Katalog BPS: 4104001

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA

2013

BADAN PUSAT STATISTIK

http://www.bps.go.id

STATISTIK PENDUDUK LANJUT USIA

2013

bps.go.id

STATISTIK
PENDUDUK LANJUT USIA 2013

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

ISSN : **2086–1036**
No. Publikasi : **04220.1402**
Katalog BPS : **4104001**
Ukuran Buku : **29,7 cm x 21 cm**
Jumlah Halaman : **xxv + 240**

Naskah :
Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Penanggung Jawab Umum	:	Teguh Pramono, MA
Penanggung Jawab Teknis	:	Ir. Meity Trisnowati, M.Si
Editor	:	Dwi Susilo, M.Si
		Amiek Chamami SST,M.Stat
		Nur Budi Handayani, SST, M.Si
Penulis Naskah	:	Andhie Surya Mustari, M.Si
		Rida Agustina, SST
		Yeni Rachmawati, SST
		Karuniawati Dewi R, S.Si
		Sigit Wahyu Nugroho, A.Md
Pengolah Data	:	Eko Budiatmodjo, SST

http://www.bps.go.id

Gambar Kulit :
Sub Direktorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh :

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat, yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup tercermin dari semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia). Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup lansia, perlu upaya pemberdayaan guna menunjang derajat kesehatan dan peningkatan mutu kehidupan lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Arah pemberdayaan dilakukan tidak hanya dengan memberdayakan lansia agar mempunyai kemampuan, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan namun juga pemberdayaan terhadap keluarga lansia serta seluruh komponen bangsa sehingga upaya-upaya peningkatan kesejahteraan lansia dapat terwujud.

Publikasi ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk lansia di Indonesia. Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia 2013 menyajikan data antara lain ciri-ciri demografi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor tahun 2013 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2013.

Terima kasih dan penghargaan diberikan kepada berbagai pihak dan Tim Penyusun atas kontribusi dan perannya, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang sangat diharapkan.

Jakarta, Oktober 2014
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suryamin, M.Sc.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

GLOSSARY
(Singkatan)

1. ART: Anggota Rumah Tangga
2. ASKESKIN: Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin
3. ASLUT: Asistensi Sosial Lanjut Usia
4. BPS: Badan Pusat Statistik
5. BKKKS: Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial
6. DTK: Daerah Tertinggal dan Khusus
7. IUPHHK: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
8. Jamkesda: Jaminan Kesehatan Daerah
9. Jamkesmas: Jaminan Kesehatan Masyarakat
10. JPK-MM: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
11. JSLU: Program Jaminan Sosial Lanjut Usia
12. Kemdikbud: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kemenag: Kementerian Agama
14. KF: Keaksaraan Fungsional
15. KRT: Kepala Rumah Tangga
16. KUP: Kelompok Usaha Produktif
17. KUR: Kredit Usaha Rakyat
18. Lansia: Lanjut Usia
19. MA: Madrasah Aliyah
20. MI: Madrasah Ibtidaiyah
21. MTs: Madrasah Tsanawiyah
22. ODR: O*ld Dependency Ratio* (Rasio ketergantungan lansia)
23. OPK: Operasi Pasar Khusus
24. PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini
25. PHLU: Pelayanan Harian Lanjut Usia
26. PEMP: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
27. PERKASA: Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera
28. PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa
29. PKP: Program Peningkatan Ketahanan Pangan
30. PKPTK: Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
31. PPLTK: Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
32. P2DTK: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
33. PNPM: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
34. P3KUM: Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro

http://www.bps.go.id

35. PPFMBLPS: Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial
36. PPEL: Program Pengembangan Ekonomi Lokal
37. P2WKSS: Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
38. PPIP: Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
39. PPK: Program Pengembangan Kecamatan
40. PPMR: Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Rentan Lainnya
41. P3MP: Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
42. PT: Perguruan Tinggi
43. PUAP: Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
44. PUMSHP: Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi
45. Pustu: Puskesmas Pembantu
46. P2KP: Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
47. Raskin : Beras untuk Masyarakat Miskin
48. RTS: Rumah Tangga Sasaran
49. Sakernas: Survei Angkatan Kerja Nasional
50. *SPADA: Support for Poor and Disadvantaged Areas*
51. SKPD: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
52. SKTM: Surat Keterangan Tidak Mampu
53. SBA: Survei Buta Aksara
54. SD: Sekolah Dasar
55. SDM: Sumber Daya Manusia
56. SMA: Sekolah Menengah Atas
57. SMP: Sekolah Menengah Pertama
58. SMK: Sekolah Menengah Kejuruan
59. SP 2010: Sensus Penduduk Tahun 2010
60. Susenas: Survei Sosial Ekonomi Nasional
61. TPAK: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
62. TD: Titik Distribusi
63. TB: Titik Bagi
64. UEP: Usaha Ekonomi Produktif
65. UU: Undang-undang

http://www.bps.go.id

Ringkasan Eksekutif

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat, yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup adalah salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia), yaitu penduduk berusia 60 tahun ke atas.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013, jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,04 juta orang atau sekitar 8,05 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Menurut jenis kelamin, jumlah lansia perempuan yaitu 10,67 juta orang (8,61 persen dari seluruh penduduk perempuan), lebih banyak daripada lansia laki-laki yang sebesar 9,38 juta orang (7,49 persen dari seluruh penduduk laki-laki). Provinsi yang mempunyai lansia dengan proporsi paling tinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (13,20 persen), Jawa Tengah (11,11 persen), dan Jawa Timur (10,96 persen). Sementara provinsi yang proporsi lansia paling rendah adalah Provinsi Papua (2,56 persen), Papua Barat (3,63 persen) dan Kepulauan Riau (3,76 persen).

Akibat penurunan angka kelahiran dan makin tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia, jumlah lansia pun meningkat, yang berarti angka ketergantungan lansia juga meningkat. Angka rasio ketergantungan lansia pada tahun 2013 sebesar 12,72 lebih tinggi daripada angka rasio ketergantungan lansia pada tahun 2012.

Lansia di Indonesia saat ini umumnya sangat kurang pendidikannya. Di tahun 2013 hampir 84 persen lansia masih berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah sebesar 25,17 persen, tidak tamat SD sebesar 32,59 persen, dan 25,72 persen tamat SD).

Secara individu pengaruh proses penuaan menimbulkan berbagai masalah. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan penduduk lansia adalah permasalahan kesehatan. Semakin bertambahnya usia, umumnya keluhan kesehatan yang dialami juga semakin bertambah. Keluhan kesehatan pada kelompok pra lansia (45-59 tahun) sebesar 35,18 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 46,71 persen pada kelompok lansia muda (60-69 tahun), lansia

http://www.bps.go.id

madya (70-79 tahun) sebesar 56,26 persen dan lansia tua (80 ke atas) sebesar 61,04 persen.

Derajat kesehatan penduduk merupakan cerminan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk lansia adalah angka kesakitan. Angka kesakitan lansia tahun 2013 sebesar 24,80 persen, artinya bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 25 orang yang mengalami sakit. Bila dilihat perkembangannya, angka kesakitan lansia mengalami penurunan. Angka kesakitan lansia pada tahun 2011 sebesar 27,95 persen, pada tahun 2012 menjadi 26,83 persen, dan pada tahun 2013 menjadi 24,80 persen. Penurunan ini mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik.

Hasil Sakernas tahun 2013 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan lansia, sekitar 46,33 persen diantaranya masih bekerja. Proporsi bekerja penduduk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sebanyak 63,34 persen lansia laki-laki yang bekerja, lebih besar daripada lansia perempuan yang bekerja sebanyak 31,23 persen. Partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari nilai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK lansia pada tahun 2013 sebanyak 46,58 persen. Menurut jenis kelamin, TPAK lansia laki-laki dua kali lebih tinggi daripada lansia perempuan (63,72 persen berbanding 31,37 persen).

Sebagian besar lansia bekerja pada sektor pertanian (60,93 persen), diikuti sektor perdagangan (18,23 persen), jasa (7,51 persen), industri (7,23 persen), dan sektor lainnya (6,10 persen). Bila dilihat menurut jabatan/jenis pekerjaan, sebanyak 73,01 persen lansia bekerja sebagai tenaga usaha dan jasa (pekerja kerah biru), sebanyak 23,61 persen sebagai buruh, operator, dan pekerja kasar (pekerja kerah abu-abu), sisanya sebagai tenaga profesional, pejabat, dan manager (pekerja kerah putih). Sementara bila dilihat menurut status pekerjaan, sebagian besar lansia bekerja dengan status berusaha/bekerja dibantu buruh (42,11 persen), disusul oleh lansia yang berusaha sendiri sebesar 25,66 persen, pekerja tidak dibayar sebesar 13,16 persen, pekerja bebas 10,39 persen, dan pekerja lansia sebagai buruh/karyawan sebesar 8,68 persen.

Masih banyak lansia yang bekerja secara penuh atau jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Dari seluruh lansia yang bekerja, sebanyak 40,13 persen bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Sebanyak 39,05 persen bekerja antara 15 hingga 35 jam, dan 20,82 persen bekerja kurang dari 15 jam seminggu. Sebanyak 36,94 persen lansia yang bekerja memperoleh upah/gaji

http://www.bps.go.id

kurang dari 500 ribu rupiah dalam sebulan, bahkan lebih dari 70 persen yang memperoleh kurang dari satu juta rupiah dalam sebulan. Pekerja lansia yang memperoleh upah/gaji lebih dari 2,5 juta rupiah per bulan hanya sebesar persen.

Lansia yang lemah dan hidup sendiri ataupun yang ada di lingkungan keluarganya sangat rentan terhadap kekerasan dan kejahatan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase lansia yang menjadi korban kejahatan relatif. Persentase lansia yang menjadi korban kejahatan pada tahun 2013 sebesar 1,13 persen, pada tahun 2012 sebesar 1,16 persen, dan tahun 2011 sebesar 1,35 persen.

Tempat tinggal/rumah pada dasarnya merupakan tempat hunian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, tidak terkecuali bagi lansia. Pada tahun 2013, persentase lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni sebesar 5,71 persen, di rumah hampir tidak layak huni sebesar 12,48 persen, dan di rumah layak huni sebesar 81,81 persen. Sebagian besar (92,32 persen) lansia tinggal di rumah dengan status milik sendiri. Sedangkan sebesar 6,02 persen lansia tinggal di rumah dengan status lainnya seperti rumah bebas sewa, rumah dinas dan sebagainya, sebesar 0,98 persen lansia tinggal di rumah dengan status kontrak, dan sebesar 0,64 persen lansia tinggal di rumah sewa.

Bepergian saat ini sudah menjadi kebutuhan dan faktor pelengkap dalam kehidupan manusia. Berdasarkan hasil Susenas 2013, sebanyak 12,37 persen lansia bepergian dalam tiga bulan terakhir. Persentase lansia yang berpergian dengan tujuan mengunjungi teman/keluarga mencapai 80,13 persen. Sementara itu lansia yang berpergian dengan tujuan berlibur/rekreasi persentasenya sebesar 6,33 persen dan berziarah/kegamaan sebesar 5,39 persen

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
GLOSSARY (Singkatan)		iii
RINGKASAN EKSEKUTIF		v
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR GAMBAR		xxiii
DAFTAR TABEL		xv
DAFTAR TABEL LAMPIRAN		xix
DAFTAR TABEL KESALAHAN PENGAMBILAN SAMPEL		xxiii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**3**
	1.1 Latar Belakang	3
	1.2 Maksud dan Tujuan	4
	1.3 Sistematika Penyajian	5
BAB II	**METODOLOGI**	**9**
	2.1 Sumber Data	9
	2.1.1 Ruang Lingkup	10
	2.1.2 Kerangka Sampel	10
	2.1.3 Pemilihan Sampel	11
	2.1.4 Metode Pengumpulan Data	11
	2.2 Keterwakilan Sampel	11
	2.3 Konsep dan Definisi	13
	2.4 Keterbatasan Data	25
	2.5 Metode Estimasi	25
	2.6 Metode Analisis	25
BAB III	**STRUKTUR DEMOGRAFIS**	**29**
	3.1 Struktur Penduduk Indonesia	30
	3.2 Distribusi dan Komposisi Penduduk Lansia	32
	3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia	35
	3.4 Status Perkawinan Penduduk Lansia	36

http://www.bps.go.id

		Halaman
	3.5 Peranan Penduduk Lansia dalam Rumah Tangga	38
	3.6 Lansia menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga	40
BAB IV	**PENDIDIKAN**	**45**
	4.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	46
	4.2 Kemampuan Membaca dan Menulis	50
BAB V	**KESEHATAN**	**57**
	5.1 Keluhan Kesehatan	59
	5.2 Angka Kesakitan	62
	5.3 Lama Sakit	64
	5.4 Cara Berobat	66
BAB VI	**KEGIATAN EKONOMI**	**71**
	6.1 Partisipasi Angkatan Kerja	72
	6.2 Karakteristik Demografi Lansia Bekerja	78
	6.3 Lapangan Usaha	80
	6.4 Jabatan/Jenis Pekerjaan	83
	6.5 Status Pekerjaan	85
	6.6 Jumlah Jam Kerja	87
	6.7 Pendapatan Lansia	89
BAB VII	**KONDISI SOSIAL**	**95**
	7.1 Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan	95
	7.2 Tempat Tinggal Lansia	98
	7.3 Lansia yang Bepergian	102
BAB VIII	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**107**
	8.1 Bantuan Sosial	109
	8.2 Jaminan Sosial	111
	8.3 Kebijakan Pasar Kerja (*Labour Market Policies*)	115
BAB IX	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LANSIA**	**121**

http://www.bps.go.id

Halaman

DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN TABEL	135
PENGHITUNGAN KESALAHAN PENARIKAN SAMPEL *(SAMPLING ERROR ESTIMATE)*	227

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.1	Piramida Penduduk, 2011-2013	31
3.2	Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, 2011-2013	34
3.3	Persentase Penduduk Lansia Umur 60 Tahun ke Atas, 70 Tahun ke Atas, dan 80 ke Atas, 2011–2013	34
3.4	Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, 2011-2013	36
3.5	Persentase Penduduk Lansia menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2013	38
4.1	Persentase Penduduk Lansia menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, Tahun 2013	49
4.2	Proporsi Penduduk Lansia yang Buta Aksara menurut Jenis Kelamin Tahun 2011, 2012, dan 2013	52
5.1	Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia dan Jenis Kelamin, 2013	60
5.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, 2011, 2012, dan 2013	63
5.3	Rata-rata Lama Sakit yang Dialami oleh Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Lansia, 2013	65
6.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama, 2013	73
6.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenis Kegiatan Utama, 2013	74
6.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan Utama, 2013	74
6.4	TPAK Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013	76

http://www.bps.go.id

Gambar		Halaman

6.5	TPAK Lansia Menurut Provinsi, 2013	77
6.6	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013	78
6.7	Persentase Lansia yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013	84
6.8	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Kelompok Umur, 2013	86
6.9	Persentase Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Kelompok Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2013	88
6.10	Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan (ribuan rupiah) dari Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2013	91
7.1	Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan Dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2010-2013	96
7.2	Persentase Lansia menurut Tipe Daerah dan Kelayakan Rumah Tinggal, 2013	100
7.3	Proporsi Lansia yang Bepergian dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2013	102
8.1	Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Sosial, 2013	112
8.2	Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Pembiayaan/ Asuransi Kesehatan, 2013	114

http://www.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Keputusan mengenai Keakuratan Suatu Estimasi	13
3.1	Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Lansia, 2013	32
3.2	Perkiraan Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2013	33
3.3	Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013	35
3.4	Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2013	37
3.5	Persentase Penduduk 10—59 Tahun dan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, 2013	39
3.6	Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Tinggal dalam Satu Rumah Tangga, 2013	41
4.1	Persentase Penduduk Lansia menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2011, 2012, dan 2013	47
4.2	Proporsi Penduduk 15-59 Tahun, 15 Tahun Ke Atas dan Lansia yang Buta Aksara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 2013	51
5.1	Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan, 2013	62
5.2	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2013	64
5.3	Persentase Penduduk Berumur 0-59 Tahun dan Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah, 2013	66

http://www.bps.go.id

Tabel		Halaman
5.4	Proporsi Penduduk berumur 0-59 Tahun dan Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah, 2013	67
6.1	Persentase Lansia yang Bekerja menurut Status Perkawinan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013	79
6.2	Persentase Lansia yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha, Kelompok Umur, dan Tipe Daerah, 2013	80
6.3	Persentase Lansia yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kelompok Umur dan Lapangan Usaha, 2013	81
6.4	Persentase Lansia yang Bekerja menurut Jabatan/Jenis Pekerjaan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013	83
6.5	Persentase Lansia yang Bekerja menurut Status Pekerjaan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013	85
6.6	Persentase Lansia yang Bekerja menurut Kelompok Jumlah Jam Kerja, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, 2013	88
6.7	Persentase Lansia yang Bekerja menurut Kelompok Pendapatan (ribuan rupiah), Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013	90
7.1	Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013	97
7.2	Persentase Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, 2013	98
7.3	Persentase Lansia menurut Kelayakan Rumah Tinggal, 2011-2013	99
7.4	Persentase Lansia menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2013	101
7.5	Persentase Lansia yang Bepergian menurut Tujuan Bepergian yang Utama dan Jenis Kelamin, 2013	103
8.1	Karakteristik Bantuan Beras Miskin (Raskin) yang Diterima oleh Rumah Tangga (RT) Lansia Selama 3 Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, 2013	110

http://www.bps.go.id

Tabel		Halaman
8.2	Perkiraan Jumlah dan Proporsi Rumah Tangga (RT) Lansia yang Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah 2013	112
8.3	Perkiraan Jumlah dan Proporsi Rumah Tangga (RT) Lansia yang Memiliki Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Selama Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah, 2013	114
8.4	Jumlah dan Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Menerima PNPM Mandiri dan Program Lainnya dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah, 2013	116
8.5	Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bantuan dari Kebijakan Pasar Kerja dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Program, 2013	116

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel		Halaman
3.1.1 - 3.1.3	Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2013	135-137
3.2	Proporsi Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013	138
3.3	Rasio Ketergantungan Penduduk Tua menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013	139
3.4.1 – 3.4.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2013	140 - 142
3.5.1 – 3.5.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2013	143 - 145
3.6.1 – 3.6.6	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga, 2013	146 - 151
4.1.1 – 4.1.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013	152 - 154
4.2.1 – 4.2.9	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2013	155 - 163
5.1	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013	164
5.2	Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013	165
5.3.1 – 5.3.3	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2013	166 - 168
5.4	Rata-rata Lama Sakit yang Dialami oleh Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Kategori Lansia, 2013	169
5.5	Rata-rata Lama Sakit yang Dialami oleh Penduduk Lansia menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Kategori Lansia, 2013	170

http://www.bps.go.id

Tabel		Halaman

5.6	Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013	171
5.7.1 – 5.7.3	Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2013	172 - 174
5.8	Proporsi Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013	175
5.9.1 – 5.9.3	Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2013	176 - 178
6.1.1 – 6.1.3	Persentase Lansia menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2013	179 - 181
6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013	182
6.3.1 – 6.3.3	Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Kelompok Lapangan Usaha, 2013	183 - 185
6.4.1 – 6.4.3	Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Jabatan/Jenis Pekerjaan Usaha, 2013	186 - 188
6.5.1 – 6.5.3	Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2013	189 - 191
6.6.1 – 6.6.2	Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu Terakhir, 2013	192 - 194
6.7.1 – 6.7.3	Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji, 2013	195 - 197
7.1	Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013	198
7.2.1 – 7.2.3	Persentase Lansia Korban Tindak Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan, 2013	199 - 201

https://www.bps.go.id

Tabel		Halaman
7.3.1 – 7.3.3	Perkiraan Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Kelayakan Rumah Tinggal, 2013	202 - 204
7.4.1 – 7.4.3	Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2013	205 - 207
7.5	Proporsi Lansia yang Melakukan Perjalanan dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013	208
7.6.1 – 7.6.2	Persentase Lansia yang Melakukan Perjalanan dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Tujuan Utama Bepergian yang Terakhir, 2013	209 - 211
8.1	Persentase Lansia yang Melakukan Perjalanan dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Tujuan Utama Bepergian yang Terakhir, 2013	212
8.2	Rata-rata Raskin yang Dibeli untuk Sebulan dan Rata-rata Harga per kg yang Dibayarkan oleh Rumah Tangga Lansia yang Membeli Raskin selama Tiga bulan Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	213
8.3	Persentase Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Sosial menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	214
8.4.1 – 8.4.3	Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Sosial, 2013	215 - 217
8.5	Perkiraan Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/ Asuransi Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	218
8.6.1 – 8.6.3	Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan, 2013	219 - 221
8.7	Perkiraan Jumlah dan Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Menerima PNPM dan Program Pemerintah Lainnya menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	222

http://www.bps.go.id

Tabel		Halaman

8.8	Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bantuan dari Kebijakan Pasar Kerja dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Program, 2013	223

http://www.bps.go.id

DAFTAR ESTIMASI KESALAHAN SAMPLING

Tabel		Halaman
9.1	*Sampling Error* Persentase Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	229
9.2	*Sampling Error* Angka Buta Huruf (ABH) Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	230
9.3	*Sampling Error* Rata-rata Lama Sekolah Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	231
9.4	*Sampling Error* Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	232
9.5	*Sampling Error* Angka Kesakitan Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	233
9.6	*Sampling Error* Persentase Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	234
9.7	*Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	235
9.8	*Sampling Error* Persentase Lansia yang Membeli Beras Miskin (Raskin) menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	236
9.9	*Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	237
9.10	*Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang memiliki Jaminan Sosial menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	238
9.11	*Sampling Error* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	239
9.12	*Sampling Error* persentase Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013	240

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

PENDAHULUAN

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

1

PENDAHULUAN

http://www.bps.go.id

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat, yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup. Peningkatan usia harapan hidup tercermin dari semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus terhadap lansia dalam pelaksanaan pembangunan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan salah satu indikasi tentang makin besarnya perhatian pemerintah terhadap lansia. Dalam undang-undang tersebut diatur secara tegas tentang upaya peningkatan kesejahteraan penduduk lanjut usia. Pasal 4 UU Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan bahwa "Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Banyak diantara lansia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, tidak sedikit pula lansia yang menghadapi hambatan fisik sehingga tidak dapat aktif dan oleh karenanya memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan

sosialnya. Menurut PP nomor 43 tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 dan 5, kondisi lansia di Indonesia dapat dibedakan menjadi lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial adalah lansia yang masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri seperti dengan bekerja dan biasanya tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan lansia tidak potensial adalah lansia yang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan biasanya bergantung kepada orang lain.

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup lansia, perlu upaya pemberdayaan guna menunjang derajat kesehatan dan peningkatan mutu kehidupan lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Pemberdayaan lansia Pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Arah pemberdayaan dilakukan tidak hanya berfokus pada lansia saja namun juga pemberdayaan terhadap keluarga lansia serta seluruh komponen bangsa. Untuk membantu mempertajam arah dan sasaran pembangunan serta pemberdayaan lansia dibutuhkan data statistik dan berbagai indikator yang dapat memberikan gambaran makro mengenai kondisi dan potensi lansia.

http://www.bps.go.id

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah menyajikan gambaran makro mengenai situasi dan kondisi lansia Indonesia dilihat dari berbagai aspek, yaitu struktur demografis, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kondisi sosial, dan perlindungan sosial.

Gambaran situasi dan kondisi lansia Indonesia dalam publikasi ini disajikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi, dibedakan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Diharapkan penyajian publikasi ini berguna terutama bagi peneliti, perencana, dan pengambil keputusan di bidang sosial dan kependudukan, khususnya yang menaruh perhatian pada lansia.

1.3 Sistematika Penyajian

Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia Tahun 2013 ini disajikan dalam sembilan bagian. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan latar belakang penyusunan publikasi; maksud dan tujuan; serta sistematika penyajian. Pada bagian kedua (Bab II) disajikan metodologi berupa sumber data; ruang lingkup; konsep dan definisi; keterbatasan data; serta metode analisis.

Tujuh bagian berikutnya menyajikan gambaran situasi dan kondisi lansia di Indonesia, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa kajian mengenai struktur demografis lansia, bagian keempat (Bab IV) mengenai kemampuan baca tulis, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan lansia, bagian kelima (Bab V) mengenai kondisi kesehatan lansia, dan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan; bagian keenam (Bab VI) mengenai kegiatan lansia yang bekerja, lapangan usaha, status pekerjaan lansia yang bekerja, jumlah jam kerja lansia, dan pendapatan lansia; bagian ketujuh (Bab VII) mengenai kondisi sosial lansia, lansia yang menjadi korban kejahatan, kelayakan tempat tinggal, dan lansia yang melakukan perjalanan; bagian kedelapan (Bab VIII) mengenai perlindungan sosial lansia, bantuan sosial, jaminan sosial, dan kebijakan pasar kerja bagi lansia; dan bagian kesembilan (Bab IX) mengenai program pemberdayaan lansia yang didapatkan berdasarkan data/informasi sekunder dari kementerian/lembaga.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

METODOLOGI

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

2

METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2013 adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor tahun 2013 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2013. Jenis data yang digunakan adalah:

a. Data Kor Susenas Tahun 2013, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi lansia dari sisi demografi, pendidikan, dan kesehatan.
b. Data Sakernas Tahun 2013, yang digunakan untuk melihat gambaran kegiatan ekonomi lansia.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, Susenas dilaksanakan setiap tahun. Mulai tahun 2011, Susenas dilaksanakan secara triwulanan (triwulan I–IV) yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Susenas mengumpulkan data kor (keterangan pokok) dan data modul (keterangan sasaran). Data kor dikumpulkan setiap tahun sedangkan data modul dikumpulkan secara bergiliran setiap 3 tahun sekali.

http://www.bps.go.id

Data yang dikumpulkan melalui Susenas Kor antara lain keterangan umum anggota rumah tangga (anggota ruta), yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, umur, dan status perkawinan; keterangan tentang kesehatan, keterangan pendidikan anggota ruta 5 tahun ke atas, keterangan kegiatan ketenagakerjaan anggota ruta 10 tahun ke atas, keterangan fertilitas untuk wanita pernah kawin. Selain itu, Susenas Kor juga mengumpulkan data mengenai keterangan perumahan yang mencakup penguasaan tempat tinggal, luas lantai, sumber air minum, dan fasilitas tempat buang air besar; keterangan sosial ekonomi lainnya, antara lain mencakup pemanfaatan fasilitas program pemberdayaan masyarakat miskin (raskin, kartu sehat, dan sejenisnya), pemanfaatan fasilitas kredit, ketersediaan jaminan kesehatan dan aset, serta keterangan teknologi komunikasi dan informasi.

2.1.1 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas Kor 2013 mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan 497 kabupaten/kota di Indonesia, dimana setiap triwulan akan didistribusikan sebanyak 75.000 rumah tangga. Data hasil pencacahan setiap triwulan dapat disajikan baik untuk tingkat nasional maupun provinsi, sedangkan data kumulatif hasil pencacahan selama empat triwulan dapat disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

2.1.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap kedua, dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga.

- Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar wilayah pencacahan (wilcah) SP2010 yang disertai dengan informasi banyaknya rumah tangga hasil listing SP2010 (Daftar RBL1).
- Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar blok sensus pada setiap wilcah terpilih.

http://www.bps.go.id

- Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga biasa pada blok sensus terpilih yang telah dimutakhirkan menjelang pelaksanaan survei. Rumah tangga tidak termasuk rumah tangga khusus seperti panti asuhan, barak polisi/militer, dan penjara.

2.1.3 Pemilihan Sampel

Metode *sampling* yang digunakan yaitu penarikan sampel tiga tahap berstrata. Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut:

- Tahap pertama, memilih sampel wilcah secara *PPS* (*Probability Proportional to Size*) dengan *size* banyaknya rumah tangga SP2010. Kemudian wilcah terpilih tersebut dialokasikan secara acak ke dalam 4 (empat) triwulan. Keseluruhan sampel wilcah diambil sebanyak 30.000 wilcah, masing-masing triwulan sebanyak 7.500 wilcah.
- Tahap kedua, memilih BS pada setiap wilcah terpilih Susenas Triwulan I, II, III dan IV.
- Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih Susenas yang sudah dilakukan pemutakhiran listing rumah tangga hasil Sensus Penduduk tahun 2010, dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematik. Pemilihan sampel rumah tangga di beberapa lokasi menggunakan program komputer yang telah disiapkan berdasarkan hasil pemutakhiran.

2.1.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

2.2 Keterwakilan Sampel

Keterwakilan sampel mempengaruhi estimasi hasil pendataan. Keterwakilan sampel dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu banyaknya sampel, kesalahan *non sampling* atau *human errors (non sampling error)*, dan kesalahan *sampling* (*sampling error*).

http://www.bps.go.id

(1) Banyaknya sampel

Semakin banyak atau semakin besar jumlah sampel dalam suatu survei, maka estimasi yang dihasilkan akan semakin mendekati karakteristik populasinya.

(2) Kesalahan *non sampling* (*Non Sampling Error*)

Non sampling error merupakan kesalahan yang muncul pada saat pelaksanaan survei dan atau saat pengolahan data. Contoh kesalahan dalam pelaksanaan survei antara lain:

i) Penggunaan konsep dan definisi yang salah oleh petugas akibat kesalahan penyampaian dari instruktur ke petugas pencacah maupun pengawas,
ii) Tidak ditemukannya rumah tangga sampel,
iii) Kesalahan pengertian antara responden dan petugas pencacah pada saat wawancara.

Sedangkan contoh kesalahan pada saat pengolahan antara lain:

i) Kesalahan pada saat perekaman data (*entry data*)
ii) Kesalahan *editing dan coding*.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendataan yang bertujuan untuk memperkecil jenis kesalahan ini, namun kesalahan *non sampling* tidak dapat dihilangkan sama sekali serta sulit untuk dievaluasi secara statistik.

(3) Kesalahan *sampling* (*Sampling Error*)

Sampling error merupakan kesalahan yang muncul akibat dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Estimasi yang dihasilkan dalam survei tidak terlepas dari *sampling variability*. Secara statistik, besarnya *sampling error* dapat ditunjukkan oleh besarnya angka galat baku (*Standard Error/SE)*. Untuk mengukur sejauh mana sampel yang digunakan sudah cukup menggambarkan keadaan parameter populasi digunakan *Relative Standard Error* (*RSE*), yaitu hasil bagi SE dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%).

http://www.bps.go.id

Dalam publikasi ini penghitungan RSE menggunakan metode Taylor Linearization untuk mengestimasi nilai total maupun rata-ratanya. Namun tidak semua variabel hasil pendataan dihitung SE dan RSE, hanya beberapa variabel penting saja yang dihitung.

Menurut Mulia, Aryago dkk (2008), kualitas hasil estimasi suatu survei bisa diamati dari RSE yang dihasilkan dimana keputusan mengenai keakuratan suatu estimasi bisa diamati dari hasil penghitungan RSE tersebut. Kesalahan *sampling* dari beberapa estimasi harus digunakan secara hati-hati. Untuk estimasi berdasarkan jumlah kasus yang kecil kesalahan relatif cenderung sangat besar. Secara umum, besaran RSE meningkat seiring dengan meningkatnya estimasi. Sebaliknya, RSE menurun jika ukuran estimasi tersebut meningkat. Estimasi yang sangat kecil dengan demikian akan menghasilkan RSE yang tinggi sehingga nilainya menjadi tidak akurat. Nilai estimasi dengan RSE kurang dari sama dengan (≤) 25% dianggap akurat, sedangkan nilai estimasi dengan RSE lebih dari (>) 25% tetapi kurang dari sama dengan (≤) 50% perlu hati-hati jika ingin digunakan, dan estimasi dengan RSE lebih dari (>) 50% dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan RSE kurang dari sama dengan (≤) 25%.

Tabel 1. Keputusan mengenai Keakuratan Suatu Estimasi

Kondisi	Perlakuan
RSE ≤ 25%	Akurat (bisa digunakan)
25% < RSE ≤ 50%	Perlu hati-hati jika digunakan
RSE > 50%	Dianggap tidak akurat (harus digabungkan dengan estimasi lain untuk memberikan estimasi dengan RSE ≤ 25%.

2.3 Konsep dan Definisi

a. **Penduduk Lanjut Usia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas.

b. **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator

http://www.bps.go.id

komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

c. **Rumah Tangga Biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

   Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 orang atau lebih.

   Rumah Tangga Lansia adalah rumah tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya berumur 60 tahun ke atas.

d. **Kepala Rumah Tangga (KRT)** adalah salah seorang dari anggota rumah tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

   Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

   Orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

   Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

http://www.bps.go.id

e. **Rasio Jenis Kelamin** adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

f. **Kawin** adalah mempunyai istri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

   Cerai Hidup adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.

   Cerai Mati adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

g. **Pendidikan:**

   Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SM/MA/sederajat, dan PT.

   Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

http://www.bps.go.id

h. **Tidak/Belum Pernah Sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

i. **Bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/sederajat dan SMP/sederajat, pendidikan menengah yaitu SMA/sederajat dan pendidikan tinggi yaitu PT/sederajat) maupun non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan instansi lainnya.

j. **Tamat Sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

k. **Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah.

Belum Tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang sederajat tetapi tidak/belum tamat.

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan sederajat.

SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan, dan sederajat.

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah, dan sederajat.

Diploma/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca

http://www.bps.go.id

sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

l. **Dapat Membaca dan Menulis** adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu.

Buta Aksara/Huruf adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana dengan suatu aksara, termasuk huruf *Braille*. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

m. **Keluhan Kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

n. **Sakit** adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis/gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

o. **Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan :**

JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes) adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS/Veteran/Pensiunan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Askes (Persero).

JPK Jamsostek adalah jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerja swasta di sektor formal yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Jamsostek.

Asuransi Kesehatan Swasta adalah asuransi kesehatan komersial yang mengganti biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh peserta asuransi. Keanggotaannya ditandai dengan kepemilikan kartu peserta asuransi kesehatan.

Tunjangan/penggantian biaya kesehatan oleh perusahaan adalah jaminan kesehatan yang ditandai dengan kepemilikan kartu identitas sebagai pegawai perusahaan dimana perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja mengganti biaya/memberi tunjangan kesehatan karyawannya.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM)/Kartu Sehat/JPK Gakin/Kartu Miskin/Kartu Jamkesmas adalah jaminan

http://www.bps.go.id

pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, kartu sehat, kartu miskin, kartu JPK-Gakin, atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau kartu Jamkesmas.

Dana Sehat adalah kepesertaan jaminan kesehatan kelompok/komunitas yang ditandai dengan memiliki kartu dana sehat dan dikelola oleh kelompok/komunitas tersebut.

JPKM/JPK lain adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan JPKM atau jaminan pemeliharaan kesehatan lain di luar dari bentuk-bentuk jaminan di atas.

p. **Angkatan Kerja Penduduk Lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/ membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah, yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/ melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebastugaskan dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan

http://www.bps.go.id

sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan Suatu Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

q. **Bukan Angkatan Kerja Lansia** adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

r. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia** adalah persentase angkatan kerja penduduk lansia terhadap penduduk lansia. TPAK dihitung dengan rumus:

$$TPAK_{Lansia} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Lansia}}{\text{Jumlah Penduduk Lansia}} \times 100\%$$

s. **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/ instansi tempat seseorang bekerja.

t. **Status Pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.

u. **Jam Kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

v. **Korban kejahatan** adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

http://www.bps.go.id

Pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perampokan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri atau jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

w. **Rumah Tidak Layak Huni** didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008).

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni:

1. Luas lantai per kapita Perkotaan dan Perdesaan yaitu 7,2 m^2
2. Jenis atap rumah terbuat dari daun/lainnya
3. Jenis dinding rumah terbuat dari bambu/lainnya
4. Jenis lantai tanah
5. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar (WC sendiri)
6. Sumber penerangan bukan listrik
7. Jarak sumber air minum utama ke tempat pembuangan kotoran/tinja kurang dari 10 m.

Jika memenuhi: 1 (satu) kriteria : Layak huni
2 (dua) kriteria : Hampir tidak layak huni
Lebih dari dua kriteria : Tidak layak huni.

http://www.bps.go.id

x. **Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)** adalah salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh BULOG dengan menjual beras dengan harga murah bersubsidi.

Titik distribusi beras raskin adalah titik distribusi yang resmi seperti kantor kelurahan/desa, pos RW atau tempat yang lebih dekat dengan masyarakat.

y. **Kredit Usaha** adalah sejumlah dana yang bersifat pinjaman yang diterima untuk membantu menjalankan atau memperbesar kegiatan usaha.

Pada dasarnya jenis kredit usaha terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Program pemerintah lainnya

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam rangka menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksudkan kredit usaha yang diterima oleh masyarakat dari PNPM Mandiri adalah kredit usaha yang diterima dari program-program yang termasuk di dalam PNPM Mandiri, setelah tahun 2007 maupun sebelum tahun 2007.

Ciri kredit usaha dari PNPM Mandiri adalah penyalurannya tidak mengikuti prosedur perbankan. Dana kredit usaha atau lebih dikenal dengan dana modal bergulir *(revolving fund)* dikelola dan diusulkan pemanfaatannya langsung oleh masyarakat.

Program-program yang termasuk di dalam PNPM Mandiri pada tahun 2008, yaitu:

1. PNPM Mandiri Perdesaan atau yang dahulunya dinamakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK),
2. PNPM Mandiri Perkotaan atau yang dahulu dinamakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP),
3. PNPM Infrastruktur Perdesaan atau yang dahulunya bernama Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP),
4. PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (DTK) atau yang dahulunya bernama Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)/*Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA)*,

http://www.bps.go.id

5. PNPM Agribisnis Perdesaan atau Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Program pemerintah lainnya, antara lain:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP);
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFMBLPS);
3. Program Pembentukan Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Rentan Lainnya (PPMR);
4. Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK);
5. Program Pembangunan Hutan Rakyat;
6. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (PWP) dan Program Pengembangan WilayahTertinggal (PWT);
7. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Perkotaan;
8. Program Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan;
9. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P3MP);
10. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
11. Program Model Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri);
12. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil;
13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP);
14. Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi;
15. Program Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP);
16. Program Hutan Kemasyarakatan (HKM);
17. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (PKPTK);
18. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK);
19. Program Penciptaan Iklim Usaha bagi UKM;
20. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM;
21. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif UKM;

http://www.bps.go.id

22. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
23. Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASA);
24. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM);
25. Program Pelatihan Pengarusutamaan Gender;
26. Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
27. Program Stimulasi Perumahan Swadaya bagi MBR melalui LKM/LKnB;
28. Program Pinjaman Lunak Lingkungan;
29. Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PPEL);
30. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan;
31. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
32. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan;
33. Rencana Bisnis Perbankan untuk UMKM;
34. Pengembangan Usaha dan Investasi Pemerintahan;
35. Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang disalurkan oleh BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Bukopin.

z. **Jenis-jenis jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan** untuk keperluan berobat jalan/rawat inap antara lain :

1. **Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat)** adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Sasaran dari program Jamkesmas adalah masyarakat sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin/tidak mampu. **Pengelola Jamkesmas** adalah Kementerian Kesehatan RI dan PT Askes (Persero), sedangkan yang memberikan pelayanan kesehatan adalah puskesmas dan jaringannya, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk. Jamkesmas merupakan pengganti ASKESKIN (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin). Pemegang kartu Jamkesmas dibebaskan dari biaya pengobatan dan rawat inap di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang ditunjuk.
2. **Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah)** adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat daerah. Sasaran Program Jamkesda adalah seluruh masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa Jamkesmas, ASKES dan asuransi kesehatan lainnya.

http://www.bps.go.id

3. **Program Jaminan Persalinan (Jampersal)** adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan
4. **JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes)** adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi PNS/Veteran/Pensiunan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Askes (Persero).
5. **JPK Jamsostek** adalah jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerja swasta di sektor formal yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan yang dikelola PT Jamsostek.
6. **Asuransi Kesehatan Swasta** adalah asuransi kesehatan komersial yang mengganti biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh peserta asuransi. Keanggotaannya ditandai dengan kepemilikan kartupeserta asuransi kesehatan.
7. **Tunjangan/penggantian biaya kesehatan oleh perusahaan** adalah jaminan kesehatan yang ditandai dengan kepemilikan kartu identitas sebagai pegawai perusahaan dimana perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja mengganti biaya/memberi tunjangan kesehatan karyawannya.
8. **Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM)/Kartu Sehat/JPK Gakin/Kartu Miskin/Kartu Jamkesmas** adalah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi orang miskin yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, Kartu Sehat, Kartu Miskin, Kartu JPK-Gakin, atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) atau Kartu Jamkesmas.
9. **Dana Sehat** adalah kepesertaan jaminan kesehatan kelompok/ komunitas yang ditandai dengan memiliki kartu dana sehat dan dikelola oleh kelompok/komunitas tersebut.
10. **JPKM/JPK lain** adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang ditandai dengan memiliki kartu kepesertaan JPKM atau jaminan pemeliharaan kesehatan lain di luar dari bentuk-bentuk jaminan di atas.

http://www.bps.go.id

2.4 Keterbatasan Data

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS, termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus seperti panti jompo tidak dicakup dalam survei.

2.5 Metode Estimasi

Angka-angka yang disajikan dalam publikasi ini merupakan angka estimasi dengan menggunakan penimbang (*weighted*) yang dihitung berdasarkan angka proyeksi penduduk per kabupaten/kota 2010—2035 yang telah dipublikasikan. Untuk data tahun 2011 dan 2012 juga dilakukan estimasi ulang (*backcasting*) dengan penimbang yang dihitung berdasarkan hasil proyeksi tersebut.

2.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam publikasi ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan menjelaskan perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu, disertakan pula analisis tren yang menjelaskan gambaran perkembangan lansia antar periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi dengan lampiran tabel yang menyajikan data pada level provinsi.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

STRUKTUR DEMOGRAFIS

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

3

STRUKTUR DEMOGRAFIS

http://www.bps.go.id

Keberhasilan pembangunan nasional memberikan dampak meningkatnya umur harapan hidup yang mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah lansia. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat termasuk lanjut usia dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144). Setiap upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi pembangunan negara. Prinsip nondiskriminatif mengandung makna bahwa semua masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk lansia.

Dalam rangka perencanaan pembangunan (sebagai input dan output) serta penetapan prioritas pembangunan dalam bidang kependudukan memerlukan data dasar kependudukan. Data dasar tersebut antara lain berhubungan dengan jumlah dan struktur penduduk. Pada kegiatan perencanaan sebagai input pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan jumlah sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja yang harus diserap dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan sebagai output pembangunan, data jumlah dan struktur penduduk digunakan untuk menentukan kelompok sasaran (*target groups*) pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan lansia.

Kelompok sasaran pembangunan yang menjadi perhatian salah satunya adalah penduduk usia 60 tahun ke atas atau penduduk lansia. Tersedianya data atau informasi dasar yang berkaitan dengan jumlah dan struktur demografis lansia akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan sasaran/target pembangunan. Uraian berikut ini difokuskan untuk memperoleh gambaran secara makro mengenai jumlah dan komposisi penduduk lansia serta perkembangannya menurut karakteristik demografis antara lain: umur, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan struktur dalam rumah tangga.

3.1 Struktur Penduduk Indonesia

Suatu negara dikatakan berstruktur tua jika mempunyai populasi lansia di atas tujuh persen (Soeweno,2009). Bila merujuk dari pernyataan di atas maka Indonesia termasuk negara berstruktur tua. Berdasarkan data Susenas 2013 dapat dilihat persentase lansia yang telah mencapai 8,05 persen dari keseluruhan penduduk, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. Struktur penduduk yang menua tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan manusia secara global dan nasional yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup. Hal itu berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat yang meningkat. Keadaan ini telah memberikan peningkatan pada usia harapan hidup. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.

Komposisi penduduk Indonesia berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Gambar 3.1 menunjukkan piramida penduduk tahun 2011-2013. Terlihat bahwa pola piramida penduduk relatif tidak mengalami perubahan, dimana frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 5-9 dan 10-14 tahun. Sedangkan pada kelompok lansia terlihat proporsinya sudah mencapai 7 persen sehingga penduduk Indonesia sudah mengarah pada era 'penduduk berstruktur tua' (*aging population*).

http://www.bps.go.id

Gambar 3.1
Piramida Penduduk, 2011-2013

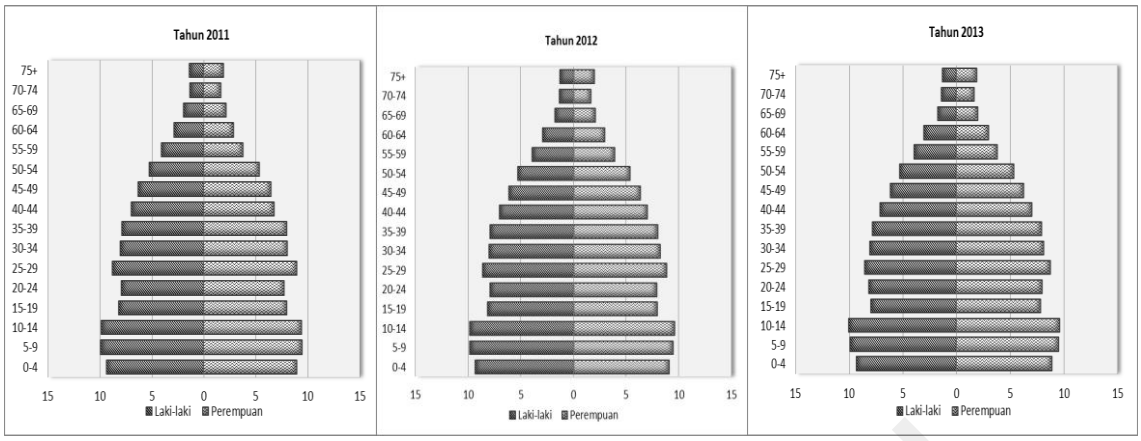

Sumber: BPS, Susenas Kor 2011-2013

Keberadaan lansia tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kepedulian akan kesejahteraan lansia tertuang dalam UU RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Pasal 4 UU RI No. 13 Tahun 1998 menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejateraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190).

Jika dilihat menurut kelompok umur, lansia terbagi menjadi lansia muda (60-69 tahun) dengan proporsi sebesar 4,91 persen, lansia menengah/madya (70-79 tahun) sebesar 2,31 persen, dan lansia tua (80 tahun ke atas) sebesar 0,83 persen. Sementara itu, penduduk pra lansia yaitu kelompok umur 45-54 tahun dan 55-59 tahun masing-masing sebesar 11,57 persen dan 3,90 persen.

http://www.bps.go.id

Tabel 3.1
Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur Lansia, 2013

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur Lansia (Tahun)					60+*)
	45-54*)	55-59*)	60-69*)	70-79*)	80+*)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K)						
Laki-laki (L)	11,48	3,89	4,51	1,84	0,57	6,92
Perempuan (P)	11,63	3,72	4,71	2,37	0,86	7,94
L+P	**11,56**	**3,81**	**4,61**	**2,11**	**0,71**	**7,43**
Perdesaan (D)						
Laki-laki (L)	11,47	4,03	5,08	2,22	0,76	8,07
Perempuan (P)	11,68	3,94	5,34	2,80	1,14	9,28
L+P	**11,57**	**3,99**	**5,21**	**2,51**	**0,95**	**8,67**
K+D						
Laki-laki (L)	11,48	3,96	4,79	2,03	0,67	7,49
Perempuan (P)	11,65	3,83	5,02	2,58	1,00	8,61
L+P	**11,57**	**3,90**	**4,91**	**2,31**	**0,83**	**8,05**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Keterangan: *) 45-54 tahun dan 55-59 tahun : Pra Lansia
60-69 tahun : Lansia Muda
70-79 tahun : Lansia Menengah/Madya
80 tahun ke atas : Lansia Tua
60 tahun ke atas : Lansia

Lampiran Tabel 3.1.3 menyajikan proporsi lansia menurut provinsi tahun 2013. Provinsi yang memiliki proporsi lansia di atas 7 persen adalah DI Yogyakarta (13,20 persen), Jawa Tengah (11,11 persen), Jawa Timur (10,96 persen), Bali (10,07 persen), Sulawesi Utara (9,14 persen), Sulawesi Selatan (8,54 persen), Sumatera Barat (8,41 persen), Jawa Barat (7,58 persen), Lampung (7,50 persen), Nusa Tenggara Timur (7,40 persen), dan Nusa Tenggara Barat (7,38 persen).

3.2 Distribusi dan Komposisi Penduduk Lansia

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013, jumlah lansia di Indonesia telah mencapai 20,04 juta orang atau sekitar 8,05 persen dari seluruh penduduk Indonesia (Tabel 3.2). Bila dibandingkan menurut jenis kelamin jumlah lansia perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 10,67 juta orang (8,61 persen dari seluruh penduduk perempuan), lebih banyak daripada laki-laki yang hanya 9,38 juta orang (7,49 persen dari seluruh penduduk laki-laki).

http://www.bps.go.id

Kontribusi penduduk perempuan dalam populasi lansia yang lebih tinggi dari penduduk laki-laki disebabkan usia harapan hidup perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki.

Tabel 3.2
Perkiraan Jumlah dan Proporsi Penduduk Lansia menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, 2013

Jenis Kelamin	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki (L)	4 333 816	6,92	5 043 177	8,07	9 376 992	7,49
Perempuan (P)	4 927 291	7,94	5 739 352	9,28	10 666 643	8,61
L+P	**9 261 107**	**7,43**	**10 782 529**	**8,67**	**20 043 635**	**8,05**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Dilihat menurut tipe daerah, jumlah lansia yang tinggal di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Lansia yang tinggal di perdesaan 10,78 juta orang (8,67 persen) sedangkan lansia yang tinggal di perkotaan sebanyak 9,26 juta orang (7,43 persen).

Proporsi penduduk lansia tahun 2013 sangat bervariasi antar provinsi di Indonesia (Lampiran Tabel 3.2). Pada tabel tersebut tampak bahwa proporsi lansia berkisar antara 2,56 persen sampai dengan 13,20 persen. Provinsi yang mempunyai lansia dengan proporsi paling tinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (13,20 persen), kemudian Jawa Tengah (11,11 persen), dan Jawa Timur (10,96 persen). Sementara provinsi yang proporsi lansia paling rendah adalah Provinsi Papua (2,56 persen), kemudian Papua Barat (3,63 persen) dan Kepulauan Riau (3,76 persen). Pola yang sama terjadi pada lansia laki-laki maupun perempuan.

Gambar 3.2 menyajikan persentase penduduk lansia tahun 2011-2013. Pada kurun waktu tersebut terlihat bahwa persentase penduduk lansia relatif sama, yaitu sekitar 8,05 persen.

http://www.bps.go.id

Gambar 3.2
Persentase Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, 2011−2013

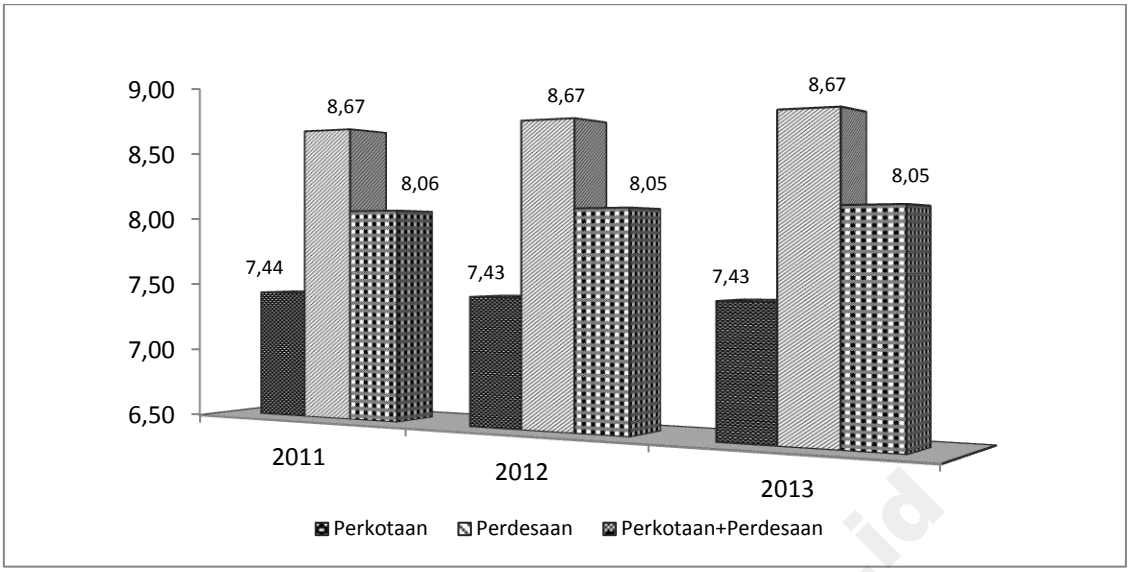

Sumber: BPS, Susenas Kor 2011-2013

Gambar 3.3 menyajikan persentase penduduk lansia umur 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, dan 80 tahun ke atas pada tahun 2011-2013. Pada tahun 2013 terlihat bahwa persentase penduduk usia 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, dan 80 tahun ke atas pada kurun waktu tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti, dengan persentase untuk penduduk 60 tahun ke atas berkisar sebesar 8,05 persen, 70 tahun ke atas sebesar 3,15 persen, dan 80 tahun ke atas sebesar 0,85 persen.

Gambar 3.3
Persentase Penduduk Lansia Umur 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, dan 80 tahun ke atas, 2011−2013

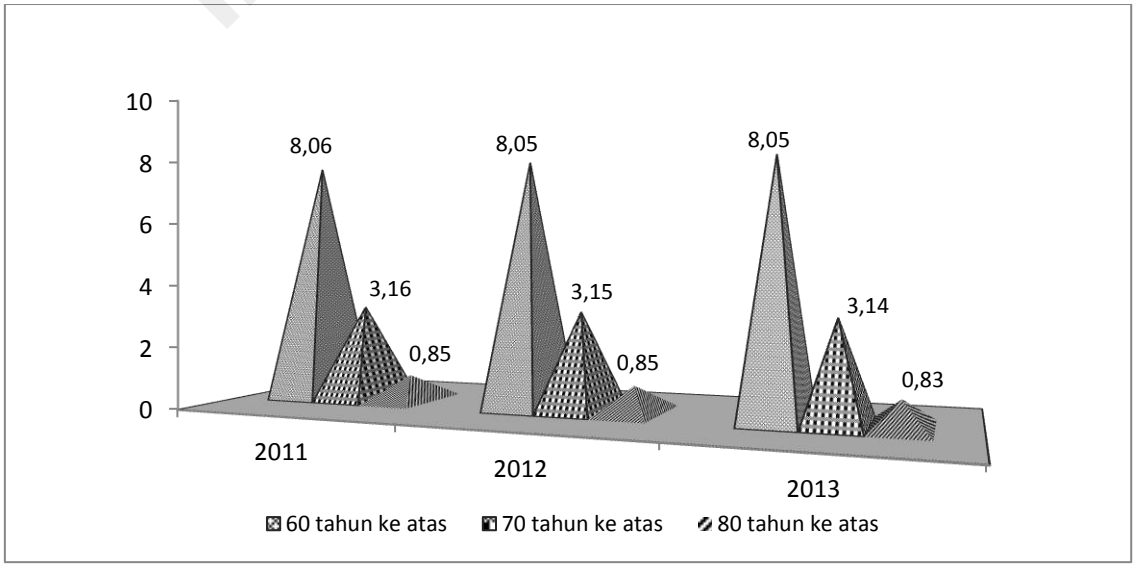

Sumber: BPS, Susenas Kor 2011-2013

http://www.bps.go.id

3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia

Perubahan struktur penduduk memengaruhi angka beban ketergantungan, salah satunya adalah beban ketergantungan lansia. Akibat penurunan angka kelahiran dan makin tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia, jumlah lansia pun menjadi relatif besar, yang berarti angka ketergantungan lansia juga bisa meningkat. Rasio ketergantungan lansia (*old dependency ratio/ODR*) adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan lansia pada penduduk usia produktif. Angka tersebut merupakan perbandingan antara jumlah lansia (60 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (15-59 tahun). Dari angka ini tercermin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai lansia.

Tabel 3.3
Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013

Tipe Daerah	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	10,64	12,20	11,42
Perdesaan (D)	13,14	15,09	14,11
K+D	**11,85**	**13,60**	**12,72**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Angka rasio ketergantungan lansia pada tahun 2013 sebesar 12,72 (Tabel 3.3), menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 12 orang lansia. Dibandingkan menurut jenis kelamin, angka rasio ketergantungan lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki, yaitu 13,60 berbanding 11,85.

Gambar 3.4 menyajikan rasio ketergantungan lansia menurut tipe daerah pada tahun 2011-2013. Terlihat bahwa rasio ketergantungan dari tahun 2011 ke tahun 2013 sedikit mengalami kenaikan dari 12,70 pada tahun 2011 menjadi 12,72 pada tahun 2013. Dari gambar tersebut terlihat juga bahwa rasio ketergantungan lansia di perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan.

http://www.bps.go.id

Jika dilihat menurut provinsi di Indonesia, besarnya rasio ketergantungan lansia berkisar antara 4,04–20,25 (Lampiran Tabel 3.3). Provinsi yang memiliki rasio ketergantungan lansia tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 20,25, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 17,70, dan Jawa Timur sebesar 16,96. Sedangkan provinsi yang mempunyai rasio ketergantungan lansia terendah adalah Papua sebesar 4,04, Kepulauan Riau sebesar 5,76, dan Papua Barat sebesar 5,79.

Gambar 3.4
Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Menurut Tipe Daerah, 2011–2013

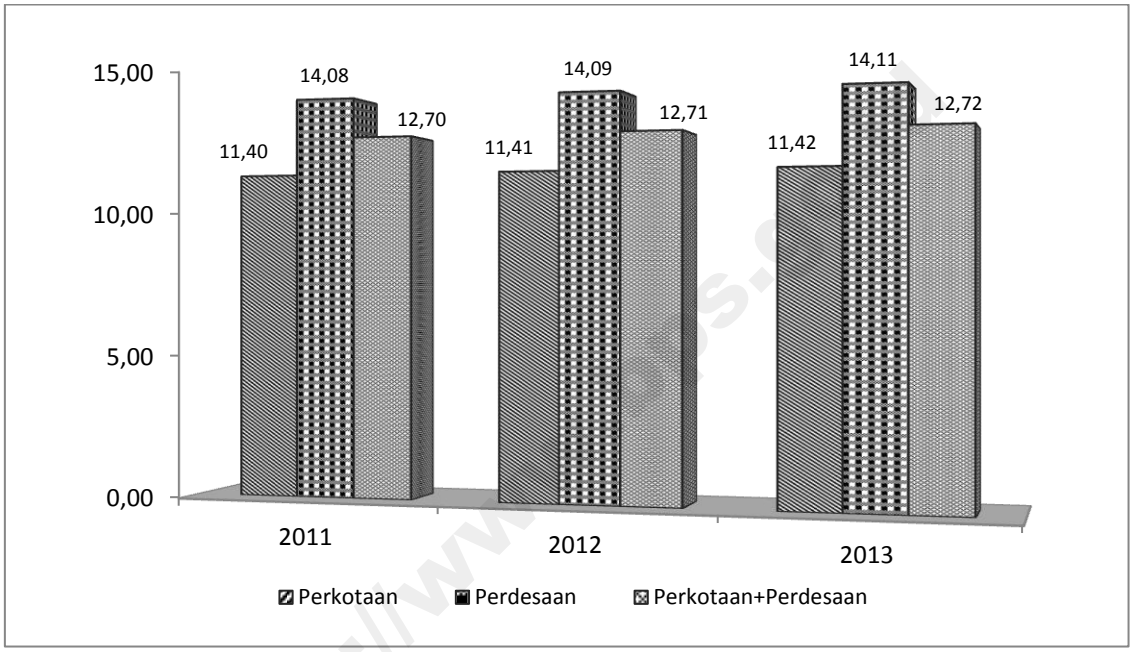

Sumber: BPS, Susenas Kor 2011–2013

3.4 Status Perkawinan Penduduk Lansia

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa mayoritas lansia berstatus kawin, yaitu sebesar 58,71 persen dan diikuti dengan lansia berstatus cerai mati sebesar 38,04 persen. Sementara itu, lansia yang berstatus cerai hidup dan belum kawin masing-masing hanya sebesar 2,37 persen dan 0,88 persen.

Bila dilihat lebih rinci menurut jenis kelamin, pola status perkawinan lansia laki-laki berbeda dengan lansia perempuan. Sesuai dengan kenyataan bahwa usia harapan hidup perempuan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup laki-laki. Hal ini diduga menjadi penyebab persentase lansia perempuan yang berstatus cerai mati lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki. Persentase lansia laki-laki yang berstatus

kawin (83,19 persen) lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki yang berstatus cerai mati (14,87 persen). Sebaliknya, lansia perempuan yang berstatus cerai mati (58,40 persen) lebih banyak daripada yang berstatus kawin (37,20 persen). Pola yang sama juga terlihat baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 3.4
Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, 2013

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K)					
Laki-laki (L)	0,73	82,48	1,18	15,61	100,00
Perempuan (P)	1,20	37,02	3,45	58,34	100,00
L+P	**0,98**	**58,29**	**2,39**	**38,35**	**100,00**
Perdesaan (D)					
Laki-laki (L)	0,60	83,81	1,36	14,23	100,00
Perempuan (P)	0,96	37,35	3,24	58,46	100,00
L+P	**0,79**	**59,08**	**2,36**	**37,77**	**100,00**
K+D					
Laki-laki (L)	0,66	83,19	1,28	14,87	100,00
Perempuan (P)	1,07	37,20	3,33	58,40	100,00
L+P	**0,88**	**58,71**	**2,37**	**38,04**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Terdapat fenomena yang menarik pada status perkawinan untuk lansia. Pada status perkawinan cerai terdapat perbedaan persentase yang cukup tinggi antara lansia perempuan dengan lansia laki-laki. Tingginya persentase lansia perempuan yang berstatus cerai dapat disebabkan karena sebagian besar kaum perempuan yang telah bercerai tidak segera kawin lagi untuk jangka waktu yang relatif lama. Sebaliknya, lansia laki-laki yang terpaksa bercerai karena ditinggal mati oleh pasangannya, umumnya segera kawin lagi.

Struktur perkawinan lansia di setiap provinsi menunjukkan pola yang sama dengan struktur perkawinan lansia secara nasional. Keadaan ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.4.3. Pola tersebut tidak terjadi di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Maluku. Provinsi-provinsi tersebut mempunyai pola persentase lansia yang berstatus belum kawin cenderung lebih tinggi dari mereka yang berstatus cerai hidup.

3.5 Peranan Penduduk Lansia dalam Rumah Tangga

Seseorang yang telah memasuki masa tua seyogianya dapat menikmati hari tuanya tanpa beban yang berat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa lansia di Indonesia masih banyak yang berperan sebagai kepala rumah tangga (KRT). KRT adalah orang yang memimpin dan bertanggungjawab terhadap satu rumah tangga. Kedudukan KRT sangat penting dalam menentukan kelangsungan dan keberadaan rumah tangga. Selain harus bertanggung jawab secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, KRT juga harus mengatur dan memimpin anggota rumah tangga (ART), serta berperan sebagai pengambil keputusan.

Pada Gambar 3.5 disajikan persentase lansia dan hubungannya dengan KRT. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa lebih dari separuh lansia berperan sebagai KRT, yaitu sebesar 61,95 persen, sedangkan yang berstatus sebagai ART sebesar 38,05 persen. Besarnya persentase lansia yang menjadi KRT perlu mendapat perhatian serius karena mereka dituntut beban dan tanggung jawab tinggi secara ekonomi terhadap ART-nya.

Gambar 3.5
Persentase Penduduk Lansia menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2013

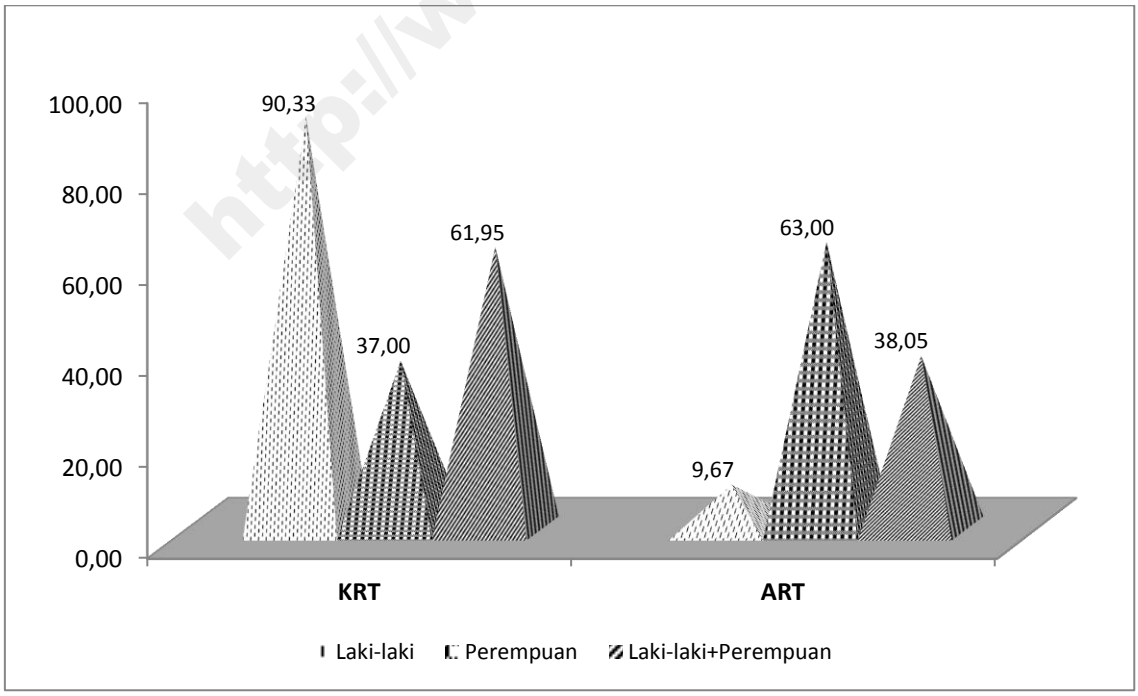

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Peran keanggotaan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara lansia laki-laki dan perempuan sebagai KRT. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2013, persentase lansia laki-laki yang menjadi KRT sebesar 90,33 persen, sedangkan lansia perempuan hanya sebesar 37,00 persen.

Tabel 3.5 menyajikan peran keanggotaan penduduk berumur 10-59 tahun dan lansia dalam rumah tangga. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar lansia berkedudukan sebagai KRT. Pola tersebut berbeda dengan pola umum penduduk berumur 10-59 tahun. Sebagian besar (73,87 persen) penduduk berumur 10-59 tahun berkedudukan sebagai ART. Keadaan ini berlaku baik di perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk perkotaan berumur 10-59 tahun yang berkedudukan sebagai ART sebesar 74,05 persen dan di perdesaan sebesar 73,70 persen.

Tabel 3.5
Persentase Penduduk 10-59 Tahun dan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Peran Keanggotaan dalam Rumah Tangga, 2013

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Penduduk 10 – 59 Tahun		Penduduk Lansia	
	KRT	ART	KRT	ART
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K)				
Laki-laki (L)	43,72	56,28	90,73	9,27
Perempuan (P)	8,02	91,98	38,50	61,50
L+P	**25,95**	**74,05**	**62,94**	**37,06**
Perdesaan (D)				
Laki-laki (L)	44,84	55,16	89,99	10,01
Perempuan (P)	7,56	92,44	35,71	64,29
L+P	**26,30**	**73,70**	**61,10**	**38,90**
K + D				
Laki-laki (L)	44,28	55,72	90,33	9,67
Perempuan (P)	7,79	92,21	37,00	63,00
L+P	**26,13**	**73,87**	**61,95**	**38,05**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki berumur 10 tahun ke atas yang menjadi KRT lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Pola yang sama terjadi pada penduduk berumur 10-59 tahun dan lansia (60 tahun ke atas) baik di perkotaan maupun perdesaan. Hal

http://www.bps.go.id

tersebut sesuai dengan budaya masyarakat bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dalam suatu kehidupan rumah tangga.

Lampiran Tabel 3.5.3 menyajikan persentase penduduk lansia menurut provinsi dan hubungan dengan KRT tahun 2013. Provinsi dengan persentase lansia sebagai KRT tertinggi adalah Aceh sebesar 75,67 persen, diikuti oleh DKI JakARTa sebesar 70,14 persen, dan Papua sebesar 68,51 persen. Sedangkan provinsi yang mempunyai persentase lansia sebagai KRT terendah adalah Bali sebesar 41,09 persen, Kepulauan Riau sebesar 55,69 persen, dan Sulawesi Utara sebesar 56,47 persen.

3.6 Lansia menurut Status Tinggal dalam Rumah Tangga

Menjadi tua merupakan suatu fase kehidupan yang dialami oleh manusia. Makin panjang usia seseorang, sejalan dengan pertambahan usia tubuh akan mengalami kemunduran secara fisik maupun psikologis. Orang lansia akan terlihat dari kulit yang mulai keriput, berkurangnya fungsi telinga dan mata, tidak dapat bergerak cepat lagi, cepat merasa lelah, rambut menipis dan memutih, serta mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh berkurang. Secara psikologis lansia menjadi mudah lupa, serta berkurangnya kegiatan dan interaksi (baik dengan anak-anak, saudara atau teman), mengalami rasa kesepian, kebosanan dan sebagainya. Apalagi jika ia kehilangan pekerjaan, menderita *post power syndrome*, berkurangnya peranan dalam keluarga atau masyarakat, atau kondisi ekonominya buruk.

Melihat keadaan tersebut menyebabkan perlunya perhatian pada lansia, agar lansia tidak hanya berumur panjang, tetapi dapat menikmati masa tuanya dengan bahagia, serta meningkatkan kualitas hidup diri mereka. Perubahan sosial di masyarakat misalnya adanya kecenderungan perubahan struktur keluarga dari keluarga besar (*extended family*) ke keluarga inti (*nuclear family*) ikut membawa perubahan terhadap lansia, dimana sebelumnya mereka tinggal bersama dalam satu rumah dengan anggota keluarga lainnya, namun sekarang lansia tinggal terpisah dengan anak-anak mereka. Demikian juga dengan kondisi ekonomi orang lansia juga mengalami perubahan apabila dibandingkan ketika masih muda. Penduduk lansia secara individual merupakan penduduk yang potensial menjadi “beban” keluarga dan masyarakat terutama bagi mereka yang memasuki usia tuanya tidak dipersiapkan sejak dini.

http://www.bps.go.id

Status tinggal bersama dalam satu rumah tangga memperlihatkan bagaimana dukungan keluarga dan lingkungan yang diberikan kepada lansia. Tinggal bersama dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan jaminan perawatan ketika seorang lansia membutuhkan pendampingan. Tabel 3.6 memberikan gambaran tentang status tinggal bersama dalam rumah tangga. Secara umum, sebagian besar lansia masih tinggal dalam satu rumah tangga bersama dengan keluarga dan tiga generasi. Persentase lansia yang tinggal bersama keluarga dalam rumah tangga sebesar 26,82 persen, sedangkan lansia yang tinggal bersama tiga generasi dalam rumah tangga ada sebanyak 41,44 persen. Sementara itu lansia yang tinggal sendiri dalam rumah tangga masih cukup besar, yaitu sebesar 9,89 persen.

Tabel 3.6
Persentase Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Tinggal dalam Satu Rumah Tangga, 2013

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status Tinggal dalam Satu Rumah Tangga					
	Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga *)	Tiga Generasi *)	Bersama orang lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
Laki-Laki	4,12	22,02	36,36	36,07	1,42	100,00
Perempuan	13,11	12,66	23,48	45,98	4,76	100,00
Laki-laki + Perempuan	**8,91**	**17,04**	**29,51**	**41,35**	**3,20**	**100,00**
Perdesaan						
Laki-Laki	4,36	27,09	30,02	37,08	1,45	100,00
Perempuan	16,34	14,28	19,65	45,44	4,29	100,00
Laki-laki + Perempuan	**10,74**	**20,27**	**24,50**	**41,53**	**2,96**	**100,00**
Perkotaan + Perdesaan						
Laki-Laki	4,25	24,75	32,95	36,61	1,44	100,00
Perempuan	14,85	13,53	21,42	45,69	4,51	100,00
Laki-laki + Perempuan	**9,89**	**18,78**	**26,82**	**41,44**	**3,07**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

***) Keterangan: Bersama keluarga : anak/menantu atau orang tua/mertua tinggal bersama lansia dalam satu rumah tangga.**

Tiga generasi : lansia tinggal bersama anak/menantu dan cucunya atau tinggal bersama anak/menantu dan orangtua/mertuanya dalam satu rumah tangga.

http://www.bps.go.id

Bila dilihat menurut tipe daerah, baik di perkotaan maupun perdesaan mempunyai pola yang relatif sama dalam kaitannya dengan tinggal bersama dalam rumah tangga. Namun jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, maka yang tinggal dengan tiga generasi relatif lebih berimbang, sedangkan yang tinggal bersama keluarga lebih banyak di daerah perkotaan (29,51 persen) dibandingkan di perdesaan (24,50 persen). Keadaan sebaliknya untuk lansia yang tinggal sendiri, di perdesaan (10,74 persen) lebih banyak dibandingkan di perkotaan (8,91 persen).

Bila dilihat menurut jenis kelamin, baik lansia laki-laki dan perempuan mempunyai pola yang relatif sama dalam kaitannya dengan tinggal bersama dalam rumah tangga. Namun jika dibandingkan, maka persentase lansia perempuan yang tinggal sendiri (14,85 persen) jauh lebih banyak daripada lansia laki-laki (4,25 persen). Begitu pula mereka yang tinggal bersama bukan dengan keluarganya, persentase lansia perempuan (4,51 persen) lebih banyak daripada laki-laki (1,44 persen). Sementara lansia yang tinggal dengan pasangannya saja, lansia laki-laki (24,75 persen) lebih banyak daripada lansia perempuan (13,53 persen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketika harus tinggal sendiri atau bersama orang lain, lansia perempuan lebih rela dan sanggup menjalaninya daripada laki-laki yang lebih memilih untuk tinggal bersama pasangan atau keluarganya.

http://www.bps.go.id

PENDIDIKAN

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

4

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam pembangunan manusia. Begitu pentingnya hal ini, kinerja pendidikan, yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek huruf (AMH), digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Pendidikan juga merupakan amanat konstitusi, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan salah satu tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu pula pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi , 'Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan' dan pada ayat (3) disebutkan, 'Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.'

Pendidikan merupakan proses sepanjang hayat. Setiap orang, tidak mengenal usia, memiliki hak untuk terus belajar demi mengembangkan wawasan, pola pikir dan kemampuannya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menurut data SP2010, sebesar 7,58 persen atau sekitar 18 juta penduduk Indonesia berusia lanjut (60 tahun ke atas). Angka ini bukanlah jumlah yang sedikit sehingga juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya menjamin kesejahteraan dan kemandirian para lansia melalui pembekalan ketrampilan, pengetahuan, dan wawasan,

http://www.bps.go.id

terutama yang tergolong lansia yang tidak atau kurang terdidik di masa mudanya.

Dalam UU No.13 Tahun 1998 tentang Lansia Bab III Pasal 5 Ayat 2d tentang hak dan kewajiban lansia, bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, salah satunya dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan timbul rasa kemandirian pada lansia sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

4.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan yang tinggi dan berkualitas, serta terbukanya kesempatan untuk mengembangkan diri, berkarya dan berusaha merupakan syarat setiap orang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pendidikan tertinggi seringkali dijadikan pendekatan dalam mengukur besarnya pendapatan yang diterima seseorang di masa depan. Dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang. Lansia merupakan orang-orang dengan usia yang tergolong sudah tidak lagi produktif secara ekonomi. Kesejahteraannya seringkali sangat bergantung kepada pendidikan tertinggi yang pernah diperolehnya sewaktu muda sebagai cerminan dari pekerjaan dan pendapatannya yang bisa disimpan sebagai jaminan di hari tua.

Lansia pada masa sekarang adalah penduduk yang rata-rata mencapai usia sekolah pertamanya (SD) pada masa-masa awal kemerdekaan yaitu sekitar tahun 1950-1960'an. Upaya dan perjuangan bangsa pada saat itu masih terfokus kepada bagaimana menjaga stabilitas politik dan mempertahankan kemerdekaan, sampai dengan meletusnya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Hal ini menyebabkan usaha memperbaiki kehidupan sosial ekonomi belum tertangani dengan baik, termasuk pada sektor pendidikan. Baru pada mulai tahun 1966, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh pemerintah telah berhasil menciptakan stabilitas nasional, baik di bidang ekonomi, politik maupun di bidang keamanan, dan telah melakukan serangkaian pembangunan nasional secara terus menerus, terarah dan terpadu, bertahap dan berencana, serta konstitusional. Hal itu diwujudkan dengan disusunnya Program Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama (PJP I), yang dimulai sejak

http://www.bps.go.id

tahun 1969. Oleh sebab itulah pada umumnya tingkat pendidikan para lansia saat ini masih sangat kurang.

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa di tahun 2013 hampir 84 persen lansia masih berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah, dengan persentase tidak tamat SD sebesar 32,59 persen, tidak atau belum pernah sekolah sebesar 25,17 persen, dan 25,72 persen tamat SD. Sedangkan untuk lansia yang tamat SMP dan SMA atau lebih berturut-turut sebesar 6,52 persen dan 9,99 persen. Hal ini menunjukan masih sangat rendahnya partisipasi pendidikan di masa awal-awal kemerdekaan akibat masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan di masa itu. Rendahnya tingkat pendidikan lansia ini dapat menjadi indikasi terbatasnya kemampuan dalam berkontribusi dalam kegiatan ekonomi masyarakat demi menunjang kesejahteraan hidupnya.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk Lansia menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2011, 2012, dan 2013

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2011			2012			2013		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak/belum pernah sekolah	15,62	40,14	28,67	14,65	37,70	26,92	13,61	35,34	25,17
Tdk tamat SD	33,04	31,74	32,35	32,68	32,36	32,51	32,14	32,99	32,59
SD	29,35	18,14	23,38	29,90	19,18	24,19	31,52	20,63	25,72
SMP	7,94	4,35	6,03	8,20	4,66	6,32	8,36	4,90	6,52
SM+	14,05	5,63	9,57	14,57	6,10	10,06	14,37	6,15	9,99
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Tabel di atas juga menunjukkan dengan jelas adanya budaya patriakhi yang dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Budaya ini menganggap laki-laki lebih penting untuk berkembang dibanding perempuan. Tabel di atas menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antara lansia laki-laki dan perempuan di semua jenjang pendidikan. Sebesar 35,34 persen lansia perempuan tidak atau belum pernah sekolah, sedangkan lansia laki-laki hanya 13,61 persen atau sekitar sepertiganya. Kesenjangan yang signifikan juga terjadi pada jenjang SMA ke

http://www.bps.go.id

atas di mana lansia laki-laki yang menamatkan SMA ke atas lebih dari dua kali dibanding perempuan. Kemudian lansia laki-laki juga lebih banyak yang menamatkan SD dan SMP dibanding lansia perempuan, bahkan untuk jenjang SMP hampir dua kali lipatnya.

Dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2013 terjadi penurunan persentase lansia yang tidak atau belum pernah bersekolah sebesar 1,75 persen dari tahun 2012 dan 3,5 persen dari tahun 2011 menjadi 25,17 persen. Kemudian persentase lansia yang tamat SD bertambah dari 24,19 persen di tahun 2011 menjadi 25,72 persen. Sementara untuk jenjang yang lain tidak berubah secara signifikan. Kesenjangan antara lansia laki-laki dan perempuan belum berubah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pendidikan lansia yang masih rendah ini terjadi hampir di semua provinsi. Provinsi dengan persentase lansia yang tidak/belum pernah sekolah tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat (49,91 persen) diikuti Kalimantan Barat (40,44 persen) dan Bali (37,75 persen). Sedangkan yang terendah adalah Sulawesi Utara (1,82 persen), Gorontalo (4,99 persen), dan Maluku (5,49 persen).

Pembangunan bidang pendidikan di Sulawesi Utara (saat itu meliputi daerah Provinsi Gorontalo) di awal zaman kemerdekaan telah dilakukan dengan baik meski sebagian besar hanya sampai tingkat pendidikan dasar. Salah satu penyebabnya adalah karena di daerah inilah para misionaris dari Negara Belanda menetap dan membuka sekolah-sekolah, rumah sakit dan menjadi pusat penyebaran agama Kristen di Tanah Minahasa. Bahkan Pada tahun 1906 melalui kerja sama dan kesepakatan dengan raja Bolaang Mongondow, W.Dunnebier telah mengusahakan pembukaan beberapa sekolah rakyat yang dikelola oleh zending di beberapa desa di Bolaang Mongondow dengan tiga kelas. Jumlah murid yang tertampug di sekolah-sekolah tersebut adalah 1605 orang (Sejarah Pendidikan daerah Sulawesi Utara oleh Drs.L.Th. Manus dkk). Kemudian pada rentang 1912 hingga tahun 1937 banyak berdiri sekolah-sekolah baru baik yang dikelola oleh Balai Pendidikan dan Pengajaran Islam (BPPI), maupun oleh swasta. Guru-gurunya pun banyak didatangkan dari Pulau Jawa. Beberapa sekolah yang terkenal di Sulawesi Utara adalah Meisjesschool, Holland Inlandshe School, sekolah untuk para guru Kweekschool, serta Vervolg School (sekolah sambungan) kelas 4 dan

http://www.bps.go.id

5 yang menampung lepasan sekolah rakyat 3 tahun. (Sejarah Pendidikan daerah Sulawesi Utara oleh Drs.L.Th. Manus dkk)

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa masih terdapat perbedaan yang signifikan antara wilayah perdesaan dan perkotaan dalam hal tingkat pendidikan penduduknya. Penduduk lansia di perdesaan sebagian besar tidak tamat SD (37,39 persen) dan tidak/belum pernah bersekolah (31,13 persen) dan hanya sekitar 3,5 persen yang tamat SMP maupun SMA ke atas. Di lain pihak, di perkotaan, meski masih didominasi mereka yang tidak tamat SD (27,00 persen) tetapi memiliki persentase yang tamat SD, SMP dan SMA ke atas yang signifikan lebih tinggi dari penduduk perdesaan. Bahkan persentase lansia di perkotaan yang tamat SMA ke atas (17,54 persen) lima kali lebih besar daripada di perdesaan (3,51 persen).

Gambar 4.1
Persentase Penduduk Lansia menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, Tahun 2013

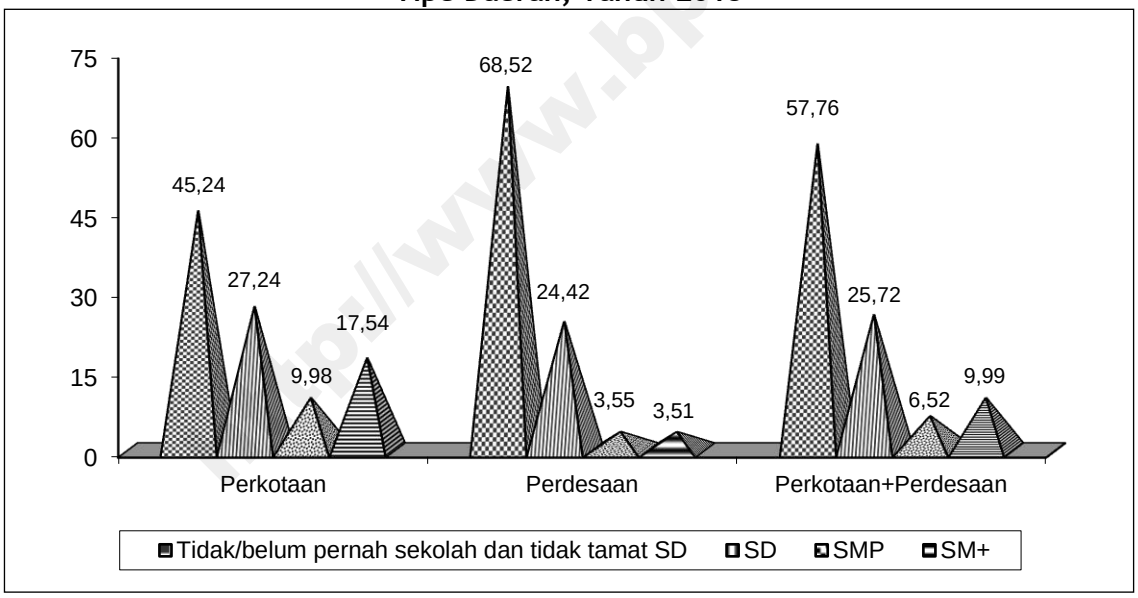

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Hal ini mencerminkan masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di perdesaan di awal masa-masa kemerdekaan. Di masa tersebut pembangunan memang masih sangat tersentralisasi dan difokuskan di perkotaan, terutama area Jabodetabek yang disiapkan untuk menjadi area industri yang juga menyebabkan dimulainya arus urbanisasi penduduk. Namun, dengan semangat otonomi daerah saat ini diharapkan daerah-daerah

khususnya perdesaan dapat lebih mengembangkan daerah dan memajukan penduduknya terutama dalam hal pendidikan.

4.2 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan baca-tulis atau melek aksara penting bagi seseorang karena merupakan modal dasar untuk pembelajaran berkelanjutan sehingga orang tersebut bisa mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat dalam aspek yang lebih luas. UNESCO mendefinisikan melek aksara sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Dalam konteks Indonesia, keaksaraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis kalimat sederhana dalam bahasa latin atau bahasa lain serta melakukan perhitungan sederhana (Fasli Jalal, Nina sardjunani dalam Ringkasan Keaksaraan bagi kehidupan).

Buta aksara lansia saat ini erat kaitannya dengan ketidakmampuan lansia tersebut memperoleh pendidikan di masa mudanya, terutama bagi mereka yang sama sekali belum atau tidak pernah bersekolah. Sebagaimana dalam perjalanan bangsa Indonesia, buta aksara sebenarnya telah ada sejak zaman penjajahan. Negara penjajah memang telah sengaja membuat rakyat Indonesia menjadi lebih terbelakang dan bodoh agar nantinya tidak merugikan mereka. Pada masa tersebut, tidak ada sekolah untuk rakyat yang bukan keturunan “ningrat”, sehingga rakyat Indonesia yang miskin sama sekali tidak ada kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan terjadilah buta aksara. Hal ini sama sekali tidak menguntungkan rakyat Indonesia sendiri, karena menjadikan penjajah semakin lama menduduki Indonesia.

Tabel 4.2 menunjukan adanya kesenjangan kondisi pendidikan antara perkotaan dan perdesaan di awal-awal masa kemerdekaan. Persentase lansia yang buta aksara di perdesaan sebesar 34,15 persen dibanding di perkotaan 19,14 persen. Kesenjangan ini didominasi oleh kesenjangan proporsi buta aksara lansia perempuan, dimana di perdesaan proporsi buta aksara lansia perempuan mencapai 46,66 persen atau hampir separuh penduduk lansia perempuan di perdesaan. Sedangkan di perkotaan hanya 27,58 persen lansia

http://www.bps.go.id

perempuan yang buta aksara. Kemudian dibanding kelompok umur 15-59, tampak kondisi yang jauh berbeda. Proporsi penduduk buta aksara kelompok umur 15-59 hanya berkisar antara 0,81 persen sampai 5,31 persen, bahkan jika dibandingkan secara keseluruhan. Proporsi buta aksara lansia hampir sembilan kali lipat dibandingkan peduduk kelompok umur 15-59, yaitu 27,21 persen dibanding 3,39 persen.

Tabel 4.2
Proporsi Penduduk 15-59 Tahun, 15 Tahun Ke Atas dan Lansia yang Buta Aksara menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin 2013

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	15-59 Tahun	Lansia (60+)	15 Tahun Ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)			
Laki-laki (L)	0,86	9,54	1,70
Perempuan (P)	2,29	27,58	5,04
L+P	1,57	19,14	3,37
Perdesaan (D)			
Laki-laki (L)	3,54	19,91	5,44
Perempuan (P)	7,10	46,66	12,29
L+P	5,31	34,15	8,88
K+D			
Laki-laki (L)	2,16	15,12	3,53
Perempuan (P)	4,62	37,85	8,60
L+P	3,39	27,21	6,08

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Gambar 4.2 di bawah ini secara umum menunjukan tren menurun dari proporsi penduduk buta aksara di Indonesia sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Data pada Gambar 4.2 menunjukkan 15,12 persen dari jumlah lansia laki-laki masih buta aksara di tahun 2013, menurun dari tahun 2011 (17,55 persen) dan tahun 2012 (17,46 persen). Sedangkan proporsi lansia perempuan dengan buta aksara di 2013 masih tinggi, yaitu 37,85 persen. Hal ini, sekali lagi, membuktikan masih kuatnya budaya patriakhi yang telah ada sejak lama, di mana masyarakat Indonesia lebih mengutamakan laki-laki (Iriantono et al, 2002). Dari tabel lampiran, mulai tabel 4.3.1 s.d 4.3.9, diketahui pula bahwa lansia perempuan lebih banyak yang buta aksara baik di kota maupun di desa secara nilai

absolut maupun proporsi. Proporsi buta aksara tertinggi terjadi pada lansia perempuan di desa (46,66 persen).

Gambar 4.2
Proporsi Penduduk Lansia yang Buta Aksara menurut Jenis Kelamin Tahun 2011, 2012, dan 2013

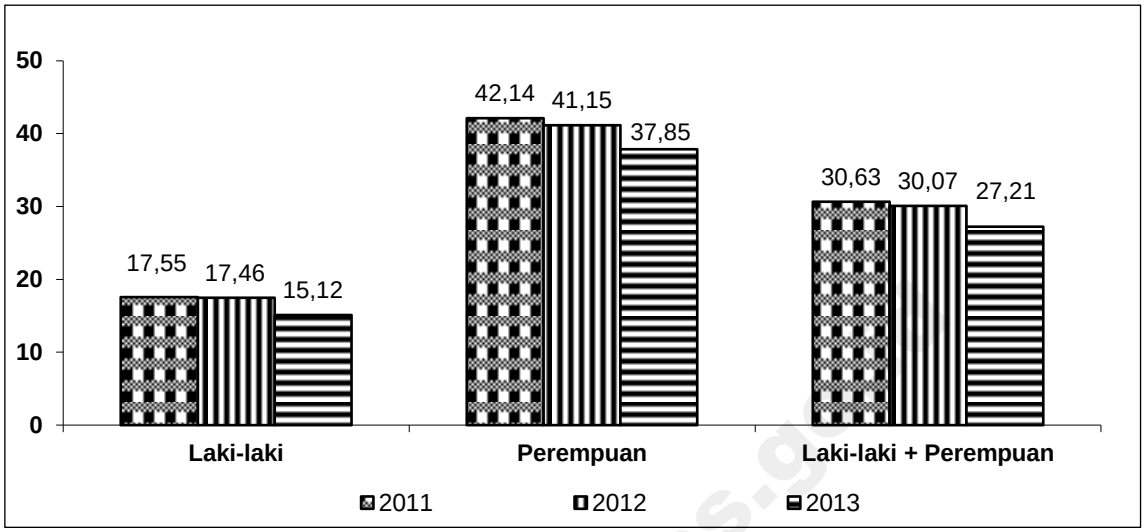

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Secara keseluruhan proporsi penduduk lansia yang buta aksara pada tahun 2013 berkurang 2,86 persen dibanding tahun 2012 dan 3,42 persen dibanding tahun 2011 menjadi 27,21 persen. Pada lampian Tabel 4.2.9 diketahui bahwa persebaran proporsi buta aksara di Indonesia sangat bervariasi mulai dari 3,18 persen di Sulawesi Utara, hingga 53,37 persen di Nusa Tenggara Barat. Bahkan di wilayah perdesaan di NTB, buta aksara perempuan mencapai 55,85 persen. DKI Jakarta (5,49 persen) dan Maluku (7,52 persen) menempati urutan wilayah dengan buta aksara terendah berikutnya. Sedangkan wilayah dengan proporsi buta aksara tertinggi kedua dan ketiga berturut-turut adalah Bali (38,71 persen) dan Jawa Timur (37,85 persen).

Indonesia dapat dikatakan negara yang tergolong cepat dalam pemberantasan buta aksara. Bahkan hal ini telah diakui oleh badan dunia seperti UNESCO. Salah satu program pemerintah dalam pengentasan buta huruf adalah pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan yang salah satunya dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Tujuan pendidikan keaksaraan ini pertama, untuk membebaskan penduduk dari buta

http://www.bps.go

aksara. Kedua, untuk memberikan bekal hidup berupa keterampilan, dan yang terakhir, untuk menanamkan pendidikan karakter agar masyarakat dapat hidup damai dan tenteram. Akan tetapi, pada dasarnya sulit untuk dapat memberantas buta aksara secara tuntas karena buta aksara yang masih tersisa merupakan kelompok yang paling sulit diberantas. Sebab, sebagian besar dari mereka berusia di atas 44 tahun yang umumnya berasal keluarga kurang mampu, penglihatannya sudah terganggu dan kebanyakan tinggal di daerah terpencil.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

KESEHATAN

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

5

KESEHATAN

http://www.bps.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat mengenai kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Kesehatan adalah hak asasi yang melekat dan merupakan bagian dari unsur kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan, yang dimaksud kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 3 menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Secara biologis penduduk lansia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus yang ditandai dengan menurunnya daya tahan tubuh sehingga mengakibatkan semakin rentan terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Semakin tua, mereka akan mengalami kemunduran terutama dalam bidang kemampuan fisik sehingga mengakibatkan timbulnya gangguan dalam kesehatannya (Nugroho, 2000).

Menurut Bustan (2007), secara umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia mengalami penurunan yang dapat dilihat dari

beberapa perubahan: (1) perubahan penampilan pada bagian wajah, tangan, dan kulit; (2) perubahan bagian dalam tubuh seperti sistem saraf: otak, isi perut: limpa, hati; (3) perubahan panca indra: penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa; dan (4) perubahan motorik antara lain berkurangnya kekuatan, kecepatan bergerak. Perubahan-perubahan tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang akan berpengaruh pada aktivitas kehidupan sehari-hari.

Secara yuridis formal, ketentuan untuk memenuhi hak lansia diatur dalam pasal 42 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan lansia juga dituangkan dalam UU RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab VI Pasal 14 Ayat (1) mengenai pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pada Ayat (2) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah berupa peningkatan: (a) penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lansia; (b) upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik; (c) pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dan pada Ayat (3) disebutkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat memenuhi hak lansia khususnya dibidang kesehatan, pemerintah membuat dan menjalankan program pelayanan kesehatan untuk lansia antara lain *Home Care*, Usaha Ekonomi Produktif dan Posyandu Lansia, yang telah diadakan diantaranya di Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. *Home Care* merupakan program pendampingan yang ditujukan

http://www.bps.go.id

khusus untuk lansia yang perlu perhatian serius, seperti masalah fisik, kesehatan, gizi buruk, penyakit tua dan masalah mental spiritual (menurunnya daya pikir/pikun). Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan posyandu lansia adalah pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan dan pelaksanaan senam lansia.

Menurut Tamher, S dan Noorkasiani (2009), dalam Simanullang, Poniyah dkk, *et al*. (2011), mengatakan bahwa menjadi lansia merupakan suatu fenomena yang alamiah sebagai akibat dari proses menua. Fenomena ini bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu keadaan yang wajar dan bersifat universal. Proses menua adalah suatu proses kemunduran mencakup proses organobiologis, psikologik, serta sosiobudaya. Menjadi tua ditentukan secara genetik dan dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Kondisi kesehatan seseorang pada saat sekarang ini merupakan hasil proses akumulasi yang terjadi semenjak manusia dalam kandungan sampai sekarang. Secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai pola hidup sehat dari masa kecil, remaja, dewasa hingga lansia, kondisi kesehatannya akan lebih baik dibandingkan dengan lansia yang masa lalunya tidak berperilaku hidup sehat. Gambaran makro mengenai kondisi kesehatan lansia yang dibahas pada bagian ini meliputi angka keluhan kesehatan, angka kesakitan, rata-rata lama sakit, dan cara berobat lansia.

http://www.bps.go.id

5.1 Keluhan Kesehatan

Secara individu pengaruh proses penuaan menimbulkan berbagai masalah. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan penduduk lansia adalah permasalahan kesehatan. Semakin bertambahnya usia, umumnya keluhan kesehatan yang dialami akan semakin bertambah. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau sebab lainnya. Keluhan kesehatan tidak selalu mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, namun terjadinya keluhan kesehatan dan jenis keluhan yang dialami oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat/derajat kesehatan secara kasar.

Secara umum persentase penduduk pra lansia, lansia muda, lansia madya, dan lansia tua yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dapat dilihat pada Gambar 5.1. Semakin tinggi kelompok umur pra lansia dan lansia maka persentase yang mengalami keluhan kesehatan semakin besar, yaitu kelompok pra lansia (45-59 tahun) sebesar 35,18 persen, lansia muda (60-69 tahun) sebesar 46,71 persen, lansia madya (70-79 tahun) sebesar 56,26 persen dan lansia tua (80 ke atas) sebesar 61,04 persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin, lansia perempuan lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan laki-laki pada semua kelompok umur, kecuali kelompok lansia tua. Pada kelompok pra lansia perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 33,84 persen dan 36,54 persen, pada kelompok lansia muda perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 45,71 persen dan 47,68 persen, pada kelompok lansia madya perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 55,04 persen dan 57,22 persen, dan kelompok umur 80 tahun ke atas perbandingan antara lansia laki-laki dan perempuan, yaitu 63,24 persen dan 59,55 persen.

Gambar 5.1
Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia dan Jenis Kelamin, 2013

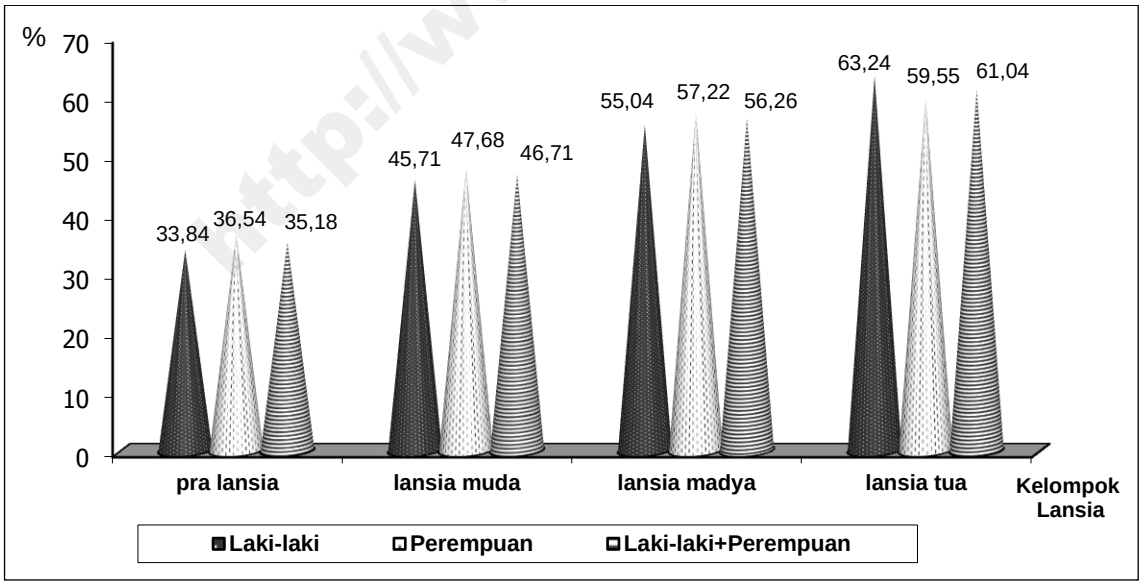

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Tiga provinsi dengan persentase tertinggi lansia yang mengalami keluhan kesehatan berturut-turut adalah Provinsi Aceh (64,05 persen), Nusa Tenggara Barat (63,00 persen), dan Gorontalo (60,00 persen). Sebaliknya,

persentase terendah lansia yang mengalami keluhan kesehatan secara berturut-turut ditemukan di Provinsi Kepulauan Riau (39,34 persen), Papua Barat (39,40 persen), dan Maluku Utara (40,37 persen) seperti yang disajikan pada Lampiran Tabel 5.1.

Manusia dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya berlangsung sepanjang hidup sejak bayi hingga dewasa sampai masa tua. Dalam struktur anatomi proses menjadi tua terlihat sebagai kemunduran dalam sel. Proses ini berlangsung secara alami, terus menerus, dan berkesinambungan, yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan anatomi, fisiologi, dan biokimia pada jaringan tubuh secara keseluruhan. Perubahan ini berarti perubahan yang bersifat negatif bagi lansia yaitu adanya kemunduran fungsi organ pada lansia.

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kemunduran fungsi organ khususnya pada lansia menyebabkan kelompok ini rawan terhadap penyakit-penyakit kronis seperti diabetes melitus, *stroke*, gagal ginjal, kanker, hipertensi, dan jantung. Penyakit-penyakit tersebut kemungkinan telah lama diderita tetapi karena kurangnya perhatian lansia terhadap kesehatannya maka penyakit tersebut tidak diatasi sedini mungkin.

Gambaran penyakit/keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh penduduk pra lansia dan lansia tersebut tersaji pada Tabel 5.1. Semakin tinggi kelompok umur lansia maka keluhan kesehatan yang dialaminya dengan berbagai jenis keluhan semakin meningkat kecuali keluhan sakit gigi yang menurun persentasenya. Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami pra lansia dan lansia dari berbagai kelompok umur adalah keluhan lainnya, yaitu jenis keluhan kesehatan yang umumnya diderita lansia antara lain penyakit kronis seperti asam urat, darah tinggi, rematik, darah rendah, dan diabetes. Jenis keluhan lainnya untuk kelompok umur 45-59 tahun (18,42 persen), kelompok umur 60-69 tahun (29,00 persen), kelompok umur 70-79 tahun (38,64 persen) dan kelompok umur 80 tahun ke atas (44,56 persen). Jenis keluhan yang juga banyak dialami pra lansia dan lansia adalah jenis keluhan yang biasanya banyak dialami oleh masyarakat umum yaitu batuk dan pilek.

http://www.bps.go.id

Tabel 5.1
Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Kelompok Lansia, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan, 2013

Kelompok Lansia/ Jenis Kelamin	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45-59 Tahun (Pra Lansia)								
Laki-laki (L)	7,61	13,03	10,88	1,74	1,06	4,87	1,84	16,16
Perempuan (P)	6,52	10,96	9,34	1,52	0,97	6,93	1,60	20,70
L+P	**7,07**	**12,00**	**10,11**	**1,63**	**1,01**	**5,90**	**1,72**	**18,42**
60-69 Tahun (Lansia Muda)								
Laki-laki (L)	8,05	16,20	11,31	3,74	1,33	6,14	1,43	26,61
Perempuan (P)	7,48	13,42	10,08	3,16	1,17	7,89	1,32	31,30
L+P	**7,76**	**14,78**	**10,68**	**3,44**	**1,25**	**7,03**	**1,38**	**29,00**
70-79 Tahun (Lansia Madya)								
Laki-laki (L)	8,38	18,77	11,88	6,92	1,48	7,31	1,16	35,45
Perempuan (P)	8,16	15,53	9,60	4,43	1,72	9,27	1,03	41,17
L+P	**8,26**	**16,96**	**10,61**	**5,53**	**1,61**	**8,41**	**1,09**	**38,64**
80 Tahun Ke atas (Lansia Tua)								
Laki-laki (L)	9,22	20,67	11,27	9,29	1,63	8,88	1,08	43,74
Perempuan (P)	8,19	15,49	9,21	5,04	2,40	8,73	0,89	45,12
L+P	**8,61**	**17,58**	**10,04**	**6,75**	**2,09**	**8,79**	**0,97**	**44,56**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Bila dilihat menurut gender, persentase lansia yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak dialami oleh lansia laki-laki dibandingkan lansia perempuan pada semua jenis keluhan. Jenis keluhan yang sering dialami lansia laki-laki adalah panas, batuk, pilek, sakit gigi, dan asma. Sementara untuk lansia perempuan jenis keluhannya adalah sakit kepala berulang dan lainnya.

5.2 Angka Kesakitan

Fisik yang sehat akan menunjang manusia untuk dapat mampu melakukan berbagai aktifitas yang produktif sehingga diharapkan memperoleh hasil yang positif. Hasil yang positif tersebut akan mendorong manusia menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Derajat kesehatan penduduk merupakan cerminan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

http://www.bps.go.id

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan penduduk lansia adalah angka kesakitan. Angka kesakitan (*morbidity rates*) lansia adalah proporsi lansia yang mengalami masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Angka kesakitan tergolong sebagai indikator kesehatan negatif. Semakin tinggi angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya, semakin rendah angka kesakitan, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik.

Angka kesakitan lansia tahun 2013 sebesar 24,80 persen, artinya bahwa dari setiap 100 orang lansia terdapat sekitar 25 orang yang mengalami sakit. Angka kesakitan lansia perkotaan (23,12 persen) lebih rendah dibandingkan lansia perdesaan (26,24 persen). Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan lansia di perkotaan cenderung lebih baik dibandingkan derajat kesehatan lansia di perdesaan. Bila dilihat perkembangannya, angka kesakitan lansia mengalami penurunan (Gambar 5.2). Angka kesakitan lansia pada tahun 2011 sebesar 27,95 persen, pada tahun 2012 turun sebesar 1,12 persen menjadi 26,83 persen, dan pada tahun 2013 turun lagi sebesar 2,03 persen menjadi 24,80 persen. Pola yang sama juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Penurunan ini menunjukkan indikasi derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik.

http://www.bps.go.id

Gambar 5.2
Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, 2011, 2012, dan 2013

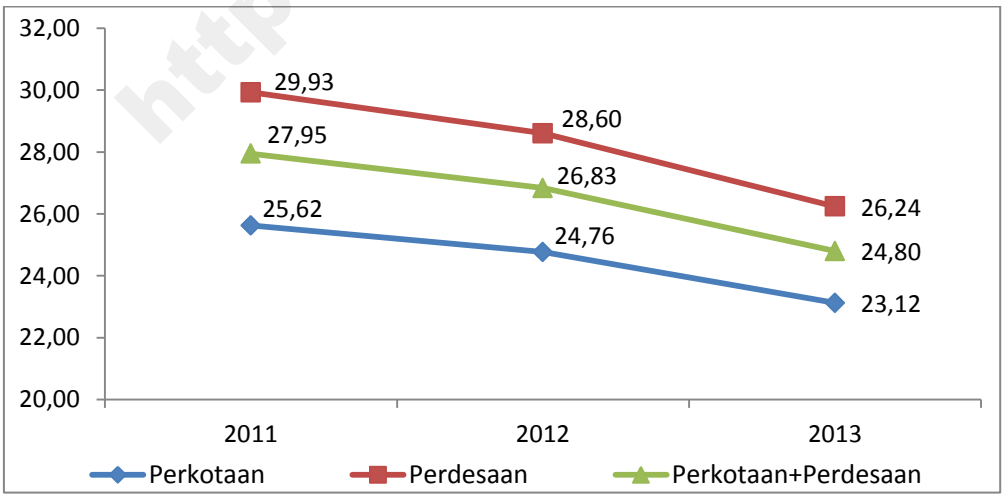

Sumber: BPS, Susenas Kor 2011, 2012, dan 2013

Lampiran Tabel 5.2 memperlihatkan angka kesakitan lansia per provinsi berkisar antara 20,83 – 38,50 persen. Angka kesakitan lansia tertinggi

terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara (38,43 persen), Aceh (36,06 persen) dan Nusa Tenggara Barat (35,01 persen). Sebaliknya, angka kesakitan terendah terdapat di Provinsi Kep.Bangka Belitung (20,48 persen), Kepulauan Riau (20,55 persen), dan DI Yogyakarta (20,59 persen).

5.3 Lama Sakit

Lamanya seseorang menderita sakit sangat dipengaruhi oleh tingkat keparahan penyakit dan daya tahan tubuh orang tersebut. Semakin lama seseorang menderita sakit menunjukkan bahwa sakit yang dideritanya cukup parah, dan sebaliknya. Selain itu, semakin lemah daya tahan tubuh seseorang maka proses penyembuhan akan semakin lama, begitu juga sebaliknya. Kemunduran fungsi organ dan menurunnya daya tahan tubuh pada lansia menyebabkan proses penyembuhannya menjadi lebih lama dibandingkan yang usianya lebih muda.

Tabel 5.2
Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, 2013

Lama Sakit(Hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan +Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1 - 3	43,43	42,26	42,77
4 - 7	30,99	32,80	32,02
8 - 14	6,17	6,50	6,35
15 - 21	3,57	3,54	3,56
22 - 30	15,84	14,89	15,30
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Tabel 5.2 menyajikan persentase lansia yang menderita sakit menurut lamanya sakit. Tabel tersebut memberikan gambaran bahwa sebagian besar lansia mengalami sakit kurang dari seminggu. Persentase lansia yang menderita sakit selama 1–3 hari sebesar 42,77 persen dan yang menderita sakit selama 4–7 hari sebesar 32,02 persen. Sisanya adalah mereka yang menderita sakit lebih dari seminggu (8 sampai dengan 30 hari).

Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Persentase lansia perkotaan yang mengalami sakit selama 1–3 hari sebesar 43,43 persen dan yang sakit selama 4–7 hari sebesar 30,99 persen,

http://www.bps.go.id

sedangkan lansia perdesaan yang mengalami sakit selama 1–3 hari dan 4–7 hari masing-masing tercatat sebesar 42,26 persen dan 32,80 persen.

Pada Lampiran Tabel 5.3.3 dapat dilihat persentase lansia yang sakit menurut lama hari sakit dan provinsi. Pada kelompok lama sakit 1–3 hari, persentasenya berkisar antara 29,98–60,22 persen dan pada kelompok lama sakit 4–7 hari persentasenya berkisar antara 20,97–49,83 persen. Pada kelompok lama sakit lansia antara 1–3 hari, provinsi yang mempunyai persentase paling tinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (60,22 persen), D.I Yogyakarta (49,46 persen) dan Kalimantan Tengah (48,98 persen). Sebaliknya, persentase terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara (29,98 persen), Papua (32,97 persen), dan Kepulauan Riau (33,26 persen). Pada kelompok lama sakit lansia antara 4–7 hari, provinsi yang mempunyai persentase paling tinggi terdapat di Provinsi Papua (49,83 persen), Maluku Utara (42,68 persen) dan Papua Barat (40,29 persen). Sebaliknya, persentase terendah secara berturut-turut terdapat di Provinsi Kep. Bangka Belitung (20,97 persen), DKI Jakarta (21,83 persen) dan D.I Yogyakarta (22,91 persen).

Gambar 5.3
Rata-rata Lama Sakit yang Dialami oleh Penduduk Lansia menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Lansia, 2013

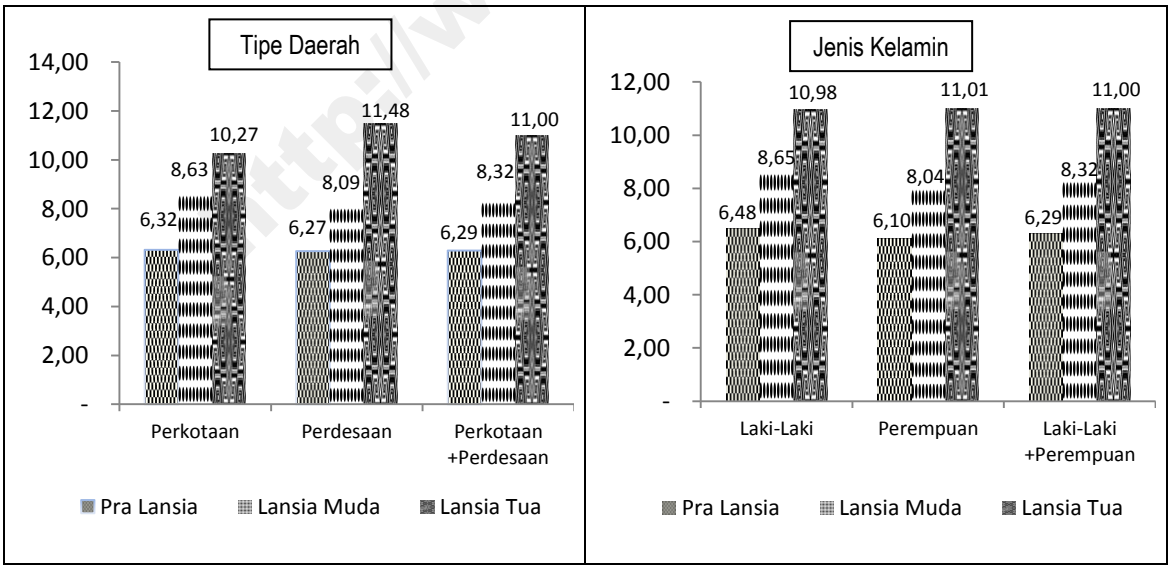

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Gambaran rata-rata lama sakit yang dialami oleh penduduk pra lansia, lansia muda, dan lansia tua disajikan pada Gambar 5.3. Semakin tinggi kelompok umur lansia maka rata-rata lama sakit yang dialami semakin

meningkat. Rata-rata lama sakit penduduk pra lansia sekitar 6 hari, lansia muda sekitar 8 hari dan lansia tua sekitar 11 hari. Pola yang sama diperlihatkan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Hal ini berarti menjadi tua merupakan suatu fase kehidupan yang dialami oleh manusia, makin panjang usia seseorang sejalan dengan pertambahan usia tubuh maka akan mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga proses penyembuhan bagi lansia yang sakit menjadi relatif lebih lama.

5.4 Cara Berobat

Berbagai upaya akan dilakukan baik oleh lansia maupun keluarga yang memiliki anggota lansia agar dapat terus sehat dan beraktifitas. Salah satunya yaitu dengan mencari pengobatan yang efektif untuk dapat sembuh dari penyakit yang diderita oleh lansia. Cara pengobatan yang bisa dilakukan adalah dengan berobat sendiri atau mendatangi tempat pelayanan kesehatan, baik modern maupun tradisional, termasuk mendatangkan petugas kesehatan kerumah pasien.

Tabel 5.3
Persentase Penduduk Berumur 0-59 Tahun dan Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Jenis Obat yang Digunakan dan Tipe Daerah, 2013

Jenis Obat yang Digunakan	Penduduk 0-59 Tahun			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tradisional	6,75	8,94	7,95	9,45	11,48	10,62
Modern	76,07	67,97	71,63	64,12	58,85	61,07
Lainnya	0,84	0,95	0,90	1,39	0,91	1,11
Campuran	16,35	22,14	19,52	25,04	28,76	27,19
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, SusenasKor 2013

Tabel 5.3 menyajikan persentase penduduk berumur 0-59 tahun yang berobat sendiri menurut jenis obat yang digunakan. Cara berobat sendiri dengan menggunakan obat modern tidak saja dilakukan oleh mayoritas lansia, namun juga dilakukan oleh lebih dari dua per tiga (71,63 persen) penduduk berumur 0-59 tahun yang sakit.

http://www.bps.go.id

Bila dilihat menurut provinsi, persentase lansia yang melakukan pengobatan sendiri dengan menggunakan obat modern berkisar antara 36,10–73,02 persen (Lampiran Tabel 5.7.3). Tiga provinsi yang mempunyai persentase lansia yang menggunakan obat modern tertinggi adalah Provinsi Gorontalo (73,02 persen), Banten (71,15 persen) dan Jawa Tengah (68,43 persen). Persentase terendah terdapat di Provinsi Maluku Utara (36,10 persen), Bali (39,32 persen) dan Kepulauan Riau (46,99 persen).

Selain dengan berobat sendiri, seseorang juga dapat mengobati sakitnya dengan cara berobat jalan. Berobat jalan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan. Tabel 5.5 menampilkan proporsi penduduk berumur 0-59 tahun dan lansia yang berobat jalan menurut jenis tempat berobat. Tiga tempat yang paling banyak didatangi oleh lansia untuk berobat jalan yaitu praktek tenaga kesehatan sebesar 33,20 persen, praktek dokter (31,61 persen), dan puskesmas/puskesmas pembantu (28,56 persen).

Tabel 5.4
Proporsi Penduduk berumur 0-59 Tahun dan Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Tipe Daerah, 2013

Tempat Berobat	Penduduk 0-59 Tahun			Penduduk Lansia		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah sakit pemerintah	7,73	4,69	6,17	12,62	6,27	9,16
Rumah sakit swasta	7,38	2,72	4,99	8,32	3,11	5,48
Praktek Dokter	41,00	21,99	31,24	39,90	24,69	31,61
Puskesmas/Pustu	28,37	34,13	31,33	25,75	30,90	28,56
Praktek tenaga kesehatan	21,53	41,96	32,03	21,75	42,76	33,20
Pengobatan tradisional	2,33	2,52	2,43	2,85	2,82	2,83
Lainnya	2,99	3,23	3,11	3,60	3,22	3,39

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Pola tersebut sedikit berbeda jika dilihat berdasarkan tipe daerah. Untuk daerah perdesaan, praktek tenaga kesehatan (42,76 persen) lebih banyak dikunjungi oleh lansia untuk berobat jalan dibandingkan ke puskesmas/pustu (30,90 persen) dan praktek dokter (24,69 persen). Di daerah perkotaan, proporsi lansia yang berobat jalan ke tempat praktek dokter (39,90 persen) lebih besar dibandingkan yang berobat ke puskesmas/pustu

http://www.bps.go.id

(25,75 persen) dan praktek tenaga kesehatan (21,75 persen). Tempat berobat di praktek dokter lebih banyak dikunjungi oleh lansia di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Hal tersebut karena fasilitas praktek dokter lebih banyak terdapat di daerah perkotaan.

Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa baik di perkotaan maupun di perdesaan, puskesmas/pustu bukan merupakan tempat berobat pilihan utama bagi lansia. Hal ini kurang sejalan dengan salah satu program pemerintah yang mengadakan adanya puskesmas lansia dan atau posyandu lansia di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Bila kita cermati antara penduduk berumur 0-59 tahun dengan lansia, maka tempat berobat sebagai salah satu alternatif pilihan yang terjangkau baik dari sisi akses maupun biaya berobat bagi penduduk 0-59 tahun maupun lansia secara umum adalah berobat di praktek tenaga kesehatan. Proporsi penduduk berumur 0-59 tahun yang berobat jalan ke praktek tenaga kesehatan sebesar 32,03 persen (di daerah perkotaan sebesar 21,53 persen dan perdesaan 41,96 persen). Sedangkan proporsi lansia yang berobat jalan ke praktek tenaga kesehatan sebesar 33,30 persen (di daerah perkotaan sebesar 21,75 persen dan perdesaan 42,76 persen).

Lampiran Tabel 5.9.3 menunjukkan proporsi tertinggi lansia yang sakit dan berobat ke puskesmas/pustu terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (67,63 persen), Papua (64,21 persen) dan Maluku (58,81 persen). Sebaliknya, provinsi yang mempunyai proporsi terendah terdapat di Provinsi Lampung (18,72 persen), Bali (20,97 persen) dan Banten (21,03 persen).

http://www.bps.go.id

KEGIATAN EKONOMI

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

6

KEGIATAN EKONOMI

Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa lansia potensial adalah penduduk usia 60 tahun ke atas yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa. Lansia potensial mampu mencari nafkah sendiri sehingga hidupnya tidak bergantung pada bantuan orang lain, atau dapat disebut juga sebagai lansia produktif. Mereka dapat diberdayakan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya. Keterlibatan lansia produktif dalam aktifitas ekonomi juga dapat menjamin pemeliharaan kemandirian dan kesejahteraan sosial lanjut usia, memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hak lansia untuk bekerja juga dijamin dalam Undang-undang. Pasal 5 UU No. 13 Tahun 1998 menyebutkan bahwa lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan serta untuk menjamin kesejahteraan sosial, negara menjamin hak-hak lansia diantaranya dalam kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, serta layanan dan bantuan hukum. Pasal 15 menyebutkan bahwa lansia potensial dapat mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya untuk bekerja pada sektor

http://www.bps.go.id

formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi adalah ketenagakerjaan, karena membangun perekonomian yang baik harus dilandasi oleh produktivitas yang tinggi. Perlu diupayakan pembangunan ketenagakerjaan yang luas dan menyeluruh agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah selalu diarahkan pada peningkatan, pembentukan, dan pengembangan tenaga kerja berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan berjiwa wirausaha. Dalam hal ini, pembangunan pada bidang ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan bagi penduduk muda yang produktif namun diarahkan juga bagi mereka yang sudah memasuki masa lansia namun masih potensial, yaitu mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

http://www.bps.go.id

6.1 Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, serta pengangguran. Pengangguran ditentukan dari penduduk tidak bekerja yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas tidak bekerja dan bukan pengangguran yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) digunakan untuk melihat partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi, khusus lansia dibatasi pada usia 60 tahun ke atas.

Hasil Sakernas tahun 2013 memperlihatkan tingginya jumlah lansia potensial di Indonesia. Dari keseluruhan lansia, sekitar 46,33 persen diantaranya bekerja, 29,88 persen melakukan kegiatan mengurus rumah tangga, dan 0,25 persen masih berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha (pengangguran). Sisanya sebanyak 23,54 persen lansia yang hanya melakukan kegiatan pribadi lainnya sehari-hari seperti berolahraga, kegiatan sosial, bermain, mengurus diri sendiri, atau tidak melakukan apapun. Dibandingkan dengan usia produktif, penduduk usia 15-59

tahun yang hanya mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya sebanyak 18,77 persen dan 11,88 persen.

Gambar 6.1
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama, 2013

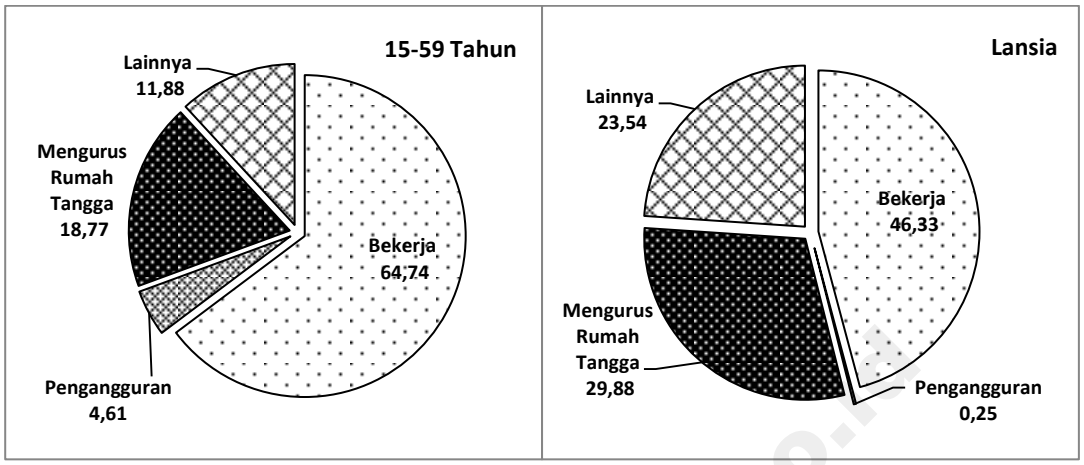

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Menurut tipe daerah, proporsi lansia bekerja di daerah perdesaan (53,21 persen) lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (38,32 persen). Perbedaan kondisi perekonomian menyebabkan lansia di perdesaan lebih cenderung untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya daripada mereka yang tinggal di perkotaan. Selain itu, lebih banyaknya lapangan pekerjaan non formal di perdesaan yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti faktor usia atau pendidikan yang lebih tinggi juga menyebabkan lansia di perdesaan lebih mudah memasuki lapangan pekerjaan. Sebaliknya, kegiatan mengurus rumah tangga dan lainnya di perkotaan (34,73 persen dan 26,61 persen) lebih tinggi daripada perdesaan (25,71 persen dan 20,89 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sulitnya lansia untuk memasuki lapangan pekerjaan di perkotaan menyebabkan mereka lebih banyak melakukan aktifitas di rumah daripada mereka yang tinggal di perdesaan.

http://www.bps.go.id

Gambar 6.2
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenis Kegiatan Utama, 2013

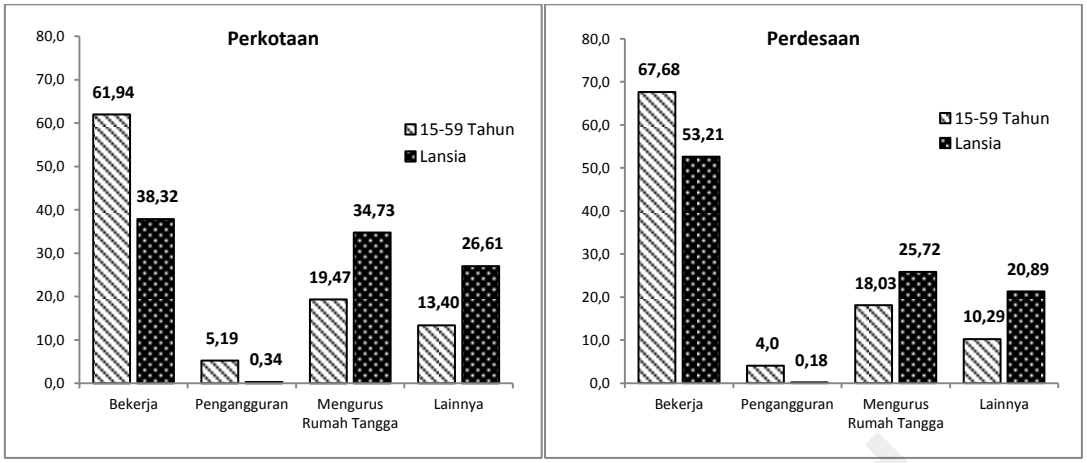

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Partisipasi bekerja lansia lebih rendah daripada penduduk usia produktif, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Akan tetapi, perbedaan tersebut terjadi lebih tajam di daerah perkotaan. Sebanyak 61,94 persen penduduk perkotaan usia 15-59 tahun yang bekerja pada tahun 2013, jauh lebih tinggi daripada lansia bekerja sebanyak 38,32 persen. Sementara di perdesaan, selisih proporsi bekerja antara penduduk usia produktif (67,68 persen) dengan lansia (53,21 persen) relatif lebih kecil. Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan mengurus rumah tangga, lainnya, dan pengangguran, dimana perbedaan proporsi yang lebih tajam terjadi di perkotaan daripada perdesaan.

http://www.bps.go.id

Gambar 6.3
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan Utama, 2013

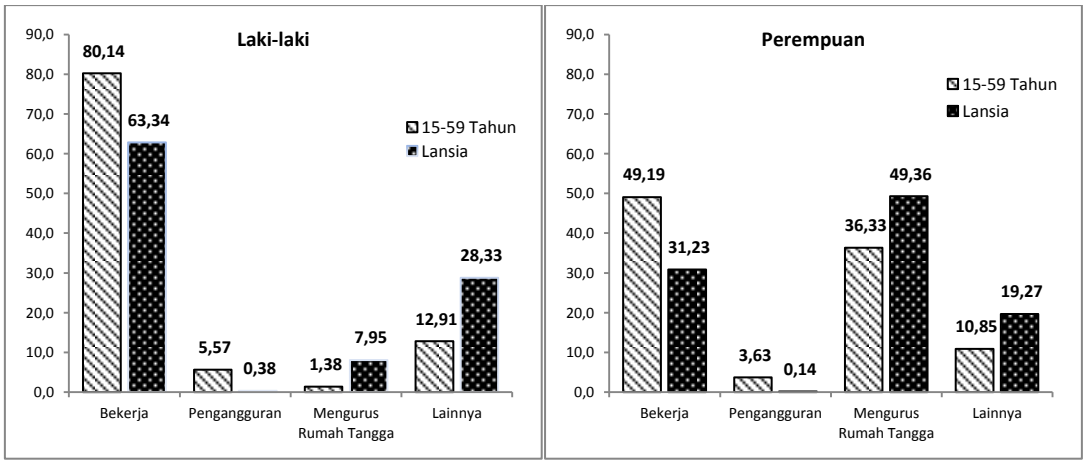

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Gambar 6.3 menggambarkan kegiatan utama dari lansia dan penduduk usia 15-59 tahun menurut jenis kelamin. Proporsi bekerja penduduk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, baik pada kelompok umur 15-59 tahun maupun lansia. Sebanyak 63,34 persen lansia laki-laki yang bekerja, lebih besar daripada lansia perempuan yang bekerja sebanyak 31,23 persen. Lansia laki-laki yang mencari pekerjaan dan mempersiapkan usaha (0,38 persen) juga lebih besar daripada lansia perempuan (0,14 persen). Begitu pula mereka yang hanya melakukan kegiatan lainnya, dimana proporsi laki-laki lebih besar daripada perempuan, baik pada kelompok umur 15-59 tahun maupun lansia.

Proporsi lansia perempuan yang mengurus rumah tangga (49,36 persen) jauh lebih tinggi daripada lansia laki-laki (7,95 persen). Begitu pula pada kelompok umur 15-59 tahun, dimana proporsi perempuan usia produktif yang mengurus rumah tangga sebesar 36,33 persen jauh lebih tinggi daripada laki-laki yang hanya sebesar 1,38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa faktor gender masih memberikan pengaruh kuat bagi lansia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Perempuan cenderung untuk tetap tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki lebih cenderung untuk bekerja.

Partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi juga dapat dilihat dari nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Pada kelompok lansia, TPAK lansia dihititung dari proporsi jumlah lansia yang bekerja dan pengangguran terhadap seluruh jumlah lansia. Tingginya nilai TPAK mencerminkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

http://www.bps.go.id

Gambar 6.4
TPAK Lansia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013

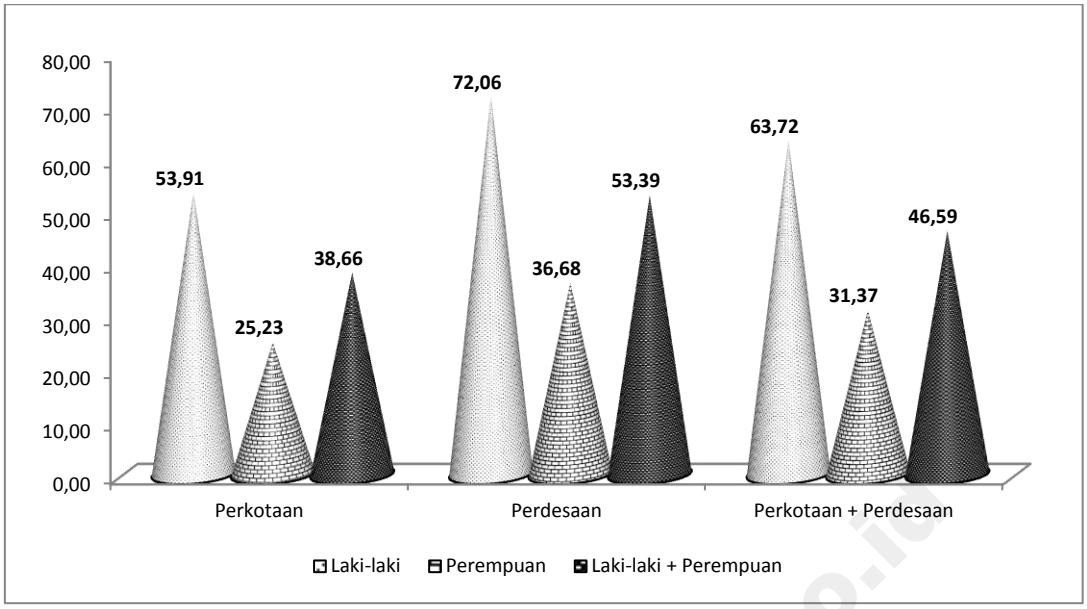

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Secara umum pada tahun 2013, lansia yang terlibat kegiatan ekonomi sebanyak 46,58 persen. Tingginya TPAK lansia terutama pada kelompok jenis kelamin laki-laki di daerah perdesaan, yaitu sebesar 72,06 persen. Sedangkan TPAK lansia perempuan di perkotaan sebesar 25,23 persen. Menurut jenis kelamin, TPAK lansia laki-laki dua kali lebih tinggi daripada lansia perempuan (63,72 persen berbanding 31,37 persen). Hal ini terjadi karena umumnya laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab pada kondisi ekonomi keluarganya dan harus bekerja, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang biasanya mengurus rumah tangga.

TPAK lansia menurut provinsi bervariasi dengan rentang nilai antara 30 hingga 56 persen. Gambar 6.5 memperlihatkan provinsi-provinsi dengan nilai TPAK lansia di atas 50 persen di antaranya adalah Provinsi Papua (55,51 persen), Nusa Tenggara Timur (55,03 persen), dan DI Yogyakarta (54,82 persen). Daerah-daerah tersebut selain karena tuntutan alam dan kondisi ekonomi masyarakatnya, juga karena budaya kerja dan kondisi kesehatan lansia yang memungkinkan dan mendorong lansia untuk tetap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu provinsi-provinsi dengan nilai TPAK lansia terendah di antaranya adalah DKI Jakarta (31,15 persen), Kepulauan Riau (35,72 persen), dan Bali (37,96 persen). Rendahnya nilai TPAK lansia didorong

http://www.bps.go.id

oleh banyaknya pusat-pusat kegiatan industri di daerah tersebut yang menuntut partisipasi tenaga kerja usia muda. Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya lansia untuk tetap bekerja, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia pensiun.

Gambar 6.5
TPAK Lansia menurut Provinsi, 2013

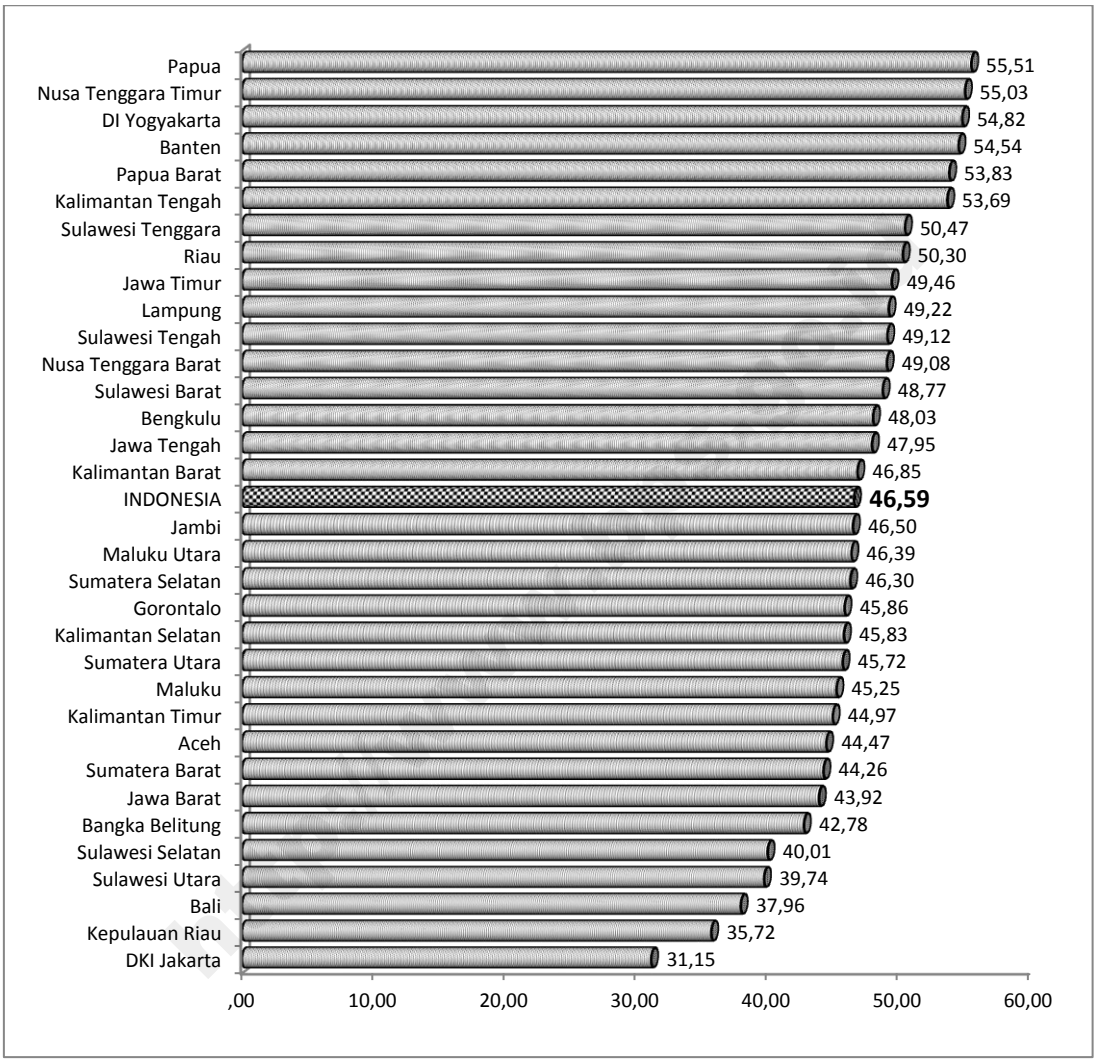

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Sesuai gambar 6.1 di atas, sebanyak 46,33 persen lansia yang bekerja pada tahun 2013. Pembahasan di bawah ini akan menjelaskan karakteristik demografi lansia bekerja di Indonesia dan keterangan pekerjaannya yang meliputi lapangan usaha, jenis dan status pekerjaan, serta jumlah jam kerja dan upah/gaji/pendapatan yang diperolehnya.

6.2 Karakteristik Demografi Lansia Bekerja

Semakin bertambah usia lansia, semakin kecil pula peluangnya untuk tetap bekerja. Sebanyak 15,54 persen lansia usia 80 tahun ke atas yang bekerja, menurun dari sebesar 34,87 persen pada kelompok usia 70-79 tahun dan 57,52 persen pada usia 60-69 tahun. Faktor kesehatan menjadi penyebab utama penurunan ini, sebagaimana terlihat pada gambar 6.6 di bawah ini. Menurut jenis kelamin, proporsi lansia laki-laki yang bekerja lebih tinggi daripada perempuan pada setiap kelompok umur. Begitu pula ketika dilihat menurut tipe daerah, proporsi lansia bekerja yang tinggal di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan pada setiap kelompok umur lansia. Penurunan jumlah lansia bekerja tersebut relatif proporsional sesuai dengan pertambahan usia lansia. Hal ini menunjukkan bahwa berkurangnya partisipasi bekerja lansia seiring pertambahan umur tidak dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin maupun tempat tinggalnya.

Gambar 6.6
Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013

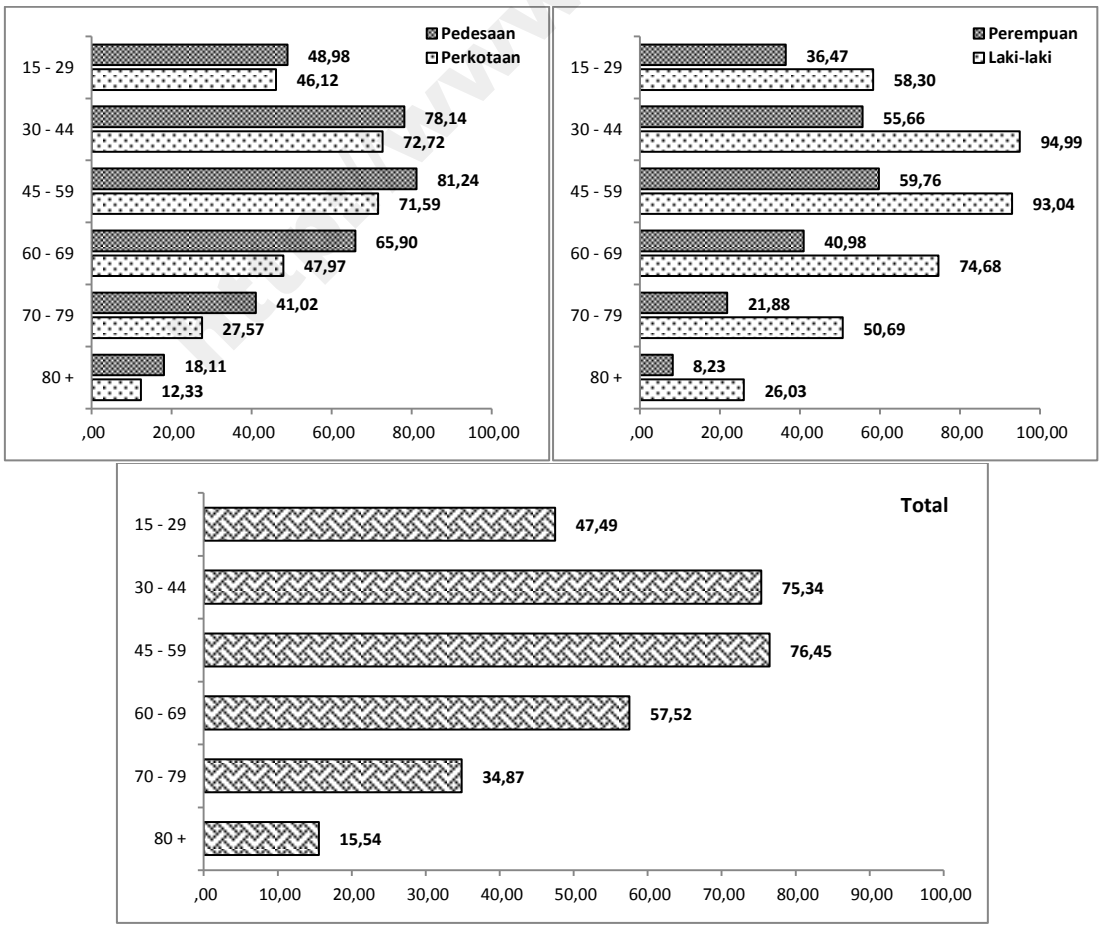

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

www.bps.go.id

Menurut status perkawinan, lansia bekerja lebih banyak didominasi oleh mereka yang berstatus menikah. Kondisi ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan, baik pada laki-laki maupun perempuan. Sebanyak 75,49 persen lansia bekerja berstatus menikah, sebanyak 21,99 persen cerai mati, sisanya cerai hidup (1,84 persen) dan belum kawin (0,68 persen). Kondisi ini mengindikasikan bahwa alasan umum lansia masih bekerja adalah karena tuntutan ekonomi keluarganya, bukan karena keinginannya untuk mengekspresikan kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, atau pengalamannya dalam kegiatan ekonomi.

Persentase lansia bekerja perempuan yang berstatus kawin (50,93 persen) relatif seimbang dengan mereka yang cerai mati (45,14 persen). Berbeda dengan lansia laki-laki berstatus kawin (89,12 persen) yang jauh mendominasi partisipasi bekerja daripada status perkawinan lainnya. Bahkan di perkotaan, jumlah lansia bekerja perempuan yang berstatus cerai mati (49,26 persen) lebih besar daripada mereka yang kawin (45,73 persen). Tingginya proporsi cerai mati bagi lansia perempuan yang bekerja ini menunjukkan bahwa status perkawinan tidak menghalangi mereka untuk bekerja, bahkan menuntut kemandirian yang lebih mengingat lansia perempuan yang cerai mati umumnya tidak memiliki *life support* yang mencukupi.

http://www.bps.go.id

Tabel 6.1
Persentase Lansia yang Bekerja menurut Status Perkawinan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status Perkawinan				Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
- Laki-laki	0,52	88,93	1,29	9,26	100,00
- Perempuan	1,47	45,73	3,54	49,26	100,00
- Laki-laki + Perempuan	**0,85**	**73,88**	**2,08**	**23,19**	**100,00**
Perdesaan					
- Laki-laki	0,44	89,24	1,24	9,08	100,00
- Perempuan	0,82	54,01	2,48	42,69	100,00
- Laki-laki + Perempuan	**0,58**	**76,48**	**1,69**	**21,25**	**100,00**
Perkotaan + Perdesaan					
- Laki-laki	0,47	89,12	1,26	9,15	100,00
- Perempuan	1,06	50,93	2,87	45,14	100,00
- Laki-laki + Perempuan	**0,68**	**75,49**	**1,84**	**21,99**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

6.3 Lapangan Usaha

Lapangan usaha atau lapangan pekerjaan ialah bidang kegiatan dari usaha/pekerjaan/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Struktur lapangan usaha menunjukkan komposisi sektor ekonomi yang mengikutsertakan keterlibatan lansia dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, terdapat 1.457 kategori lapangan usaha yang tercatat dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2009. Akan tetapi yang melibatkan lansia secara maksimal dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok lapangan usaha besar, yaitu sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri, dan kelompok lapangan usaha lainnya.

Tabel 6.2 memperlihatkan bahwa sebagian besar lansia bekerja pada sektor pertanian (60,93 persen), diikuti sektor perdagangan (18,23 persen), jasa (7,51 persen), industri (7,23 persen), dan sektor lainnya (6,10 persen). Sebanyak 78,12 persen lansia bekerja yang tinggal di perdesaan bekerja di sektor pertanian. Berbeda dengan mereka yang tinggal di perkotaan, lansia yang berkerja di sektor pertanian (33,12 persen) relatif berimbang dengan mereka yang bekerja di sektor perdagangan (32,04 persen). Hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama sebagian besar pekerja lansia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama bagi mereka yang tinggal di perdesaan. Masih rendahnya tingkat pendidikan lansia secara umum menyebabkan terjadinya kondisi tersebut, dimana lapangan usaha sektor pertanian terbuka untuk semua kalangan dan tanpa syarat pendidikan tertentu.

http://www.bps.go.id

Tabel 6.2
Persentase Lansia yang Bekerja
menurut Kelompok Lapangan Usaha, Kelompok Umur, dan Tipe Daerah, 2013

Kelompok Lapangan Usaha	Penduduk Usia 15-59 Tahun			Penduduk Lansia		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	8,95	55,01	32,40	33,12	78,12	60,93
Perdagangan	29,75	13,87	21,66	32,04	9,69	18,23
Jasa	22,95	11,60	17,17	13,45	3,85	7,51
Industri	18,83	8,98	13,82	10,22	5,38	7,23
Lainnya	19,52	10,54	14,95	11,17	2,96	6,10
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Struktur lapangan usaha penduduk usia 15–59 tahun lebih berimbang antar setiap sektor ekonomi. Dua dari tiga penduduk usia produktif bekerja di sektor pertanian (32,40 persen), satu dari lima di sektor perdagangan (21,66 persen), sisanya bekerja di sektor jasa (17,17 persen), industri (13,82 persen), dan sektor lainnya (14,95 persen). Menurut tempat tinggalnya, sektor perdagangan (29,75 persen) menjadi pilihan utama bagi penduduk usia produktif yang bekerja di perkotaan dan sektor pertanian (55,01 persen) di perdesaan. Sementara lapangan usaha lainnya relatif berimbang antar sektor, kecuali pertanian yang hanya dipilih oleh 8,95 persen penduduk usia 15-59 tahun di perkotaan. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran struktur ekonomi bagi angkatan kerja, ketika mereka memasuki usia tua. Lapangan usaha sektor formal seperti industri dan jasa mulai ditinggalkan ketika memasuki usia pensiun, kemudian beralih menekuni sektor informal seperti pertanian dan perdagangan.

Tabel 6.3
Persentase Lansia yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kelompok Umur, dan Lapangan Usaha, 2013

Kelompok Umur/ Lapangan Usaha	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Jumlah
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/ Paket C	Diploma/ Akademi/ Sarjana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk 15-59 Tahun							
- Pertanian	7,81	20,77	41,37	17,86	11,36	0,83	100,00
- Perdagangan	1,53	9,32	24,82	21,92	36,22	6,19	100,00
- Industri	1,41	8,42	24,38	24,27	36,46	5,06	100,00
- Jasa	1,23	5,33	14,68	13,39	31,15	34,22	100,00
- Lainnya	1,15	9,51	26,39	20,73	30,14	12,08	100,00
Penduduk Lansia							
- Pertanian	23,67	36,93	30,99	4,66	2,76	0,99	100,00
- Perdagangan	15,33	30,17	32,01	10,30	9,57	2,61	100,00
- Industri	20,02	33,79	30,62	7,65	6,34	1,58	100,00
- Jasa	13,70	25,19	24,68	10,27	14,45	11,71	100,00
- Lainnya	7,45	26,68	37,50	11,10	13,52	3,75	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Tabel 6.3 memperkuat asumsi rendahnya tingkat pendidikan dari lansia bekerja, sehingga mereka lebih banyak berkonsentrasi pada lapangan usaha non formal. Pada setiap kelompok lapangan usaha, lansia bekerja lebih banyak didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah seperti hanya

http://www.bps.go.id

tamat SD/sederajat, tidak/belum tamat SD atau tidak pernah sekolah. Berbeda dengan tingkat pendidikan dari penduduk usia 15-59 tahun yang bekerja, dimana mereka yang tamat SD/sederajat (41,37 persen) atau tidak/belum tamat SD (20,77 persen) hanya dominan di lapangan usaha pertanian.

Secara umum, empat dari lima lansia yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri hanya tamat SD/sederajat, tidak/belum tamat SD atau tidak pernah sekolah. Bahkan lebih dari 90 persen lansia yang bekerja di sektor pertanian berpendidikan tamat SD/sederajat atau lebih rendah. Sektor pertanian dan perdagangan tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu. Selama ada lahan untuk digarap atau barang yang dapat dijual, maka seorang lansia dapat terus produktif memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sementara sektor industri yang banyak digeluti oleh lansia berpendidikan rendah merupakan industri rumah tangga berskala kecil yang dapat dilakukan di rumah dan juga tidak mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu.

Setengah dari lansia yang bekerja di sektor jasa pernah menikmati pendidikan dasar, baik tamat (24,68 persen) maupun tidak/belum tamat (25,19 persen). Sementara dua dari tiga penduduk usia produktif yang bekerja di sektor yang sama berpendidikan minimal tamat SMA/sederajat. Hal ini memperlihatkan bahwa karakteristik tingkat pendidikan dan perbedaan umur mempengaruhi lapangan usaha yang dipilih seseorang untuk bekerja.Mereka yang berumur 15-59 tahun memiliki banyak pilihan lapangan usaha sementara penduduk lansia terbatas pada sektor non formal.

Stuktur lapangan usaha dari masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 6.3.3 lampiran publikasi ini. Sektor pertanian menjadi pilihan utama dari lansia bekerja di seluruh Indonesia, dengan kisaran proporsi antara 30 hingga 81 persen. Kecuali Provinsi DKI Jakarta dimana hanya 1,02 persenlansia yang bekerja di sektor pertanian, jauh lebih rendah daripada sektor jasa yang sebesar 24,28 persen. Struktur ekonomi lansia yang tinggal di 21 (mayoritas) daerah perkotaan provinsi, terbesar bekerja pada sektor perdagangan disusul pertanian dan industri (Tabel 6.3.1 lampiran). Sementara di daerah perdesaan, sektor pertanian merupakan andalan utama lansia bekerja di seluruh provinsi, disusul oleh kelompok sektor perdagangan dan industri.

http://www.bps.go.id

6.4 Jabatan/Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang. Jika lapangan usaha menjelaskan sektor ekonomi atau tempat bekerja seseorang, maka jabatan atau jenis pekerjaan lebih menggambarkan spesifik tugas yang dilakukan atau posisi kedudukannya dalam lapangan usaha tempatnya bekerja. Klasifikasi baku jabatan Indonesia (KBJI) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu (1) pekerja profesional, pejabat dan manager (*white collar worker*); (2) tenaga usaha dan jasa (*blue collar worker*); serta (3) buruh, operator dan pekerja kasar (*grey collar worker*). Melalui jabatan/jenis pekerjaan dapat diidentifikasi posisi lansia dalam pekerjaannya, serta dapat diperkirakan status ekonomi dan jaminan penghasilan yang dimilikinya.

Tabel 6.4
Persentase Lansia yang Bekerja
menurut Jabatan/Jenis Pekerjaan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jabatan/Jenis Pekerjaan			Jumlah
	Profesional, Pejabat, dan Manager	Tenaga Usaha dan Jasa	Buruh, Operator, dan Pekerja Kasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
- Laki-laki	6,73	57,07	36,20	100,00
- Perempuan	5,67	65,51	28,82	100,00
- Laki-laki + Perempuan	**6,36**	**60,01**	**33,63**	**100,00**
Perdesaan				
- Laki-laki	1,48	81,54	16,98	100,00
- Perempuan	1,65	80,17	18,18	100,00
- Laki-laki + Perempuan	**1,54**	**81,04**	**17,42**	**100,00**
Perkotaan + Perdesaan				
- Laki-laki	3,51	72,07	24,42	100,00
- Perempuan	3,15	74,70	22,15	100,00
- Laki-laki + Perempuan	**3,38**	**73,01**	**23,61**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Tabel 6.4 memperlihatkan bahwa 73,01 persen lansia bekerja sebagai tenaga usaha dan jasa (pekerja kerah biru), sebanyak 23,61 persen sebagai buruh, operator, dan pekerja kasar (pekerja kerah abu-abu), sisanya sebagai tenaga profesional, pejabat, dan manager (pekerja kerah putih). Persentase pekerja lansia kerah putih di perkotaan (6,36 persen) lebih besar daripada perdesaan (1,54 persen). Mereka yang bekerja sebagai buruh, operator dan

http://www.bps.go.id

pekerja kasar di perkotaan (33,63 persen) juga lebih besar proporsinya daripada perdesaan (17,42 persen). Kondisi ini memperlihatkan bahwa jenis pekerjaan untuk lansia di perkotaan relatif lebih heterogen daripada daerah perdesaan yang lebih didominasi oleh tenaga usaha dan jasa sebesar 81,04 persen.

Menurut jenis kelamin, sebanyak 22,15 persen pekerja lansia perempuan bekerja sebagai buruh, operator, dan pekerja kasar.Jumlah tersebut lebih kecil daripada lansia laki-laki yang bekerja pada jabatan yang sama. Kondisi ini sedikit berbeda di daerah perdesaan, dimana persentase pekerja lansia laki-laki sebagai buruh, operator, dan pekerja kasar justru lebih kecil daripada perempuan. Hal ini memperlihatkan dorongan ekonomi di perdesaan yang menyebabkan lansia perempuan untuk tetap bekerja, walaupun sebagai pekerja kerah abu-abu yang umumnya tidak memiliki penghasilan yang tetap.

Gambar 6.7
Persentase Lansia yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013

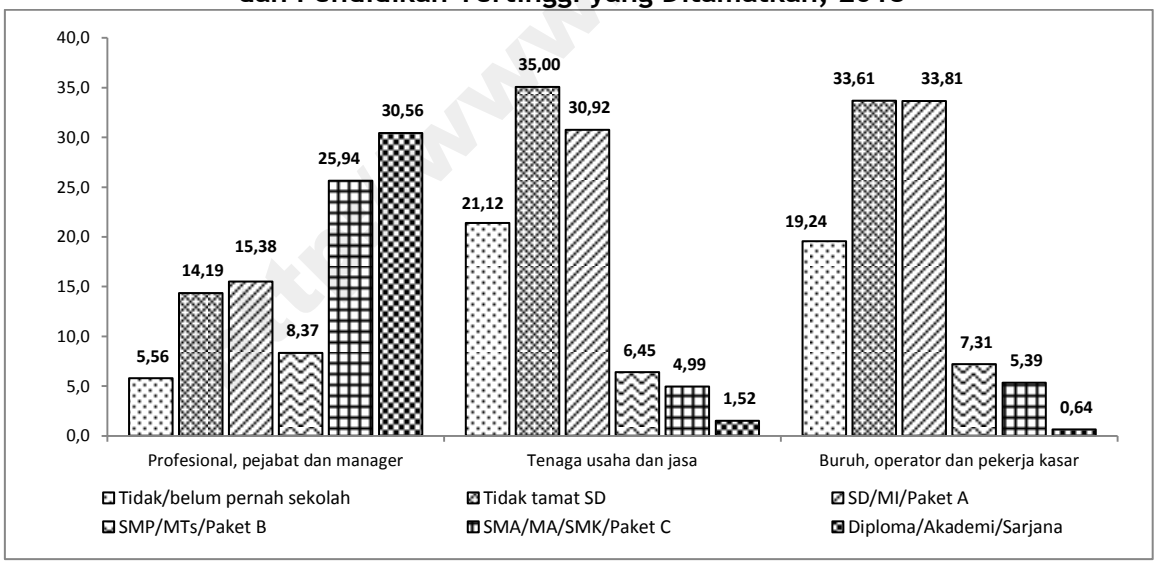

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Jabatan/jenis pekerjaan dari lansia bekerja dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya ketika muda. Lebih dari setengah lansia yang bekerja sebagai profesional, pejabat, dan manager berpendidikan minimal SMA/sederajat. Sementara lansia pekerja kerah biru dan kerah abu-abu lebih didominasi oleh mereka yang pernah mengenyam pendidikan dasar, baik lulus maupun tidak. Dua dari tiga pekerja lansia tenaga usaha, jasa buruh, operator, atau pekerja

kasar merupakan lulusan SD atau tidak lulus SD. Hanya 5,56 persen pekerja lansia kerah putih yang tidak pernah sekolah. Sementara pada jenis pekerjaan lainnya, satu dari lima pekerja lansia tidak pernah sekolah.

6.5 Status Pekerjaan

Status pekerjaan diidentifikasi sebagai kedudukan seseorang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Status pekerjaan terdiri atas berusaha/bekerja sendiri, berusaha/bekerja dibantu buruh/karyawan/ pegawai, sebagai buruh/karyawan/pegawai yang terikat, pekerja bebas yang tidak terikat pada satu pengusaha/perusahaan, serta pekerja keluarga atau tidak dibayar. Kedudukan seorang pekerja lansia dalam lapangan usaha tempatnya bekerja mencerminkan seberapa besar peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi status pekerjaannya, semakin tinggi pula kemandirian dan partisipasinya dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 6.5
Persentase Lansia yang Bekerja
menurut Status Pekerjaan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Status Pekerjaan					Jumlah
	Berusaha Sendiri	Berusaha dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja tidak Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
- Laki-laki	26,62	38.27	18,64	12,31	4,16	100,00
- Perempuan	37,80	22,33	10,52	9,50	19,85	100,00
- Laki-laki + Perempuan	30,52	32,72	15,81	11,33	9,62	100,00
Perdesaan						
- Laki-laki	20,52	61,89	5,09	9,82	2,68	100,00
- Perempuan	26,43	23,32	2,81	9,77	37,68	100,00
- Laki-laki + Perempuan	22,66	47,92	4,26	9,80	15,35	100,00
Perkotaan + Perdesaan						
- Laki-laki	22,88	52,75	10,33	10,79	3,25	100,00
- Perempuan	30,67	22,95	5,68	9,67	31,03	100,00
- Laki-laki + Perempuan	25,66	42,11	8,68	10,39	13,16	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Tabel 6.5 memperlihatkan bahwa sebagian besar lansia bekerja dengan status berusaha/bekerja dibantu buruh (42,11 persen), disusul oleh lansia yang berusaha sendiri sebesar 25,66 persen, pekerja tidak dibayar sebesar 13,16 persen, pekerja bebas 10,39 persen, dan pekerja lansia sebagai buruh/karyawan sebesar 8,68 persen. Hampir setengah dari pekerja lansia

http://www.bps.go.id

yang tinggal di perdesaan dibantu oleh buruh/karyawan, sementara mereka yang berusaha sendiri sebanyak 22,66 persen dan tidak dibayar sebanyak 15,35 persen. Adapun di daerah perkotaan, pekerja lansia yang dibantu buruh sebanyak 32,72 persen, berusaha sendiri 30,52 persen, dan buruh/karyawan sebanyak 15,81 persen.

Menurut jenis kelamin, komposisi tertinggi status pekerjaan lansia perempuan ditempati oleh pekerja keluarga/tidak dibayar (31,03 persen), diikuti oleh mereka yang berusaha sendiri (30,67 persen), dibantu buruh/karyawan (22,95 persen), dan lainnya. Sementara status pekerjaan lansia laki-laki lebih didominasi oleh mereka yang bekerja/ berusaha dibantu buruh/karyawan (52,75 persen), berusaha sendiri (22,88 persen), pekerja bebas (10,79 persen), dan lainnya. Perbedaan komposisi status pekerjaan ini menunjukkan bahwa lansia perempuan lebih banyak yang berstatus sebagai pekerja keluarga tidak dibayar daripada lansia laki-laki, yang cenderung masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berusaha sendiri dan menggaji buruh/karyawan.

Gambar 6.8
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Kelompok Umur, 2013

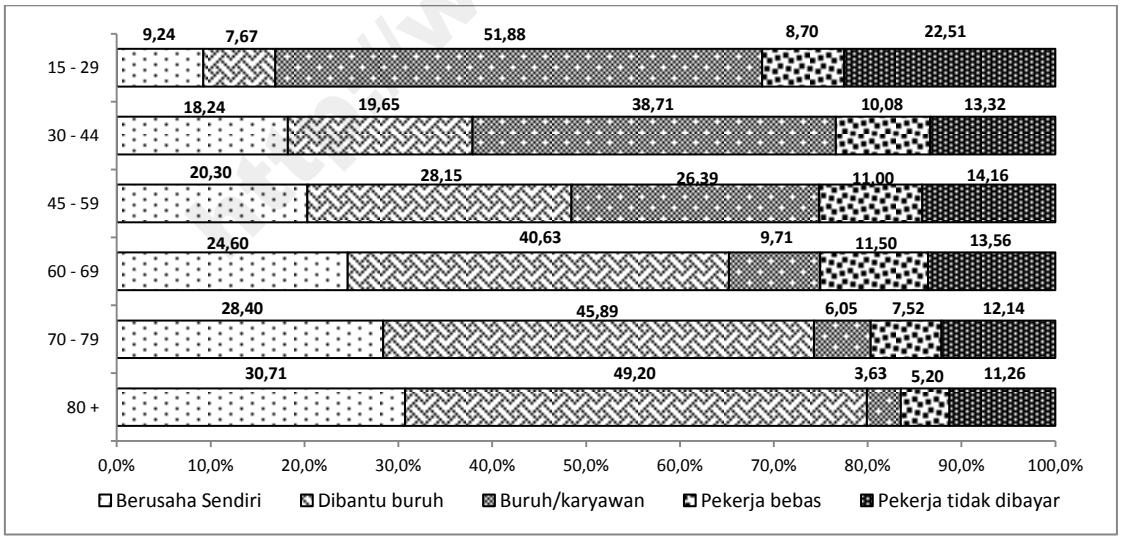

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Proporsi pekerja yang dibantu oleh buruh/karyawan semakin besar seiring dengan pertambahan kelompok umur, begitu pula dengan pekerja yang berusaha sendiri. Hal sebaliknya terjadi untuk pekerja berstatus sebagai buruh/karyawan yang mengalami penurunan proporsi seiring dengan

pertambahan kelompok umurnya. Sebanyak 3,63 persen pekerja lansia berumur 80 tahun ke atas berstatus buruh/karyawan, menurun dari 6,05 persen pada kelompok umur 70-79 tahun, dan 9,71 persen pada kelompok umur 60-69 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang bekerja secara terikat pada suatu perusahaan cenderung untuk melepaskan status buruh/karyawannya seiring dengan pertambahan usia. Mereka beralih profesi menjadi pekerja/pengusaha, baik sebagai pengusaha mandiri maupun dibantu buruh/karyawan.

Bila dilihat menurut provinsi, Tabel 6.5.3 lampiran memperlihatkan bahwa sebagian besar provinsi mempunyai struktur status pekerjaan yang sama dengan nasional, yaitu mayoritas lansia bekerja dengan status berusaha dibantu buruh. Namun terdapat, enam provinsi yang mayoritas lansianya mempunyai status pekerjaan berusaha sendiri, yaitu Provinsi Sulawesi Utara (44,75 persen), Kepulauan Riau (42,93 persen), Kepulauan Bangka Belitung (36,78 persen), DKI Jakarta (35.68 persen), Kalimantan Timur (35,22 persen), dan Banten (30,89 persen).

6.6 Jumlah Jam Kerja

Produktivitas seorang lansia dan peran aktifnya dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pula melalui jumlah jam kerja yang ditekuninya. Seyogianya, jam kerja lansia semakin menurun seiring dengan kondisi fisiknya yang mulai melemah. Partisipasi lansia dalam kegiatan ekonomi tidak diutamakan pada kuantitas jam kerjanya, melainkan lebih kepada kualitas kerja yang tercermin dari fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya.Namun pada kenyataannya, masih banyak lansia yang bekerja secara penuh atau jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu.

Gambar 6.9 memperlihatkan bahwa dari seluruh lansia bekerja, sebanyak 40,13 persen bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Pekerja lansia dengan jumlah jam kerja antara 15 hingga 35 jam dalam seminggu sebanyak 39,05 persen, sementara yang bekerja kurang dari 15 jam seminggu hanya 20,82 persen. Setengah dari pekerja lansia di perkotaan bekerja secara penuh lebih dari 35 jam seminggu, atau rata-rata lima jam per hari dalam tujuh hari atau tujuh jam per hari dalam lima hari. Sementara di perdesaan, satu dari tiga pekerja lansia bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu.

http://www.bps.go.id

Gambar 6.9
Persentase Lansia yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Kelompok Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu, 2013

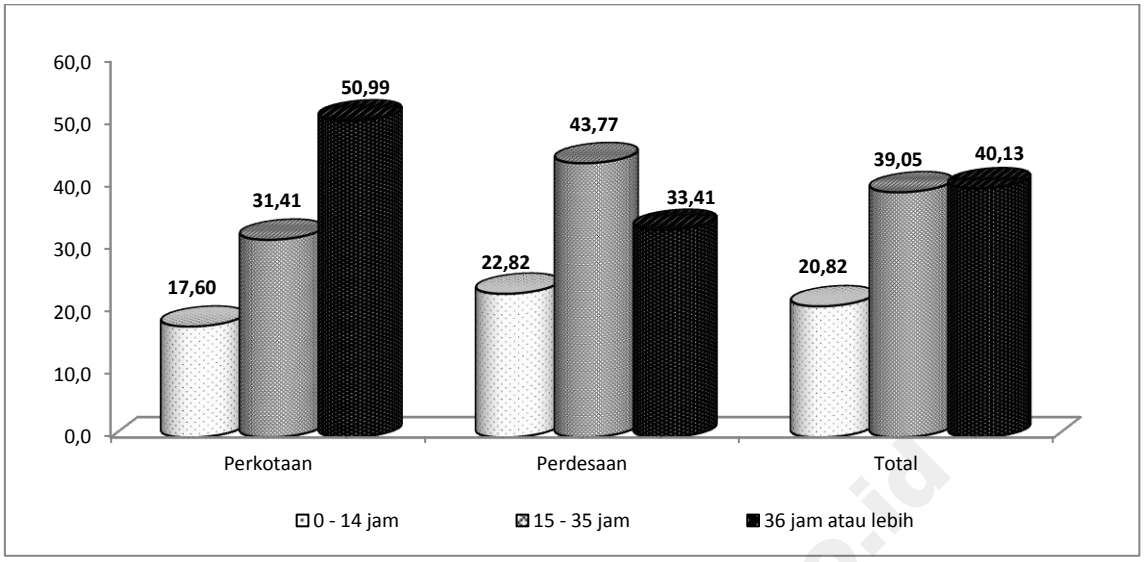

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Menurut jenis kelamin, persentase pekerja lansia laki-laki yang bekerja lebih dari 35 jam seminggu lebih besar daripada lansia perempuan. Sebanyak 44,95 persen pekerja lansia laki-laki bekerja secara penuh waktu, sementara pekerja lansia perempuan yang bekerja lebih dari 35 jam seminggu sebanyak 31,44 persen. Penduduk usia produktif yang bekerja lebih dari 35 jam seminggu sebanyak 57,77 persen, 15-35 jam seminggu sebanyak 28,69 persen, dan sisanya 13,53 persen yang bekerja kurang dari 15 jam seminggu.Sebanyak 62,44 persen pekerja laki-laki usia 15-59 tahun bekerja lebih dari 35 jam seminggu, sementara perempuan sebanyak 50,09 persen.

http://www.bps.go.id

Tabel 6.6
Persentase Lansia yang Bekerja menurut Kelompok Jumlah Jam Kerja, Kelompok Umur, dan Jenis Kelamin, 2013

Kelompok Jumlah jam kerja	Penduduk Usia 15-59 Tahun			Penduduk Lansia		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14 jam	11,65	16,63	13,54	17,58	26,66	20,82
15 – 35 jam	25,91	33,28	28,69	37,47	41,90	39,05
36 jam atau lebih	62,44	50,09	57,77	44,95	31,44	40,13
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Proporsi terkecil dari pekerja lansia yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu ditemukan di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu sebesar 13,79 persen. Di provinsi tersebut, sebanyak 43,73 persen pekerja lansia bekerja kurang dari 15 jam dalam seminggu, terbesar dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.6.3 lampiran. Adapun proporsi terbesar dari pekerja lansia yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu ditemukan di Provinsi DKI Jakarta (63,51 persen) dan Kalimantan Timur (60,35 persen). Sementara persentase terkecil dari pekerja lansia yang bekerja kurang dari 15 jam dalam seminggu adalah sebesar 9,31 persen di Provinsi Papua dan 9,94 persen di Kalimantan Timur.

6.7 Pendapatan Lansia

Tingkat kesejahteraan lansia yang bekerja dapat dilihat dari upah/gaji/ pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan yang diterima akan menjamin kesejahteraannya di hari tua karena lansia membutuhkan biaya ekstra untuk pemeliharaan kesehatan dan kebutuhan sosialnya. Selain itu, penghasilan yang memadai berarti penghargaan yang sepadan bagi jerih payah lansia yang telah bekerja. Hal tersebut akan memberikan kebanggaan dan kepuasan batin tersendiri bagi seorang lansia. Informasi mengenai pendapatan lansia ditanyakan kepada mereka yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, buruh/karyawan, dan pekerja bebas.

Tabel 6.7 memperlihatkan bahwa sebanyak 36,94 persen lansia yang bekerja memperoleh upah/gaji kurang dari 500 ribu rupiah dalam sebulan, bahkan lebih dari 70 persen yang memperoleh kurang dari satu juta rupiah dalam sebulan. Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada pekerja lansia perempuan, dimana sebanyak 84,94 persen di antaranya memperoleh pendapatan kurang dari satu juta rupiah dalam sebulan. Pekerja lansia yang memperoleh upah/gaji lebih dari 2,5 juta rupiah per bulan hanya sebesar 6,26 persen, dimana persentase pekerja lansia laki-laki (8,00 persen) lebih besar daripada perempuan (3,27 persen).

Lebih dari 78 persen lansia yang bekerja di daerah perdesaan hanya dibayar kurang dari satu juta rupiah dalam sebulan, sementara mereka yang bekerja di daerah perkotaan hampir mencapai 63 persen. Rendahnya upah/gaji yang diterima lansia mencerminkan rendahnya penghargaan yang

http://www.bps.go.id

diterima jika ia bekerja sebagai buruh/karyawan atau pekerja bebas. Adapun bagi lansia yang bekerja atau berusaha secara mandiri, rendahnya pendapatan tersebut mencerminkan terbatasnya kemampuan yang mereka miliki.

Tabel 6.7
Persentase Lansia yang Bekerja menurut Kelompok Pendapatan (ribuan rupiah),Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Upah/gaji/pendapatan (ribuan rupiah)						Jumlah
	< 500	500 - 999	1 000 - 1 499	1 500 - 1 999	2 000 - 2 499	> 2 500	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan							
- Laki-laki	20,03	34,36	15,22	12,29	6,19	11,91	100,00
- Perempuan	45,25	33,31	8,17	5,30	2,07	5,90	100,00
- Laki-laki + Perempuan	28,91	33,99	12,74	9,83	4,74	9,79	**100,00**
Perdesaan							
- Laki-laki	34,35	36,13	14,49	7,62	3,58	3,83	100,00
- Perempuan	62,15	28,67	4,84	2,41	1,09	0,84	100,00
- Laki-laki + Perempuan	45,07	33,25	10,77	5,61	2,62	2,68	**100,00**
Perkotaan + Perdesaan							
- Laki-laki	26,96	35,21	14,87	10,03	4,93	8,00	100,00
- Perempuan	54,04	30,90	6,44	3,79	1,56	3,27	100,00
- Laki-laki + Perempuan	36,94	33,62	11,76	7,73	3,69	6,26	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Sebanyak 62,15 persen lansia perempuan yang bekerja di daerah perdesaan memperoleh upah/gaji kurang dari 500 ribu rupiah dalam sebulan dan sebanyak 28,67 persen antara 500 hingga satu juta rupiah. Sisanya, yang memperoleh penghasilan di atas satu juta rupiah dalam sebulan tidak lebih dari sepuluh persen pekerja lansia perempuan. Sementara di perkotaan, hanya sebagian kecil (11,91 persen) lansia laki-laki yang bekerja memperoleh upah/gaji lebih dari 2,5 juta dalam sebulan. Sebagian besar dari mereka (69,61 persen) memperoleh upah/gaji kurang dari satu juta rupiah.

Gambar 6.10 memperlihatkan rata-rata upah/gaji/pendapatan yang diperoleh lansia yang bekerja menurut jabatan/jenis pekerjaan, dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Secara rata-rata, pendapatan dari lansia yang bekerja sebagai buruh, operator, dan pekerja kasar tidak mencapai 800 ribu rupiah dalam sebulan. Jauh lebih rendah daripada mereka yang masih berusia 15-59 tahun, dengan rata-rata upah/gaji sebesar 1,27 juta rupiah. Begitu pula dengan penduduk yang bekerja sebagai tenaga usaha dan jasa,

http://www.bps.go.id

rata-rata upah/gaji dari pekerja lansia (889 ribu rupiah) jauh lebih rendah daripada pekerja usia produktif (1,5 juta rupiah).

Gambar 6.10
Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan (ribuan rupiah) dari Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Kelompok Umur dan Jabatan/Jenis Pekerjaan, 2013

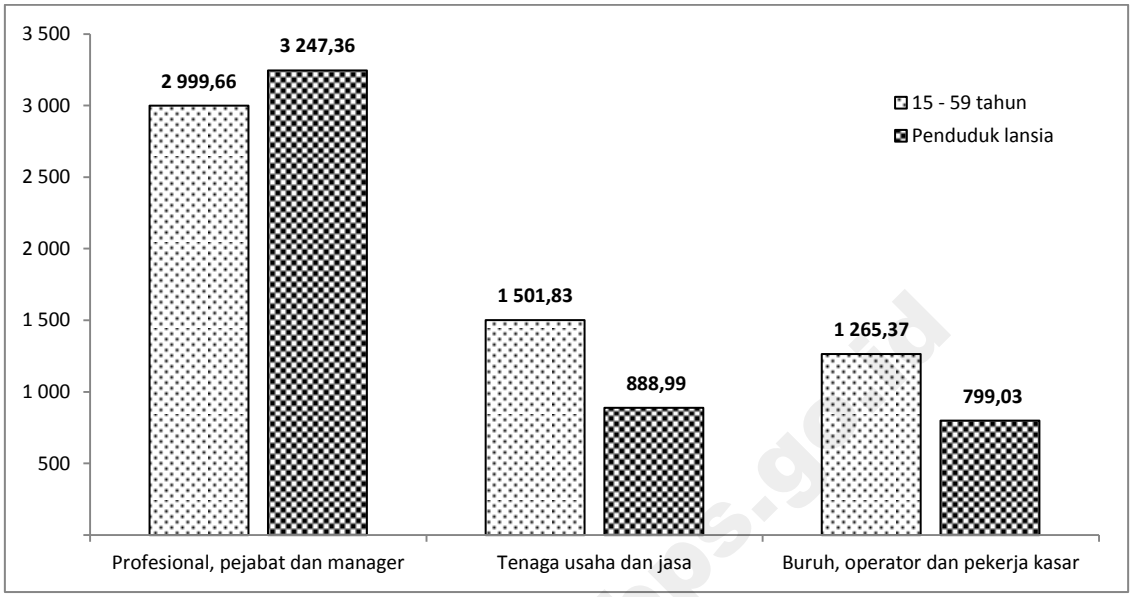

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

Fenomena sebaliknya terjadi pada mereka yang bekerja sebagai profesional, pejabat, dan manager, dimana pekerja lansia lebih dihargai daripada pekerja usia 15-59 tahun. Rata-rata upah/gaji/pendapatan dari lansia yang bekerja sebagai profesional, pejabat dan manager (3,25 juta rupiah) lebih tinggi daripada pekerja usia produktif (3,00 juta rupiah). Walaupun hanya sebanyak 3,35 persen (Tabel 6.4) dari seluruh pekerja lansia, jabatan profesional, pejabat, dan manager telah cukup menjamin terpenuhinya kebutuhan hari tua seorang lansia.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

KONDISI SOSIAL

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

7

KONDISI SOSIAL

Negara-negara di dunia menghadapi isu global dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia tua yang diakibatkan meningkatnya angka harapan hidup penduduk. Situasi ini memberikan dampak terhadap kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkannya. Permasalahan tersebut tidak hanya yang berkaitan dengan penyediaan perawatan medis yang berkualitas, melainkan perawatan khusus untuk perlindungan dan kepentingan lansia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteran Lanjut Usia Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa "Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar" (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190). Perlindungan terhadap lansia dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Aman dari berbagai gangguan yang timbul dari lingkungan (alam dan manusia), dan nyaman dalam menjalani hidup.

http://www.bps.go.id

7.1 Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan

Salah satu problem pokok yang dihadapi oleh kota besar dan kota-kota lainnya tanpa menutup kemungkinan terjadi di pedesaan adalah kriminalitas atau tindak kejahatan. Dalam berbagai acara berita di televisi, misalnya hampir setiap hari selalu ada berita mengenai tindak kejahatan. Hal ini tentunya cukup meresahkan bagi masyarakat.

Tindak kejahatan yang dilakukan sangat bervariasi, mulai dari pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya. Tindak kejahatan yang marak terjadi kian meresahkan masyarakat. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan keinginan-keinginan materiil tinggi, dan sering disertai ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan yang berlebihan tanpa didukung oleh kemampuan untuk mencapainya secara wajar akan mendorong individu untuk melakukan tindak kejahatan.

Lansia yang lemah dan hidup sendiri ataupun yang ada di lingkungan keluarganya sangat rentan terhadap kekerasan dan kejahatan. Faktor usia dan kondisi fisik lansia dianggap sebagai peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan karena para pelaku kejahatan berpikir para lansia tersebut tidak bisa berbuat apa-apa jika menjadi korban kejahatan.

Gambar 7.1
Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2010-2013

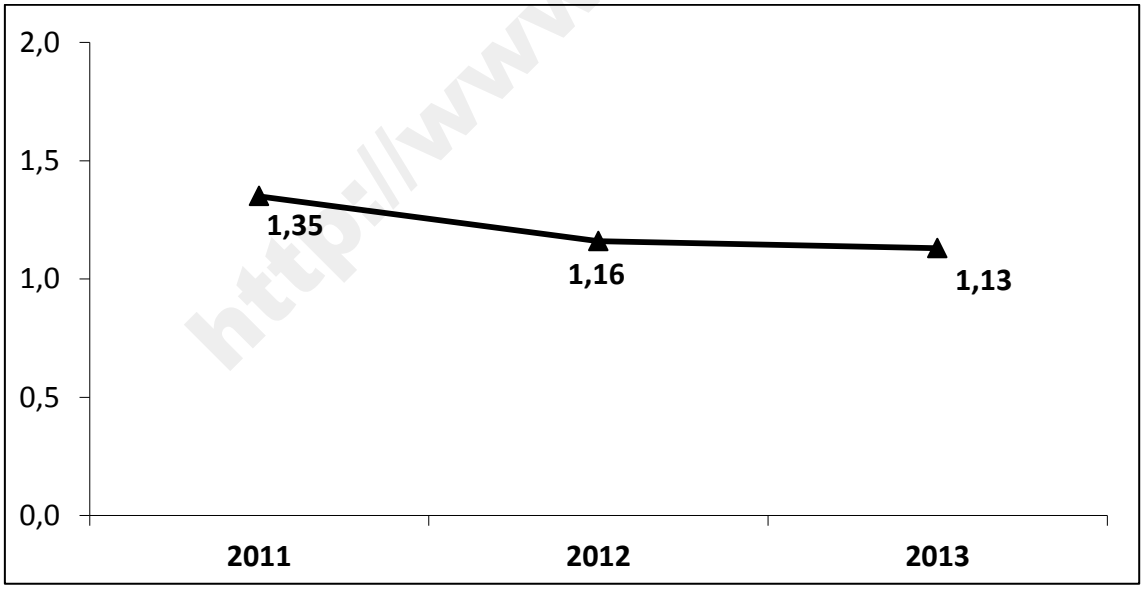

Sumber : BPS, Susenas Kor 2010-2013

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir persentase lansia yang menjadi korban kejahatan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Seperti yang disajikan pada Gambar 7.1, persentase lansia yang menjadi korban kejahatan pada tahun 2013 sebesar 1,13 persen. Angka tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun

2012 lansia yang menjadi korban kejahatan persentasenya sebesar 1,16 persen, dan tahun 2011 sebesar 1,35 persen.

Pada dasarnya tingkat kejahatan yang terjadi di perdesaan relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini terlihat dari tingginya persentase lansia yang menjadi korban kejahatan di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan (1,52 persen berbanding 0,80 persen), seperti yang tersaji pada Tabel 7.1. Kondisi yang serupa juga terlihat apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, dimana lansia laki-laki maupun perempuan di perkotaan yang menjadi korban kejahatan persentasenya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lansia di perdesaan.

Tabel 7.1
Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013

Tipe Daerah	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	1,76	1,31	1,52
Perdesaan	0,98	0,64	0,80
Perkotaan+Perdesaan	1,35	0,95	1,13

Sumber : BPS, Susenas Kor 2013

Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, secara umum persentase lansia laki-laki yang menjadi korban kejahatan lebih tinggi dibanding dengan lansia perempuan. Susenas tahun 2013 mencatat sebanyak 1,35 persen lansia laki-laki menjadi korban kejahatan. Angka ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan lansia perempuan yang menjadi korban kejahatan yang tercatat sebesar 0,95 persen. Gambaran yang serupa terlihat pada lansia laki-laki dan perempuan di perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, lansia laki-laki yang menjadi korban kejahatan sebesar 1,76 persen dan lansia perempuan sebesar 1,31 persen. Sedangkan lansia laki-laki yang menjadi korban kejahatan di perdesaan sebesar 0,98 persen dan lansia perempuan sebesar 0,64 persen.

Lampiran Tabel 7.1 mempelihatkan proporsi lansia yang menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir menurut provinsi. Provinsi Gorontalo

http://www.bps.go.id

merupakan provinsi yang memiliki persentase tertinggi untuk lansia yang menjadi korban kejahatan yaitu sebesar 3,25 persen, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,55 persen, dan Sulawesi Tengah sebesar 2,42 persen.

Jenis kejahatan yang paling sering dialami oleh lansia yang menjadi korban kejahatan adalah pencurian dengan persentase sebesar 66,32 persen (Tabel 7.2). Selain pencurian, jenis kejahatan lain yang banyak dialami oleh lansia adalah perampokan (14,59 persen) dan penipuan (12,72 persen).

Tabel 7.2
Persentase Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin, 2013

Jenis Kejahatan	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pencurian	70,84	58,75	66,32
Perampokan	11,19	20,28	14,59
Penipuan	12,59	12,93	12,72
Lainnya	5,37	8,03	6,37
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan pola antara jenis kejahatan yang dialami oleh lansia laki-laki dan perempuan. Jenis kejahatan yang banyak dialami oleh lansia laki-laki adalah pencurian (70,84 persen), penipuan (12,59 persen) dan perampokan (11,19 persen). Sementara itu jenis kejahatan yang banyak dialami oleh lansia perempuan yaitu pencurian, perampokan dan penipuan dengan persentase masing-masing sebesar 58,75 persen, 20,28 persen dan 12,93 persen.

7.2 Tempat Tinggal Lansia

Tempat tinggal/rumah pada dasarnya merupakan tempat hunian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, tidak terkecuali bagi lansia. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat

http://www.bps.go.id

fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, serta menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan fakir miskin juga mencakup upaya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH). Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Masalah perumahan telah diatur dalam undang undang pemerintahan tentang perumahan dan pemukiman yaitu UU Nomor 4 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23). Ditinjau dari sisi kelayakan, rumah dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu rumah layak huni, rumah hampir tidak layak huni ,dan rumah tidak layak huni.

http://www.bps.go.id

Tabel 7.3
Persentase Lansia menurut Kelayakan Rumah Tinggal,2011-2013

Kategori Kelayakan Rumah Tinggal	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Layak Huni	8,35	6,81	5,71
Hampir Tidak Layak Huni	14,92	13,69	12,48
Layak Huni	76,73	79,50	81,81
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2011-2013

Tabel 7.3 memberikan gambaran kelayakan rumah yang ditinggali oleh lansia. Pada tahun 2013, persentase lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni sebesar 5,71 persen, di rumah hampir tidak layak huni sebesar 12,48 persen, dan di rumah layak huni sebesar 81,81 persen.

Apabila diperhatikan perkembangannya dalam tiga tahun terakhir, terlihat adanya perkembangan yang cukup baik yaitu terjadi peningkatan persentase lansia yang tinggal di rumah layak huni. Pada tahun 2011 persentase lansia yang tinggal di rumah layak huni tercatat sebesar 76,73 persen. Pada tahun 2012 persentasenya naik menjadi 79,50 persen dan sebesar 81,81 persen di tahun 2013. Kondisi tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran membaiknya kondisi kesejahteraan lansia bila dilihat dari kelayakan rumah tinggalnya.

Lansia yang tinggal di daerah perkotaan memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tinggal di perdesaan dalam hal kelayakan rumah tinggal. Hal ini terlihat dari lebih tingginya persentase lansia di perdesaan yang tinggal di rumah tidak layak huni di bandingkan dengan lansia di perkotaan (8,01 persen berbanding 3,03 persen). Sedangkan lansia di perkotaan yang tinggal di rumah layak huni persentasenya sebesar 88,46 persen lebih tinggi daripada di perdesaan yang tercatat sebesar 76,10 persen.

Gambar 7.2
Persentase Lansia menurut Tipe Daerah dan Kelayakan Rumah Tinggal, 2013

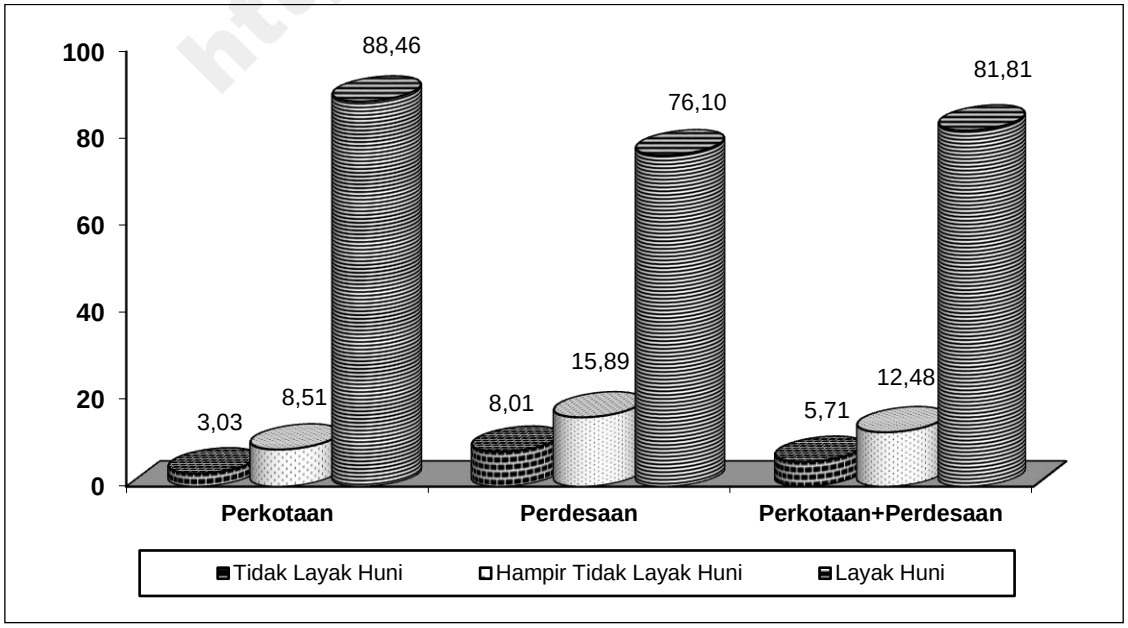

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Sebaran lansia menurut kelayakan rumah tinggal menurut provinsi disajikan pada Lampiran Tabel 7.3.3. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki persentase tertinggi dari lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni sebesar 27,70 persen, kemudian diikuti oleh Papua sebesar 14,04 persen, dan Sulawesi Barat sebesar 10,46 persen. Sedangkan provinsi yang memiliki persentase tertinggi lansia yang tinggal di rumah layak huni adalah Kepulauan Riau (97,11 persen), Kalimantan Timur (95,54 persen), dan Kepulauan Bangka Belitung (94,64 persen).

Rumah tinggal merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok. Memiliki dan tinggal di rumah sendiri merupakan impian bagi semua orang, tidak terkecuali bagi lansia. Memiliki hunian milik sendiri meskipun kecil akan terasa lebih nikmat ketimbang tinggal di rumah dengan luas bangunan yang besar namun bukan kepunyaan sendiri. Selain itu tinggal di rumah dengan status milik sendiri akan merasa lebih nyaman dibandingkan dengan menyewa, mengontrak, atau lainnya.

Pada Tabel 7.4 dapat dilihat bahwa sebagian besar (92,32 persen) lansia tinggal di rumah dengan status milik sendiri. Sedangkan sebesar 6,07 persen lansia tinggal di rumah dengan status lainnya seperti rumah bebas sewa, rumah dinas dan sebagainya, sebesar 0,98 persen lansia tinggal di rumah dengan status kontrak dan sebesar 0,64 persen lansia tinggal di rumah sewa.

http://www.bps.go.id

Tabel 7.4
Persentase Lansia menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal dan Tipe Daerah, 2013

Status Kepemilikan Tempat Tinggal	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	89,27	94,94	92,32
Kontrak	1,95	0,14	0,98
Sewa	1,27	0,10	0,64
Lainnya	7,52	4,82	6,07
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Berdasarkan tipe daerah tempat tinggal, terlihat adanya perbedaan pola status kepemilikan tempat tinggal antara lansia di perkotaan dengan di perdesaan. Persentase lansia yang tinggal di rumah dengan status milik sendiri di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan lansia di perkotaan (94,94 persen berbanding 89,27 persen). Sementara itu persentase lansia yang tinggal di rumah dengan status sewa, kontrak, atau lainnya di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

7.3 Lansia yang Bepergian

Bepergian saat ini sudah menjadi kebutuhan dan faktor pelengkap dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak lepas dengan adanya dorongan naluri manusia yang selalu ingin mengetahui dan mencari hal-hal yang baru, bagus, menarik, mengagumkan, dan menantang. Biasanya hal tersebut dilakukan dengan perjalanan ke luar daerah atau keluar dari kebiasaan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu.

Gambar 7.3
Proporsi Lansia yang Bepergian dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, 2013

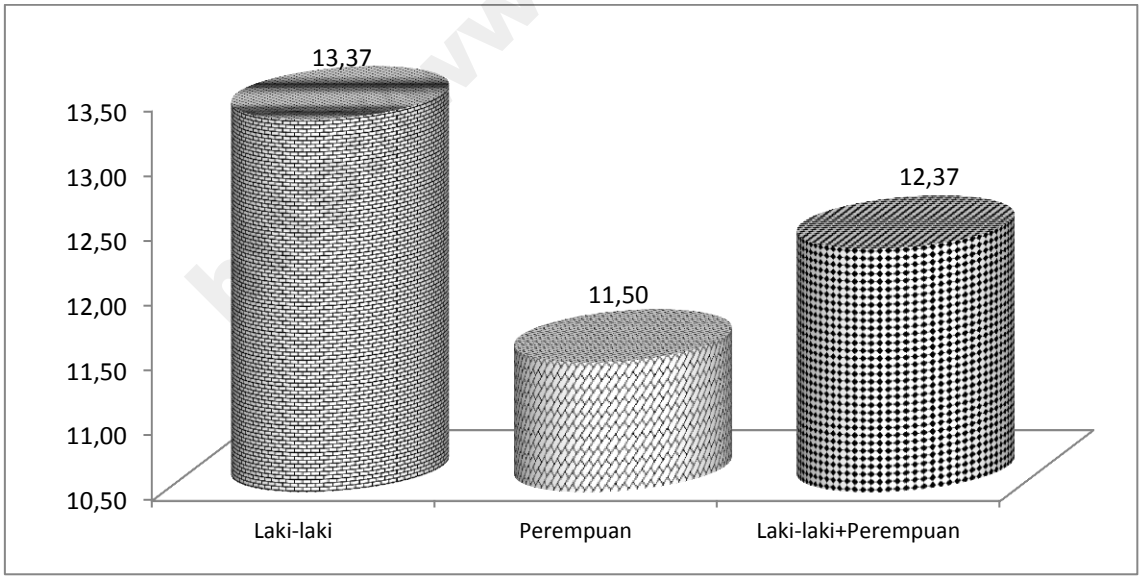

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Gambar 7.3 menyajikan proporsi lansia yang bepergian dalam tiga bulan terakhir. Berdasarkan hasil Susenas 2013, sebanyak 12,37 persen lansia bepergian dalam tiga bulan terakhir. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, tampak bahwa lansia laki-laki yang bepergian persentasenya

lebih besar dibanding dengan lansia perempuan. Lansia laki-laki yang bepergian tercatat sebanyak 13,37 persen, sedangkan lansia perempuan sebanyak 11,50 persen. Kebebasan bepergian dan waktu luang yang dimiliki laki-laki menyebabkan lebih tingginya persentase lansia laki-laki yang bepergian dibanding perempuan.

Pada dasarnya seseorang yang bepergian memiliki tujuan tertentu, baik karena keinginan sendiri maupun karena mengikuti orang lain. Tabel 7.5 memberikan gambaran tentang lansia yang bepergian menurut tujuan berpergian yang utama. Secara umum tampak bahwa sebagian besar dari lansia yang bepergian mempunyai tujuan untuk mengunjungi teman/keluarga. Persentase lansia yang bepergian dengan tujuan mengunjungi teman/ keluarga mencapai 80,13 persen. Sementara itu lansia yang bepergian dengan tujuan berlibur/rekreasi persentasenya sebesar 6,33 persen dan berziarah/kegamaan sebesar 5,39 persen.

Tabel 7.5
Persentase Lansia yang Bepergian menurut Tujuan Bepergian yang Utama dan Jenis Kelamin, 2013

Tujuan Bepergian yang Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berlibur/rekreasi	5,77	6,90	6,33
Profesi/bisnis	4,61	0,96	2,81
Kesehatan	3,25	2,22	2,74
Berziarah/keagamaan	4,65	6,14	5,39
Mengunjungi teman/ keluarga	78,73	81,57	80,13
Lainnya	2,99	2,21	2,60
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat adanya persamaan pola antara tujuan lansia laki-laki dan perempuan dalam berpergian. Seperti yang disajikan pada Tabel 7.5, baik lansia laki-laki maupun perempuan sebagian besar bepergian dengan tujuan untuk mengunjungi teman/keluarga dan berlibur/rekreasi. Persentase lansia perempuan bepergian dengan tujuan untuk mengunjungi teman/keluarga (81,57 persen) sedangkan lansia laki-laki

http://www.bps.go.id

(78,73 persen). Begitu pula dengan lansia yang bepergian dengan tujuan berlibur atau rekreasi, dimana persentase lansia perempuan dibanding lansia laki-laki adalah 6,90 persen berbanding 5,77 persen.

http://www.bps.go.id

PERLINDUNGAN SOSIAL

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

8

PERLINDUNGAN SOSIAL

Dalam kurun waktu 69 tahun sejak Indonesia merdeka telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat telah menyelenggarakan beberapa bentuk perlindungan sosial terutama bagi masyarakat yang tergolong rentan seperti penduduk miskin, lanjut usia, anak, penyandang disabilitas ganda (fisik dan mental) serta penduduk yang tinggal di kawasan terpencil. Krisis moneter yang dimulai pada tahun 1998 berdampak serius pada kelompok masyarakat yang rentan dan berakibat pada pelaksanaan program perlindungan sosial yang masif, misalkan penyediaan beras untuk masyarakat miskin (raskin).

Penduduk lanjut usia termasuk ke dalam kelompok rentan. Bila dilihat dari kondisi demografi, persentase penduduk lansia di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan terjadi pergeseran struktur penduduk Indonesia yang mengarah kepada struktur penduduk tua yaitu makin banyaknya penduduk lanjut usia (lansia). Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan/jaminan sosial bagi mereka dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi maupun sosial yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

UUD 1945 Pasal 28 H–ayat 3 (amandemen kedua) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”, dan Pasal 34 ayat 2 (amandemen keempat), bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang

http://www.bps.go.id

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Di samping itu, Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 juga menugaskan kepada presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Menurut Edi Suharto (2006) dalam "Memperkuat Perlindungan Sosial di ASEAN", Perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan (*vulnerability*) melalui perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan resiko-resiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan. Kebijakan dan program perlindungan sosial, khususnya untuk konteks negara-negara di kawasan ASEAN, mencakup lima jenis, yaitu: Pertama, kebijakan pasar kerja (*labour market policies*) yang dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan mempromosikan beroperasinya hukum penawaran dan permintaan kerja secara efisien; Kedua, bantuan sosial (*social assistance*), yakni program jaminan sosial (*social security*) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan; Ketiga, asuransi sosial (*social insurance*), yaitu skema jaminan sosial yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya berupa premi atau tabungan yang dibayarkannya; Keempat, jaring pengaman sosial berbasis masyarakat (*community-based social safety nets*) atau yang dikenal dengan istilah "skema mikro dan berbasis wilayah" (*micro and area-basedschemes*), perlindungan sosial ini diarahkan untuk mengatasi kerentanan pada tingkat komunitas; dan Kelima, perlindungan anak (*child protection*).

Pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan sosial rakyat terutama bagi penduduk lanjut usia telah menyelenggarakan beberapa bentuk perlindungan sosial. Gambaran umum mengenai pencapaian penyelenggaraan perlindungan sosial yang telah dilakukan pemerintah akan disajikan dalam bab

https://www.bps.go.id

ini. Jenis perlindungan sosial yang dicakup adalah bantuan sosial (*social assistance*), asuransi sosial (*social insurance*), dan kebijakan pasar kerja (*labour market policies*).

8.1 Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam menghadapi masa krisis ekonomi. Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi dan penyediaan pemakaman.

Salah satu bentuk bantuan sosial yang telah dilaksanakan pemerintah adalah pemberian subsidi beras bagi penduduk miskin. Raskin merupakan program bantuan pangan yang sudah dilaksanakan sejak Juli 1998 dengan tujuan awal menanggulangi kerawanan pangan akibat krisis moneter 1997/1998. Program ini berlanjut hingga saat ini dengan tujuan utama mengurangi beban rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program yang sebelum 2002 bernama Operasi Pasar Khusus (OPK) ini awalnya merupakan program darurat bagian dari jaring pengaman sosial (*social safety net*), namun kemudian fungsinya diperluas menjadi bagian dari program perlindungan sosial.

Tabel 8.1 menyajikan data mengenai karakteristik bantuan beras miskin yang diterima oleh rumah tangga lansia menurut tipe daerah. Proporsi rumah tangga lansia yang pernah mendapatkan bantuan beras miskin adalah sebesar

http://www.bps.go.id

60,43 persen dari seluruh rumah tangga lansia, di daerah perkotaan sebesar 48,15 persen dan perdesaan sebesar 71,02 persen.

Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin tahun 2013, yaitu 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp 1.600,-/kg di titik distribusi. Hasil Susenas 2013 menunjukkan rata-rata banyaknya beras yang diterima oleh satu rumah tangga kurang dari jumlah alokasi sasaran yang ditetapkan pemerintah. Beras yang dibeli untuk sebulan sebesar 5,55 kg per rumah tangga lansia, di perkotaan sebesar 5,21 kg dan di perdesaan sebesar 5,76 kg. Hal yang menyebabkan berkurangnya beras yang diterima adalah beras umumnya dibagi secara merata kepada hampir seluruh rumah tangga atau paling tidak kepada rumah tangga yang lebih banyak dari sasaran.

Tabel 8.1
Karakteristik Bantuan Beras Miskin (Raskin) yang Diterima oleh Rumah Tangga (RT) Lansia Selama 3 Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, 2013

Tipe Daerah	Proporsi RT Lansia yang Pernah Menerima/Membeli Raskin (%)	Rata-rata Banyaknya Raskin (Kg) yang dibeli per bulan pada 3 bulan terakhir	Rata-rata Harga per Kg Raskin yang Dibayar selama 3 bulan terakhir (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	48,15	5,21	2.153
Perdesaan (D)	71,02	5,76	2.093
K+D	60,43	5,55	2.117

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Demikian juga dengan rata-rata harga per kg beras miskin yang dibayar adalah sebesar Rp 2.117,- (di perkotaan sebesar Rp 2.153,- dan di perdesaan sebesar Rp 2.093,-) tidak sesuai dengan harga tebus yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan adanya perbedaan harga tersebut, salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah tingkat harga Raskin yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku di tingkat titik distribusi (TD), masalahnya tidak semua TD bisa sekaligus berfungsi sebagai titik bagi (TB), yakni titik terakhir yang

http://www.bps.go.id

berfungsi sebagai tempat RTS membeli Raskin. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan biaya tambahan untuk mendistribusikan beras dari TD ke TB.

8.2 Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 34(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jaminan sosial juga diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Universal Independent of Human Right* dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 Pasal 22 yaitu "Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara". Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab agar hak atas jaminan sosial dapat terpenuhi.

Tabel 8.2 menyajikan data jumlah dan proporsi rumah tangga lansia yang menerima jaminan sosial menurut tipe daerah. Jumlah rumah tangga lansia di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 14,92 juta rumah tangga. Sekitar 1 juta rumah tangga lansia menerima jaminan sosial atau 6,72 persen dari jumlah rumah tangga lansia. Dilihat dari tipe daerah, proporsi rumah tangga lansia yang menerima jaminan sosial di perkotaan (10,60 persen) jauh lebih besar daripada perdesaan (3,52 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sedikitnya rumah tangga lansia yang menerima jaminan sosial sehingga diperlukan perhatian lebih dari berbagai pihak agar lansia bisa memperoleh jaminan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan lansia. Akses dan fasilitas di perkotaan yang lebih memadai menyebabkan rumah tangga lansia di perkotaan lebih mudah untuk menerima jaminan sosial dibandingkan perdesaan.

http://www.bps.go.id

Tabel 8.2
Perkiraan Jumlah dan Proporsi Rumah Tangga (RT) Lansia yang Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah 2013

Tipe Daerah	Perkiraan Jumlah RT Lansia yang Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir	Perkiraan Jumlah Rumah Tangga Lansia	Proporsi RT Lansia yang Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	780 021	7 362 119	10,60
Perdesaan (D)	300 281	8 531 506	3,52
K+D	1 080 302	15 893 625	6,80

Sumber: BPS. Susenas Kor 2013

Berbagai jenis jaminan sosial banyak diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Gambar 8.1 menampilkan proporsi rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial jumlah rumah tangga menurut tipe daerah dan jenis jaminan sosial.

Gambar 8.1
Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Sosial 2013

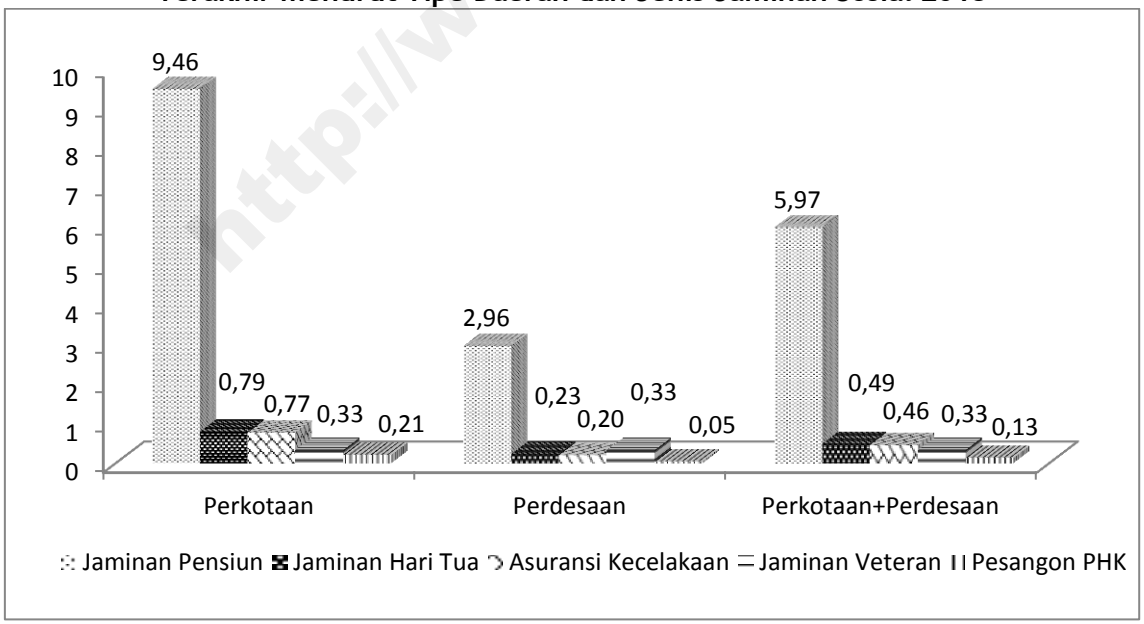

Sumber: BPS. Susenas Kor 2013

Hasil Susenas 2013 menunjukkan bahwa jaminan pensiun merupakan jenis jaminan yang paling banyak digunakan di Indonesia yaitu 5,97 persen, kemudian jaminan hari tua (0,49 persen) dan asuransi kecelakaan kerja (0,46

http://www.bps.go.id

persen). Pola yang hampir sama juga terlihat di daerah perkotaan maupun perdesaan, di daerah perkotaan jaminan pensiun (9,46 persen), jaminan hari tua (0,79 persen) dan jaminan asuransi kecelakaan kerja (0,77 persen). Sedangkan di derah perdesaan jaminan pensiun (2,96 persen), jaminan veteran (0,33 persen) dan jaminan hari tua (0,23 persen).

Program jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi. Hal tesebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 28H (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian pula dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Konstitusi *World Health Organization* (WHO) 1946 telah menegaskan pula bahwa memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi (fundamental) bagi setiap orang. Oleh karena itu negara bertanggung jawab untuk mengatur agar hak hidup sehat bagi penduduknya terpenuhi.

Tabel 8.3 menyajikan jumlah dan persentase rumah tangga lansia yang mempunyai jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan menurut tipe daerah. Sekitar 8,2 juta rumah tangga lansia atau 51,93 persen mempunyai jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Bila dilihat menurut tipe daerah, proporsi rumah tangga lansia yang mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan di daerah perkotaan (52,79 persen) lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan (51,19 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyaknya rumah tangga lansia yang belum mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan berarti diperlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah.

http://www.bps.go.id

Tabel 8.3
Perkiraan Jumlah dan Proporsi Rumah Tangga (RT) Lansia yang Memiliki Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan Selama Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah, 2013

Tipe Daerah	Perkiraan Jumlah RT Lansia yang Memiliki Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan	Perkiraan Jumlah Rumah Tangga Lansia	Proporsi RT Lansia yang Memiliki Jaminan Pembiayaan/ Asuransi Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	3 886 330	7 362 119	52,79
Perdesaan (D)	4 367 130	8 531 506	51,19
K+D	8 253 460	15 893 625	51,93

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Berbagai jenis jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan sudah banyak diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta seperti Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal (termasuk bantuan sosial); JPK PNS/Veteran/Pensiun, JPK Jamsostek, dan jaminan kesehatan lainnya (termasuk asuransi sosial).

Gambar 8.2
Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan. 2013

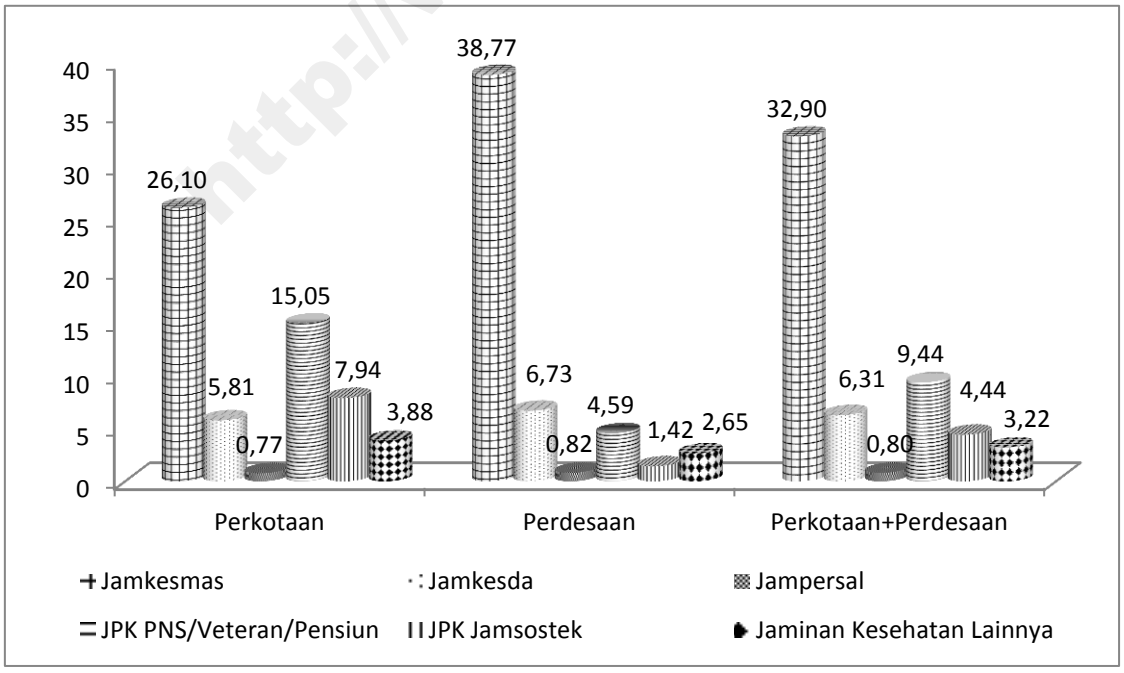

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Hasil Susenas 2013 yang ditunjukkan Gambar 8.2 memperlihatkan jenis jaminan pembiayan kesehatan yang digunakan rumah tangga lansia. Dari tabel tersebut terlihat Jamkesmas merupakan jenis jaminan pembiayan kesehatan yang banyak digunakan yaitu sebesar 32,90 persen, kemudian JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes) sebesar 9,44 persen dan Jamkesda sebesar 6,31 persen. Pola yang hampir sama juga terlihat baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, di perkotaan Jamkesmas, JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes), dan JPK Jamsostek masing-masing sebesar 26,10 persen; 15,05 persen; dan 7,94 persen. Sedangkan di perdesaan untuk Jamkesmas, Jamkesda, dan JPK PNS/Veteran/Pensiun (Askes) berturut-turut sebesar 38,77 persen; 6,73 persen; dan 4,59 persen.

8.3 Kebijakan Pasar Kerja (*Labour Market Policies*)

Umumnya lansia di Indonesia masih dapat melakukan berbagai aktivitas dan masih banyak berperan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tidaklah mengherankan bila lansia di Indonesia masih banyak yang bekerja, kemudian pula yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Banyaknya lansia yang masih bekerja disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang relatif masih besar, serta secara fisik dan mental lansia tersebut masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan ekonomi yang relatif besar pada lansia kemungkinan disebabkan tidak atau belum adanya jaminan sosial ekonomi yang memadai bagi lansia.

Idealnya bagi lansia yang bekerja mempunyai pekerjaan tersebut yang sesuai dengan kondisi fisik dan mental, sedangkan bagi lansia yang tidak bekerja diharapkan kesejahteraan mereka juga masih tetap mendapat perhatian. Jika kondisi seperti ini dapat terwujud dengan baik, maka berbagai pandangan bahwa lansia bergantung kepada anggota rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan dapat dikurangi.

Salah satu cara mewujudkan kebijakan pasar kerja (*labour market policies*) yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh penduduk lansia adalah dengan mengadakan program PNPM Mandiri dan Program lainnya (seperti: Program Pemberdayaan Ekonomi

http://www.bps.go.id

Masyarakat Pesisir (PEMP), Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dan lain-lain).

Tabel 8.4
Jumlah dan Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Menerima PNPM Mandiri dan Program Lainnya dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah, 2013

Tipe Daerah	Jumlah RT Lansia yang Menerima PNPM Mandiri dan Program Lainnya	Jumlah Rumah Tangga Lansia	Persentase RT Lansia yang Menerima PNPM Mandiri dan Program Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K)	100 679	7 362 119	1,37
Perdesaan (D)	220 700	8 531 506	2,59
K+D	321 379	15 893 625	2,02

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Hasil Susenas 2013 memberikan gambaran mengenai rumah tangga lansia yang menerima bantuan dari kedua program pemerintah dalam setahun terakhir (Tabel 8.4.). Rumah tangga lansia yang menerima bantuan dari kedua program tersebut ada sekitar 321 ribu rumah tangga atau 2,02 persen dari seluruh rumah tangga lansia. Bila dilihat menurut tipe daerah, di daerah perkotaan yang menerima bantuan tersebut adalah sekitar 100 ribu rumah tangga (1,37 persen) lebih kecil dibandingkan dengan daerah perdesaan (220 ribu rumah tangga atau 2,59 persen).

http://www.bps.go.id

Tabel 8.5
Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bantuan dari Kebijakan Pasar Kerja dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Program, 2013

Tipe Daerah	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	Program pemerintah lainnya
(1)	(2)	(3)
Perkotaan (K)	1,08	0,31
Perdesaan (D)	2,21	0,45
K+D	1,68	0,38

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

Tabel 8.5 menyajikan persentase rumah tangga lansia yang menerima bantuan dari kedua program pemerintah tersebut dalam setahun terakhir. Jumlah rumah tangga lansia yang menerima bantuan dari kedua program tersebut relatif sangat kecil, yaitu PNPM Mandiri (1,68 persen) dan program pemerintah lainnya (0,38 persen). Bila dilihat menurut tipe daerah, pemberian bantuan melalui Program PNPM Mandiri di daerah perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu 2,21 persen dan 1,08 persen. Pola yang sama juga terlihat untuk program pemerintah lainnya, yaitu di perdesaan sebesar 0,45 persen dan di perkotaan sebesar 0,31 persen.

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

PROGRAM PEMBERDAYAAN LANSIA

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

9

PROGRAM PEMBERDAYAAN LANSIA

http://www.bps.go.id

Kepedulian terhadap para lansia merupakan tanggungjawab bersama. Untuk itu, dibutuhkan upaya yang berkesinambungan dari berbagai pihak agar masalah kesejahteraan sosial lansia tidak menjadi permasalahan sosial di kemudian hari. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia melalui berbagai program.

Berbagai macam kegiatan pemberdayaan bagi lansia telah menjadi program kementerian/dinas/lembaga, baik di pusat maupun daerah. Program diharapkan dapat menyentuh kepentingan dan mempunyai nilai lebih bagi lansia. Program diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial bagi para lanjut usia yang mengalami hambatan medis, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dari hasil kunjungan pada kementerian/instansi/lembaga terkait lansia di pusat, dan kunjungan pada dinas terkait di daerah yang dilakukan di tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat, diperoleh informasi beberapa program yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan lansia antara lain :

1. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar (ASLUT)

Program ASLUT merupakan salah satu program pusat dari Kementerian Sosial RI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga sekarang. Program ini bertujuan untuk membimbing, mendampingi, dan mengarahkan lanjut usia

yang telah mendapatkan bantuan di daerahnya masing-masing, sehingga diharapkan lansia terdampingi dalam mengatasi berbagai masalah dan kebutuhannya, meningkatkan kemampuan lansia untuk mengatasi masalahnya sendiri, dan mengurangi masalah yang dihadapi oleh lansia yang didampingi.

Program diberikan dalam bentuk bantuan bersumber dari dana APBN, berupa uang tunai senilai Rp 200.000,- per bulan. Penyaluran dana dilakukan melalui PT. Pos untuk kemudian diteruskan oleh petugas pembayar dari PT Pos bersama pendamping lansia yang telah ditunjuk, mengantar bantuan ke tempat tinggal lansia.

Program ASLUT telah dilaksanakan di semua provinsi. Pada tahun 2013 terdapat 1300 orang penerima ASLUT di Provinsi Jawa Timur yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

2. Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Program UEP merupakan salah satu program pusat dari Kementerian Sosial RI berupa layanan sosial kepada lansia potensial yang masih aktif, kreatif, dan produktif, dengan memberikan bimbingan/pelatihan, bantuan modal dan pendampingan sehingga lansia tersebut bisa berkarya membangun usaha yang setidaknya dapat menjadi sumber penghasilan bagi dirinya. Jenis usaha yang dilakukan sesuai kemampuan lansia dan pangsa pasar, baik dalam bentuk usaha kelompok maupun individu.

Di Jawa Timur program ini diberikan bergilir setiap tahun di beberapa kabupaten/kota. Pada tahun 2013 diberikan kepada 5 kabupaten/kota masing masing 20 orang lansia dengan besaran bantuan Rp.1.500.000,- per orang.

3. Program Pendampingan dan Perawatan Lansia di Rumah (*Home Care*)

Program *Home Care* merupakan salah satu program pusat dari Kementerian Sosial RI. Program ini merupakan pelayanan lansia yang dilakukan di luar panti sosial (lansia didatangi ke rumah), bertujuan untuk membantu keluarga dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah lansia sekaligus memberi kesempatan kepada lansia untuk tetap tinggal dalam keluarganya. Program ini memiliki beberapa fungsi antara lain pencegahan, promosi, rehabilitasi, dan perlindungan serta pemeliharaan. *Home care* lanjut

http://www.bps.go.id

usia membangun kemitraan lintas disiplin antara lain pekerja sosial, dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, rohaniawan, guru, pemandu kebugaran jasmani. Kemitraan lintas sektor antara lain pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha. Sasaran pelayanan meliputi lansia rentan, lansia telantar, lansia tinggal sendiri, lansia miskin, lansia dengan keterbatasan mobilitas, lansia penyandang cacat ringan atau berat, lansia pasca perawatan di rumah sakit.

Berdasarkan laporan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, program ini dilaksanakan di Kota Surabaya selama 8 bulan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 50 orang.

4. Pelayanan Harian Lanjut Usia (Day *Care Service*)

Program Pelayanan Harian Lanjut Usia *(Day Care Service)* salah satu program pusat dari Kementerian Sosial RI, merupakan pelayanan lansia luar panti yang ditangani secara profesional, terencana, terarah, dan terpadu sehingga dapat lebih efektif. Tujuannya antara lain untuk membantu memberikan pelayanan kepada lansia, memenuhi kebutuhan lansia, meningkatkan kemampuan lansia untuk mengembangkan diri dalam menghadapi proses ketuaan, membentuk hubungan dan kerjasama harmonis antara lansia, keluarga, masyarakat, dan lembaga Pelayanan Harian Lanjut Usia (PHLU), serta untuk mengurangi rasa kecemasan yang timbul dalam diri lansia.

Salah satu bentuk pelayanan sosial lansia dalam program ini adalah dengan mengadakan kegiatan di panti, dimana lansia datang ke panti sosial pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Selama di panti lansia melakukan kegiatan bersama-sama dengan lansia lainnya. Kegiatan yang dilakukan berupa aktivitas di bidang ekonomi, pendidikan (membaca, menulis), kegiatan spiritual, dan lain-lain. Kegiatan bersama tersebut dilaksanakan 7 - 8 jam per kegiatan.

Pada tahun 2013 Program Pelayanan Harian Lanjut Usia di Jawa Timur diberikan kepada lansia melalui UPT Lansia Jombang di Kabupaten Jombang dan Karang Werda Yudistira di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah penerima manfaat masing-masing sebanyak 40 orang selama 8 bulan.

http://www.bps.go.id

5. Bantuan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Program ini bertujuan untuk membantu baik perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat melalui LKS lanjut usia yang membutuhkan guna melindungi dari terjadinya penurunan kualitas hidup lanjut usia. Bantuan sosial melalui LKS juga merupakan salah satu program pusat dari Kementerian Sosial RI dengan memberikan bantuan kepada lansia berupa bantuan uang tunai sebesar Rp 1.095.000 per orang per tahun melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pada tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur, bantuan tersebut telah disampaikan oleh Dinas Sosial kepada 1.185 lansia melalui 23 yayasan dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia yang berada di 15 kabupaten/kota.

6. Pelayanan sosial Lanjut Usia dalam Situasi Darurat

Pelayanan sosial Lanjut Usia dalam Situasi Darurat merupakan program Kementerian Sosial RI berupa pelayanan sosial kedaruratan bagi lanjut usia, menjamin perlindungan dan memulihkan kesejahteraan para lanjut usia dalam situasi darurat baik akibat terjadinya bencana maupun oleh sebab lain, misalnya dikarenakan perlakuan salah seperti penelantaran, penipuan, tindak kekerasan, diskriminasi dan kasus khusus lainnya.

Kegiatan pelayanan sosial kedaruratan bagi lanjut usia tersebut antara lain: penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi psikologis, pemulihan kondisi sosial, intervensi krisis, advokasi, dan rujukan.

Bantuan/santunan sosial yang diberikan berupa uang santunan, sembako dan kebutuhan lansia lainnya. Bantuan tersebut dapat diberikan kepada perorangan, kelompok maupun lembaga.

7. Bantuan Bedah Kamar Lansia

Bantuan bedah kamar merupakan program Kementerian Sosial RI guna memberikan tempat tinggal yang layak bagi lansia. Pada tahun 2013 bantuan bedah kamar di Provinsi Jawa Timur diberikan kepada 70 orang lansia di 3 kabupaten yaitu Banyuwangi, Pacitan dan Gresik dengan bantuan sebesar 10 juta per orang.

http://www.bps.go.id

8. Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagai wadah kegiatan bagi keluarga lansia dan keluarga yang memiliki lansia untuk berusaha meningkatkan kegiatan dan keterampilan keluarga dalam memberikan pelayanan, perawatan dan pengakuan yang layak sebagai orang tua bagi lansia tidak potensial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga lansia melalui kegiatan pemberdayaan, pembinaan, serta pengembangan potensi bagi lansia.

Melalui kelompok BKL, lansia akan mendapatkan penyuluhan-penyuluhan dari Kader BKL yang sifatnya selain menambah pengetahuan juga memberi dorongan, bahkan sebagai konsultan dan mediator. Bentuk kegiatan di dalam BKL diantaranya :

- Kegiatan kepedulian kepada sesama, misalnya memberikan santunan kepada sesama, melakukan silaturahmi, mengunjungi lansia yang sakit, melayat lansia yang meninggal,
- Kegiatan sosial kemasyarakatan bagi lansia misalnya kegiatan spiritual di bidang keagamaan, gotong royong, bakti sosial, kegiatan ekonomi produktif, penyaluran hobi bakat, menjadi guru tamu, menjadi orang tua asuh.

Pemberdayaan lansia juga menjadi program spesifik wilayah yang pendanaannya bersumber dari APBD ataupun swadaya masyarakat. Beberapa program tersebut yaitu:

1. Karang Lansia

Pembentukan karang lansia dimaksudkan untuk membentuk sebuah wadah yang dapat menampung kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap lanjut usia serta menyediakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi para lanjut usia. Sehingga dengan adanya karang lansia diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan kepedulian masyarakat terhadap kaum lanjut usia. Kegiatan yang terdapat dalam karang lansia antara lain posyandu lansia, pembinaan keagamaan/pengajian, dan rekreasi.

http://www.bps.go.id

Salah satu bentuk pelaksanaan dari program ini adalah didirikannya Karang Werda, yang merupakan wadah atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menampung kegiatan para lansia. Karang werda dibentuk di desa/kelurahan dengan Surat Keputusan Camat dan menjadi lembaga sosial kemasyarakatan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan lansia. Pengkoordinasian karang werda dilakukan oleh forum kerjasama karang werda yang merupakan jaringan kerjasama antar karang werda pada lingkup kecamatan. Pembinaan karang werda dilakukan oleh Gubernur, Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Karang werda dapat ditemui di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, di Kota Surabaya Karang Werda sudah ada di setiap desa/kelurahan.

2. Rumah Sehat Lansia

Rumah sehat lansia sebelumnya merupakan Pustu (Puskesmas pembantu), namun karena jaraknya berdekatan dengan Puskesmas maka dialihfungsikan menjadi Rumah Sehat Lansia. Program ini baru berjalan pada akhir 2012. Rumah sehat lansia memberikan konsultasi spesialis untuk lansia. Setiap puskesmas mengirimkan lansia secara bergilir ke rumah sehat lansia untuk konsultasi setiap harinya. Selain itu, rumah sehat lansia juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Sarjito dengan mengadakan konsultasi Geriatri setiap hari Rabu dan Sabtu.

Program serupa juga dapat ditemui di Jawa Timur, berupa poli khusus bagi lansia di RS. Dr. Sutomo Surabaya, yaitu Poli Geriatri (Geriatri ialah kumpulan gejala dan atau tanda klinis dari satu atau lebih penyakit yang dimiliki oleh pasien lansia).

3. Puskesmas Santun Lansia

Puskesmas santun lansia, dimana lansia mendapatkan layanan prioritas. Pelayanan kepada lansia mulai dari pendaftaran sampai mendapat obat dilaksanakan satu paket di satu ruang. Sehingga lansia tidak perlu berpindah tempat dan antre lagi untuk pelayanan lainnya dalam puskesmas. Bila tidak ada ruang khusus maka lansia dilayani di poli umum tetapi pelayanannya didahulukan. Sedikitnya terdapat satu puskesmas santun lansia di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Beberapa puskesmas di Kota Yogya juga

http://www.bps.go.id

merupakan Puskesmas Santun Lansia. Puskesmas ini memiliki loket yang terpisah antara lansia dan non lansia, selain itu ada pelayanan psikologi lansia yang diadakan 3 kali dalam seminggu.

4. Pembinaan Lansia Berbasis Masyarakat

Kegiatan ini merupakan kerjasama beberapa instansi terkait di Provinsi Bali, seperti: Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS), Kanwil Agama Provinsi Bali, dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Rangkaian kegiatan meliputi:

- Penyuluhan dari Kanwil Agama Provinsi Bali, Dinas Sosial Provinsi Bali, dan BKKS mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam memperhatikan para lansia.
- Olahraga senam lansia secara rutin
- Pemeriksaan/pelayanan kesehatan
- Pemeriksaan mata dan pemberian kaca mata gratis serta operasi katarak oleh Rumah Sakit Indra.

Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada lansia binaan agar menjadi lansia yang sehat dan berguna seerta mampu menolong diri sendiri dan mengurangi beban pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat melaksanakan perannya dalam keluarga sebagai penasehat, pembimbing dan panutan bagi keluarga serta generasi penerusnya.

5. Posyandu Lansia

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap sebulan sekali, pemberian makanan tambahan serta pelaksanaan senam lansia dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali tergantung masing-masing posyandu lansia. Selain kegiatan kesehatan, posyandu lansia juga menyelingi kegiatan dengan keterampilan dan pelatihan. Pembentukan posyandu lansia di bawah pembinaan Puskesmas.

6. Pemotongan Biaya Pengobatan

Program ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2010 tentang Retribusi

http://www.bps.go.id

Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, untuk pasien lanjut usia mendapatkan pengurangan retribusi sebesar 60 persen dari tarif retribusi pengobatan umum, dan pengurangan sebesar 50 persen dari tarif retribusi tindakan.

7. Bimbingan Lansia Telantar Di Luar Panti

Program ini dilaksanakan di Provinsi Bali. Kegiatan yang dilakukan berupa pemberian bantuan modal usaha kepada lansia telantar dengan sumber dana dari APBD. Pada tahun 2012 diberikan bantuan modal usaha berupa alat-alat untuk penyewaan tenda dan kursi kepada kelompok lansia di Kecamatan Denpasar Timur. Pada tahun 2013, pemberian modal ternak babi kepada 30 lansia telantar di Kecamatan Denpasar Utara, masing-masing 1 ekor babi.

8. Taman Lansia

Taman lansia berfungsi sebagaimana taman kota. Di sela warna warni tanaman disediakan *track* yang khusus dibuat untuk kenyaman kusi roda para lansia, ada *track* khusus dengan batuan sebagai alat refleksi, ada pula tempat duduk untuk pengantar saat menemani para lansia menikmati suasana kota. Taman lansia salah satunya dapat ditemui di Jalan Kalimantan di Kota Surabaya, taman lansia di sebelah Gedung Sate Bandung.

http://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Bustan MN. 2007. *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Rineka

Jalal, Fasli, Nina Sardjunani. 2006. *Ringkasan- Pendidikan untuk Semua Keaksaraan bagi kehidupan*.

Kementerian Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2013. *Lembar Informasi Dan Sosialisasi Program Raskin 2013*. http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Lembar_Sosialisasi_1_Program_2013_clean.pdf. (diakses 13 Agustus 2014).

Kementerian Sosial. 2009. *Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos. (diakses 1 Sepetember 2014).

Majelis Umum PBB. 1948. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. https://www.kontras.org/baru/Deklarasi_Universal HAM.pdf. (diakses 13 Agustus 2014).

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*. https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/uud-nri-tahun-1945-dalam-satu-naskah. (diakses 1 September 2014).

Manus, L.Th. dkk. 1980. *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Utara*.

Nugroho, Wahyudi, SKM. 2000. *Keperawatan Gerontik Edisi 2*. Jakarta: EGC

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_92.htm. (diakses 1 September 2014).

Republik Indonesia. 2012. *Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013*. http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/uuapbn2013.pdf. (diakses 13 Agustus 2014).

http://www.bps.go.id

Simanullang, Poniyah dkk. 2011. *Pengaruh Gaya Hidup terhadap Status Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) di Wilayah Kerja Puskesmas Darusalam Medan*. Medan: USU.

Suharto Edi. 2006. *Memperkuat Perlindungan Sosial di Asean*. http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=199. (diakses 1 Sepetember 2014).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

World Health Organization. 2006. *Constitution Of The World Health Organization*. http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf. (diakses 1 September 2014).

http://www.bps.go.id

LAMPIRAN
TABEL

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

Tabel 3.1.1 Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2013

Laki-laki

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)					
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	9,14	2,97	3,58	1,48	0,39	5,45
Sumatera Utara	10,35	3,36	3,82	1,41	0,45	5,67
Sumatera Barat	10,44	4,27	4,82	1,91	0,76	7,50
Riau	9,61	2,98	3,02	1,02	0,32	4,36
Jambi	10,97	3,15	3,90	1,45	0,52	5,87
Sumatera Selatan	10,14	3,65	4,07	1,55	0,60	6,22
Bengkulu	11,52	3,25	3,84	1,49	0,62	5,95
Lampung	11,03	3,67	4,56	1,95	0,86	7,37
Kep. Bangka Belitung	10,83	3,79	4,04	1,45	0,47	5,96
Kep. Riau	9,20	2,60	2,59	0,79	0,34	3,72
DKI Jakarta	10,99	4,06	4,02	1,40	0,23	5,66
Jawa Barat	11,40	3,80	4,65	1,90	0,63	7,18
Jawa Tengah	13,19	4,79	6,19	3,04	1,10	10,32
DI Yogyakarta	13,45	4,74	6,59	3,98	1,33	11,90
Jawa Timur	13,56	5,04	6,37	2,81	0,85	10,03
Banten	10,63	3,10	3,28	1,08	0,35	4,71
Bali	12,43	4,42	5,79	2,80	0,81	9,40
Nusa Tenggara Barat	10,25	3,38	4,59	1,78	0,81	7,19
Nusa Tenggara Timur	9,31	3,32	4,29	2,08	0,72	7,09
Kalimantan Barat	10,29	3,46	4,21	1,67	0,39	6,27
Kalimantan Tengah	10,64	2,99	3,31	1,08	0,46	4,85
Kalimantan Selatan	10,76	3,62	3,81	1,39	0,35	5,54
Kalimantan Timur	10,89	3,57	3,43	1,09	0,23	4,75
Sulawesi Utara	12,48	4,97	5,52	2,17	0,68	8,37
Sulawesi Tengah	10,70	3,49	4,32	1,90	0,56	6,78
Sulawesi Selatan	10,19	3,61	4,78	2,13	0,68	7,59
Sulawesi Tenggara	8,66	3,02	3,73	1,42	0,50	5,65
Gorontalo	10,80	3,06	4,13	1,57	0,34	6,03
Sulawesi Barat	8,56	2,94	3,79	1,56	0,52	5,87
Maluku	8,95	3,63	3,92	1,59	0,56	6,07
Maluku Utara	9,30	3,10	3,65	1,21	0,30	5,16
Papua Barat	9,52	2,61	2,80	0,88	0,15	3,83
Papua	10,05	2,56	2,06	0,55	0,17	2,78
Indonesia	**11,48**	**3,96**	**4,79**	**2,03**	**0,67**	**7,49**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.1.2 Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2013

Perempuan

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)					
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	9,61	2,90	3,89	1,86	0,78	6,53
Sumatera Utara	11,06	3,67	4,29	1,94	0,77	7,00
Sumatera Barat	11,28	4,39	5,16	2,79	1,36	9,31
Riau	9,31	2,64	2,94	1,17	0,45	4,55
Jambi	10,74	3,04	3,76	1,61	0,77	6,13
Sumatera Selatan	10,44	3,60	4,24	1,96	0,80	7,00
Bengkulu	10,79	3,09	3,82	1,66	0,82	6,31
Lampung	11,46	3,37	4,50	2,26	0,89	7,64
Kep. Bangka Belitung	10,86	3,49	4,03	1,82	0,87	6,71
Kep. Riau	7,59	2,26	2,57	1,03	0,22	3,82
DKI Jakarta	11,78	3,41	4,18	1,54	0,45	6,17
Jawa Barat	10,98	3,61	4,77	2,38	0,84	7,99
Jawa Tengah	13,42	4,75	6,48	3,86	1,54	11,88
DI Yogyakarta	13,50	5,05	7,37	4,72	2,37	14,46
Jawa Timur	13,98	4,93	6,69	3,73	1,44	11,86
Banten	10,38	2,68	3,29	1,42	0,49	5,20
Bali	12,15	4,52	6,26	3,16	1,33	10,76
Nusa Tenggara Barat	10,62	3,40	4,59	2,26	0,72	7,57
Nusa Tenggara Timur	10,06	3,41	4,58	2,15	0,97	7,70
Kalimantan Barat	10,28	3,40	4,22	1,76	0,50	6,48
Kalimantan Tengah	10,54	2,42	3,20	1,27	0,52	5,00
Kalimantan Selatan	11,52	2,99	4,18	1,78	0,78	6,74
Kalimantan Timur	10,99	2,54	3,03	1,02	0,51	4,56
Sulawesi Utara	13,03	4,56	5,80	3,14	1,01	9,95
Sulawesi Tengah	10,76	3,26	4,38	2,10	0,68	7,15
Sulawesi Selatan	10,84	3,60	5,48	2,91	1,06	9,45
Sulawesi Tenggara	8,88	2,97	3,75	1,83	0,90	6,48
Gorontalo	10,96	3,38	4,64	1,91	0,57	7,12
Sulawesi Barat	9,00	3,09	3,98	1,76	0,91	6,65
Maluku	9,37	3,72	4,08	2,00	0,59	6,67
Maluku Utara	9,21	3,09	3,33	1,37	0,52	5,22
Papua Barat	9,48	2,33	2,43	0,72	0,26	3,42
Papua	8,66	1,91	1,63	0,56	0,12	2,31
Indonesia	**11,65**	**3,83**	**5,02**	**2,58**	**1,00**	**8,61**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.1.3 Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2013

Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)					
	45-54	55-59	60-69	70-79	80+	60+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	9,38	2,93	3,74	1,67	0,58	5,99
Sumatera Utara	10,71	3,52	4,06	1,67	0,61	6,33
Sumatera Barat	10,86	4,33	4,99	2,36	1,06	8,41
Riau	9,47	2,81	2,98	1,09	0,38	4,46
Jambi	10,86	3,10	3,83	1,53	0,64	6,00
Sumatera Selatan	10,29	3,62	4,16	1,75	0,70	6,60
Bengkulu	11,16	3,17	3,83	1,57	0,72	6,13
Lampung	11,24	3,53	4,53	2,10	0,87	7,50
Kep. Bangka Belitung	10,84	3,65	4,04	1,63	0,66	6,32
Kep. Riau	8,41	2,43	2,58	0,90	0,28	3,76
DKI Jakarta	11,38	3,74	4,10	1,47	0,34	5,91
Jawa Barat	11,20	3,71	4,71	2,14	0,73	7,58
Jawa Tengah	13,31	4,77	6,34	3,45	1,32	11,11
DI Yogyakarta	13,47	4,90	6,98	4,35	1,86	13,20
Jawa Timur	13,78	4,99	6,53	3,28	1,15	10,96
Banten	10,51	2,89	3,29	1,24	0,42	4,95
Bali	12,29	4,47	6,02	2,98	1,07	10,07
Nusa Tenggara Barat	10,44	3,39	4,59	2,03	0,76	7,38
Nusa Tenggara Timur	9,69	3,37	4,44	2,12	0,85	7,40
Kalimantan Barat	10,29	3,43	4,22	1,71	0,44	6,37
Kalimantan Tengah	10,59	2,71	3,26	1,17	0,49	4,92
Kalimantan Selatan	11,13	3,31	3,99	1,58	0,56	6,13
Kalimantan Timur	10,94	3,08	3,24	1,06	0,36	4,66
Sulawesi Utara	12,75	4,77	5,66	2,65	0,84	9,14
Sulawesi Tengah	10,73	3,37	4,34	2,00	0,62	6,96
Sulawesi Selatan	10,52	3,60	5,14	2,53	0,88	8,54
Sulawesi Tenggara	8,77	2,99	3,74	1,62	0,70	6,07
Gorontalo	10,88	3,22	4,38	1,74	0,46	6,58
Sulawesi Barat	8,78	3,01	3,89	1,66	0,71	6,26
Maluku	9,16	3,68	4,00	1,79	0,58	6,37
Maluku Utara	9,26	3,10	3,49	1,29	0,41	5,19
Papua Barat	9,50	2,48	2,63	0,81	0,20	3,63
Papua	9,39	2,25	1,86	0,55	0,14	2,56
Indonesia	**11,57**	**3,90**	**4,91**	**2,31**	**0,83**	**8,05**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.2 Proporsi Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	5,03	5,90	5,47	5,61	6,78	6,20	5,45	6,53	5,99
Sumatera Utara	5,61	6,73	6,17	5,72	7,26	6,49	5,67	7,00	6,33
Sumatera Barat	6,79	8,42	7,61	7,95	9,88	8,92	7,50	9,31	8,41
Riau	4,16	4,39	4,27	4,49	4,66	4,57	4,36	4,55	4,46
Jambi	5,80	6,13	5,96	5,89	6,14	6,01	5,87	6,13	6,00
Sumatera Selatan	5,97	6,94	6,45	6,36	7,04	6,69	6,22	7,00	6,60
Bengkulu	5,06	5,40	5,23	6,35	6,74	6,54	5,95	6,31	6,13
Lampung	6,63	7,07	6,85	7,62	7,85	7,73	7,37	7,64	7,50
Kep. Bangka Belitung	6,13	6,99	6,54	5,80	6,45	6,11	5,96	6,71	6,32
Kep. Riau	3,21	3,30	3,25	6,21	6,46	6,33	3,72	3,82	3,76
DKI Jakarta	5,66	6,17	5,91	-	-	-	5,66	6,17	5,91
Jawa Barat	6,52	7,26	6,89	8,46	9,42	8,94	7,18	7,99	7,58
Jawa Tengah	9,74	11,30	10,53	10,82	12,37	11,60	10,32	11,88	11,11
DI Yogyakarta	10,28	12,45	11,37	15,15	18,30	16,77	11,90	14,46	13,20
Jawa Timur	9,26	10,89	10,08	10,74	12,74	11,76	10,03	11,86	10,96
Banten	4,29	4,66	4,47	5,58	6,37	5,96	4,71	5,20	4,95
Bali	8,05	9,26	8,65	11,51	13,02	12,27	9,40	10,76	10,07
Nusa Tenggara Barat	6,92	7,40	7,17	7,38	7,69	7,54	7,19	7,57	7,38
Nusa Tenggara Timur	6,04	6,77	6,40	7,36	7,93	7,65	7,09	7,70	7,40
Kalimantan Barat	6,56	6,84	6,70	6,15	6,32	6,23	6,27	6,48	6,37
Kalimantan Tengah	4,65	4,73	4,69	4,95	5,14	5,04	4,85	5,00	4,92
Kalimantan Selatan	5,28	6,26	5,76	5,73	7,09	6,40	5,54	6,74	6,13
Kalimantan Timur	4,54	4,40	4,47	5,10	4,82	4,97	4,75	4,56	4,66
Sulawesi Utara	7,85	9,45	8,64	8,78	10,38	9,55	8,37	9,95	9,14
Sulawesi Tengah	5,92	6,61	6,27	7,06	7,33	7,19	6,78	7,15	6,96
Sulawesi Selatan	6,46	8,15	7,32	8,26	10,21	9,26	7,59	9,45	8,54
Sulawesi Tenggara	4,72	5,45	5,08	6,01	6,89	6,45	5,65	6,48	6,07
Gorontalo	5,80	7,27	6,55	6,15	7,05	6,59	6,03	7,12	6,58
Sulawesi Barat	6,03	7,08	6,57	5,82	6,52	6,17	5,87	6,65	6,26
Maluku	5,70	6,61	6,15	6,29	6,71	6,50	6,07	6,67	6,37
Maluku Utara	4,61	5,13	4,87	5,36	5,26	5,31	5,16	5,22	5,19
Papua Barat	3,58	3,35	3,47	3,94	3,45	3,71	3,83	3,42	3,63
Papua	4,01	3,74	3,89	2,34	1,82	2,10	2,78	2,31	2,56
Indonesia	**6,92**	**7,94**	**7,43**	**8,07**	**9,28**	**8,67**	**7,49**	**8,61**	**8,05**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk Tua menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	8,04	9,31	8,68	9,27	11,07	10,18	8,91	10,56	9,75
Sumatera Utara	8,94	10,63	9,79	9,92	12,52	11,22	9,42	11,54	10,49
Sumatera Barat	10,87	13,38	12,14	13,47	16,88	15,18	12,42	15,45	13,95
Riau	6,44	6,80	6,62	7,21	7,57	7,38	6,90	7,26	7,07
Jambi	8,84	9,28	9,06	9,21	9,73	9,46	9,09	9,59	9,33
Sumatera Selatan	9,26	10,73	9,99	10,12	11,29	10,69	9,81	11,08	10,43
Bengkulu	7,70	8,13	7,92	10,03	10,70	10,35	9,29	9,86	9,57
Lampung	10,26	10,98	10,62	12,17	12,58	12,37	11,67	12,14	11,90
Kep. Bangka Belitung	9,35	10,93	10,11	8,88	10,01	9,42	9,11	10,47	9,76
Kep. Riau	4,91	4,96	4,93	9,80	10,72	10,23	5,71	5,82	5,76
DKI Jakarta	8,19	8,91	8,55	-	-	-	8,19	8,91	8,55
Jawa Barat	10,08	11,27	10,66	13,71	15,30	14,49	11,27	12,59	11,92
Jawa Tengah	15,35	17,61	16,50	17,57	19,92	18,76	16,54	18,84	17,70
DI Yogyakarta	15,20	18,65	16,92	24,52	30,11	27,37	18,12	22,36	20,25
Jawa Timur	14,09	16,63	15,37	16,84	20,00	18,45	15,51	18,38	16,96
Banten	6,43	6,96	6,69	8,99	10,35	9,65	7,21	7,98	7,59
Bali	12,09	14,10	13,08	18,51	21,11	19,80	14,50	16,78	15,63
Nusa Tenggara Barat	11,32	11,63	11,48	12,70	12,49	12,59	12,10	12,12	12,11
Nusa Tenggara Timur	10,08	10,93	10,51	13,88	14,50	14,20	13,04	13,73	13,40
Kalimantan Barat	10,26	10,85	10,55	10,00	10,25	10,12	10,08	10,44	10,26
Kalimantan Tengah	6,92	7,30	7,10	7,74	8,18	7,94	7,46	7,87	7,65
Kalimantan Selatan	8,10	9,50	8,80	8,98	11,29	10,12	8,61	10,52	9,55
Kalimantan Timur	6,82	6,70	6,76	7,89	7,68	7,80	7,23	7,06	7,15
Sulawesi Utara	11,84	14,69	13,23	13,85	16,84	15,28	12,93	15,83	14,33
Sulawesi Tengah	9,14	10,01	9,58	11,52	12,15	11,82	10,92	11,57	11,24
Sulawesi Selatan	10,25	12,81	11,56	14,09	16,94	15,57	12,60	15,37	14,03
Sulawesi Tenggara	7,66	8,68	8,17	10,63	11,97	11,30	9,75	10,98	10,37
Gorontalo	8,95	11,22	10,11	9,85	11,40	10,61	9,54	11,33	10,43
Sulawesi Barat	10,06	11,54	10,82	9,73	10,77	10,25	9,80	10,95	10,38
Maluku	9,25	10,44	9,85	11,34	11,95	11,64	10,49	11,32	10,91
Maluku Utara	7,22	7,99	7,60	9,22	8,96	9,09	8,63	8,67	8,65
Papua Barat	5,46	5,24	5,36	6,34	5,61	6,00	6,05	5,49	5,79
Papua	5,96	5,92	5,94	3,78	2,89	3,35	4,39	3,66	4,04
Indonesia	**10,64**	**12,20**	**11,42**	**13,14**	**15,09**	**14,11**	**11,85**	**13,60**	**12,72**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.4.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2013

Laki-laki

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,21	86,04	1,29	11,46	100,00
Sumatera Utara	0,42	82,47	0,86	16,25	100,00
Sumatera Barat	0,54	84,19	2,48	12,80	100,00
Riau	0,76	85,74	1,41	12,09	100,00
Jambi	0,75	82,41	1,88	14,96	100,00
Sumatera Selatan	0,53	83,76	1,02	14,69	100,00
Bengkulu	0,47	84,63	1,37	13,53	100,00
Lampung	0,40	85,26	0,90	13,45	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,63	77,73	3,07	16,58	100,00
Kep. Riau	1,49	81,34	1,01	16,16	100,00
DKI Jakarta	0,93	78,71	2,17	18,19	100,00
Jawa Barat	0,22	85,90	1,19	12,68	100,00
Jawa Tengah	0,49	83,76	0,82	14,93	100,00
DI Yogyakarta	0,81	82,68	1,16	15,35	100,00
Jawa Timur	0,61	83,16	1,11	15,12	100,00
Banten	0,14	84,26	1,45	14,15	100,00
Bali	2,67	80,24	0,89	16,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,77	80,41	1,64	17,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,82	77,82	0,82	19,53	100,00
Kalimantan Barat	1,52	80,00	1,43	17,05	100,00
Kalimantan Tengah	0,34	83,33	1,58	14,75	100,00
Kalimantan Selatan	0,58	85,27	2,01	12,15	100,00
Kalimantan Timur	0,97	82,34	2,24	14,45	100,00
Sulawesi Utara	1,39	80,37	2,05	16,19	100,00
Sulawesi Tengah	1,63	79,80	2,78	15,79	100,00
Sulawesi Selatan	1,56	78,55	2,06	17,82	100,00
Sulawesi Tenggara	0,94	79,90	3,29	15,87	100,00
Gorontalo	0,26	84,59	0,11	15,03	100,00
Sulawesi Barat	0,85	75,26	3,72	20,17	100,00
Maluku	0,68	77,73	1,73	19,86	100,00
Maluku Utara	0,61	80,31	1,78	17,30	100,00
Papua Barat	0,35	79,49	3,17	17,00	100,00
Papua	0,58	79,34	2,79	17,29	100,00
Indonesia	**0,66**	**83,19**	**1,28**	**14,87**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.4.2 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2013

Perempuan

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,50	28,69	3,03	67,78	100,00
Sumatera Utara	1,15	35,89	1,82	61,14	100,00
Sumatera Barat	0,46	33,90	5,67	59,98	100,00
Riau	1,15	34,59	1,17	63,09	100,00
Jambi	0,85	34,78	2,25	62,12	100,00
Sumatera Selatan	0,83	41,14	2,03	56,00	100,00
Bengkulu	0,01	42,09	2,22	55,68	100,00
Lampung	0,21	41,91	2,45	55,42	100,00
Kep. Bangka Belitung	1,59	41,81	5,12	51,47	100,00
Kep. Riau	0,31	47,37	1,16	51,16	100,00
DKI Jakarta	0,70	38,59	4,30	56,41	100,00
Jawa Barat	0,44	38,46	4,00	57,09	100,00
Jawa Tengah	0,60	38,27	3,09	58,04	100,00
DI Yogyakarta	1,93	43,45	2,91	51,71	100,00
Jawa Timur	0,84	33,47	3,17	62,52	100,00
Banten	0,45	30,00	4,45	65,10	100,00
Bali	4,00	50,10	2,30	43,60	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,97	38,64	7,52	52,86	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,81	39,37	2,30	54,52	100,00
Kalimantan Barat	1,85	37,49	2,92	57,74	100,00
Kalimantan Tengah	1,32	41,81	2,44	54,43	100,00
Kalimantan Selatan	1,73	27,93	4,34	66,01	100,00
Kalimantan Timur	0,56	42,63	2,13	54,68	100,00
Sulawesi Utara	2,34	45,24	2,49	49,93	100,00
Sulawesi Tengah	1,90	40,67	3,46	53,96	100,00
Sulawesi Selatan	4,19	34,91	4,00	56,90	100,00
Sulawesi Tenggara	1,57	33,43	3,70	61,31	100,00
Gorontalo	3,38	39,42	2,64	54,56	100,00
Sulawesi Barat	3,88	34,65	5,01	56,46	100,00
Maluku	4,86	45,57	1,69	47,89	100,00
Maluku Utara	1,05	40,96	1,64	56,36	100,00
Papua Barat	0,57	45,58	3,16	50,69	100,00
Papua	0,62	51,76	5,05	42,57	100,00
Indonesia	**1,07**	**37,20**	**3,33**	**58,40**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.4.3 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2013

Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	0,82	54,71	2,24	42,23	100,00
Sumatera Utara	0,82	56,67	1,39	41,11	100,00
Sumatera Barat	0,49	56,17	4,25	39,08	100,00
Riau	0,95	60,32	1,29	37,44	100,00
Jambi	0,80	58,56	2,07	38,58	100,00
Sumatera Selatan	0,69	61,54	1,55	36,23	100,00
Bengkulu	0,24	63,17	1,80	34,79	100,00
Lampung	0,31	63,77	1,67	34,26	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,10	59,37	4,12	34,41	100,00
Kep. Riau	0,90	64,52	1,09	33,49	100,00
DKI Jakarta	0,81	57,93	3,27	37,99	100,00
Jawa Barat	0,33	61,26	2,65	35,75	100,00
Jawa Tengah	0,55	59,24	2,04	38,16	100,00
DI Yogyakarta	1,43	60,92	2,13	35,51	100,00
Jawa Timur	0,73	55,91	2,24	41,12	100,00
Banten	0,30	56,33	3,00	40,38	100,00
Bali	3,38	64,25	1,64	30,73	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,88	58,35	4,75	36,02	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,87	57,64	1,60	37,90	100,00
Kalimantan Barat	1,69	58,80	2,17	37,34	100,00
Kalimantan Tengah	0,81	63,16	2,00	34,02	100,00
Kalimantan Selatan	1,20	54,14	3,27	41,39	100,00
Kalimantan Timur	0,78	63,92	2,19	33,11	100,00
Sulawesi Utara	1,89	61,64	2,28	34,18	100,00
Sulawesi Tengah	1,77	60,17	3,12	34,94	100,00
Sulawesi Selatan	3,05	53,84	3,16	39,95	100,00
Sulawesi Tenggara	1,27	55,18	3,51	40,04	100,00
Gorontalo	1,95	60,18	1,48	36,39	100,00
Sulawesi Barat	2,46	53,74	4,40	39,40	100,00
Maluku	2,85	61,04	1,71	34,40	100,00
Maluku Utara	0,83	60,92	1,71	36,54	100,00
Papua Barat	0,45	64,40	3,16	31,99	100,00
Papua	0,60	67,60	3,75	28,05	100,00
Indonesia	**0,88**	**58,71**	**2,37**	**38,04**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.5.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2013

Laki-laki

Provinsi	Kepala Rumah Tangga	Istri/ Suami	Mertua/ Orang tua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	96,32	0,32	2,75	0,61	100,00
Sumatera Utara	94,46	0,13	4,76	0,65	100,00
Sumatera Barat	89,87	0,43	7,35	2,35	100,00
Riau	92,50	0,07	6,20	1,23	100,00
Jambi	92,94	0,15	6,19	0,72	100,00
Sumatera Selatan	88,41	0,44	9,68	1,48	100,00
Bengkulu	90,38	0,80	7,82	1,01	100,00
Lampung	90,52	0,02	8,64	0,83	100,00
Kep. Bangka Belitung	89,14	0,00	8,90	1,96	100,00
Kep. Riau	84,12	0,22	13,73	1,93	100,00
DKI Jakarta	94,56	0,09	3,72	1,62	100,00
Jawa Barat	93,68	0,29	5,15	0,88	100,00
Jawa Tengah	89,46	0,34	9,12	1,07	100,00
DI Yogyakarta	89,88	0,03	8,75	1,35	100,00
Jawa Timur	89,42	0,55	8,31	1,73	100,00
Banten	91,43	0,47	7,01	1,09	100,00
Bali	69,58	0,07	26,79	3,56	100,00
Nusa Tenggara Barat	87,67	0,43	9,78	2,12	100,00
Nusa Tenggara Timur	86,00	0,23	11,09	2,68	100,00
Kalimantan Barat	90,44	0,05	7,70	1,81	100,00
Kalimantan Tengah	92,66	0,34	6,62	0,38	100,00
Kalimantan Selatan	93,86	0,26	5,42	0,46	100,00
Kalimantan Timur	91,63	0,41	6,44	1,52	100,00
Sulawesi Utara	86,52	0,28	10,63	2,57	100,00
Sulawesi Tengah	86,61	0,13	11,21	2,06	100,00
Sulawesi Selatan	89,16	0,15	7,70	2,99	100,00
Sulawesi Tenggara	89,89	0,00	8,85	1,26	100,00
Gorontalo	87,45	0,47	9,34	2,73	100,00
Sulawesi Barat	85,92	0,00	9,72	4,36	100,00
Maluku	87,72	0,20	10,63	1,45	100,00
Maluku Utara	87,95	0,11	10,14	1,80	100,00
Papua Barat	91,67	0,13	5,93	2,26	100,00
Papua	95,39	0,00	4,24	0,37	100,00
Indonesia	**90,33**	**0,32**	**7,93**	**1,42**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.5.2 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2013

Perempuan

Provinsi	Kepala Rumah Tangga	Istri/ Suami	Mertua/ Orang tua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	58,52	26,80	13,43	1,25	100,00
Sumatera Utara	46,14	34,06	17,28	2,52	100,00
Sumatera Barat	37,09	30,75	29,44	2,71	100,00
Riau	38,38	32,14	26,16	3,32	100,00
Jambi	35,79	32,80	27,99	3,43	100,00
Sumatera Selatan	32,27	35,12	29,24	3,37	100,00
Bengkulu	30,04	38,04	30,44	1,48	100,00
Lampung	27,78	38,17	31,97	2,09	100,00
Kep. Bangka Belitung	39,20	38,76	19,50	2,54	100,00
Kep. Riau	26,69	39,53	31,25	2,53	100,00
DKI Jakarta	47,42	35,89	13,23	3,46	100,00
Jawa Barat	42,14	35,95	19,02	2,88	100,00
Jawa Tengah	33,71	34,54	27,83	3,92	100,00
DI Yogyakarta	33,79	40,12	22,45	3,64	100,00
Jawa Timur	35,80	29,91	29,09	5,21	100,00
Banten	40,65	28,02	27,01	4,32	100,00
Bali	15,86	34,93	40,70	8,51	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,86	34,44	20,29	3,41	100,00
Nusa Tenggara Timur	32,50	33,48	28,50	5,53	100,00
Kalimantan Barat	33,12	34,27	29,20	3,41	100,00
Kalimantan Tengah	33,01	39,01	25,26	2,71	100,00
Kalimantan Selatan	47,03	26,70	22,83	3,45	100,00
Kalimantan Timur	36,67	38,47	21,85	3,01	100,00
Sulawesi Utara	30,15	39,72	26,23	3,89	100,00
Sulawesi Tengah	30,20	37,73	28,32	3,75	100,00
Sulawesi Selatan	37,03	31,80	25,77	5,40	100,00
Sulawesi Tenggara	39,00	30,36	25,74	4,90	100,00
Gorontalo	33,24	35,25	26,96	4,54	100,00
Sulawesi Barat	31,90	31,80	28,99	7,32	100,00
Maluku	29,44	40,19	25,94	4,42	100,00
Maluku Utara	32,65	35,72	27,89	3,74	100,00
Papua Barat	35,95	43,02	16,62	4,42	100,00
Papua	32,22	48,81	17,83	1,15	100,00
Indonesia	**37,00**	**33,65**	**25,41**	**3,94**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

https://www.bps.go.id

Tabel 3.5.3 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2013

Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Kepala Rumah Tangga	Istri/ Suami	Mertua/ Orang tua	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	75,67	14,78	8,59	0,96	100,00
Sumatera Utara	67,70	18,92	11,69	1,69	100,00
Sumatera Barat	60,47	17,32	19,66	2,55	100,00
Riau	65,60	16,01	16,12	2,27	100,00
Jambi	64,32	16,50	17,10	2,08	100,00
Sumatera Selatan	59,15	18,52	19,87	2,46	100,00
Bengkulu	59,94	19,59	19,23	1,25	100,00
Lampung	59,41	18,93	20,21	1,45	100,00
Kep. Bangka Belitung	63,61	19,81	14,32	2,26	100,00
Kep. Riau	55,69	19,68	22,40	2,23	100,00
DKI Jakarta	70,14	18,63	8,65	2,58	100,00
Jawa Barat	66,91	18,81	12,36	1,92	100,00
Jawa Tengah	59,41	18,77	19,20	2,61	100,00
DI Yogyakarta	58,77	22,26	16,34	2,62	100,00
Jawa Timur	60,01	16,65	19,70	3,64	100,00
Banten	65,29	14,65	17,31	2,75	100,00
Bali	41,09	18,56	34,17	6,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	63,48	18,39	15,33	2,80	100,00
Nusa Tenggara Timur	57,91	17,69	20,23	4,17	100,00
Kalimantan Barat	61,86	17,11	18,42	2,61	100,00
Kalimantan Tengah	63,69	19,12	15,67	1,52	100,00
Kalimantan Selatan	68,44	14,61	14,87	2,08	100,00
Kalimantan Timur	66,13	18,07	13,59	2,21	100,00
Sulawesi Utara	56,47	21,31	18,95	3,27	100,00
Sulawesi Tengah	58,31	18,99	19,79	2,91	100,00
Sulawesi Selatan	59,64	18,07	17,93	4,36	100,00
Sulawesi Tenggara	62,82	16,15	17,83	3,19	100,00
Gorontalo	58,15	19,27	18,87	3,71	100,00
Sulawesi Barat	57,29	16,85	19,93	5,93	100,00
Maluku	57,48	20,96	18,58	2,99	100,00
Maluku Utara	60,71	17,65	18,89	2,75	100,00
Papua Barat	66,87	19,22	10,69	3,22	100,00
Papua	68,51	20,77	10,02	0,70	100,00
Indonesia	**61,95**	**18,05**	**17,23**	**2,76**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.6.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga, 2013

Perkotaan

Provinsi	Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga					
	Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	11,35	14,28	42,49	30,33	1,54	100,00
Sumatera Utara	8,95	13,04	33,66	41,95	2,40	100,00
Sumatera Barat	8,39	12,36	30,10	46,63	2,53	100,00
Riau	4,78	10,60	40,30	41,55	2,76	100,00
Jambi	6,39	11,48	34,51	44,37	3,25	100,00
Sumatera Selatan	3,80	9,64	40,77	42,55	3,24	100,00
Bengkulu	5,05	16,06	36,28	41,65	0,96	100,00
Lampung	5,45	13,61	30,20	48,55	2,19	100,00
Kep. Bangka Belitung	9,56	15,53	36,06	35,01	3,84	100,00
Kep. Riau	6,72	18,12	29,33	43,08	2,76	100,00
DKI Jakarta	6,01	11,59	42,49	37,00	2,90	100,00
Jawa Barat	11,34	21,33	30,69	34,57	2,06	100,00
Jawa Tengah	9,77	19,58	24,41	43,27	2,96	100,00
DI Yogyakarta	10,65	23,11	27,09	36,04	3,10	100,00
Jawa Timur	9,45	18,02	24,69	43,60	4,24	100,00
Banten	6,11	9,43	33,51	47,11	3,85	100,00
Bali	4,79	14,63	17,48	56,66	6,44	100,00
Nusa Tenggara Barat	14,42	17,59	28,21	37,01	2,77	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,95	9,17	24,56	57,89	6,44	100,00
Kalimantan Barat	4,73	8,83	33,77	49,51	3,16	100,00
Kalimantan Tengah	5,49	17,26	31,63	42,70	2,92	100,00
Kalimantan Selatan	8,03	16,34	37,16	36,26	2,21	100,00
Kalimantan Timur	8,39	13,83	37,80	36,81	3,17	100,00
Sulawesi Utara	7,09	16,36	25,12	47,70	3,72	100,00
Sulawesi Tengah	4,69	12,82	32,74	47,25	2,50	100,00
Sulawesi Selatan	4,65	10,29	30,67	48,54	5,84	100,00
Sulawesi Tenggara	6,18	11,23	31,17	46,81	4,62	100,00
Gorontalo	5,22	15,43	28,82	43,15	7,37	100,00
Sulawesi Barat	6,19	8,59	28,75	49,51	6,97	100,00
Maluku	4,31	6,45	22,75	62,35	4,14	100,00
Maluku Utara	1,81	6,69	31,53	57,20	2,77	100,00
Papua Barat	3,48	8,78	34,64	48,52	4,58	100,00
Papua	6,02	10,82	47,61	33,25	2,30	100,00
Indonesia	**8,91**	**17,04**	**29,51**	**41,35**	**3,20**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.6.2 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga, 2013

Perdesaan

Provinsi	Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga					
	Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	16,46	14,44	42,14	25,90	1,06	100,00
Sumatera Utara	15,05	22,44	29,98	31,42	1,11	100,00
Sumatera Barat	10,13	17,87	25,83	43,44	2,73	100,00
Riau	6,85	16,87	34,08	40,45	1,75	100,00
Jambi	9,18	18,46	30,33	40,41	1,61	100,00
Sumatera Selatan	7,20	18,56	31,08	40,99	2,17	100,00
Bengkulu	9,39	24,05	24,73	40,24	1,59	100,00
Lampung	6,72	20,03	29,76	41,89	1,60	100,00
Kep Bangka Belitung	10,79	19,82	30,59	38,22	0,58	100,00
Kep. Riau	6,66	13,71	38,68	38,68	2,26	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	15,54	27,50	24,81	30,07	2,09	100,00
Jawa Tengah	10,02	22,65	19,70	44,90	2,73	100,00
DI Yogyakarta	8,00	22,84	24,55	41,59	3,02	100,00
Jawa Timur	11,95	20,36	18,96	44,84	3,90	100,00
Banten	10,82	14,68	29,38	43,91	1,20	100,00
Bali	6,43	21,88	21,43	43,03	7,23	100,00
Nusa Tenggara Barat	11,66	20,22	23,74	41,30	3,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	6,40	9,36	26,05	53,32	4,86	100,00
Kalimantan Barat	7,31	15,62	29,24	44,84	2,99	100,00
Kalimantan Tengah	10,26	20,74	36,44	30,90	1,65	100,00
Kalimantan Selatan	15,41	17,38	30,87	33,48	2,86	100,00
Kalimantan Timur	10,00	16,20	32,94	37,80	3,06	100,00
Sulawesi Utara	6,43	21,66	21,85	46,32	3,74	100,00
Sulawesi Tengah	7,30	15,14	29,52	44,31	3,72	100,00
Sulawesi Selatan	7,89	12,30	27,46	47,61	4,75	100,00
Sulawesi Tenggara	8,16	11,69	28,45	48,33	3,36	100,00
Gorontalo	4,36	17,25	23,58	51,01	3,80	100,00
Sulawesi Barat	4,47	8,34	37,08	44,25	5,86	100,00
Maluku	6,25	10,06	25,89	54,26	3,54	100,00
Maluku Utara	3,55	12,52	25,97	54,77	3,19	100,00
Papua Barat	6,66	12,83	34,48	43,52	2,50	100,00
Papua	8,33	20,29	44,95	25,92	0,50	100,00
Indonesia	**10,74**	**20,27**	**24,50**	**41,53**	**2,96**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.6.3 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga					
	Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	15,14	14,40	42,23	27,04	1,19	100,00
Sumatera Utara	12,12	17,92	31,75	36,48	1,73	100,00
Sumatera Barat	9,51	15,93	27,34	44,56	2,66	100,00
Riau	6,07	14,52	36,42	40,86	2,13	100,00
Jambi	8,33	16,34	31,60	41,62	2,11	100,00
Sumatera Selatan	6,00	15,43	34,48	41,54	2,54	100,00
Bengkulu	8,23	21,92	27,82	40,62	1,42	100,00
Lampung	6,42	18,50	29,86	43,47	1,74	100,00
Kep Bangka Belitung	10,16	17,63	33,38	36,59	2,24	100,00
Kep. Riau	6,70	16,89	31,94	41,85	2,62	100,00
DKI Jakarta	6,01	11,59	42,49	37,00	2,90	100,00
Jawa Barat	13,01	23,79	28,35	32,78	2,07	100,00
Jawa Tengah	9,91	21,32	21,75	44,19	2,83	100,00
DI Yogyakarta	9,51	22,99	26,00	38,43	3,07	100,00
Jawa Timur	10,85	19,33	21,47	44,30	4,05	100,00
Banten	7,92	11,45	31,92	45,88	2,83	100,00
Bali	5,58	18,11	19,38	50,11	6,82	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,78	19,15	25,56	39,56	2,95	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,64	9,33	25,80	54,10	5,13	100,00
Kalimantan Barat	6,48	13,45	30,69	46,34	3,05	100,00
Kalimantan Tengah	8,73	19,62	34,90	34,69	2,06	100,00
Kalimantan Selatan	12,49	16,96	33,36	34,58	2,61	100,00
Kalimantan Timur	9,05	14,80	35,82	37,22	3,13	100,00
Sulawesi Utara	6,71	19,40	23,25	46,91	3,73	100,00
Sulawesi Tengah	6,72	14,63	30,24	44,96	3,45	100,00
Sulawesi Selatan	6,86	11,66	28,48	47,90	5,09	100,00
Sulawesi Tenggara	7,70	11,58	29,09	47,98	3,65	100,00
Gorontalo	4,65	16,63	25,37	48,33	5,02	100,00
Sulawesi Barat	4,88	8,40	35,09	45,51	6,12	100,00
Maluku	5,53	8,72	24,72	57,27	3,76	100,00
Maluku Utara	3,10	11,02	27,40	55,40	3,08	100,00
Papua Barat	5,69	11,59	34,53	45,05	3,14	100,00
Papua	7,43	16,58	45,99	28,79	1,21	100,00
Indonesia	**9,89**	**18,78**	**26,82**	**41,44**	**3,07**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.6.4 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga, 2013

Laki-laki

Provinsi	Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga					
	Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4,85	19,56	54,43	20,39	0,77	100,00
Sumatera Utara	6,02	24,16	39,02	30,34	0,47	100,00
Sumatera Barat	4,26	21,64	35,34	36,68	2,08	100,00
Riau	2,47	19,14	45,74	31,60	1,06	100,00
Jambi	4,28	21,19	37,82	36,09	0,62	100,00
Sumatera Selatan	3,57	19,53	40,79	34,92	1,19	100,00
Bengkulu	4,55	27,18	33,03	34,21	1,04	100,00
Lampung	3,01	22,47	37,61	35,81	1,10	100,00
Kep Bangka Belitung	6,43	21,24	34,52	35,98	1,82	100,00
Kep. Riau	4,48	22,19	34,79	36,04	2,50	100,00
DKI Jakarta	3,25	12,99	51,06	30,90	1,80	100,00
Jawa Barat	5,12	30,62	35,61	27,89	0,77	100,00
Jawa Tengah	3,98	28,08	26,49	40,42	1,03	100,00
DI Yogyakarta	3,59	29,38	30,25	35,58	1,20	100,00
Jawa Timur	4,28	27,16	26,55	40,28	1,73	100,00
Banten	2,82	14,78	41,04	39,71	1,66	100,00
Bali	3,27	23,09	21,16	48,46	4,02	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,88	24,56	31,53	36,60	2,43	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,20	12,40	31,32	50,11	2,97	100,00
Kalimantan Barat	4,69	17,28	35,74	40,40	1,89	100,00
Kalimantan Tengah	6,64	24,53	40,81	27,72	0,29	100,00
Kalimantan Selatan	3,76	25,68	42,05	27,89	0,62	100,00
Kalimantan Timur	6,66	17,51	41,38	33,00	1,44	100,00
Sulawesi Utara	3,74	24,60	27,62	41,38	2,66	100,00
Sulawesi Tengah	3,69	18,18	34,64	41,05	2,43	100,00
Sulawesi Selatan	3,58	16,34	33,29	43,64	3,15	100,00
Sulawesi Tenggara	3,74	15,43	36,37	43,11	1,35	100,00
Gorontalo	1,74	21,69	28,85	45,83	1,89	100,00
Sulawesi Barat	2,17	10,82	39,94	42,79	4,28	100,00
Maluku	3,87	10,32	29,45	54,75	1,61	100,00
Maluku Utara	3,07	13,00	32,02	49,87	2,04	100,00
Papua Barat	5,72	14,53	39,29	38,47	1,99	100,00
Papua	7,13	20,18	50,70	21,18	0,80	100,00
Indonesia	**4,25**	**24,75**	**32,95**	**36,61**	**1,44**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.6.5 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga, 2013

Perempuan

Provinsi	Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga					
	Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	23,69	10,12	32,10	32,56	1,53	100,00
Sumatera Utara	17,04	12,90	25,89	41,43	2,75	100,00
Sumatera Barat	13,70	11,39	20,97	50,83	3,12	100,00
Riau	9,72	9,84	26,99	50,25	3,21	100,00
Jambi	12,36	11,51	25,41	47,12	3,60	100,00
Sumatera Selatan	8,24	11,66	28,69	47,62	3,79	100,00
Bengkulu	11,84	16,75	22,70	46,91	1,80	100,00
Lampung	9,89	14,46	21,99	51,26	2,40	100,00
Kep Bangka Belitung	13,73	14,18	32,28	37,16	2,65	100,00
Kep. Riau	8,97	11,47	29,04	47,78	2,74	100,00
DKI Jakarta	8,58	10,30	34,52	42,67	3,93	100,00
Jawa Barat	20,32	17,47	21,63	37,30	3,28	100,00
Jawa Tengah	14,99	15,53	17,69	47,42	4,37	100,00
DI Yogyakarta	14,27	17,86	22,59	40,72	4,56	100,00
Jawa Timur	16,26	12,89	17,29	47,60	5,96	100,00
Banten	12,73	8,32	23,32	51,70	3,93	100,00
Bali	7,62	13,70	17,80	51,58	9,30	100,00
Nusa Tenggara Barat	19,84	14,31	20,23	42,20	3,43	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,85	6,54	20,80	57,72	7,08	100,00
Kalimantan Barat	8,29	9,59	25,60	52,31	4,21	100,00
Kalimantan Tengah	10,95	14,42	28,63	42,07	3,93	100,00
Kalimantan Selatan	19,84	9,62	26,04	40,22	4,28	100,00
Kalimantan Timur	11,80	11,66	29,39	42,08	5,07	100,00
Sulawesi Utara	9,32	14,85	19,41	51,75	4,67	100,00
Sulawesi Tengah	9,73	11,10	25,86	48,84	4,46	100,00
Sulawesi Selatan	9,38	8,08	24,79	51,17	6,58	100,00
Sulawesi Tenggara	11,18	8,20	22,68	52,26	5,67	100,00
Gorontalo	7,14	12,33	22,40	50,46	7,67	100,00
Sulawesi Barat	7,29	6,26	30,79	47,91	7,75	100,00
Maluku	7,07	7,24	20,34	59,60	5,75	100,00
Maluku Utara	3,12	8,98	22,64	61,10	4,16	100,00
Papua Barat	5,64	7,93	28,60	53,26	4,56	100,00
Papua	7,83	11,73	39,63	39,06	1,75	100,00
Indonesia	**14,85**	**13,53**	**20,76**	**45,69**	**4,51**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 3.6.6 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga, 2013

Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Status Tinggal Bersama dalam Satu Rumah Tangga					
	Sendiri	Bersama Pasangan	Bersama Keluarga	Tiga Generasi	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	15,14	14,40	42,23	27,04	1,19	100,00
Sumatera Utara	12,12	17,92	31,75	36,48	1,73	100,00
Sumatera Barat	9,51	15,93	27,34	44,56	2,66	100,00
Riau	6,07	14,52	36,42	40,86	2,13	100,00
Jambi	8,33	16,34	31,60	41,62	2,11	100,00
Sumatera Selatan	6,00	15,43	34,48	41,54	2,54	100,00
Bengkulu	8,23	21,92	27,82	40,62	1,42	100,00
Lampung	6,42	18,50	29,86	43,47	1,74	100,00
Kep.Bangka Belitung	10,16	17,63	33,38	36,59	2,24	100,00
Kep. Riau	6,70	16,89	31,94	41,85	2,62	100,00
DKI Jakarta	6,01	11,59	42,49	37,00	2,90	100,00
Jawa Barat	13,01	23,79	28,35	32,78	2,07	100,00
Jawa Tengah	9,91	21,32	21,75	44,19	2,83	100,00
DI Yogyakarta	9,51	22,99	26,00	38,43	3,07	100,00
Jawa Timur	10,85	19,33	21,47	44,30	4,05	100,00
Banten	7,92	11,45	31,92	45,88	2,83	100,00
Bali	5,58	18,11	19,38	50,11	6,82	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,78	19,15	25,56	39,56	2,95	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,64	9,33	25,80	54,10	5,13	100,00
Kalimantan Barat	6,48	13,45	30,69	46,34	3,05	100,00
Kalimantan Tengah	8,73	19,62	34,90	34,69	2,06	100,00
Kalimantan Selatan	12,49	16,96	33,36	34,58	2,61	100,00
Kalimantan Timur	9,05	14,80	35,82	37,22	3,13	100,00
Sulawesi Utara	6,71	19,40	23,25	46,91	3,73	100,00
Sulawesi Tengah	6,72	14,63	30,24	44,96	3,45	100,00
Sulawesi Selatan	6,86	11,66	28,48	47,90	5,09	100,00
Sulawesi Tenggara	7,70	11,58	29,09	47,98	3,65	100,00
Gorontalo	4,65	16,63	25,37	48,33	5,02	100,00
Sulawesi Barat	4,88	8,40	35,09	45,51	6,12	100,00
Maluku	5,53	8,72	24,72	57,27	3,76	100,00
Maluku Utara	3,10	11,02	27,40	55,40	3,08	100,00
Papua Barat	5,69	11,59	34,53	45,05	3,14	100,00
Papua	7,43	16,58	45,99	28,79	1,21	100,00
Indonesia	**9,89**	**18,78**	**26,82**	**41,44**	**3,07**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.1.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013

Perkotaan

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	11,03	20,83	34,07	10,16	19,46	4,45	100,00
Sumatera Utara	4,96	20,71	32,98	18,45	18,37	4,54	100,00
Sumatera Barat	5,83	28,41	27,39	13,28	18,38	6,71	100,00
Riau	7,40	23,53	32,73	13,55	16,39	6,40	100,00
Jambi	11,60	28,48	28,48	12,06	15,74	3,64	100,00
Sumatera Selatan	10,86	27,68	28,41	13,40	13,85	5,81	100,00
Bengkulu	11,88	25,41	27,31	11,12	15,62	8,66	100,00
Lampung	13,67	32,88	26,48	11,88	10,89	4,21	100,00
Kep.Bangka Belitung	14,27	30,72	28,63	14,01	9,40	2,97	100,00
Kep. Riau	15,72	22,62	31,07	10,26	12,78	7,55	100,00
DKI Jakarta	6,48	15,09	23,96	16,49	24,85	13,1	100,00
Jawa Barat	15,33	29,30	32,53	8,05	10,82	3,98	100,00
Jawa Tengah	26,43	29,07	23,85	8,49	8,36	3,79	100,00
DI Yogyakarta	23,86	21,36	22,30	11,21	13,11	8,17	100,00
Jawa Timur	21,94	30,15	25,23	9,14	9,81	3,73	100,00
Banten	23,46	29,82	21,32	6,83	12,50	6,06	100,00
Bali	29,77	26,14	26,11	4,92	8,47	4,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	46,77	23,12	16,78	5,16	5,20	2,97	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,80	23,47	24,73	12,76	14,89	8,36	100,00
Kalimantan Barat	25,97	25,98	25,46	8,11	10,20	4,29	100,00
Kalimantan Tengah	8,71	26,86	35,36	8,79	13,88	6,41	100,00
Kalimantan Selatan	10,71	31,00	29,77	8,47	15,47	4,57	100,00
Kalimantan Timur	10,47	23,14	36,88	9,70	16,35	3,45	100,00
Sulawesi Utara	0,74	26,68	23,31	19,20	23,56	6,51	100,00
Sulawesi Tengah	3,96	20,36	35,49	13,81	18,86	7,53	100,00
Sulawesi Selatan	18,40	18,39	25,99	9,23	17,76	10,2	100,00
Sulawesi Tenggara	16,10	27,82	22,81	10,58	16,29	6,40	100,00
Gorontalo	3,43	33,28	23,60	16,40	17,43	5,85	100,00
Sulawesi Barat	18,24	33,77	22,43	4,77	12,91	7,87	100,00
Maluku	2,72	18,96	38,26	13,85	17,11	9,10	100,00
Maluku Utara	5,02	17,59	35,37	16,36	18,15	7,51	100,00
Papua Barat	5,94	12,99	31,83	15,52	22,79	10,9	100,00
Papua	13,12	14,32	31,30	10,57	25,09	5,61	100,00
Indonesia	**18,24**	**27,00**	**27,24**	**9,98**	**12,40**	**5,14**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.1.2 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013

Perdesaan

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	21,70	32,90	34,30	6,55	3,59	0,97	100,00
Sumatera Utara	11,27	39,69	30,33	10,93	6,76	1,03	100,00
Sumatera Barat	10,08	46,84	25,60	9,55	6,30	1,63	100,00
Riau	19,00	43,74	29,35	4,62	2,62	0,68	100,00
Jambi	23,45	39,19	28,05	4,73	3,83	0,74	100,00
Sumatera Selatan	15,21	42,93	33,90	4,49	2,91	0,56	100,00
Bengkulu	22,86	44,04	24,61	4,17	3,10	1,22	100,00
Lampung	22,65	46,52	24,79	3,30	2,19	0,55	100,00
Kep.Bangka Belitung	21,69	43,73	23,66	6,35	4,43	0,13	100,00
Kep. Riau	32,52	37,14	24,79	2,97	2,57	0,00	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	21,64	39,57	33,82	2,30	2,11	0,56	100,00
Jawa Tengah	34,90	38,35	20,99	2,71	2,20	0,85	100,00
DI Yogyakarta	43,61	25,06	21,24	3,84	3,03	3,23	100,00
Jawa Timur	42,80	33,10	19,94	2,10	1,41	0,65	100,00
Banten	34,01	43,44	17,77	1,87	1,96	0,95	100,00
Bali	46,38	25,88	23,25	1,58	1,75	1,16	100,00
Nusa Tenggara Barat	52,07	29,53	13,96	2,35	1,75	0,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	33,25	40,90	20,28	2,55	2,56	0,47	100,00
Kalimantan Barat	47,26	33,89	15,50	2,46	0,87	0,03	100,00
Kalimantan Tengah	13,45	38,22	40,81	4,65	2,42	0,44	100,00
Kalimantan Selatan	19,49	49,51	24,37	2,99	2,84	0,80	100,00
Kalimantan Timur	29,63	29,23	32,79	3,01	4,42	0,91	100,00
Sulawesi Utara	2,62	39,67	33,38	12,77	9,43	2,12	100,00
Sulawesi Tengah	16,14	38,56	34,62	5,41	4,76	0,50	100,00
Sulawesi Selatan	40,71	32,02	18,64	3,74	3,68	1,21	100,00
Sulawesi Tenggara	33,49	39,66	19,82	2,99	3,22	0,81	100,00
Gorontalo	5,79	58,57	27,32	4,36	3,54	0,42	100,00
Sulawesi Barat	36,80	33,42	20,44	3,67	4,79	0,88	100,00
Maluku	7,13	35,89	41,20	7,74	6,84	1,21	100,00
Maluku Utara	15,74	37,76	31,27	7,52	6,16	1,55	100,00
Papua Barat	19,04	35,25	31,75	4,46	8,07	1,43	100,00
Papua	44,64	19,31	24,22	4,82	3,50	3,50	100,00
Indonesia	**31,13**	**37,39**	**24,42**	**3,55**	**2,69**	**0,83**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.1.3 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat	PT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	18,95	29,79	34,24	7,48	7,68	1,87	100,00
Sumatera Utara	8,24	30,57	31,60	14,54	12,34	2,71	100,00
Sumatera Barat	8,58	40,33	26,23	10,86	10,57	3,42	100,00
Riau	14,64	36,14	30,62	7,98	7,79	2,83	100,00
Jambi	19,85	35,94	28,18	6,96	7,45	1,63	100,00
Sumatera Selatan	13,68	37,57	31,97	7,62	6,76	2,40	100,00
Bengkulu	19,93	39,06	25,33	6,03	6,44	3,21	100,00
Lampung	20,51	43,27	25,19	5,34	4,26	1,42	100,00
Kep.Bangka Belitung	17,91	37,11	26,19	10,25	6,96	1,58	100,00
Kep. Riau	20,42	26,68	29,32	8,23	9,93	5,44	100,00
DKI Jakarta	6,48	15,09	23,96	16,49	24,85	13,13	100,00
Jawa Barat	17,84	33,39	33,04	5,76	7,35	2,62	100,00
Jawa Tengah	31,22	34,32	22,23	5,22	4,88	2,13	100,00
DI Yogyakarta	32,36	22,95	21,85	8,04	8,77	6,04	100,00
Jawa Timur	33,64	31,80	22,26	5,19	5,10	2,00	100,00
Banten	27,53	35,07	19,95	4,92	8,44	4,09	100,00
Bali	37,75	26,01	24,73	3,32	5,24	2,94	100,00
Nusa Tenggara Barat	49,91	26,92	15,11	3,49	3,15	1,42	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,27	37,92	21,04	4,30	4,67	1,82	100,00
Kalimantan Barat	40,44	31,36	18,69	4,27	3,85	1,39	100,00
Kalimantan Tengah	11,93	34,57	39,06	5,98	6,10	2,36	100,00
Kalimantan Selatan	16,01	42,18	26,51	5,16	7,85	2,30	100,00
Kalimantan Timur	18,27	25,62	35,22	6,98	11,49	2,42	100,00
Sulawesi Utara	1,82	34,13	29,09	15,51	15,46	3,99	100,00
Sulawesi Tengah	13,45	34,54	34,82	7,27	7,88	2,05	100,00
Sulawesi Selatan	33,65	27,71	20,97	5,48	8,13	4,06	100,00
Sulawesi Tenggara	29,42	36,89	20,52	4,77	6,28	2,12	100,00
Gorontalo	4,99	49,96	26,06	8,46	8,27	2,27	100,00
Sulawesi Barat	32,37	33,50	20,91	3,93	6,73	2,55	100,00
Maluku	5,49	29,59	40,10	10,01	10,66	4,15	100,00
Maluku Utara	12,98	32,56	32,33	9,80	9,25	3,09	100,00
Papua Barat	15,03	28,44	31,77	7,85	12,57	4,34	100,00
Papua	32,31	17,36	26,99	7,07	11,95	4,32	100,00
Indonesia	**25,17**	**32,59**	**25,72**	**6,52**	**7,17**	**2,82**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.2.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2013

Perkotaan - Laki-laki

Provinsi	Dapat Membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	71,88	1,37	21,44	5,31	100,00
Sumatera Utara	54,55	0,80	42,67	1,97	100,00
Sumatera Barat	57,63	1,61	37,38	3,39	100,00
Riau	39,49	1,18	54,93	4,40	100,00
Jambi	51,45	0,11	44,51	3,94	100,00
Sumatera Selatan	39,32	1,09	55,85	3,75	100,00
Bengkulu	44,17	0,91	50,99	3,93	100,00
Lampung	61,03	0,76	30,28	7,93	100,00
Kep.Bangka Belitung	33,31	4,24	55,54	6,91	100,00
Kep. Riau	30,05	3,92	61,50	4,53	100,00
DKI Jakarta	39,98	0,97	56,54	2,51	100,00
Jawa Barat	32,11	1,37	59,26	7,27	100,00
Jawa Tengah	47,00	1,95	36,62	14,42	100,00
DI Yogyakarta	44,55	0,65	44,63	10,17	100,00
Jawa Timur	45,01	2,30	39,84	12,84	100,00
Banten	37,37	4,11	50,04	8,47	100,00
Bali	31,67	0,95	55,55	11,84	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,12	1,78	17,73	37,37	100,00
Nusa Tenggara Timur	82,11	0,28	5,19	12,43	100,00
Kalimantan Barat	48,81	3,26	34,10	13,84	100,00
Kalimantan Tengah	51,93	0,68	45,52	1,87	100,00
Kalimantan Selatan	20,46	1,66	75,44	2,45	100,00
Kalimantan Timur	43,66	1,27	51,15	3,92	100,00
Sulawesi Utara	88,87	0,86	9,04	1,22	100,00
Sulawesi Tengah	63,01	1,58	33,12	2,29	100,00
Sulawesi Selatan	48,25	0,94	35,87	14,94	100,00
Sulawesi Tenggara	73,64	0,63	18,77	6,97	100,00
Gorontalo	59,85	0,00	36,02	4,13	100,00
Sulawesi Barat	68,45	0,00	14,81	16,74	100,00
Maluku	68,55	1,12	29,87	0,45	100,00
Maluku Utara	49,44	0,00	48,56	2,01	100,00
Papua Barat	75,40	0,00	20,32	4,28	100,00
Papua	83,16	0,00	11,30	5,54	100,00
Indonesia	**43,33**	**1,67**	**45,47**	**9,54**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.2.2 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2013

Perkotaan - Perempuan

Provinsi	Dapat Membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	61,46	2,86	16,05	19,62	100,00
Sumatera Utara	53,93	1,44	36,37	8,25	100,00
Sumatera Barat	51,88	3,44	33,76	10,92	100,00
Riau	34,17	3,86	51,14	10,83	100,00
Jambi	35,21	3,84	40,87	20,08	100,00
Sumatera Selatan	36,44	3,37	45,63	14,55	100,00
Bengkulu	51,39	3,05	29,13	16,43	100,00
Lampung	51,06	4,60	19,98	24,36	100,00
Kep.Bangka Belitung	37,18	5,40	41,19	16,23	100,00
Kep. Riau	23,98	6,64	47,96	21,42	100,00
DKI Jakarta	40,53	4,60	46,61	8,26	100,00
Jawa Barat	29,57	5,06	45,46	19,92	100,00
Jawa Tengah	32,05	3,52	22,73	41,71	100,00
DI Yogyakarta	34,05	1,79	24,52	39,63	100,00
Jawa Timur	34,18	3,95	26,02	35,85	100,00
Banten	27,29	9,86	33,59	29,26	100,00
Bali	30,13	2,30	20,62	46,95	100,00
Nusa Tenggara Barat	30,20	1,78	7,40	60,62	100,00
Nusa Tenggara Timur	73,32	1,90	2,94	21,85	100,00
Kalimantan Barat	39,73	6,07	19,93	34,27	100,00
Kalimantan Tengah	45,42	4,12	33,64	16,82	100,00
Kalimantan Selatan	22,40	4,31	57,04	16,25	100,00
Kalimantan Timur	44,32	2,73	37,38	15,58	100,00
Sulawesi Utara	87,04	0,09	10,70	2,16	100,00
Sulawesi Tengah	62,23	1,76	29,94	6,07	100,00
Sulawesi Selatan	47,73	2,39	23,93	25,95	100,00
Sulawesi Tenggara	54,35	2,03	11,00	32,62	100,00
Gorontalo	41,92	1,16	46,78	10,14	100,00
Sulawesi Barat	55,21	5,44	6,25	33,10	100,00
Maluku	76,04	0,00	17,51	6,44	100,00
Maluku Utara	49,33	0,06	38,90	11,71	100,00
Papua Barat	79,09	0,00	14,03	6,88	100,00
Papua	68,99	0,34	4,61	26,05	100,00
Indonesia	**36,36**	**3,97**	**32,08**	**27,58**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.2.3 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2013

Perkotaan – Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Dapat Membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	66,28	2,17	18,54	13,01	100,00
Sumatera Utara	54,21	1,15	39,22	5,41	100,00
Sumatera Barat	54,43	2,63	35,36	7,58	100,00
Riau	36,82	2,52	53,03	7,63	100,00
Jambi	43,20	2,00	42,66	12,14	100,00
Sumatera Selatan	37,78	2,31	50,38	9,53	100,00
Bengkulu	47,89	2,01	39,73	10,37	100,00
Lampung	55,94	2,72	25,02	16,33	100,00
Kep.Bangka Belitung	35,32	4,84	48,11	11,74	100,00
Kep. Riau	27,03	5,28	54,76	12,93	100,00
DKI Jakarta	40,27	2,85	51,40	5,49	100,00
Jawa Barat	30,79	3,28	52,09	13,84	100,00
Jawa Tengah	38,90	2,80	29,09	29,21	100,00
DI Yogyakarta	38,78	1,28	33,58	26,37	100,00
Jawa Timur	39,11	3,20	32,31	25,38	100,00
Banten	32,22	7,05	41,63	19,10	100,00
Bali	30,85	1,66	37,05	30,43	100,00
Nusa Tenggara Barat	36,23	1,78	12,22	49,76	100,00
Nusa Tenggara Timur	77,48	1,13	4,00	17,39	100,00
Kalimantan Barat	44,19	4,69	26,88	24,24	100,00
Kalimantan Tengah	48,74	2,36	39,70	9,20	100,00
Kalimantan Selatan	21,50	3,08	65,57	9,85	100,00
Kalimantan Timur	43,97	1,96	44,67	9,41	100,00
Sulawesi Utara	87,88	0,44	9,94	1,73	100,00
Sulawesi Tengah	62,60	1,68	31,45	4,27	100,00
Sulawesi Selatan	47,96	1,76	29,10	21,18	100,00
Sulawesi Tenggara	63,29	1,38	14,60	20,73	100,00
Gorontalo	49,73	0,66	42,10	7,52	100,00
Sulawesi Barat	61,22	2,97	10,13	25,68	100,00
Maluku	72,56	0,52	23,26	3,66	100,00
Maluku Utara	49,38	0,03	43,53	7,06	100,00
Papua Barat	77,09	0,00	17,43	5,48	100,00
Papua	76,86	0,15	8,33	14,66	100,00
Indonesia	**39,62**	**2,89**	**38,34**	**19,14**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.2.4 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2013

Perdesaan – Laki-laki

Provinsi	Dapat Membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	62,79	2,31	22,92	11,98	100,00
Sumatera Utara	68,42	0,25	26,36	4,97	100,00
Sumatera Barat	63,88	0,73	27,57	7,83	100,00
Riau	31,86	3,01	58,15	6,98	100,00
Jambi	32,51	1,76	54,19	11,54	100,00
Sumatera Selatan	50,11	1,63	40,40	7,86	100,00
Bengkulu	50,26	2,45	35,58	11,71	100,00
Lampung	63,58	2,08	22,75	11,59	100,00
Kep.Bangka Belitung	36,07	1,24	53,36	9,33	100,00
Kep. Riau	31,25	0,31	52,76	15,68	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	33,05	2,95	52,77	11,23	100,00
Jawa Tengah	44,70	2,61	29,57	23,12	100,00
DI Yogyakarta	40,38	0,47	29,15	30,00	100,00
Jawa Timur	42,52	3,73	24,97	28,78	100,00
Banten	19,53	10,10	53,40	16,97	100,00
Bali	32,02	1,28	41,05	25,65	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,37	4,65	11,08	41,90	100,00
Nusa Tenggara Timur	67,98	2,33	2,99	26,70	100,00
Kalimantan Barat	51,77	4,10	16,37	27,76	100,00
Kalimantan Tengah	55,81	3,00	35,76	5,44	100,00
Kalimantan Selatan	25,07	1,14	63,61	10,18	100,00
Kalimantan Timur	57,30	1,35	26,44	14,90	100,00
Sulawesi Utara	87,84	0,83	8,51	2,82	100,00
Sulawesi Tengah	57,91	2,40	25,74	13,95	100,00
Sulawesi Selatan	40,56	4,13	23,49	31,82	100,00
Sulawesi Tenggara	62,66	0,76	14,49	22,10	100,00
Gorontalo	64,28	2,43	23,20	10,09	100,00
Sulawesi Barat	65,81	1,28	6,70	26,20	100,00
Maluku	63,97	2,59	27,60	5,84	100,00
Maluku Utara	59,39	1,48	32,74	6,39	100,00
Papua Barat	63,34	0,54	21,03	15,10	100,00
Papua	52,41	0,45	5,90	41,24	100,00
Indonesia	**46,17**	**2,79**	**31,13**	**19,91**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.2.5 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2013

Perdesaan – Perempuan

Provinsi	Dapat Membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	46,90	7,63	13,23	32,24	100,00
Sumatera Utara	55,26	2,09	21,64	21,01	100,00
Sumatera Barat	54,44	3,21	24,78	17,57	100,00
Riau	26,80	10,44	36,07	26,69	100,00
Jambi	24,31	8,69	36,67	30,33	100,00
Sumatera Selatan	40,34	5,08	30,33	24,24	100,00
Bengkulu	38,49	4,25	17,69	39,57	100,00
Lampung	44,75	5,46	9,71	40,08	100,00
Kep.Bangka Belitung	36,64	5,58	28,63	29,15	100,00
Kep. Riau	23,61	7,70	29,36	39,33	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	24,48	6,94	38,04	30,54	100,00
Jawa Tengah	27,09	4,42	11,61	56,88	100,00
DI Yogyakarta	28,96	1,44	10,71	58,89	100,00
Jawa Timur	23,21	3,38	10,47	62,94	100,00
Banten	13,96	17,85	29,88	38,31	100,00
Bali	20,88	1,79	10,23	67,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	26,04	1,34	4,15	68,48	100,00
Nusa Tenggara Timur	49,87	1,72	0,81	47,59	100,00
Kalimantan Barat	23,78	5,99	8,07	62,16	100,00
Kalimantan Tengah	50,77	7,52	22,77	18,94	100,00
Kalimantan Selatan	21,32	8,94	37,78	31,95	100,00
Kalimantan Timur	36,51	5,07	16,32	42,10	100,00
Sulawesi Utara	86,78	0,98	6,67	5,56	100,00
Sulawesi Tengah	54,00	3,74	16,74	25,53	100,00
Sulawesi Selatan	27,46	4,52	14,33	53,69	100,00
Sulawesi Tenggara	35,84	1,43	5,32	57,41	100,00
Gorontalo	50,09	1,79	31,20	16,92	100,00
Sulawesi Barat	35,83	4,67	4,91	54,59	100,00
Maluku	67,52	2,53	16,34	13,61	100,00
Maluku Utara	57,05	5,70	11,46	25,78	100,00
Papua Barat	51,72	0,00	21,25	27,03	100,00
Papua	53,01	0,82	4,95	41,22	100,00
Indonesia	**31,53**	**4,66**	**17,15**	**46,66**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.2.6 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2013

Perdesaan – Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Dapat Membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	54,07	5,23	17,60	23,11	100,00
Sumatera Utara	61,06	1,28	23,72	13,94	100,00
Sumatera Barat	58,62	2,11	26,02	13,25	100,00
Riau	29,36	6,69	47,23	16,72	100,00
Jambi	28,43	5,21	45,47	20,89	100,00
Sumatera Selatan	45,09	3,40	35,23	16,27	100,00
Bengkulu	44,37	3,35	26,63	25,66	100,00
Lampung	54,33	3,74	16,35	25,58	100,00
Kep.Bangka Belitung	36,36	3,43	40,90	19,31	100,00
Kep. Riau	27,52	3,92	41,34	27,22	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	28,60	5,02	45,11	21,27	100,00
Jawa Tengah	35,25	3,58	19,93	41,24	100,00
DI Yogyakarta	33,97	1,01	18,81	46,20	100,00
Jawa Timur	31,88	3,54	16,98	47,61	100,00
Banten	16,63	14,13	41,16	28,08	100,00
Bali	26,10	1,55	24,67	47,67	100,00
Nusa Tenggara Barat	33,80	2,91	7,44	55,85	100,00
Nusa Tenggara Timur	58,48	2,01	1,85	37,66	100,00
Kalimantan Barat	37,95	5,03	12,27	44,74	100,00
Kalimantan Tengah	53,37	5,18	29,48	11,96	100,00
Kalimantan Selatan	23,02	5,41	49,48	22,09	100,00
Kalimantan Timur	47,86	3,04	21,85	27,25	100,00
Sulawesi Utara	87,28	0,91	7,54	4,26	100,00
Sulawesi Tengah	55,98	3,06	21,28	19,68	100,00
Sulawesi Selatan	33,15	4,35	18,30	44,20	100,00
Sulawesi Tenggara	48,43	1,11	9,63	40,83	100,00
Gorontalo	56,79	2,09	27,42	13,70	100,00
Sulawesi Barat	50,07	3,06	5,76	41,10	100,00
Maluku	65,78	2,56	21,86	9,80	100,00
Maluku Utara	58,26	3,52	22,46	15,76	100,00
Papua Barat	58,24	0,30	21,12	20,33	100,00
Papua	52,66	0,60	5,51	41,23	100,00
Indonesia	**38,38**	**3,79**	**23,69**	**34,15**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.2.7 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2013

Perkotaan+Perdesaan – Laki-laki

Provinsi	Dapat Membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	65,18	2,06	22,53	10,23	100,00
Sumatera Utara	61,68	0,52	34,30	3,51	100,00
Sumatera Barat	61,67	1,04	31,03	6,26	100,00
Riau	34,70	2,33	56,95	6,02	100,00
Jambi	38,18	1,27	51,29	9,26	100,00
Sumatera Selatan	46,43	1,44	45,67	6,46	100,00
Bengkulu	48,66	2,05	39,61	9,68	100,00
Lampung	62,99	1,78	24,49	10,74	100,00
Kep.Bangka Belitung	34,68	2,74	54,46	8,11	100,00
Kep. Riau	30,39	2,90	59,03	7,68	100,00
DKI Jakarta	39,98	0,97	56,54	2,51	100,00
Jawa Barat	32,48	2,00	56,67	8,85	100,00
Jawa Tengah	45,69	2,33	32,61	19,37	100,00
DI Yogyakarta	42,78	0,57	38,06	18,59	100,00
Jawa Timur	43,62	3,10	31,55	21,73	100,00
Banten	30,58	6,39	51,32	11,71	100,00
Bali	31,84	1,10	48,60	18,46	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,67	3,49	13,76	40,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	70,38	1,98	3,36	24,27	100,00
Kalimantan Barat	50,84	3,83	21,93	23,40	100,00
Kalimantan Tengah	54,57	2,26	38,86	4,30	100,00
Kalimantan Selatan	23,21	1,35	68,37	7,07	100,00
Kalimantan Timur	49,31	1,30	40,91	8,47	100,00
Sulawesi Utara	88,28	0,84	8,73	2,15	100,00
Sulawesi Tengah	58,99	2,23	27,29	11,49	100,00
Sulawesi Selatan	42,99	3,12	27,40	26,48	100,00
Sulawesi Tenggara	65,20	0,73	15,48	18,59	100,00
Gorontalo	62,85	1,64	27,34	8,17	100,00
Sulawesi Barat	66,42	0,99	8,57	24,02	100,00
Maluku	65,62	2,06	28,42	3,90	100,00
Maluku Utara	56,96	1,12	36,59	5,32	100,00
Papua Barat	66,93	0,38	20,82	11,87	100,00
Papua	64,04	0,28	7,95	27,73	100,00
Indonesia	**44,86**	**2,27**	**37,76**	**15,12**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.2.8 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2013

Perkotaan+Perdesaan – Perempuan

Provinsi	Dapat Membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	50,60	6,42	13,94	29,04	100,00
Sumatera Utara	54,63	1,78	28,65	14,95	100,00
Sumatera Barat	53,54	3,29	27,95	15,22	100,00
Riau	29,60	7,95	41,78	20,67	100,00
Jambi	27,67	7,20	37,97	27,17	100,00
Sumatera Selatan	38,93	4,47	35,86	20,74	100,00
Bengkulu	42,01	3,92	20,81	33,25	100,00
Lampung	46,30	5,25	12,23	36,23	100,00
Kep.Bangka Belitung	36,92	5,49	35,11	22,48	100,00
Kep. Riau	23,88	6,93	42,84	26,35	100,00
DKI Jakarta	40,53	4,60	46,61	8,26	100,00
Jawa Barat	27,54	5,81	42,50	24,15	100,00
Jawa Tengah	29,25	4,03	16,47	50,25	100,00
DI Yogyakarta	31,84	1,64	18,51	48,01	100,00
Jawa Timur	28,00	3,63	17,25	51,12	100,00
Banten	22,10	12,97	32,15	32,78	100,00
Bali	25,68	2,06	15,62	56,64	100,00
Nusa Tenggara Barat	27,75	1,52	5,48	65,25	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,90	1,75	1,18	43,17	100,00
Kalimantan Barat	28,99	6,02	11,94	53,04	100,00
Kalimantan Tengah	49,04	6,42	26,30	18,25	100,00
Kalimantan Selatan	21,74	7,13	45,32	25,81	100,00
Kalimantan Timur	41,20	3,66	28,99	26,14	100,00
Sulawesi Utara	86,90	0,60	8,42	4,09	100,00
Sulawesi Tengah	55,91	3,28	19,79	21,02	100,00
Sulawesi Selatan	33,88	3,85	17,37	44,90	100,00
Sulawesi Tenggara	40,20	1,57	6,66	51,56	100,00
Gorontalo	47,19	1,56	36,74	14,51	100,00
Sulawesi Barat	40,59	4,86	5,24	49,31	100,00
Maluku	70,79	1,56	16,79	10,86	100,00
Maluku Utara	54,95	4,17	18,93	21,95	100,00
Papua Barat	60,36	0,00	18,97	20,67	100,00
Papua	59,54	0,62	4,81	35,02	100,00
Indonesia	**33,76**	**4,35**	**24,04**	**37,85**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 4.2.9 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2013

Perkotaan+Perdesaan – Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Dapat Membaca			Tidak Dapat	Jumlah
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Huruf Latin & Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	57,21	4,44	17,84	20,51	100,00
Sumatera Utara	57,77	1,22	31,17	9,84	100,00
Sumatera Barat	57,14	2,29	29,31	11,25	100,00
Riau	32,16	5,12	49,41	13,30	100,00
Jambi	32,92	4,24	44,62	18,23	100,00
Sumatera Selatan	42,52	3,02	40,55	13,91	100,00
Bengkulu	45,31	2,99	30,13	21,57	100,00
Lampung	54,71	3,50	18,41	23,38	100,00
Kep.Bangka Belitung	35,83	4,15	44,57	15,46	100,00
Kep. Riau	27,17	4,90	51,02	16,92	100,00
DKI Jakarta	40,27	2,85	51,40	5,49	100,00
Jawa Barat	29,92	3,98	49,31	16,80	100,00
Jawa Tengah	36,83	3,24	23,91	36,01	100,00
DI Yogyakarta	36,71	1,16	27,22	34,91	100,00
Jawa Timur	35,05	3,39	23,71	37,85	100,00
Banten	26,21	9,78	41,45	22,56	100,00
Bali	28,57	1,61	31,11	38,71	100,00
Nusa Tenggara Barat	34,79	2,45	9,39	53,37	100,00
Nusa Tenggara Timur	61,73	1,86	2,21	34,20	100,00
Kalimantan Barat	39,95	4,92	16,95	38,18	100,00
Kalimantan Tengah	51,88	4,28	32,76	11,08	100,00
Kalimantan Selatan	22,42	4,48	55,86	17,24	100,00
Kalimantan Timur	45,55	2,40	35,38	16,67	100,00
Sulawesi Utara	87,54	0,71	8,57	3,18	100,00
Sulawesi Tengah	57,44	2,75	23,53	16,27	100,00
Sulawesi Selatan	37,83	3,53	21,72	36,91	100,00
Sulawesi Tenggara	51,91	1,18	10,79	36,12	100,00
Gorontalo	54,39	1,60	32,42	11,59	100,00
Sulawesi Barat	52,73	3,04	6,80	37,42	100,00
Maluku	68,30	1,80	22,38	7,52	100,00
Maluku Utara	55,97	2,62	27,89	13,52	100,00
Papua Barat	64,01	0,21	20,00	15,79	100,00
Papua	62,13	0,43	6,61	30,83	100,00
Indonesia	**38,95**	**3,38**	**30,46**	**27,21**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.1 Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	55,57	57,49	56,60	61,06	71,21	66,63	59,62	67,73	64,05
Sumatera Utara	40,68	44,64	42,85	48,63	48,31	48,45	44,76	46,56	45,76
Sumatera Barat	50,30	56,66	53,84	56,22	55,87	56,02	54,13	56,15	55,25
Riau	43,64	49,88	46,77	54,05	52,67	53,37	50,17	51,61	50,89
Jambi	33,20	37,01	35,13	43,56	47,38	45,46	40,46	44,18	42,32
Sumatera Selatan	61,03	59,20	60,05	45,58	47,77	46,70	50,85	51,89	51,39
Bengkulu	50,16	58,50	54,46	47,83	56,26	52,05	48,44	56,87	52,69
Lampung	41,90	43,15	42,54	50,44	54,04	52,21	48,47	51,37	49,91
Kep. Bangka Belitung	48,20	57,21	52,86	47,56	55,65	51,64	47,88	56,45	52,26
Kep. Riau	35,78	37,24	36,50	46,16	47,15	46,65	38,72	39,97	39,34
DKI Jakarta	53,63	54,59	54,13	-	-	-	53,63	54,59	54,13
Jawa Barat	49,48	55,79	52,76	56,77	57,68	57,24	52,38	56,54	54,54
Jawa Tengah	50,07	51,15	50,65	48,37	47,87	48,10	49,10	49,30	49,21
DI Yogyakarta	54,06	57,88	56,16	51,85	47,48	49,40	53,12	53,35	53,25
Jawa Timur	46,25	48,75	47,61	44,05	48,00	46,23	45,02	48,33	46,83
Banten	54,23	53,80	54,01	64,90	63,14	63,98	58,30	57,44	57,85
Bali	49,74	52,58	51,24	59,69	63,70	61,82	54,51	57,93	56,32
Nusa Tenggara Barat	65,80	66,39	66,11	61,41	60,37	60,86	63,18	62,84	63,00
Nusa Tenggara Timur	56,81	58,42	57,66	57,76	59,00	58,41	57,60	58,90	58,28
Kalimantan Barat	51,38	52,08	51,74	51,36	58,40	54,84	51,36	56,34	53,84
Kalimantan Tengah	38,47	38,01	38,24	50,44	57,90	54,04	46,63	51,44	48,97
Kalimantan Selatan	51,13	57,39	54,49	58,83	63,08	61,15	55,73	60,85	58,51
Kalimantan Timur	40,42	34,38	37,58	50,66	50,99	50,81	44,66	41,00	42,96
Sulawesi Utara	39,79	33,42	36,34	48,75	46,83	47,74	45,00	41,02	42,88
Sulawesi Tengah	57,09	64,37	60,91	53,17	51,29	52,24	54,00	54,32	54,16
Sulawesi Selatan	43,61	45,13	44,47	47,61	48,26	47,98	46,34	47,27	46,87
Sulawesi Tenggara	58,30	58,89	58,61	55,07	56,77	55,97	55,82	57,27	56,59
Gorontalo	54,65	57,43	56,22	61,21	62,63	61,96	59,09	60,78	60,00
Sulawesi Barat	63,30	62,31	62,76	53,72	49,92	51,72	55,93	52,96	54,36
Maluku	37,39	34,85	36,03	48,98	48,45	48,71	44,81	43,24	43,99
Maluku Utara	31,73	43,69	37,95	37,78	44,87	41,21	36,31	44,55	40,37
Papua Barat	45,20	44,09	44,69	35,67	38,86	37,07	38,51	40,51	39,40
Papua	46,58	58,97	52,08	37,80	36,78	37,38	41,12	45,85	43,13
Indonesia	**49,02**	**51,85**	**50,53**	**50,47**	**51,98**	**51,27**	**49,80**	**51,92**	**50,93**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

https://www.bps.go.id

Tabel 5.2 Angka Kesakitan Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2013

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	32,90	27,34	29,91	33,98	41,65	38,19	33,70	38,02	36,06
Sumatera Utara	19,07	20,37	19,79	30,53	30,62	30,58	24,96	25,75	25,40
Sumatera Barat	27,46	26,29	26,81	31,93	25,35	28,27	30,35	25,68	27,75
Riau	19,64	22,05	20,85	27,40	22,92	25,18	24,51	22,59	23,55
Jambi	18,13	19,01	18,58	25,54	26,29	25,91	23,32	24,04	23,68
Sumatera Selatan	22,63	21,38	21,96	23,25	22,05	22,64	23,04	21,81	22,40
Bengkulu	23,92	35,32	29,79	26,16	32,75	29,46	25,57	33,45	29,55
Lampung	17,77	18,20	17,99	24,23	24,19	24,21	22,74	22,72	22,73
Kep. Bangka Belitung	21,37	21,40	21,38	16,30	22,74	19,55	18,85	22,05	20,48
Kep. Riau	16,34	20,62	18,47	28,31	23,41	25,92	19,73	21,39	20,55
DKI Jakarta	21,64	22,18	21,92	-	-	-	21,64	22,18	21,92
Jawa Barat	23,04	27,06	25,13	26,67	27,57	27,14	24,49	27,27	25,93
Jawa Tengah	22,67	22,21	22,42	23,15	22,33	22,71	22,95	22,28	22,59
DI Yogyakarta	18,84	17,89	18,32	25,18	22,35	23,60	21,53	19,83	20,59
Jawa Timur	21,69	22,65	22,21	23,18	23,88	23,56	22,52	23,34	22,97
Banten	24,41	23,55	23,97	32,59	25,18	28,73	27,52	24,19	25,80
Bali	27,56	26,86	27,19	35,10	39,06	37,20	31,17	32,73	32,00
Nusa Tenggara Barat	39,95	37,18	38,47	33,23	32,08	32,62	35,93	34,18	35,01
Nusa Tenggara Timur	28,16	30,26	29,27	32,84	31,90	32,35	32,04	31,62	31,82
Kalimantan Barat	26,35	22,82	24,55	28,37	31,49	29,91	27,74	28,66	28,20
Kalimantan Tengah	19,61	17,10	18,38	33,23	33,68	33,45	28,89	28,30	28,60
Kalimantan Selatan	18,23	19,74	19,04	27,08	28,28	27,74	23,52	24,94	24,29
Kalimantan Timur	18,59	16,48	17,59	28,08	26,78	27,49	22,52	20,58	21,62
Sulawesi Utara	21,66	15,40	18,27	33,46	26,90	30,00	28,52	21,92	25,00
Sulawesi Tengah	27,57	39,97	34,08	34,69	30,49	32,61	33,19	32,69	32,94
Sulawesi Selatan	20,00	19,16	19,52	26,08	23,81	24,79	24,16	22,34	23,13
Sulawesi Tenggara	30,32	34,65	32,64	38,38	41,80	40,20	36,52	40,11	38,43
Gorontalo	21,04	28,29	25,14	33,21	30,37	31,71	29,29	29,63	29,47
Sulawesi Barat	33,35	35,08	34,30	32,46	26,25	29,20	32,67	28,42	30,42
Maluku	20,47	16,16	18,16	30,50	27,32	28,88	26,90	23,04	24,90
Maluku Utara	15,69	23,68	19,84	24,71	35,21	29,79	22,51	32,07	27,22
Papua Barat	31,31	24,90	28,37	22,26	20,61	21,54	24,96	21,96	23,63
Papua	26,98	33,42	29,84	22,25	21,33	21,87	24,04	26,27	24,99
Indonesia	**22,62**	**23,56**	**23,12**	**26,41**	**26,08**	**26,24**	**24,66**	**24,92**	**24,80**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.3.1 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2013

Perkotaan

Provinsi	Lamanya Sakit (Hari)					
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	43,78	27,83	5,67	4,86	17,86	100,00
Sumatera Utara	44,81	34,80	4,19	1,88	14,31	100,00
Sumatera Barat	36,31	33,97	5,85	4,70	19,17	100,00
Riau	45,35	25,38	5,89	4,12	19,27	100,00
Jambi	46,89	31,04	9,87	3,06	9,14	100,00
Sumatera Selatan	32,40	31,84	2,42	10,33	23,01	100,00
Bengkulu	43,25	27,61	4,88	5,62	18,64	100,00
Lampung	44,57	27,80	4,14	5,04	18,45	100,00
Kep. Bangka Belitung	47,04	25,65	5,37	3,28	18,66	100,00
Kep. Riau	31,78	41,85	1,00	4,27	21,10	100,00
DKI Jakarta	60,22	21,83	3,30	2,01	12,64	100,00
Jawa Barat	42,15	35,00	8,06	2,94	11,86	100,00
Jawa Tengah	43,27	29,86	5,56	4,25	17,06	100,00
DI Yogyakarta	45,08	21,21	6,58	4,69	22,44	100,00
Jawa Timur	40,90	29,38	6,15	5,41	18,16	100,00
Banten	42,84	34,37	4,82	1,55	16,42	100,00
Bali	50,30	25,43	5,90	1,41	16,95	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,68	37,82	9,01	1,80	12,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	35,72	27,42	5,02	2,20	29,64	100,00
Kalimantan Barat	46,90	32,10	4,71	1,36	14,93	100,00
Kalimantan Tengah	46,36	25,28	5,75	1,23	21,37	100,00
Kalimantan Selatan	42,13	30,89	9,05	1,10	16,83	100,00
Kalimantan Timur	41,55	38,59	7,28	0,95	11,63	100,00
Sulawesi Utara	37,45	32,12	7,54	2,51	20,38	100,00
Sulawesi Tengah	58,40	28,75	5,40	2,65	4,80	100,00
Sulawesi Selatan	46,10	27,39	6,18	1,66	18,67	100,00
Sulawesi Tenggara	46,24	25,32	4,21	2,24	21,99	100,00
Gorontalo	54,14	35,54	4,84	0,00	5,48	100,00
Sulawesi Barat	26,03	40,86	1,17	2,79	29,15	100,00
Maluku	53,80	17,31	7,41	1,24	20,24	100,00
Maluku Utara	22,04	56,15	5,83	3,72	12,26	100,00
Papua Barat	32,65	37,66	14,10	0,00	15,59	100,00
Papua	30,87	51,64	5,18	0,00	12,31	100,00
Indonesia	**43,43**	**30,99**	**6,17**	**3,57**	**15,84**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.3.2 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2013

Perdesaan

Provinsi	Lamanya Sakit (Hari)					
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	49,42	31,90	4,65	4,96	9,07	100,00
Sumatera Utara	41,85	31,67	6,86	2,08	17,55	100,00
Sumatera Barat	37,56	30,28	7,75	7,57	16,84	100,00
Riau	41,85	32,74	4,32	4,18	16,91	100,00
Jambi	40,32	32,35	8,57	4,41	14,35	100,00
Sumatera Selatan	46,94	31,04	5,04	4,37	12,61	100,00
Bengkulu	43,69	30,65	6,37	4,17	15,12	100,00
Lampung	40,71	35,78	5,31	3,30	14,90	100,00
Kep. Bangka Belitung	45,07	15,65	4,33	12,47	22,48	100,00
Kep. Riau	36,00	23,25	5,34	6,43	28,99	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	41,03	36,12	7,35	3,46	12,04	100,00
Jawa Tengah	46,67	31,47	4,70	3,31	13,85	100,00
DI Yogyakarta	53,96	24,65	4,61	3,80	12,97	100,00
Jawa Timur	40,57	29,71	7,13	3,44	19,15	100,00
Banten	40,15	34,32	8,62	3,88	13,02	100,00
Bali	46,49	33,29	4,62	2,74	12,86	100,00
Nusa Tenggara Barat	35,87	41,69	9,66	3,94	8,84	100,00
Nusa Tenggara Timur	33,83	41,47	7,85	2,42	14,43	100,00
Kalimantan Barat	43,62	36,58	6,36	1,28	12,17	100,00
Kalimantan Tengah	49,67	31,47	5,19	1,55	12,13	100,00
Kalimantan Selatan	41,88	25,82	5,02	5,94	21,33	100,00
Kalimantan Timur	47,67	27,70	5,52	3,82	15,29	100,00
Sulawesi Utara	34,78	41,91	6,48	3,34	13,49	100,00
Sulawesi Tengah	41,00	35,17	7,96	3,75	12,12	100,00
Sulawesi Selatan	41,67	29,31	6,72	4,06	18,25	100,00
Sulawesi Tenggara	41,60	35,04	7,57	2,62	13,18	100,00
Gorontalo	44,74	32,78	11,45	1,19	9,84	100,00
Sulawesi Barat	37,48	35,74	4,29	2,79	19,70	100,00
Maluku	35,40	40,31	11,77	3,94	8,57	100,00
Maluku Utara	31,82	39,56	10,42	3,99	14,20	100,00
Papua Barat	42,18	41,82	7,76	2,01	6,24	100,00
Papua	34,81	48,24	6,64	2,89	7,42	100,00
Indonesia	**42,26**	**32,80**	**6,50**	**3,54**	**14,89**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.3.3 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Lamanya Sakit (Hari)					
	1-3	4-7	8-14	15-21	22-30	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	48,22	31,03	4,87	4,94	10,95	100,00
Sumatera Utara	42,96	32,84	5,86	2,00	16,34	100,00
Sumatera Barat	37,14	31,54	7,10	6,59	17,63	100,00
Riau	43,02	30,29	4,84	4,16	17,69	100,00
Jambi	41,90	32,03	8,88	4,09	13,10	100,00
Sumatera Selatan	41,93	31,31	4,14	6,42	16,20	100,00
Bengkulu	43,57	29,83	5,97	4,56	16,07	100,00
Lampung	41,43	34,28	5,09	3,63	15,57	100,00
Kep. Bangka Belitung	46,11	20,97	4,88	7,58	20,45	100,00
Kep. Riau	33,26	35,30	2,53	5,03	23,88	100,00
DKI Jakarta	60,22	21,83	3,30	2,01	12,64	100,00
Jawa Barat	41,68	35,47	7,76	3,15	11,94	100,00
Jawa Tengah	45,20	30,77	5,07	3,72	15,24	100,00
DI Yogyakarta	49,46	22,91	5,61	4,25	17,77	100,00
Jawa Timur	40,71	29,57	6,72	4,28	18,73	100,00
Banten	41,69	34,35	6,45	2,55	14,96	100,00
Bali	48,17	29,82	5,19	2,15	14,67	100,00
Nusa Tenggara Barat	37,13	39,96	9,37	2,98	10,56	100,00
Nusa Tenggara Timur	34,13	39,26	7,41	2,38	16,82	100,00
Kalimantan Barat	44,53	35,33	5,90	1,30	12,94	100,00
Kalimantan Tengah	48,98	30,19	5,30	1,49	14,03	100,00
Kalimantan Selatan	41,96	27,40	6,27	4,44	19,93	100,00
Kalimantan Timur	44,72	32,95	6,37	2,43	13,52	100,00
Sulawesi Utara	35,61	38,86	6,81	3,08	15,64	100,00
Sulawesi Tengah	44,98	33,70	7,38	3,50	10,45	100,00
Sulawesi Selatan	42,85	28,80	6,58	3,42	18,36	100,00
Sulawesi Tenggara	42,52	33,11	6,90	2,54	14,93	100,00
Gorontalo	47,47	33,58	9,53	0,85	8,58	100,00
Sulawesi Barat	34,40	37,12	3,45	2,79	22,24	100,00
Maluku	40,39	34,07	10,59	3,21	11,74	100,00
Maluku Utara	29,98	42,68	9,56	3,94	13,84	100,00
Papua Barat	38,68	40,29	10,09	1,27	9,67	100,00
Papua	32,97	49,83	5,96	1,54	9,71	100,00
Indonesia	**42,77**	**32,02**	**6,35**	**3,56**	**15,30**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.4 Rata-rata Lama Sakit yang Dialami oleh Penduduk Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Kategori Lansia, 2013

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Pra Lansia	Lansia Muda	Lansia Tua	Pra Lansia	Lansia Muda	Lansia Tua	Pra Lansia	Lansia Muda	Lansia Tua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4,84	9,22	10,32	5,19	6,76	8,28	5,11	7,28	8,71
Sumatera Utara	6,50	8,16	7,65	6,52	8,64	11,41	6,51	8,45	10,35
Sumatera Barat	6,85	9,12	14,80	6,71	9,37	11,72	6,75	9,29	12,82
Riau	5,61	9,28	14,62	5,71	8,93	11,04	5,67	9,05	12,08
Jambi	6,25	7,27	7,61	6,55	8,60	9,15	6,47	8,28	8,78
Sumatera Selatan	6,23	11,05	13,86	6,24	7,69	10,05	6,24	8,82	11,56
Bengkulu	7,92	9,26	13,37	6,94	8,09	11,71	7,18	8,41	12,13
Lampung	4,67	9,25	11,16	6,25	7,91	11,43	5,91	8,17	11,39
Kep. Bangka Belitung	7,53	8,61	13,85	7,11	10,53	13,29	7,34	9,45	13,51
Kep. Riau	4,66	9,13	21,16	4,44	10,89	22,53	4,58	9,74	21,70
DKI Jakarta	5,26	7,21	6,61	-	-	-	5,26	7,21	6,61
Jawa Barat	6,73	7,84	9,55	6,21	7,57	10,42	6,53	7,73	9,96
Jawa Tengah	5,83	8,91	10,71	5,64	7,59	10,34	5,73	8,17	10,48
DI Yogyakarta	7,54	10,27	10,67	5,74	7,26	10,81	6,87	8,74	10,73
Jawa Timur	6,57	9,51	10,34	6,81	8,82	14,25	6,70	9,11	12,64
Banten	6,72	8,70	9,10	6,76	8,32	10,34	6,73	8,54	9,66
Bali	6,01	8,44	9,75	5,59	7,54	9,27	5,78	7,95	9,43
Nusa Tenggara Barat	5,51	7,83	10,25	7,18	6,85	11,50	6,49	7,29	10,98
Nusa Tenggara Timur	6,57	12,05	13,30	6,41	8,26	12,33	6,43	8,80	12,56
Kalimantan Barat	5,91	7,94	9,08	5,73	7,49	8,62	5,79	7,61	8,82
Kalimantan Tengah	6,04	9,08	13,99	5,91	6,63	11,74	5,94	7,11	12,35
Kalimantan Selatan	6,53	8,50	10,72	5,71	9,33	15,68	6,01	9,08	13,84
Kalimantan Timur	6,39	7,60	7,89	6,28	8,20	10,15	6,34	7,91	9,10
Sulawesi Utara	8,00	9,60	18,25	7,00	8,86	7,28	7,35	9,10	9,07
Sulawesi Tengah	6,74	5,36	9,79	6,50	7,92	11,17	6,56	7,34	10,84
Sulawesi Selatan	6,67	9,26	10,34	6,81	8,88	12,72	6,77	8,99	12,24
Sulawesi Tenggara	6,29	9,90	9,82	6,41	7,85	11,04	6,38	8,26	10,79
Gorontalo	5,08	5,52	5,18	6,61	7,11	9,78	6,11	6,62	9,00
Sulawesi Barat	6,15	11,91	16,95	6,70	9,38	12,33	6,58	10,07	13,43
Maluku	7,59	8,55	14,96	6,87	6,89	14,11	7,11	7,33	14,37
Maluku Utara	4,81	8,05	9,48	5,79	8,88	9,94	5,60	8,74	9,81
Papua Barat	5,97	9,24	5,04	5,96	6,16	8,85	5,96	7,33	8,28
Papua	7,47	7,65	8,52	4,63	6,17	11,56	5,44	6,84	9,73
Indonesia	**6,32**	**8,63**	**10,27**	**6,27**	**8,09**	**11,48**	**6,29**	**8,32**	**11,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.5 Rata-rata Lama Sakit yang Dialami oleh Penduduk Lansia menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Kategori Lansia, 2013

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	Pra Lansia	Lansia Muda	Lansia Tua	Pra Lansia	Lansia Muda	Lansia Tua	Pra Lansia	Lansia Muda	Lansia Tua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	5,60	7,70	9,03	4,70	6,96	8,54	5,11	7,28	8,71
Sumatera Utara	6,59	8,52	11,88	6,44	8,40	9,62	6,51	8,45	10,35
Sumatera Barat	7,66	9,66	14,51	5,79	8,89	11,95	6,75	9,29	12,82
Riau	5,76	10,19	15,17	5,59	7,68	10,42	5,67	9,05	12,08
Jambi	6,19	9,73	10,01	6,72	6,74	8,05	6,47	8,28	8,78
Sumatera Selatan	6,56	8,50	10,94	5,87	9,12	12,31	6,24	8,82	11,56
Bengkulu	7,03	8,77	11,15	7,36	8,14	12,85	7,18	8,41	12,13
Lampung	5,95	8,90	10,87	5,86	7,40	11,83	5,91	8,17	11,39
Kep. Bangka Belitung	7,42	9,57	10,01	7,26	9,34	15,33	7,34	9,45	13,51
Kep. Riau	4,78	11,86	25,22	4,38	7,68	18,95	4,58	9,74	21,70
DKI Jakarta	5,65	8,05	7,32	4,85	6,40	6,21	5,26	7,21	6,61
Jawa Barat	6,60	7,74	9,10	6,46	7,72	10,64	6,53	7,73	9,96
Jawa Tengah	5,92	8,06	10,03	5,54	8,27	10,87	5,73	8,17	10,48
DI Yogyakarta	6,44	8,21	11,37	7,22	9,22	10,27	6,87	8,74	10,73
Jawa Timur	6,76	9,76	13,74	6,65	8,57	12,00	6,70	9,11	12,64
Banten	7,72	8,26	7,55	5,68	8,85	10,91	6,73	8,54	9,66
Bali	5,67	9,05	11,02	5,89	6,98	8,46	5,78	7,95	9,43
Nusa Tenggara Barat	7,05	7,65	10,54	6,02	6,97	11,50	6,49	7,29	10,98
Nusa Tenggara Timur	7,04	9,67	12,99	5,93	7,98	12,23	6,43	8,80	12,56
Kalimantan Barat	5,52	8,36	9,68	6,05	6,87	8,06	5,79	7,61	8,82
Kalimantan Tengah	5,89	6,56	10,38	6,01	7,70	14,67	5,94	7,11	12,35
Kalimantan Selatan	5,64	10,42	10,62	6,37	7,91	15,20	6,01	9,08	13,84
Kalimantan Timur	5,93	8,15	5,60	6,86	7,59	12,46	6,34	7,91	9,10
Sulawesi Utara	7,69	10,01	10,90	6,97	8,03	7,54	7,35	9,10	9,07
Sulawesi Tengah	6,36	7,38	13,02	6,83	7,30	8,30	6,56	7,34	10,84
Sulawesi Selatan	7,75	9,50	11,59	5,92	8,57	12,83	6,77	8,99	12,24
Sulawesi Tenggara	6,85	9,19	9,94	6,01	7,51	11,46	6,38	8,26	10,79
Gorontalo	7,24	7,65	13,15	4,91	5,72	6,76	6,11	6,62	9,00
Sulawesi Barat	7,12	10,30	10,90	6,05	9,83	16,00	6,58	10,07	13,43
Maluku	7,84	7,81	16,81	6,29	6,85	9,99	7,11	7,33	14,37
Maluku Utara	5,55	9,20	11,04	5,63	8,38	9,28	5,60	8,74	9,81
Papua Barat	6,36	8,62	5,51	5,56	5,45	10,87	5,96	7,33	8,28
Papua	5,26	7,49	10,37	5,71	6,07	8,71	5,44	6,84	9,73
Indonesia	**6,48**	**8,65**	**10,98**	**6,10**	**8,04**	**11,01**	**6,29**	**8,32**	**11,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.6 Proporsi Penduduk Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	32,77	29,61	31,07	36,11	43,70	40,28	35,23	40,13	37,91
Sumatera Utara	25,89	26,82	26,40	31,03	31,25	31,15	28,53	29,14	28,87
Sumatera Barat	28,32	27,05	27,61	29,32	27,41	28,25	28,96	27,28	28,03
Riau	27,22	26,90	27,06	39,51	36,73	38,14	34,93	33,00	33,97
Jambi	19,50	22,14	20,84	30,22	33,26	31,74	27,01	29,83	28,42
Sumatera Selatan	41,59	41,72	41,66	29,46	30,64	30,07	33,60	34,64	34,14
Bengkulu	32,76	34,63	33,72	30,40	33,56	31,98	31,01	33,85	32,44
Lampung	25,05	25,97	25,52	33,67	35,32	34,48	31,68	33,03	32,35
Kep. Bangka Belitung	28,86	30,80	29,87	36,44	38,27	37,36	32,64	34,42	33,55
Kep. Riau	23,89	26,46	25,17	24,42	30,35	27,31	24,04	27,53	25,77
DKI Jakarta	35,42	35,42	35,42	-	-	-	35,42	35,42	35,42
Jawa Barat	32,90	35,83	34,42	40,25	39,14	39,67	35,83	37,15	36,51
Jawa Tengah	27,64	28,35	28,03	28,64	26,81	27,66	28,21	27,49	27,82
DI Yogyakarta	25,62	32,14	29,21	20,46	14,43	17,08	23,43	24,43	23,99
Jawa Timur	28,53	29,80	29,22	27,15	27,74	27,48	27,76	28,64	28,24
Banten	31,70	37,75	34,79	50,06	46,58	48,25	38,69	41,19	39,98
Bali	20,22	22,37	21,36	26,46	27,75	27,15	23,21	24,96	24,14
Nusa Tenggara Barat	44,05	39,67	41,72	39,39	32,46	35,75	41,27	35,42	38,18
Nusa Tenggara Timur	30,86	30,18	30,50	28,08	26,91	27,47	28,55	27,47	27,99
Kalimantan Barat	29,47	28,12	28,78	34,71	39,83	37,24	33,07	36,00	34,53
Kalimantan Tengah	25,57	28,26	26,89	40,06	44,09	42,01	35,45	38,95	37,15
Kalimantan Selatan	40,15	42,17	41,23	44,41	45,10	44,79	42,70	43,95	43,38
Kalimantan Timur	25,96	19,62	22,97	32,88	30,85	31,96	28,83	24,09	26,63
Sulawesi Utara	19,89	14,11	16,76	29,58	27,61	28,54	25,52	21,76	23,52
Sulawesi Tengah	43,74	45,17	44,49	37,20	36,57	36,89	38,58	38,56	38,57
Sulawesi Selatan	20,92	23,59	22,44	29,34	28,30	28,75	26,68	26,81	26,75
Sulawesi Tenggara	40,37	31,61	35,67	37,97	37,79	37,87	38,52	36,33	37,36
Gorontalo	34,74	29,59	31,83	44,13	42,30	43,16	41,11	37,77	39,30
Sulawesi Barat	38,20	31,05	34,29	29,07	28,98	29,02	31,17	29,49	30,28
Maluku	25,94	28,28	27,19	40,03	42,09	41,08	34,97	36,79	35,92
Maluku Utara	21,44	33,56	27,74	28,79	36,22	32,38	27,00	35,50	31,19
Papua Barat	28,08	21,79	25,19	20,34	24,41	22,13	22,65	23,59	23,07
Papua	35,13	37,19	36,04	24,96	21,17	23,39	28,81	27,72	28,34
Indonesia	**29,94**	**31,24**	**30,63**	**31,87**	**31,26**	**31,55**	**30,98**	**31,25**	**31,12**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.7.1 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2013

Perkotaan

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan				Jumlah
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	7,17	56,59	1,13	35,11	100,00
Sumatera Utara	4,18	72,93	0,97	21,92	100,00
Sumatera Barat	16,91	49,44	1,40	32,25	100,00
Riau	6,34	61,33	0,40	31,93	100,00
Jambi	4,86	56,54	0,00	38,60	100,00
Sumatera Selatan	7,48	65,59	2,20	24,74	100,00
Bengkulu	13,59	52,20	0,00	34,21	100,00
Lampung	6,40	63,39	7,68	22,53	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,04	67,88	0,00	27,07	100,00
Kep. Riau	12,89	43,52	0,00	43,59	100,00
DKI Jakarta	8,34	65,02	0,00	26,64	100,00
Jawa Barat	7,68	65,66	0,94	25,72	100,00
Jawa Tengah	8,82	64,63	1,28	25,27	100,00
DI Yogyakarta	18,29	58,49	12,04	11,18	100,00
Jawa Timur	12,22	60,55	1,52	25,71	100,00
Banten	4,61	73,71	1,91	19,77	100,00
Bali	23,65	42,22	2,00	32,12	100,00
Nusa Tenggara Barat	10,33	72,63	0,20	16,84	100,00
Nusa Tenggara Timur	19,55	68,92	0,28	11,25	100,00
Kalimantan Barat	6,00	67,74	0,00	26,26	100,00
Kalimantan Tengah	12,85	74,66	0,00	12,49	100,00
Kalimantan Selatan	14,12	53,78	0,00	32,10	100,00
Kalimantan Timur	5,76	62,74	0,19	31,31	100,00
Sulawesi Utara	7,59	67,12	10,72	14,57	100,00
Sulawesi Tengah	5,94	75,43	1,98	16,66	100,00
Sulawesi Selatan	14,13	60,99	1,71	23,18	100,00
Sulawesi Tenggara	4,75	65,65	0,00	29,60	100,00
Gorontalo	9,61	84,16	0,00	6,23	100,00
Sulawesi Barat	15,07	69,55	0,00	15,39	100,00
Maluku	7,28	68,35	0,00	24,37	100,00
Maluku Utara	4,82	43,78	0,40	51,00	100,00
Papua Barat	5,43	75,19	0,00	19,38	100,00
Papua	7,98	80,73	0,00	11,30	100,00
Indonesia	**9,45**	**64,12**	**1,39**	**25,04**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.7.2 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2013

Perdesaan

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan				Jumlah
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12,21	51,01	0,10	36,68	100,00
Sumatera Utara	11,41	60,11	0,34	28,14	100,00
Sumatera Barat	26,99	48,82	1,33	22,86	100,00
Riau	11,32	57,03	0,58	31,07	100,00
Jambi	11,64	61,60	0,48	26,28	100,00
Sumatera Selatan	8,25	51,41	2,13	38,21	100,00
Bengkulu	17,60	46,66	0,75	34,99	100,00
Lampung	12,30	55,60	2,42	29,69	100,00
Kep. Bangka Belitung	13,09	52,44	0,00	34,47	100,00
Kep. Riau	25,50	54,20	0,00	20,30	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	4,98	65,97	0,29	28,77	100,00
Jawa Tengah	7,84	71,06	1,63	19,46	100,00
DI Yogyakarta	10,91	50,84	2,35	35,90	100,00
Jawa Timur	14,51	51,09	1,34	33,06	100,00
Banten	5,69	68,60	0,00	25,71	100,00
Bali	30,69	37,19	0,47	31,65	100,00
Nusa Tenggara Barat	18,94	54,12	0,00	26,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	25,55	49,51	0,78	24,16	100,00
Kalimantan Barat	6,64	56,60	0,92	35,84	100,00
Kalimantan Tengah	6,13	64,21	0,00	29,65	100,00
Kalimantan Selatan	1,83	59,28	0,00	38,90	100,00
Kalimantan Timur	7,20	68,88	0,25	23,67	100,00
Sulawesi Utara	12,40	66,62	0,00	20,98	100,00
Sulawesi Tengah	15,50	59,81	0,44	24,25	100,00
Sulawesi Selatan	12,92	56,08	0,69	30,31	100,00
Sulawesi Tenggara	9,31	68,34	0,51	21,83	100,00
Gorontalo	2,85	69,75	2,15	25,24	100,00
Sulawesi Barat	17,49	51,98	0,13	30,40	100,00
Maluku	9,53	57,34	0,36	32,77	100,00
Maluku Utara	10,84	34,80	0,00	54,36	100,00
Papua Barat	16,75	53,67	0,00	29,57	100,00
Papua	23,61	28,06	1,23	47,10	100,00
Indonesia	**11,48**	**58,85**	**0,91**	**28,76**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.7.3 Persentase Penduduk Lansia yang Sakit Sebulan Terakhir dan Berobat Sendiri menurut Provinsi dan Jenis Obat yang Digunakan, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jenis Obat yang Digunakan				Jumlah
	Obat Tradisional	Obat Modern	Lainnya	Campuran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	11,24	52,09	0,29	36,38	100,00
Sumatera Utara	8,79	64,76	0,57	25,88	100,00
Sumatera Barat	23,52	49,03	1,35	26,09	100,00
Riau	9,88	58,27	0,53	31,32	100,00
Jambi	10,26	60,58	0,38	28,77	100,00
Sumatera Selatan	7,97	56,57	2,15	33,31	100,00
Bengkulu	16,47	48,22	0,54	34,77	100,00
Lampung	11,32	56,89	3,29	28,50	100,00
Kep. Bangka Belitung	9,27	59,77	0,00	30,96	100,00
Kep. Riau	16,99	46,99	0,00	36,02	100,00
DKI Jakarta	8,34	65,02	0,00	26,64	100,00
Jawa Barat	6,53	65,79	0,66	27,02	100,00
Jawa Tengah	8,24	68,43	1,49	21,84	100,00
DI Yogyakarta	15,51	55,61	8,39	20,48	100,00
Jawa Timur	13,52	55,18	1,42	29,88	100,00
Banten	5,15	71,15	0,95	22,75	100,00
Bali	27,71	39,32	1,12	31,85	100,00
Nusa Tenggara Barat	14,76	63,11	0,10	22,04	100,00
Nusa Tenggara Timur	24,59	52,61	0,70	22,10	100,00
Kalimantan Barat	6,50	59,14	0,71	33,66	100,00
Kalimantan Tengah	7,40	66,19	0,00	26,41	100,00
Kalimantan Selatan	5,84	57,48	0,00	36,68	100,00
Kalimantan Timur	6,54	66,09	0,22	27,15	100,00
Sulawesi Utara	11,13	66,75	2,82	19,30	100,00
Sulawesi Tengah	13,20	63,56	0,81	22,43	100,00
Sulawesi Selatan	13,18	57,15	0,91	28,75	100,00
Sulawesi Tenggara	8,51	67,87	0,42	23,19	100,00
Gorontalo	4,39	73,02	1,67	20,93	100,00
Sulawesi Barat	16,88	56,43	0,10	26,59	100,00
Maluku	8,99	60,00	0,28	30,74	100,00
Maluku Utara	9,96	36,10	0,06	53,88	100,00
Papua Barat	12,65	61,48	0,00	25,87	100,00
Papua	16,32	52,62	0,66	30,41	100,00
Indonesia	**10,62**	**61,07**	**1,11**	**27,19**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.8 Proporsi Penduduk Lansia yang Berobat Jalan menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	36,34	38,72	37,62	37,31	46,85	42,55	37,05	44,79	41,28
Sumatera Utara	19,61	22,92	21,43	22,69	22,77	22,74	21,19	22,84	22,11
Sumatera Barat	33,83	34,38	34,13	32,51	30,68	31,49	32,97	31,98	32,42
Riau	20,87	28,14	24,52	20,24	20,55	20,39	20,47	23,43	21,94
Jambi	13,45	18,57	16,06	20,97	22,07	21,52	18,72	20,99	19,86
Sumatera Selatan	30,27	32,26	31,34	18,47	21,82	20,19	22,49	25,59	24,11
Bengkulu	25,46	28,42	26,98	24,04	27,58	25,81	24,41	27,81	26,12
Lampung	21,05	23,94	22,53	23,40	29,32	26,31	22,85	28,00	25,41
Kep. Bangka Belitung	26,92	32,60	29,86	19,55	34,30	26,98	23,25	33,42	28,45
Kep. Riau	21,59	22,77	22,18	29,09	22,74	25,99	23,71	22,76	23,24
DKI Jakarta	30,74	35,31	33,11	-	-	-	30,74	35,31	33,11
Jawa Barat	26,73	32,27	29,60	26,97	26,63	26,79	26,83	30,02	28,48
Jawa Tengah	25,19	26,24	25,76	24,24	24,52	24,39	24,65	25,27	24,99
DI Yogyakarta	31,03	29,27	30,06	30,78	31,95	31,43	30,92	30,43	30,65
Jawa Timur	23,26	24,50	23,93	21,14	23,73	22,57	22,08	24,06	23,17
Banten	30,58	28,24	29,38	30,67	18,45	24,31	30,61	24,43	27,43
Bali	33,11	32,97	33,04	38,07	45,11	41,81	35,49	38,81	37,25
Nusa Tenggara Barat	29,18	33,10	31,27	33,60	31,54	32,52	31,82	32,18	32,01
Nusa Tenggara Timur	26,86	26,95	26,91	29,21	28,39	28,78	28,81	28,14	28,46
Kalimantan Barat	28,06	30,30	29,20	22,64	23,59	23,11	24,34	25,78	25,06
Kalimantan Tengah	19,12	20,05	19,58	21,92	21,21	21,57	21,03	20,83	20,93
Kalimantan Selatan	21,31	21,77	21,56	27,28	25,93	26,54	24,88	24,30	24,57
Kalimantan Timur	22,30	18,34	20,44	25,12	22,96	24,14	23,47	20,18	21,94
Sulawesi Utara	20,68	16,78	18,56	27,10	25,53	26,27	24,41	21,74	22,98
Sulawesi Tengah	24,05	32,97	28,74	21,28	20,88	21,08	21,86	23,68	22,77
Sulawesi Selatan	20,10	21,18	20,71	19,54	20,00	19,80	19,72	20,37	20,09
Sulawesi Tenggara	24,83	26,48	25,72	22,89	21,21	22,00	23,34	22,46	22,87
Gorontalo	38,96	42,12	40,75	35,48	34,31	34,87	36,61	37,09	36,87
Sulawesi Barat	27,84	25,03	26,31	24,56	19,80	22,06	25,32	21,09	23,07
Maluku	8,07	11,56	9,94	19,19	17,65	18,40	15,19	15,32	15,26
Maluku Utara	19,24	21,18	20,25	15,16	16,87	15,98	16,15	18,04	17,08
Papua Barat	22,79	22,98	22,88	14,82	19,45	16,85	17,20	20,57	18,70
Papua	26,68	20,26	23,82	15,55	17,22	16,24	19,76	18,46	19,21
Indonesia	**25,76**	**28,00**	**26,95**	**24,50**	**25,47**	**25,02**	**25,08**	**26,64**	**25,91**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.9.1 Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2013

Perkotaan

Provinsi	Tempat Berobat						
	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskes-mas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	33,19	6,90	23,07	37,29	17,39	5,49	2,84
Sumatera Utara	12,88	13,19	29,47	17,52	29,80	2,62	3,67
Sumatera Barat	16,71	5,97	31,04	25,69	28,32	4,09	5,34
Riau	15,07	24,09	48,55	8,44	5,17	1,06	4,09
Jambi	27,30	4,74	46,10	27,61	10,58	7,26	0,29
Sumatera Selatan	10,49	10,06	44,25	24,03	16,80	0,13	1,07
Bengkulu	7,06	2,16	40,20	15,49	36,13	2,94	4,29
Lampung	7,35	0,90	58,90	11,61	25,23	2,71	1,33
Kep. Bangka Belitung	24,26	8,03	27,57	29,00	22,74	2,08	4,78
Kep. Riau	18,35	27,21	35,62	41,22	17,02	12,81	27,69
DKI Jakarta	15,10	17,06	34,78	31,91	3,34	0,51	2,41
Jawa Barat	11,80	8,39	45,48	31,25	19,09	3,08	6,20
Jawa Tengah	9,02	7,27	42,86	22,53	25,59	3,37	2,51
DI Yogyakarta	21,89	16,22	34,19	23,14	14,77	3,13	2,75
Jawa Timur	10,16	6,25	32,67	23,68	30,23	3,26	2,53
Banten	9,38	11,98	47,43	20,24	18,28	1,10	2,58
Bali	9,53	3,54	55,01	11,53	23,91	5,04	1,60
Nusa Tenggara Barat	12,00	2,68	32,62	26,36	32,65	3,42	0,95
Nusa Tenggara Timur	18,82	4,44	34,94	36,64	11,19	3,92	3,78
Kalimantan Barat	19,44	5,16	34,78	19,11	28,10	4,97	5,26
Kalimantan Tengah	27,22	3,46	19,51	25,52	34,10	2,16	0,00
Kalimantan Selatan	29,30	2,72	27,72	20,67	21,20	1,49	3,96
Kalimantan Timur	23,75	4,87	38,05	27,67	10,92	0,00	3,00
Sulawesi Utara	14,30	10,07	47,15	26,02	12,50	0,02	0,00
Sulawesi Tengah	21,28	0,00	40,01	20,12	23,92	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	22,43	1,56	38,93	32,24	14,62	0,00	1,26
Sulawesi Tenggara	20,61	5,43	31,45	37,41	10,14	0,52	0,91
Gorontalo	12,45	3,61	50,03	31,35	22,85	5,44	7,22
Sulawesi Barat	21,30	0,00	28,26	19,51	34,60	2,15	1,64
Maluku	9,41	4,00	41,51	50,71	5,32	2,14	2,14
Maluku Utara	7,23	4,91	62,47	24,99	0,40	0,00	0,00
Papua Barat	41,41	10,23	15,46	24,33	0,00	0,00	8,57
Papua	21,41	0,00	26,32	51,36	0,91	0,00	0,00
Indonesia	**12,62**	**8,32**	**39,90**	**25,75**	**21,75**	**2,85**	**3,60**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.9.2 Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2013

Perdesaan

Provinsi	Tempat Berobat						
	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskes-mas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	15,04	1,61	16,49	52,34	28,63	2,40	3,68
Sumatera Utara	10,46	6,81	14,14	25,09	50,26	3,10	4,38
Sumatera Barat	9,49	3,13	22,15	33,03	39,15	7,56	3,61
Riau	10,57	13,50	20,76	36,58	22,92	3,96	3,49
Jambi	7,02	1,19	26,38	28,76	37,62	3,01	2,91
Sumatera Selatan	10,95	3,39	20,17	27,75	48,21	2,42	7,09
Bengkulu	9,65	3,59	20,33	26,55	49,96	4,50	6,19
Lampung	6,17	4,79	24,84	20,40	50,22	2,11	4,36
Kep. Bangka Belitung	5,37	10,10	16,57	36,63	35,42	8,93	5,41
Kep. Riau	11,80	6,14	15,53	78,60	13,19	5,87	11,77
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	5,95	3,31	37,78	29,56	37,33	3,43	5,58
Jawa Tengah	4,42	3,74	29,97	20,70	48,35	3,14	2,16
DI Yogyakarta	5,53	4,74	35,40	28,62	30,44	1,84	0,00
Jawa Timur	3,11	2,28	23,36	19,52	56,91	2,08	2,17
Banten	5,32	2,17	22,66	22,59	53,96	1,41	7,93
Bali	4,11	0,98	37,97	27,95	38,48	4,13	0,07
Nusa Tenggara Barat	5,43	0,00	26,34	37,18	40,35	3,70	0,54
Nusa Tenggara Timur	5,00	2,47	9,88	72,14	12,25	0,00	4,27
Kalimantan Barat	8,68	2,77	11,23	39,35	47,58	3,10	2,62
Kalimantan Tengah	13,97	1,44	12,50	58,67	31,36	1,57	2,66
Kalimantan Selatan	2,81	0,97	10,08	35,72	56,34	3,02	4,57
Kalimantan Timur	14,55	1,67	19,83	67,77	5,30	0,00	0,99
Sulawesi Utara	7,01	4,53	25,84	34,11	33,77	0,72	2,57
Sulawesi Tengah	9,80	1,15	9,02	54,05	31,33	4,70	3,66
Sulawesi Selatan	9,39	1,96	14,08	55,84	25,51	3,07	2,38
Sulawesi Tenggara	6,32	0,98	19,28	53,32	23,12	0,89	6,43
Gorontalo	5,87	0,00	28,29	36,84	42,67	2,00	0,04
Sulawesi Barat	5,49	0,00	11,95	49,18	35,42	3,85	0,00
Maluku	6,43	1,49	10,82	61,43	26,99	2,10	1,75
Maluku Utara	14,16	4,81	12,58	64,61	5,99	0,00	4,07
Papua Barat	12,35	4,43	12,88	60,94	10,10	0,00	1,62
Papua	16,36	4,82	3,91	75,60	3,11	0,00	0,62
Indonesia	**6,27**	**3,11**	**24,69**	**30,90**	**42,76**	**2,82**	**3,22**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 5.9.3 Proporsi Penduduk Lansia yang Sakit menurut Provinsi dan Tempat Berobat Jalan, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Tempat Berobat						
	RS. Pemerintah	RS. Swasta	Praktek Dokter	Puskes-mas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	19,33	2,86	18,05	48,78	25,97	3,13	3,48
Sumatera Utara	11,42	9,32	20,17	22,11	42,21	2,91	4,10
Sumatera Barat	12,19	4,20	25,48	30,28	35,10	6,26	4,26
Riau	12,26	17,46	31,15	26,06	16,28	2,87	3,71
Jambi	11,55	1,98	30,79	28,50	31,58	3,96	2,32
Sumatera Selatan	10,77	6,01	29,63	26,29	35,87	1,52	4,72
Bengkulu	8,90	3,18	26,07	23,36	45,97	4,05	5,64
Lampung	6,40	4,04	31,35	18,72	45,44	2,22	3,78
Kep. Bangka Belitung	15,89	8,95	22,70	32,38	28,35	5,11	5,06
Kepulauan Riau	16,17	20,19	28,93	53,68	15,74	10,50	22,38
DKI Jakarta	15,10	17,06	34,78	31,91	3,34	0,51	2,41
Jawa Barat	9,60	6,48	42,58	30,62	25,95	3,21	5,97
Jawa Tengah	6,43	5,28	35,59	21,49	38,43	3,24	2,31
DI Yogyakarta	13,48	10,32	34,81	25,96	22,82	2,47	1,34
Jawa Timur	6,19	4,01	27,42	21,33	45,26	2,59	2,33
Banten	8,01	8,68	39,10	21,03	30,28	1,21	4,38
Bali	6,41	2,07	45,21	20,97	32,28	4,52	0,72
Nusa Tenggara Barat	7,98	1,04	28,78	32,98	37,36	3,59	0,70
Nusa Tenggara Timur	6,78	2,73	13,11	67,56	12,11	0,51	4,21
Kalimantan Barat	12,25	3,57	19,06	32,62	41,10	3,72	3,49
Kalimantan Tengah	16,96	1,90	14,08	51,18	31,98	1,70	2,06
Kalimantan Selatan	10,60	1,49	15,28	31,29	46,00	2,57	4,39
Kalimantan Timur	19,26	3,31	29,16	47,23	8,18	0,00	2,02
Sulawesi Utara	9,11	6,12	31,97	31,78	27,66	0,52	1,83
Sulawesi Tengah	12,57	0,87	16,50	45,85	29,54	3,56	2,78
Sulawesi Selatan	13,39	1,83	21,70	48,60	22,17	2,13	2,04
Sulawesi Tenggara	9,67	2,02	22,13	49,59	20,08	0,80	5,14
Gorontalo	8,03	1,18	35,42	35,04	36,17	3,13	2,39
Sulawesi Barat	10,37	0,00	16,99	40,02	35,16	3,33	0,51
Maluku	7,12	2,07	17,94	58,94	21,96	2,11	1,84
Maluku Utara	12,46	4,84	24,83	54,88	4,62	0,00	3,07
Papua Barat	21,84	6,32	13,72	48,98	6,80	0,00	3,89
Papua	18,76	2,53	14,55	64,09	2,07	0,00	0,33
Indonesia	**9,16**	**5,48**	**31,61**	**28,56**	**33,20**	**2,83**	**3,39**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.1.1 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2013

Perkotaan

Provinsi	Jenis Kegiatan Utama				Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	36,27	0,30	36,00	27,44	100,00
Sumatera Utara	35,73	0,23	32,50	31,54	100,00
Sumatera Barat	33,63	0,12	36,98	29,27	100,00
Riau	41,79	0,23	36,79	21,20	100,00
Jambi	32,96	0,47	36,95	29,62	100,00
Sumatera Selatan	32,20	0,37	36,85	30,57	100,00
Bengkulu	37,20	0,00	35,68	27,12	100,00
Lampung	33,16	0,35	31,29	35,20	100,00
Kep. Bangka Belitung	36,03	0,15	41,67	22,14	100,00
Kep. Riau	31,51	0,23	41,13	27,13	100,00
DKI Jakarta	30,92	0,23	37,75	31,10	100,00
Jawa Barat	38,97	0,61	33,74	26,67	100,00
Jawa Tengah	40,28	0,33	33,90	25,49	100,00
DI Yogyakarta	43,30	0,12	35,24	21,34	100,00
Jawa Timur	41,97	0,18	33,56	24,28	100,00
Banten	31,83	0,56	39,24	28,36	100,00
Bali	46,59	0,00	31,98	21,44	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,04	0,25	33,02	25,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	33,37	0,00	34,47	32,16	100,00
Kalimantan Barat	30,76	0,30	39,35	29,58	100,00
Kalimantan Tengah	41,17	0,07	30,60	28,16	100,00
Kalimantan Selatan	33,95	0,59	36,22	29,24	100,00
Kalimantan Timur	39,28	0,71	33,79	26,22	100,00
Sulawesi Utara	34,56	0,64	35,41	29,39	100,00
Sulawesi Tengah	38,63	0,24	30,68	30,46	100,00
Sulawesi Selatan	29,89	0,07	43,00	27,03	100,00
Sulawesi Tenggara	32,52	0,00	45,45	22,03	100,00
Gorontalo	41,96	0,00	38,68	19,36	100,00
Sulawesi Barat	36,87	0,00	36,41	26,72	100,00
Maluku	36,37	0,00	31,60	32,04	100,00
Maluku Utara	31,66	0,32	36,79	31,23	100,00
Papua Barat	33,89	0,00	23,99	42,12	100,00
Papua	38,35	0,00	34,49	27,16	100,00
Indonesia	**38,32**	**0,34**	**34,73**	**26,61**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.1.2 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2013

Perdesaan

Provinsi	Jenis Kegiatan Utama				Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	46,81	0,24	26,19	26,75	100,00
Sumatera Utara	54,57	0,07	23,44	21,93	100,00
Sumatera Barat	49,89	0,09	26,01	24,01	100,00
Riau	55,19	0,00	28,40	16,41	100,00
Jambi	51,54	0,23	24,68	23,54	100,00
Sumatera Selatan	53,79	0,00	23,05	23,16	100,00
Bengkulu	51,80	0,00	25,04	23,16	100,00
Lampung	53,68	0,10	26,16	20,07	100,00
Kep. Bangka Belitung	48,41	0,80	31,81	18,99	100,00
Kep. Riau	47,08	0,27	31,55	21,11	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	50,02	0,42	29,41	20,14	100,00
Jawa Tengah	53,38	0,19	25,52	20,90	100,00
DI Yogyakarta	70,97	0,00	16,11	12,93	100,00
Jawa Timur	55,08	0,18	25,56	19,19	100,00
Banten	46,54	0,25	26,05	27,15	100,00
Bali	63,11	0,09	22,13	14,66	100,00
Nusa Tenggara Barat	54,33	0,00	22,42	23,25	100,00
Nusa Tenggara Timur	59,05	0,04	17,58	23,32	100,00
Kalimantan Barat	53,71	0,39	21,23	24,67	100,00
Kalimantan Tengah	59,22	0,28	22,80	17,70	100,00
Kalimantan Selatan	53,41	0,00	25,72	20,88	100,00
Kalimantan Timur	52,80	0,00	25,42	21,78	100,00
Sulawesi Utara	43,15	0,05	32,17	24,63	100,00
Sulawesi Tengah	51,54	0,22	26,91	21,33	100,00
Sulawesi Selatan	44,61	0,06	31,42	23,91	100,00
Sulawesi Tenggara	55,58	0,40	26,25	17,76	100,00
Gorontalo	47,82	0,00	29,81	22,37	100,00
Sulawesi Barat	52,53	0,00	29,96	17,51	100,00
Maluku	49,69	0,09	23,69	26,53	100,00
Maluku Utara	52,25	0,00	22,01	25,74	100,00
Papua Barat	65,75	0,52	21,51	12,22	100,00
Papua	63,08	0,26	17,63	19,03	100,00
Indonesia	**53,21**	**0,18**	**25,71**	**20,89**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.1.3 Persentase Lansia menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Utama dalam Seminggu Terakhir, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jenis Kegiatan Utama				Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	44,21	0,26	28,61	26,92	100,00
Sumatera Utara	45,58	0,14	27,76	26,51	100,00
Sumatera Barat	44,16	0,10	29,88	25,86	100,00
Riau	50,22	0,09	31,51	18,19	100,00
Jambi	46,20	0,30	28,21	25,29	100,00
Sumatera Selatan	46,17	0,13	27,92	25,77	100,00
Bengkulu	48,03	0,00	27,78	24,18	100,00
Lampung	49,07	0,15	27,31	23,46	100,00
Kep. Bangka Belitung	42,30	0,48	36,68	20,55	100,00
Kep. Riau	35,49	0,24	38,68	25,59	100,00
DKI Jakarta	30,92	0,23	37,75	31,10	100,00
Jawa Barat	43,38	0,53	32,02	24,07	100,00
Jawa Tengah	47,70	0,26	29,16	22,89	100,00
DI Yogyakarta	54,75	0,07	27,32	17,86	100,00
Jawa Timur	49,28	0,18	29,10	21,44	100,00
Banten	37,52	0,44	34,15	27,89	100,00
Bali	54,50	0,04	27,26	18,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	48,98	0,10	26,68	24,23	100,00
Nusa Tenggara Timur	54,99	0,04	20,25	24,72	100,00
Kalimantan Barat	46,49	0,36	26,93	26,22	100,00
Kalimantan Tengah	53,47	0,21	25,29	21,03	100,00
Kalimantan Selatan	45,59	0,24	29,94	24,24	100,00
Kalimantan Timur	44,53	0,43	30,54	24,49	100,00
Sulawesi Utara	39,43	0,30	33,57	26,69	100,00
Sulawesi Tengah	48,90	0,22	27,68	23,20	100,00
Sulawesi Selatan	39,94	0,07	35,09	24,90	100,00
Sulawesi Tenggara	50,16	0,31	30,77	18,76	100,00
Gorontalo	45,86	0,00	32,77	21,37	100,00
Sulawesi Barat	48,77	0,00	31,51	19,72	100,00
Maluku	45,19	0,06	26,36	28,39	100,00
Maluku Utara	46,30	0,09	26,28	27,32	100,00
Papua Barat	55,17	0,35	22,33	22,15	100,00
Papua	53,67	0,16	24,04	22,13	100,00
Indonesia	**46,33**	**0,25**	**29,88**	**23,54**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2013

Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	36,57	47,05	65,53	27,24	44,47
Sumatera Utara	35,96	54,63	61,36	32,83	45,72
Sumatera Barat	33,75	49,98	64,18	27,47	44,26
Riau	42,02	55,19	68,97	30,99	50,30
Jambi	33,44	51,77	65,53	26,50	46,50
Sumatera Selatan	32,57	53,79	60,49	33,44	46,30
Bengkulu	37,20	51,80	65,90	30,61	48,03
Lampung	33,51	53,77	67,82	30,13	49,22
Kep. Bangka Belitung	36,19	49,21	64,82	20,85	42,78
Kep. Riau	31,74	47,34	53,59	15,95	35,72
DKI Jakarta	31,15	-	42,98	20,57	31,15
Jawa Barat	39,58	50,44	62,77	25,95	43,92
Jawa Tengah	40,61	53,58	64,53	33,86	47,95
DI Yogyakarta	43,42	70,97	62,45	48,72	54,82
Jawa Timur	42,15	55,26	67,17	34,43	49,46
Banten	32,39	46,80	56,03	21,75	37,96
Bali	46,59	63,20	63,79	46,20	54,54
Nusa Tenggara Barat	41,29	54,33	66,70	34,38	49,08
Nusa Tenggara Timur	33,37	59,09	70,40	40,77	55,03
Kalimantan Barat	31,06	54,09	60,91	32,62	46,85
Kalimantan Tengah	41,24	59,50	70,79	35,08	53,69
Kalimantan Selatan	34,54	53,41	62,98	31,44	45,83
Kalimantan Timur	39,99	52,80	63,49	22,19	44,97
Sulawesi Utara	35,20	43,20	59,02	23,05	39,74
Sulawesi Tengah	38,87	51,76	66,53	31,60	49,12
Sulawesi Selatan	29,97	44,67	61,99	23,49	40,01
Sulawesi Tenggara	32,52	55,99	65,05	37,97	50,47
Gorontalo	41,96	47,82	70,22	24,88	45,86
Sulawesi Barat	36,87	52,53	69,18	31,36	48,77
Maluku	36,37	49,78	62,00	30,20	45,25
Maluku Utara	31,98	52,25	65,88	27,97	46,39
Papua Barat	33,89	66,27	63,45	43,34	55,51
Papua	38,35	63,34	61,67	42,59	53,83
Indonesia	**38,66**	**53,39**	**63,72**	**31,37**	**46,59**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.3.1 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Kelompok Lapangan Usaha, 2013

Perkotaan

Provinsi	Kelompok Lapangan Usaha					Jumlah
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	29,80	6,21	34,21	14,19	15,58	100,00
Sumatera Utara	33,64	5,97	33,75	13,37	13,27	100,00
Sumatera Barat	43,20	10,45	28,30	10,76	7,30	100,00
Riau	27,27	4,49	39,92	14,78	13,54	100,00
Jambi	38,99	3,18	29,69	10,07	18,07	100,00
Sumatera Selatan	20,72	6,77	36,36	21,88	14,27	100,00
Bengkulu	22,21	3,55	44,37	17,63	12,24	100,00
Lampung	30,12	7,83	32,26	16,02	13,78	100,00
Kep. Bangka Belitung	25,52	10,97	30,52	11,46	21,53	100,00
Kep. Riau	12,10	10,86	36,24	15,43	25,37	100,00
DKI Jakarta	1,02	6,58	44,81	24,28	23,32	100,00
Jawa Barat	31,12	10,55	31,01	14,21	13,10	100,00
Jawa Tengah	36,52	15,34	29,55	11,18	7,40	100,00
DI Yogyakarta	51,14	11,96	23,68	9,46	3,77	100,00
Jawa Timur	38,89	9,13	31,75	11,93	8,31	100,00
Banten	24,57	7,55	37,76	16,09	14,02	100,00
Bali	42,26	17,71	25,44	7,27	7,32	100,00
Nusa Tenggara Barat	52,02	9,35	27,53	7,45	3,64	100,00
Nusa Tenggara Timur	31,77	8,54	38,06	10,12	11,51	100,00
Kalimantan Barat	31,41	5,65	37,77	10,32	14,84	100,00
Kalimantan Tengah	32,64	6,94	36,52	9,92	13,98	100,00
Kalimantan Selatan	24,19	7,01	30,43	21,22	17,15	100,00
Kalimantan Timur	27,58	6,16	26,71	16,44	23,10	100,00
Sulawesi Utara	30,44	2,94	35,33	17,30	13,99	100,00
Sulawesi Tengah	27,53	10,25	37,55	15,33	9,34	100,00
Sulawesi Selatan	25,86	7,22	34,47	18,56	13,88	100,00
Sulawesi Tenggara	29,85	8,69	47,01	9,13	5,32	100,00
Gorontalo	44,88	7,87	23,28	9,16	14,81	100,00
Sulawesi Barat	40,57	4,71	43,22	6,55	4,95	100,00
Maluku	38,07	4,96	34,38	15,90	6,70	100,00
Maluku Utara	53,24	4,44	23,07	9,03	10,22	100,00
Papua Barat	19,21	8,23	40,01	13,11	19,44	100,00
Papua	19,86	4,44	42,82	19,79	13,09	100,00
Indonesia	**33,12**	**10,22**	**32,04**	**13,45**	**11,17**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.3.2 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Kelompok Lapangan Usaha, 2013

Perdesaan

Provinsi	Kelompok Lapangan Usaha					Jumlah
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	79,76	6,22	8,04	2,96	3,02	100,00
Sumatera Utara	84,07	1,50	8,30	2,98	3,15	100,00
Sumatera Barat	76,28	3,79	12,21	4,22	3,51	100,00
Riau	81,29	2,73	10,52	3,54	1,92	100,00
Jambi	81,14	2,57	10,58	3,87	1,84	100,00
Sumatera Selatan	83,37	3,37	9,65	2,30	1,30	100,00
Bengkulu	85,28	1,96	7,09	3,07	2,60	100,00
Lampung	81,87	5,05	8,61	2,93	1,53	100,00
Kep. Bangka Belitung	64,05	4,72	6,65	9,27	15,31	100,00
Kep. Riau	65,07	6,00	8,87	11,84	8,22	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	70,13	7,18	12,92	4,88	4,89	100,00
Jawa Tengah	75,92	8,01	9,93	3,86	2,27	100,00
DI Yogyakarta	86,50	3,66	7,42	1,13	1,28	100,00
Jawa Timur	78,08	4,48	9,77	5,27	2,39	100,00
Banten	72,32	2,93	13,17	5,14	6,44	100,00
Bali	73,73	7,53	9,72	1,31	7,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	81,23	6,27	8,33	1,57	2,59	100,00
Nusa Tenggara Timur	86,22	8,39	3,02	0,54	1,83	100,00
Kalimantan Barat	88,86	1,39	4,02	3,20	2,54	100,00
Kalimantan Tengah	83,68	4,14	6,69	2,00	3,48	100,00
Kalimantan Selatan	76,77	7,49	6,87	5,69	3,18	100,00
Kalimantan Timur	71,89	7,39	4,94	6,83	8,94	100,00
Sulawesi Utara	73,09	5,00	12,43	5,40	4,07	100,00
Sulawesi Tengah	80,32	4,70	8,44	1,85	4,68	100,00
Sulawesi Selatan	82,66	1,50	10,95	2,47	2,42	100,00
Sulawesi Tenggara	75,96	5,65	14,29	2,13	1,97	100,00
Gorontalo	66,02	10,83	13,48	7,56	2,12	100,00
Sulawesi Barat	86,69	3,18	6,46	1,40	2,27	100,00
Maluku	81,46	3,90	8,34	3,45	2,86	100,00
Maluku Utara	87,97	3,03	5,15	1,35	2,49	100,00
Papua Barat	80,28	3,05	11,18	3,77	1,73	100,00
Papua	85,33	2,67	6,96	2,51	2,53	100,00
Indonesia	**78,12**	**5,38**	**9,69**	**3,85**	**2,97**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.3.3 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Kelompok Lapangan Usaha, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Kelompok Lapangan Usaha					Jumlah
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	69,65	6,22	13,33	5,23	5,56	100,00
Sumatera Utara	65,21	3,17	17,82	6,87	6,93	100,00
Sumatera Barat	67,39	5,58	16,53	5,97	4,53	100,00
Riau	64,62	3,27	19,59	7,01	5,50	100,00
Jambi	72,50	2,70	14,50	5,14	5,16	100,00
Sumatera Selatan	67,96	4,21	16,22	7,12	4,49	100,00
Bengkulu	72,69	2,28	14,53	5,98	4,53	100,00
Lampung	74,02	5,47	12,20	4,92	3,38	100,00
Kep. Bangka Belitung	47,84	7,35	16,69	10,20	17,92	100,00
Kep. Riau	30,03	9,22	26,97	14,21	19,57	100,00
DKI Jakarta	1,02	6,58	44,81	24,28	23,32	100,00
Jawa Barat	49,07	9,00	22,69	9,92	9,32	100,00
Jawa Tengah	61,49	10,70	17,12	6,54	4,15	100,00
DI Yogyakarta	70,11	7,51	14,96	4,99	2,43	100,00
Jawa Timur	63,30	6,23	18,06	7,78	4,63	100,00
Banten	47,47	5,34	25,97	10,84	10,38	100,00
Bali	59,71	12,06	16,72	3,97	7,53	100,00
Nusa Tenggara Barat	71,38	7,31	14,81	3,55	2,95	100,00
Nusa Tenggara Timur	81,00	8,40	6,38	1,46	2,76	100,00
Kalimantan Barat	76,90	2,28	11,04	4,68	5,10	100,00
Kalimantan Tengah	71,18	4,82	14,00	3,94	6,05	100,00
Kalimantan Selatan	61,04	7,34	13,92	10,34	7,36	100,00
Kalimantan Timur	47,97	6,73	16,69	12,02	16,59	100,00
Sulawesi Utara	56,92	4,22	21,11	9,91	7,83	100,00
Sulawesi Tengah	71,80	5,59	13,14	4,03	5,43	100,00
Sulawesi Selatan	69,19	2,86	16,53	6,28	5,14	100,00
Sulawesi Tenggara	68,93	6,11	19,28	3,20	2,48	100,00
Gorontalo	59,56	9,92	16,47	8,05	5,99	100,00
Sulawesi Barat	78,32	3,46	13,13	2,34	2,75	100,00
Maluku	69,67	4,19	15,41	6,83	3,90	100,00
Maluku Utara	81,11	3,31	8,69	2,87	4,02	100,00
Papua Barat	67,82	4,11	17,06	5,67	5,34	100,00
Papua	67,53	3,15	16,71	7,21	5,40	100,00
Indonesia	**60,93**	**7,23**	**18,23**	**7,51**	**6,10**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.4.1 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Jabatan/Jenis Pekerjaan Usaha, 2013

Perkotaan

Provinsi	Jabatan/Jenis Pekerjaan			Jumlah
	Profesional, Pejabat dan Manager	Tenaga Usaha dan Jasa	Buruh, Operator dan Pekerja Kasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Aceh	9,25	63,97	26,78	100,00
Sumatera Utara	6,26	65,59	28,15	100,00
Sumatera Barat	6,48	66,20	27,32	100,00
Riau	9,43	67,50	23,07	100,00
Jambi	8,02	64,21	27,77	100,00
Sumatera Selatan	14,07	52,67	33,26	100,00
Bengkulu	10,66	59,34	30,00	100,00
Lampung	6,82	58,53	34,66	100,00
Kep. Bangka Belitung	10,05	54,49	35,46	100,00
Kep. Riau	21,25	45,14	33,61	100,00
DKI Jakarta	14,44	54,94	30,62	100,00
Jawa Barat	5,00	52,48	42,52	100,00
Jawa Tengah	4,46	60,37	35,16	100,00
DI Yogyakarta	7,27	74,06	18,67	100,00
Jawa Timur	3,15	64,07	32,78	100,00
Banten	8,64	57,83	33,53	100,00
Bali	9,56	65,68	24,76	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,45	67,01	29,55	100,00
Nusa Tenggara Timur	12,10	65,82	22,08	100,00
Kalimantan Barat	7,81	63,26	28,93	100,00
Kalimantan Tengah	9,80	68,73	21,47	100,00
Kalimantan Selatan	18,36	51,44	30,20	100,00
Kalimantan Timur	9,67	53,86	36,47	100,00
Sulawesi Utara	10,11	66,06	23,83	100,00
Sulawesi Tengah	13,10	57,35	29,54	100,00
Sulawesi Selatan	13,19	58,88	27,93	100,00
Sulawesi Tenggara	9,83	71,90	18,27	100,00
Gorontalo	3,98	63,25	32,78	100,00
Sulawesi Barat	5,52	83,80	10,68	100,00
Maluku	10,62	75,43	13,95	100,00
Maluku Utara	9,36	68,84	21,81	100,00
Papua Barat	14,33	71,30	14,37	100,00
Papua	26,13	56,78	17,09	100,00
Indonesia	**6,36**	**60,01**	**33,63**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.4.2 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Jabatan/Jenis Pekerjaan Usaha, 2013

Perkotaan

Provinsi	Jabatan/Jenis Pekerjaan			Jumlah
	Profesional, Pejabat dan Manager	Tenaga Usaha dan Jasa	Buruh, Operator dan Pekerja Kasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Aceh	0,93	84,02	15,06	100,00
Sumatera Utara	0,76	89,21	10,02	100,00
Sumatera Barat	1,31	85,96	12,74	100,00
Riau	3,64	83,87	12,49	100,00
Jambi	3,31	86,55	10,14	100,00
Sumatera Selatan	1,75	85,11	13,14	100,00
Bengkulu	0,82	87,50	11,68	100,00
Lampung	1,35	89,20	9,45	100,00
Kep. Bangka Belitung	2,43	72,32	25,24	100,00
Kep. Riau	5,62	77,69	16,69	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	2,21	63,22	34,57	100,00
Jawa Tengah	1,28	79,78	18,94	100,00
DI Yogyakarta	0,40	91,16	8,45	100,00
Jawa Timur	1,15	80,03	18,82	100,00
Banten	2,01	81,18	16,81	100,00
Bali	1,95	81,03	17,02	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,89	80,71	18,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,37	88,52	11,11	100,00
Kalimantan Barat	2,36	91,44	6,20	100,00
Kalimantan Tengah	1,49	89,87	8,65	100,00
Kalimantan Selatan	2,96	81,11	15,93	100,00
Kalimantan Timur	1,49	76,33	22,17	100,00
Sulawesi Utara	3,91	82,52	13,57	100,00
Sulawesi Tengah	1,09	86,98	11,94	100,00
Sulawesi Selatan	2,14	90,85	7,02	100,00
Sulawesi Tenggara	3,26	87,80	8,94	100,00
Gorontalo	2,50	80,96	16,55	100,00
Sulawesi Barat	1,00	91,71	7,29	100,00
Maluku	2,13	88,95	8,92	100,00
Maluku Utara	0,96	91,10	7,94	100,00
Papua Barat	7,14	89,73	3,13	100,00
Papua	2,21	90,58	7,21	100,00
Indonesia	**1,54**	**81,04**	**17,42**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.4.3 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Jabatan/Jenis Pekerjaan Usaha, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jabatan/Jenis Pekerjaan			Jumlah
	Profesional, Pejabat dan Manager	Tenaga Usaha dan Jasa	Buruh, Operator dan Pekerja Kasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Aceh	2,61	79,96	17,43	100,00
Sumatera Utara	2,82	80,38	16,80	100,00
Sumatera Barat	2,70	80,65	16,65	100,00
Riau	5,43	78,82	15,75	100,00
Jambi	4,28	81,97	13,75	100,00
Sumatera Selatan	4,78	77,13	18,09	100,00
Bengkulu	2,78	81,88	15,34	100,00
Lampung	2,18	84,55	13,27	100,00
Kep. Bangka Belitung	5,64	64,82	29,54	100,00
Kep. Riau	15,96	56,16	27,88	100,00
DKI Jakarta	14,44	54,94	30,62	-
Jawa Barat	3,72	57,42	38,86	100,00
Jawa Tengah	2,45	72,67	24,88	100,00
DI Yogyakarta	3,58	83,23	13,19	100,00
Jawa Timur	1,91	74,01	24,08	100,00
Banten	5,46	69,03	25,52	100,00
Bali	5,34	74,20	20,47	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,75	76,09	22,16	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,50	86,34	12,16	100,00
Kalimantan Barat	3,49	85,58	10,93	100,00
Kalimantan Tengah	3,52	84,69	11,79	100,00
Kalimantan Selatan	7,57	72,23	20,20	100,00
Kalimantan Timur	5,91	64,20	29,89	100,00
Sulawesi Utara	6,26	76,28	17,46	100,00
Sulawesi Tengah	3,03	82,19	14,78	100,00
Sulawesi Selatan	4,76	83,26	11,98	100,00
Sulawesi Tenggara	4,26	85,38	10,36	100,00
Gorontalo	2,95	75,55	21,50	100,00
Sulawesi Barat	1,82	90,27	7,90	100,00
Maluku	4,43	85,28	10,29	100,00
Maluku Utara	2,62	86,71	10,68	100,00
Papua Barat	8,61	85,97	5,42	100,00
Papua	8,71	81,39	9,89	100,00
Indonesia	**3,38**	**73,01**	**23,61**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.5.1 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2013

Perkotaan

Provinsi	Status Pekerjaan					Jumlah
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	37,88	33,51	18,70	5,36	4,55	100,00
Sumatera Utara	31,07	31,81	16,85	10,22	10,05	100,00
Sumatera Barat	36,65	34,85	14,03	6,56	7,92	100,00
Riau	41,64	24,68	19,02	4,48	10,18	100,00
Jambi	29,21	40,00	14,23	7,14	9,42	100,00
Sumatera Selatan	34,17	29,38	26,16	3,14	7,14	100,00
Bengkulu	33,30	30,45	19,03	4,58	12,65	100,00
Lampung	33,21	26,00	19,84	12,43	8,52	100,00
Kep. Bangka Belitung	31,98	28,55	26,89	4,16	8,41	100,00
Kep. Riau	35,82	20,93	38,23	2,66	2,37	100,00
DKI Jakarta	35,68	27,48	27,83	3,05	5,96	100,00
Jawa Barat	29,29	29,80	14,67	17,85	8,39	100,00
Jawa Tengah	27,14	36,69	13,40	12,56	10,20	100,00
DI Yogyakarta	28,76	38,83	8,74	4,76	18,90	100,00
Jawa Timur	28,46	35,75	13,92	12,01	9,87	100,00
Banten	38,01	17,36	28,40	10,48	5,74	100,00
Bali	26,49	38,93	9,89	5,46	19,24	100,00
Nusa Tenggara Barat	28,01	40,26	5,63	15,25	10,84	100,00
Nusa Tenggara Timur	39,79	34,81	14,44	3,07	7,89	100,00
Kalimantan Barat	37,49	30,60	19,56	2,68	9,67	100,00
Kalimantan Tengah	41,99	28,84	14,30	2,96	11,92	100,00
Kalimantan Selatan	38,40	31,41	13,81	6,22	10,16	100,00
Kalimantan Timur	33,52	28,43	24,01	9,72	4,32	100,00
Sulawesi Utara	47,52	17,51	21,15	5,34	8,48	100,00
Sulawesi Tengah	53,48	20,65	11,74	1,08	13,05	100,00
Sulawesi Selatan	31,27	37,03	18,24	3,69	9,76	100,00
Sulawesi Tenggara	42,11	42,48	9,66	1,28	4,47	100,00
Gorontalo	35,51	24,96	20,32	8,25	10,97	100,00
Sulawesi Barat	26,87	50,72	5,75	1,47	15,19	100,00
Maluku	45,05	22,23	12,32	6,85	13,55	100,00
Maluku Utara	25,59	42,70	15,28	3,25	13,18	100,00
Papua Barat	37,19	41,51	11,94	3,65	5,71	100,00
Papua	30,77	23,60	35,52	0,00	10,11	100,00
Indonesia	**30,52**	**32,72**	**15,81**	**11,33**	**9,62**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.5.2 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2013

Perdesaan

Provinsi	Status Pekerjaan					Jumlah
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	33,21	44,49	7,75	5,38	9,16	100,00
Sumatera Utara	26,04	49,08	5,36	3,91	15,60	100,00
Sumatera Barat	30,49	45,51	4,74	7,63	11,64	100,00
Riau	28,89	44,69	6,94	7,64	11,84	100,00
Jambi	33,32	44,59	9,32	5,12	7,64	100,00
Sumatera Selatan	27,58	46,17	5,51	4,50	16,23	100,00
Bengkulu	27,21	44,96	6,60	4,05	17,19	100,00
Lampung	23,08	54,53	4,45	5,66	12,28	100,00
Kep. Bangka Belitung	40,27	31,68	11,97	6,36	9,72	100,00
Kep. Riau	56,82	20,40	13,22	6,45	3,12	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	18,91	44,70	5,73	20,22	10,44	100,00
Jawa Tengah	20,71	49,15	3,76	10,95	15,42	100,00
DI Yogyakarta	10,62	53,18	1,62	2,23	32,35	100,00
Jawa Timur	19,95	46,33	3,31	12,82	17,60	100,00
Banten	23,17	40,05	3,65	19,24	13,90	100,00
Bali	22,98	43,41	2,61	9,80	21,20	100,00
Nusa Tenggara Barat	16,78	57,11	3,34	8,63	14,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	24,83	52,76	1,61	0,81	19,98	100,00
Kalimantan Barat	20,66	52,44	4,16	1,96	20,78	100,00
Kalimantan Tengah	30,78	52,72	4,36	1,70	10,43	100,00
Kalimantan Selatan	29,40	47,71	4,69	5,86	12,33	100,00
Kalimantan Timur	37,22	31,82	14,27	5,47	11,22	100,00
Sulawesi Utara	43,06	30,02	5,94	9,17	11,82	100,00
Sulawesi Tengah	28,73	51,65	3,66	4,15	11,80	100,00
Sulawesi Selatan	21,72	56,48	3,10	3,31	15,39	100,00
Sulawesi Tenggara	27,91	51,61	2,37	1,61	16,50	100,00
Gorontalo	33,88	47,29	4,12	1,65	13,06	100,00
Sulawesi Barat	23,97	57,74	2,91	3,35	12,04	100,00
Maluku	26,87	47,92	6,08	0,32	18,82	100,00
Maluku Utara	31,50	46,99	1,69	2,72	17,10	100,00
Papua Barat	28,02	53,80	5,80	1,02	11,35	100,00
Papua	30,54	48,45	3,72	1,26	16,04	100,00
Indonesia	**22,66**	**47,92**	**4,26**	**9,80**	**15,35**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.5.3 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Status Pekerjaan, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Status Pekerjaan					Jumlah
	Berusaha Sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34,16	42,27	9,97	5,38	8,23	100,00
Sumatera Utara	27,92	42,62	9,66	6,27	13,53	100,00
Sumatera Barat	32,14	42,65	7,23	7,34	10,64	100,00
Riau	32,82	38,51	10,67	6,67	11,33	100,00
Jambi	32,48	43,65	10,33	5,54	8,01	100,00
Sumatera Selatan	29,20	42,04	10,59	4,17	14,00	100,00
Bengkulu	28,42	42,06	9,08	4,15	16,28	100,00
Lampung	24,62	50,20	6,78	6,69	11,71	100,00
Kep. Bangka Belitung	36,78	30,36	18,25	5,43	9,17	100,00
Kep. Riau	42,93	20,75	29,76	3,94	2,62	100,00
DKI Jakarta	35,68	27,48	27,83	3,05	5,96	100,00
Jawa Barat	24,52	36,66	10,56	18,94	9,33	100,00
Jawa Tengah	23,07	44,59	7,29	11,54	13,51	100,00
DI Yogyakarta	19,03	46,53	4,92	3,40	26,12	100,00
Jawa Timur	23,16	42,34	7,31	12,51	14,68	100,00
Banten	30,89	28,24	16,53	14,68	9,65	100,00
Bali	24,54	41,41	5,85	7,87	20,33	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,57	51,43	4,11	10,86	13,03	100,00
Nusa Tenggara Timur	26,27	51,04	2,84	1,03	18,82	100,00
Kalimantan Barat	24,16	47,89	7,37	2,11	18,46	100,00
Kalimantan Tengah	33,53	46,87	6,79	2,01	10,80	100,00
Kalimantan Selatan	32,09	42,84	7,42	5,97	11,68	100,00
Kalimantan Timur	35,22	29,99	19,53	7,76	7,50	100,00
Sulawesi Utara	44,75	25,28	11,70	7,72	10,55	100,00
Sulawesi Tengah	32,73	46,65	4,97	3,65	12,01	100,00
Sulawesi Selatan	23,98	51,87	6,70	3,40	14,05	100,00
Sulawesi Tenggara	30,08	50,22	3,48	1,56	14,66	100,00
Gorontalo	34,38	40,47	9,06	3,66	12,42	100,00
Sulawesi Barat	24,49	56,46	3,42	3,01	12,61	100,00
Maluku	31,81	40,94	7,77	2,09	17,39	100,00
Maluku Utara	30,33	46,14	4,37	2,82	16,32	100,00
Papua Barat	29,89	51,29	7,05	1,56	10,20	100,00
Papua	30,60	41,69	12,36	0,92	14,43	100,00
Indonesia	**25,66**	**42,11**	**8,67**	**10,39**	**13,16**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.6.1 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu Terakhir, 2013

Perkotaan

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	0 - 14	15 - 35	36 +	0 - 14	15 - 35	36 +	0 - 14	15 - 35	36 +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	25,15	29,43	45,42	20,99	50,17	28,84	23,93	35,51	40,56
Sumatera Utara	9,89	25,54	64,57	16,80	40,40	42,80	12,26	30,63	57,12
Sumatera Barat	24,15	35,87	39,99	42,77	35,32	21,91	29,47	35,71	34,82
Riau	15,57	26,76	57,67	14,86	48,67	36,47	15,38	32,79	51,84
Jambi	26,44	19,90	53,66	35,61	54,65	9,74	28,62	28,16	43,23
Sumatera Selatan	20,26	24,23	55,51	19,62	35,33	45,05	20,01	28,61	51,38
Bengkulu	22,01	28,19	49,80	29,04	25,70	45,25	24,00	27,48	48,51
Lampung	17,45	34,84	47,71	22,06	31,99	45,94	18,88	33,96	47,16
Kep. Bangka Belitung	14,67	29,89	55,44	44,91	16,38	38,71	21,57	26,81	51,63
Kep. Riau	23,30	12,05	64,65	27,84	26,60	45,56	24,26	15,15	60,59
DKI Jakarta	10,96	17,91	71,12	21,88	28,67	49,45	14,80	21,69	63,51
Jawa Barat	12,45	30,87	56,67	23,61	29,30	47,09	15,69	30,42	53,89
Jawa Tengah	18,40	27,75	53,85	23,60	32,96	43,44	20,44	29,79	49,78
DI Yogyakarta	26,52	45,16	28,31	37,08	36,29	26,63	31,76	40,76	27,48
Jawa Timur	13,58	31,88	54,54	18,55	34,35	47,10	15,40	32,78	51,82
Banten	15,00	23,64	61,36	27,09	30,91	42,00	18,02	25,46	56,52
Bali	9,61	39,60	50,78	19,37	35,09	45,54	14,15	37,50	48,34
Nusa Tenggara Barat	9,83	49,91	40,25	19,60	45,50	34,91	13,93	48,06	38,01
Nusa Tenggara Timur	24,79	34,25	40,96	14,08	48,21	37,71	20,79	39,46	39,75
Kalimantan Barat	18,92	27,38	53,70	28,12	47,10	24,78	21,80	33,56	44,64
Kalimantan Tengah	8,60	30,94	60,46	14,97	38,98	46,05	11,05	34,04	54,91
Kalimantan Selatan	32,56	33,48	33,96	32,35	33,97	33,68	32,47	33,67	33,85
Kalimantan Timur	6,55	20,27	73,17	19,07	37,82	43,11	9,34	24,18	66,49
Sulawesi Utara	6,65	35,24	58,11	14,54	40,49	44,97	9,72	37,29	52,99
Sulawesi Tengah	22,79	37,56	39,65	53,24	29,74	17,03	36,31	34,09	29,60
Sulawesi Selatan	18,23	32,15	49,61	18,52	48,36	33,12	18,33	37,60	44,07
Sulawesi Tenggara	19,01	36,11	44,88	28,90	32,58	38,52	22,77	34,77	42,46
Gorontalo	21,19	32,87	45,95	14,18	29,45	56,37	19,33	31,96	48,70
Sulawesi Barat	41,95	37,94	20,11	44,67	38,68	16,65	43,02	38,23	18,75
Maluku	15,47	34,75	49,78	10,93	52,26	36,80	13,66	41,74	44,61
Maluku Utara	3,08	22,83	74,09	16,25	44,61	39,14	6,16	27,93	65,91
Papua Barat	16,14	20,78	63,07	13,99	43,68	42,33	15,56	26,97	57,47
Papua	7,42	25,61	66,98	6,88	37,22	55,90	7,24	29,38	63,38
Indonesia	**14,93**	**29,95**	**55,12**	**22,60**	**34,14**	**43,26**	**17,60**	**31,41**	**50,99**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.6.2 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu Terakhir, 2013

Perdesaan

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	0 - 14	15 - 35	36 +	0 - 14	15 - 35	36 +	0 - 14	15 - 35	36 +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	19,16	51,24	29,60	27,18	58,08	14,74	21,95	53,61	24,44
Sumatera Utara	17,81	40,99	41,20	22,90	43,55	33,55	19,97	42,07	37,95
Sumatera Barat	31,27	41,06	27,67	38,20	46,84	14,96	33,72	43,11	23,17
Riau	20,39	52,10	27,51	33,99	47,91	18,10	24,68	50,78	24,54
Jambi	37,67	39,98	22,35	44,56	41,35	14,10	39,64	40,37	19,99
Sumatera Selatan	23,19	51,67	25,14	24,24	57,88	17,88	23,58	54,00	22,42
Bengkulu	30,74	37,70	31,56	25,65	51,38	22,97	29,05	42,25	28,70
Lampung	30,84	42,71	26,45	37,57	47,28	15,15	32,87	44,09	23,05
Kep. Bangka Belitung	26,26	39,60	34,14	31,02	50,22	18,76	27,46	42,29	30,25
Kep. Riau	22,54	45,15	32,31	23,64	60,87	15,48	22,78	48,52	28,70
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	19,16	38,25	42,59	31,37	42,43	26,21	23,03	39,58	37,39
Jawa Tengah	19,78	39,47	40,74	30,07	42,35	27,58	23,66	40,56	35,78
DI Yogyakarta	21,94	50,39	27,66	36,08	49,12	14,81	28,91	49,76	21,33
Jawa Timur	13,81	40,45	45,75	24,82	47,60	27,59	18,03	43,19	38,79
Banten	17,26	33,61	49,13	37,39	37,95	24,66	24,40	35,15	40,45
Bali	11,19	38,07	50,74	23,02	40,57	36,41	16,28	39,14	44,58
Nusa Tenggara Barat	17,21	51,72	31,07	27,38	50,68	21,94	20,91	51,34	27,75
Nusa Tenggara Timur	17,83	46,39	35,78	26,36	53,81	19,83	21,11	49,25	29,64
Kalimantan Barat	19,33	47,00	33,66	29,60	53,21	17,19	22,98	49,21	27,82
Kalimantan Tengah	17,41	54,38	28,20	32,42	46,88	20,70	21,78	52,20	26,02
Kalimantan Selatan	15,62	50,80	33,58	26,73	58,31	14,96	19,71	53,57	26,72
Kalimantan Timur	10,92	31,45	57,63	9,76	52,53	37,71	10,66	36,19	53,16
Sulawesi Utara	9,27	42,36	48,37	15,04	51,49	33,47	10,81	44,79	44,40
Sulawesi Tengah	26,88	39,79	33,33	33,00	51,12	15,88	28,69	43,14	28,16
Sulawesi Selatan	20,39	50,68	28,93	33,55	45,54	20,91	24,80	48,96	26,24
Sulawesi Tenggara	28,51	49,01	22,48	48,12	42,04	9,84	36,46	46,19	17,36
Gorontalo	13,66	38,67	47,67	34,72	39,51	25,77	20,05	38,93	41,03
Sulawesi Barat	40,51	45,78	13,71	50,54	38,76	10,70	43,89	43,42	12,69
Maluku	13,83	34,94	51,24	19,94	52,26	27,80	15,87	40,73	43,40
Maluku Utara	20,46	45,79	33,75	31,56	52,06	16,39	24,12	47,85	28,03
Papua Barat	7,81	52,16	40,03	11,40	74,76	13,84	8,96	59,40	31,65
Papua	7,68	56,77	35,55	15,02	63,24	21,74	10,08	58,88	31,04
Indonesia	**19,26**	**42,22**	**38,52**	**29,07**	**46,51**	**24,42**	**22,81**	**43,77**	**33,41**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.6.3 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu Terakhir, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	0 - 14	15 - 35	36 +	0 - 14	15 - 35	36 +	0 - 14	15 - 35	36 +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	20,45	46,54	33,01	26,09	56,68	17,23	22,35	49,95	27,70
Sumatera Utara	14,60	34,72	50,68	20,92	42,52	36,56	17,09	37,79	45,12
Sumatera Barat	29,21	39,56	31,22	39,25	44,21	16,55	32,58	41,12	26,30
Riau	18,84	43,97	37,19	28,64	48,13	23,24	21,81	45,23	32,96
Jambi	35,24	35,65	29,11	42,98	43,70	13,33	37,38	37,87	24,75
Sumatera Selatan	22,49	45,08	32,43	23,06	52,11	24,83	22,70	47,75	29,54
Bengkulu	28,90	35,70	35,41	26,25	46,87	26,88	28,04	39,30	32,66
Lampung	28,83	41,53	29,64	35,16	44,91	19,92	30,74	42,55	26,71
Kep. Bangka Belitung	21,29	35,44	43,27	36,52	36,83	26,65	24,98	35,77	39,25
Kep. Riau	23,04	23,24	53,72	26,41	38,26	35,33	23,76	26,44	49,80
DKI Jakarta	10,96	17,91	71,12	21,88	28,67	49,45	14,80	21,69	63,51
Jawa Barat	15,47	34,20	50,33	27,35	35,63	37,02	19,07	34,63	46,30
Jawa Tengah	19,29	35,24	45,47	27,64	38,83	33,53	22,48	36,61	40,90
DI Yogyakarta	24,06	47,98	27,96	36,54	43,15	20,31	30,23	45,59	24,18
Jawa Timur	13,72	37,16	49,12	22,52	42,75	34,73	17,03	39,26	43,70
Banten	16,00	28,05	55,95	32,93	34,90	32,18	21,08	30,11	48,82
Bali	10,51	38,73	50,76	21,33	38,02	40,65	15,33	38,41	46,26
Nusa Tenggara Barat	14,87	51,15	33,98	24,50	48,76	26,73	18,55	50,24	31,21
Nusa Tenggara Timur	18,51	45,21	36,28	25,22	53,29	21,50	21,08	48,31	30,61
Kalimantan Barat	19,24	42,71	38,04	29,32	52,06	18,62	22,73	45,95	31,32
Kalimantan Tengah	15,48	49,23	35,29	27,18	44,51	28,31	19,15	47,75	33,10
Kalimantan Selatan	20,56	45,75	33,69	28,48	50,72	20,80	23,53	47,61	28,86
Kalimantan Timur	8,56	25,41	66,03	14,76	44,63	40,61	9,94	29,70	60,35
Sulawesi Utara	8,39	39,96	51,65	14,80	46,30	38,90	10,40	41,95	47,66
Sulawesi Tengah	26,34	39,49	34,17	37,54	46,33	16,13	29,92	41,68	28,40
Sulawesi Selatan	19,88	46,30	33,83	29,97	46,21	23,82	23,26	46,27	30,47
Sulawesi Tenggara	27,01	46,98	26,01	45,34	40,67	13,99	34,37	44,45	21,18
Gorontalo	16,05	36,83	47,12	29,03	36,72	34,25	19,83	36,80	43,37
Sulawesi Barat	40,75	44,46	14,79	49,33	38,74	11,92	43,73	42,48	13,79
Maluku	14,24	34,89	50,87	17,17	52,26	30,57	15,27	41,00	43,73
Maluku Utara	16,65	40,75	42,60	29,28	50,95	19,77	20,57	43,92	35,51
Papua Barat	9,60	45,39	45,00	11,86	69,23	18,91	10,30	52,78	36,91
Papua	7,61	48,29	44,10	12,81	56,18	31,00	9,31	50,86	39,83
Indonesia	**17,58**	**37,47**	**44,95**	**26,66**	**41,90**	**31,44**	**20,82**	**39,05**	**40,13**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.7.1 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Kelompok Pendapatan/ Upah/Gaji, 2013

Perkotaan

Provinsi	Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji (Ribuan Rupiah)						Jumlah
	< 500	500 - 999	1.000 - 1.499	1.500 - 1.999	2.000 - 2.499	>2.500	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	13,79	33,98	19,08	14,33	10,26	8,56	100,00
Sumatera Utara	15,57	27,18	24,57	16,61	6,17	9,90	100,00
Sumatera Barat	20,46	26,53	14,84	19,01	10,12	9,04	100,00
Riau	8,63	21,18	16,01	19,74	9,84	24,60	100,00
Jambi	17,96	28,34	5,85	17,34	14,72	15,78	100,00
Sumatera Selatan	18,86	30,91	13,89	12,93	6,05	17,36	100,00
Bengkulu	16,86	33,12	24,50	9,56	5,72	10,25	100,00
Lampung	24,36	24,87	17,34	18,67	1,37	13,39	100,00
Kep. Bangka Belitung	11,64	26,68	17,63	21,48	12,03	10,55	100,00
Kep. Riau	3,13	32,06	5,88	21,69	5,88	31,37	100,00
DKI Jakarta	7,41	16,31	15,73	12,44	11,47	36,63	100,00
Jawa Barat	29,82	37,14	13,33	9,77	3,92	6,03	100,00
Jawa Tengah	39,99	39,24	9,08	5,27	2,11	4,31	100,00
DI Yogyakarta	43,16	33,06	8,54	5,13	1,95	8,15	100,00
Jawa Timur	36,41	39,28	10,87	6,21	2,49	4,75	100,00
Banten	21,11	34,13	10,13	12,39	7,87	14,38	100,00
Bali	29,63	24,96	16,59	14,87	6,97	6,97	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,62	32,84	7,08	3,32	0,75	4,39	100,00
Nusa Tenggara Timur	38,15	27,31	7,04	7,17	6,74	13,58	100,00
Kalimantan Barat	19,74	27,89	12,05	15,87	6,23	18,20	100,00
Kalimantan Tengah	17,93	21,25	15,55	15,14	11,04	19,09	100,00
Kalimantan Selatan	13,91	29,94	20,44	23,15	5,67	6,89	100,00
Kalimantan Timur	7,93	29,10	17,60	17,13	10,87	17,37	100,00
Sulawesi Utara	15,01	21,74	19,24	13,55	7,84	22,63	100,00
Sulawesi Tengah	23,69	19,47	12,59	29,03	5,08	10,15	100,00
Sulawesi Selatan	24,05	31,77	11,38	8,93	8,45	15,42	100,00
Sulawesi Tenggara	37,84	39,01	2,08	6,57	3,91	10,60	100,00
Gorontalo	21,34	20,13	17,25	18,71	19,34	3,24	100,00
Sulawesi Barat	44,56	32,24	1,10	3,27	12,91	5,90	100,00
Maluku	18,19	41,69	24,09	8,36	0,00	7,67	100,00
Maluku Utara	7,58	31,61	13,01	20,22	7,79	19,80	100,00
Papua Barat	12,26	24,83	12,70	15,21	14,52	20,49	100,00
Papua	8,07	9,22	9,94	3,37	9,40	60,00	100,00
Indonesia	**28,91**	**33,99**	**12,74**	**9,83**	**4,74**	**9,79**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.7.2 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Kelompok Pendapatan/ Upah/Gaji, 2013

Perdesaan

Provinsi	Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji (Ribuan Rupiah)						Jumlah
	< 500	500 - 999	1.000 - 1.499	1.500 - 1.999	2.000 - 2.499	>2.500	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	25,72	42,09	19,42	8,30	2,40	2,07	100,00
Sumatera Utara	28,54	34,00	19,93	8,49	4,62	4,42	100,00
Sumatera Barat	32,37	46,06	11,04	7,01	2,40	1,12	100,00
Riau	16,21	38,31	14,40	17,10	7,06	6,92	100,00
Jambi	29,57	32,08	18,07	8,58	3,04	8,66	100,00
Sumatera Selatan	27,10	37,47	14,63	7,05	5,57	8,18	100,00
Bengkulu	30,07	28,84	18,96	10,88	4,21	7,04	100,00
Lampung	39,50	37,72	12,82	5,70	1,98	2,29	100,00
Kep. Bangka Belitung	15,71	27,11	22,72	20,01	9,46	4,99	100,00
Kep. Riau	29,36	40,51	9,38	8,69	9,32	2,73	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	46,57	32,96	10,66	6,02	1,56	2,23	100,00
Jawa Tengah	54,78	31,19	7,82	3,21	1,25	1,75	100,00
DI Yogyakarta	52,35	39,09	3,09	1,61	2,14	1,72	100,00
Jawa Timur	54,69	33,79	6,35	2,84	1,76	0,57	100,00
Banten	46,10	27,62	13,51	7,18	4,57	1,02	100,00
Bali	48,96	28,91	9,99	7,82	3,05	1,28	100,00
Nusa Tenggara Barat	68,98	20,31	6,46	3,34	0,00	0,91	100,00
Nusa Tenggara Timur	71,43	20,63	3,09	0,88	0,26	3,70	100,00
Kalimantan Barat	30,91	35,35	15,38	6,02	3,67	8,68	100,00
Kalimantan Tengah	21,76	32,09	15,18	19,11	5,24	6,62	100,00
Kalimantan Selatan	31,08	36,36	17,94	5,16	3,58	5,87	100,00
Kalimantan Timur	11,89	26,46	27,49	14,66	12,66	6,85	100,00
Sulawesi Utara	20,35	36,65	18,62	11,02	7,72	5,65	100,00
Sulawesi Tengah	43,95	35,49	11,89	5,15	2,95	0,57	100,00
Sulawesi Selatan	44,16	30,36	9,49	7,20	4,79	4,01	100,00
Sulawesi Tenggara	39,41	38,36	11,64	5,77	2,54	2,29	100,00
Gorontalo	49,91	23,50	13,83	9,82	2,94	0,00	100,00
Sulawesi Barat	60,03	16,34	14,84	4,21	0,00	4,58	100,00
Maluku	37,56	40,38	13,67	2,74	4,34	1,31	100,00
Maluku Utara	40,66	41,11	7,26	2,63	0,00	8,34	100,00
Papua Barat	18,67	34,85	18,21	12,33	7,96	7,98	100,00
Papua	21,54	31,15	19,28	8,11	4,11	15,82	100,00
Indonesia	**45,07**	**33,26**	**10,77**	**5,61**	**2,62**	**2,68**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 6.7.3 Persentase Lansia Bekerja menurut Provinsi dan Kelompok Pendapatan/ Upah/Gaji, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Kelompok Pendapatan/Upah/Gaji (Ribuan Rupiah)						Jumlah
	< 500	500 - 999	1.000 - 1.499	1.500 - 1.999	2.000 - 2.499	>2.500	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	22,69	40,03	19,33	9,83	4,40	3,72	100,00
Sumatera Utara	22,08	30,60	22,24	12,53	5,39	7,15	100,00
Sumatera Barat	28,52	39,74	12,27	10,89	4,90	3,68	100,00
Riau	13,20	31,51	15,04	18,15	8,16	13,94	100,00
Jambi	27,01	31,26	15,38	10,51	5,61	10,23	100,00
Sumatera Selatan	24,10	35,08	14,36	9,19	5,75	11,52	100,00
Bengkulu	26,42	30,02	20,49	10,52	4,63	7,92	100,00
Lampung	35,35	34,20	14,06	9,25	1,81	5,33	100,00
Kep. Bangka Belitung	13,91	26,92	20,47	20,66	10,59	7,45	100,00
Kep. Riau	11,84	34,87	7,04	17,37	7,03	21,86	100,00
DKI Jakarta	7,41	16,31	15,73	12,44	11,47	36,63	100,00
Jawa Barat	36,16	35,56	12,32	8,35	3,02	4,59	100,00
Jawa Tengah	47,66	35,06	8,42	4,20	1,67	2,98	100,00
DI Yogyakarta	45,54	34,62	7,13	4,22	2,00	6,49	100,00
Jawa Timur	45,74	36,48	8,56	4,49	2,12	2,61	100,00
Banten	30,01	31,81	11,33	10,53	6,69	9,62	100,00
Bali	39,28	26,93	13,30	11,35	5,01	4,13	100,00
Nusa Tenggara Barat	60,83	26,19	6,75	3,33	0,35	2,54	100,00
Nusa Tenggara Timur	64,54	22,01	3,91	2,18	1,61	5,75	100,00
Kalimantan Barat	26,81	32,62	14,16	9,63	4,61	12,17	100,00
Kalimantan Tengah	20,44	28,35	15,31	17,74	7,24	10,92	100,00
Kalimantan Selatan	24,40	33,86	18,92	12,17	4,39	6,27	100,00
Kalimantan Timur	9,59	27,99	21,73	16,10	11,62	12,97	100,00
Sulawesi Utara	18,01	30,12	18,89	12,13	7,77	13,09	100,00
Sulawesi Tengah	38,36	31,07	12,08	11,74	3,53	3,22	100,00
Sulawesi Selatan	36,66	30,88	10,19	7,84	6,16	8,26	100,00
Sulawesi Tenggara	39,04	38,51	9,41	5,96	2,86	4,22	100,00
Gorontalo	38,51	22,15	15,20	13,37	9,48	1,29	100,00
Sulawesi Barat	56,81	19,65	11,98	4,02	2,68	4,86	100,00
Maluku	29,38	40,93	18,07	5,11	2,51	4,00	100,00
Maluku Utara	32,98	38,90	8,60	6,71	1,81	11,00	100,00
Papua Barat	16,88	32,05	16,67	13,13	9,79	11,48	100,00
Papua	15,92	22,00	15,38	6,13	6,31	34,25	100,00
Indonesia	**36,94**	**33,62**	**11,76**	**7,73**	**3,69**	**6,26**	**100,00**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.1 Proporsi Lansia yang Menjadi Korban Tindak Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P	Laki-laki	Perem-puan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0,57	0,81	0,70	1,35	0,34	0,80	1,15	0,46	0,77
Sumatera Utara	1,29	1,31	1,30	1,09	0,56	0,79	1,19	0,91	1,03
Sumatera Barat	3,45	0,96	2,06	1,10	0,76	0,91	1,93	0,83	1,32
Riau	0,38	1,65	1,02	1,67	0,98	1,33	1,19	1,23	1,21
Jambi	0,00	0,76	0,39	0,75	0,37	0,56	0,52	0,49	0,51
Sumatera Selatan	2,02	1,77	1,89	1,77	0,92	1,33	1,86	1,22	1,53
Bengkulu	4,46	3,39	3,91	2,11	1,06	1,58	2,72	1,69	2,20
Lampung	2,33	0,80	1,55	1,42	0,13	0,79	1,63	0,29	0,97
Kep. Bangka Belitung	1,37	1,15	1,26	0,52	0,00	0,26	0,95	0,59	0,77
Kep. Riau	2,15	0,21	1,18	0,00	0,00	0,00	1,54	0,15	0,85
DKI Jakarta	2,48	0,44	1,42	0,00	0,00	0,00	2,48	0,44	1,42
Jawa Barat	2,09	0,85	1,45	1,61	0,64	1,10	1,90	0,76	1,31
Jawa Tengah	1,61	0,98	1,27	0,95	0,71	0,82	1,24	0,82	1,01
DI Yogyakarta	1,03	0,47	0,72	0,79	0,86	0,83	0,93	0,64	0,77
Jawa Timur	1,21	0,88	1,03	1,06	0,44	0,72	1,13	0,63	0,86
Banten	2,29	1,28	1,77	1,38	0,19	0,76	1,94	0,85	1,38
Bali	1,56	0,84	1,18	1,74	0,62	1,14	1,65	0,73	1,16
Nusa Tenggara Barat	1,55	2,58	2,10	2,54	1,20	1,84	2,14	1,76	1,94
Nusa Tenggara Timur	5,01	0,53	2,65	3,07	2,04	2,53	3,40	1,78	2,55
Kalimantan Barat	2,01	1,87	1,94	0,27	0,24	0,26	0,82	0,77	0,80
Kalimantan Tengah	3,42	0,77	2,12	0,95	0,27	0,62	1,73	0,43	1,10
Kalimantan Selatan	1,77	1,14	1,43	1,02	1,10	1,06	1,32	1,11	1,21
Kalimantan Timur	0,19	0,07	0,13	0,35	0,38	0,37	0,26	0,19	0,23
Sulawesi Utara	2,33	0,77	1,49	0,68	0,24	0,45	1,38	0,47	0,89
Sulawesi Tengah	2,53	3,47	3,02	3,15	1,33	2,25	3,02	1,83	2,42
Sulawesi Selatan	1,72	0,53	1,05	1,10	0,68	0,87	1,30	0,64	0,92
Sulawesi Tenggara	1,23	1,82	1,55	0,95	0,65	0,79	1,02	0,93	0,97
Gorontalo	3,70	2,39	2,96	4,80	2,16	3,41	4,44	2,24	3,25
Sulawesi Barat	0,55	2,48	1,60	2,61	0,31	1,40	2,14	0,84	1,45
Maluku	1,60	3,75	2,75	2,89	0,00	1,42	2,43	1,44	1,91
Maluku Utara	0,00	0,00	0,00	0,42	0,88	0,64	0,32	0,64	0,48
Papua Barat	1,80	5,71	3,59	1,80	0,59	1,27	1,80	2,21	1,98
Papua	2,77	5,91	4,17	0,96	0,19	0,64	1,64	2,53	2,02
Indonesia	**1,76**	**0,98**	**1,35**	**1,31**	**0,64**	**0,95**	**1,52**	**0,80**	**1,13**

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.2.1 Persentase Lansia Korban Tindak Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan, 2013

Laki-Laki

Provinsi	Jenis Kejahatan				
	Pencurian	Perampokan	Penipuan	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	88,89	9,61	1,50	0,00	100,00
Sumatera Utara	77,53	1,61	20,86	0,00	100,00
Sumatera Barat	55,48	23,21	12,83	8,48	100,00
Riau	86,60	5,94	7,47	0,00	100,00
Jambi	72,86	0,00	0,00	27,14	100,00
Sumatera Selatan	90,56	9,44	0,00	0,00	100,00
Bengkulu	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Lampung	69,66	13,78	6,06	10,50	100,00
Kep. Bangka Belitung	82,93	17,07	0,00	0,00	100,00
Kep. Riau	0,00	9,48	90,52	0,00	100,00
DKI Jakarta	61,65	15,31	23,03	0,00	100,00
Jawa Barat	70,00	19,42	8,31	2,27	100,00
Jawa Tengah	55,55	8,06	23,18	13,22	100,00
DI Yogyakarta	87,26	0,00	7,60	5,15	100,00
Jawa Timur	61,90	11,04	19,00	8,06	100,00
Banten	91,17	4,78	0,00	4,05	100,00
Bali	78,75	16,45	4,80	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	77,61	2,13	14,86	5,39	100,00
Nusa Tenggara Timur	84,86	4,49	7,77	2,89	100,00
Kalimantan Barat	75,16	19,37	5,47	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	94,47	5,53	0,00	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	73,49	8,89	0,00	17,63	100,00
Kalimantan Timur	56,26	0,00	43,74	0,00	100,00
Sulawesi Utara	94,44	0,00	3,42	2,15	100,00
Sulawesi Tengah	84,76	3,29	3,74	8,21	100,00
Sulawesi Selatan	79,98	10,85	5,83	3,34	100,00
Sulawesi Tenggara	83,38	0,00	16,62	0,00	100,00
Gorontalo	92,62	0,00	7,38	0,00	100,00
Sulawesi Barat	83,81	0,00	10,28	5,91	100,00
Maluku	81,12	0,00	14,64	4,24	100,00
Maluku Utara	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Papua Barat	75,16	24,84	0,00	0,00	100,00
Papua	72,38	20,35	4,55	2,72	100,00
Indonesia	**70,84**	**11,19**	**12,59**	**5,37**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.2.2 Persentase Lansia Korban Tindak Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan, 2013

Perempuan

Provinsi	Jenis Kejahatan				
	Pencurian	Perampokan	Penipuan	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	89,54	5,18	5,28	0,00	100,00
Sumatera Utara	37,05	44,95	18,00	0,00	100,00
Sumatera Barat	67,31	13,13	15,62	3,94	100,00
Riau	66,16	21,53	12,31	0,00	100,00
Jambi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sumatera Selatan	49,44	39,62	10,94	0,00	100,00
Bengkulu	90,43	9,57	0,00	0,00	100,00
Lampung	96,80	3,20	0,00	0,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	31,12	26,03	42,85	0,00	100,00
Kep. Riau	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
DKI Jakarta	0,00	22,48	49,65	27,87	100,00
Jawa Barat	62,96	21,87	7,19	7,98	100,00
Jawa Tengah	61,60	15,59	16,23	6,59	100,00
DI Yogyakarta	61,62	0,00	0,00	38,38	100,00
Jawa Timur	48,94	27,70	11,99	11,37	100,00
Banten	24,26	23,31	52,43	0,00	100,00
Bali	92,27	7,73	0,00	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	67,64	7,83	14,69	9,84	100,00
Nusa Tenggara Timur	77,98	11,18	0,00	10,84	100,00
Kalimantan Barat	74,58	25,42	0,00	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	28,72	41,90	29,38	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	48,89	26,57	0,00	24,54	100,00
Kalimantan Timur	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Utara	78,30	15,79	3,53	2,38	100,00
Sulawesi Tengah	59,35	14,60	14,46	11,59	100,00
Sulawesi Selatan	69,17	9,88	12,63	8,32	100,00
Sulawesi Tenggara	78,61	0,00	21,39	0,00	100,00
Gorontalo	83,41	16,59	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Barat	65,21	0,00	34,79	0,00	100,00
Maluku	67,04	0,00	32,96	0,00	100,00
Maluku Utara	22,25	0,00	77,75	0,00	100,00
Papua Barat	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Papua	11,26	38,73	0,00	50,02	100,00
Indonesia	**58,75**	**20,28**	**12,93**	**8,03**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.2.3 Persentase Lansia Korban Tindak Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kejahatan, 2013

Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Jenis Kejahatan				
	Pencurian	Perampokan	Penipuan	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	89,10	8,16	2,74	0,00	100,00
Sumatera Utara	57,75	22,79	19,46	0,00	100,00
Sumatera Barat	59,63	19,67	13,81	6,89	100,00
Riau	76,27	13,82	9,92	0,00	100,00
Jambi	85,97	0,00	0,00	14,03	100,00
Sumatera Selatan	73,38	22,05	4,57	0,00	100,00
Bengkulu	96,29	3,71	0,00	0,00	100,00
Lampung	73,74	12,19	5,15	8,92	100,00
Kep. Bangka Belitung	62,41	20,62	16,97	0,00	100,00
Kep. Riau	0,00	17,31	82,69	0,00	100,00
DKI Jakarta	51,84	16,45	27,27	4,43	100,00
Jawa Barat	67,87	20,16	7,97	4,00	100,00
Jawa Tengah	58,19	11,35	20,14	10,32	100,00
DI Yogyakarta	75,40	0,00	4,08	20,52	100,00
Jawa Timur	56,65	17,79	16,16	9,40	100,00
Banten	69,89	10,67	16,67	2,76	100,00
Bali	83,27	13,54	3,19	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	72,83	4,87	14,78	7,53	100,00
Nusa Tenggara Timur	82,34	6,94	4,92	5,80	100,00
Kalimantan Barat	74,88	22,30	2,82	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	82,02	12,42	5,56	0,00	100,00
Kalimantan Selatan	61,19	17,73	0,00	21,08	100,00
Kalimantan Timur	73,28	0,00	26,72	0,00	100,00
Sulawesi Utara	89,89	4,45	3,45	2,21	100,00
Sulawesi Tengah	75,14	7,57	7,80	9,49	100,00
Sulawesi Selatan	75,76	10,47	8,48	5,29	100,00
Sulawesi Tenggara	80,95	0,00	19,05	0,00	100,00
Gorontalo	89,19	6,18	4,63	0,00	100,00
Sulawesi Barat	78,10	0,00	17,81	4,09	100,00
Maluku	75,63	0,00	21,78	2,59	100,00
Maluku Utara	48,68	0,00	51,32	0,00	100,00
Papua Barat	87,48	12,52	0,00	0,00	100,00
Papua	39,81	30,14	2,12	27,92	100,00
Indonesia	**66,32**	**14,59**	**12,72**	**6,37**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.3.1 Perkiraan Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Kelayakan Rumah Tinggal, 2013

Perkotaan

Provinsi	Tidak Layak Huni		Hampir Tidak Layak Huni		Layak Huni		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	654	0,88	3 444	4,63	70 343	94,49	74 442	100,00
Sumatera Utara	4 463	1,08	15 534	3,75	394 220	95,17	414 217	100,00
Sumatera Barat	2 024	1,34	9 040	5,99	139 898	92,67	150 962	100,00
Riau	591	0,58	3 154	3,12	97 454	96,30	101 200	100,00
Jambi	237	0,39	2 509	4,18	57 247	95,42	59 993	100,00
Sumatera Selatan	1 391	0,76	8 863	4,87	171 852	94,37	182 107	100,00
Bengkulu	530	1,78	1 727	5,80	27 536	92,43	29 793	100,00
Lampung	3 949	2,79	7 938	5,60	129 889	91,62	141 776	100,00
Kep. Bangka Belitung	0	0,00	2 110	4,98	40 296	95,02	42 406	100,00
Kep. Riau	70	0,14	826	1,63	49 838	98,23	50 735	100,00
DKI Jakarta	6 982	1,18	30 468	5,16	552 955	93,66	590 404	100,00
Jawa Barat	89 833	4,34	254 157	12,28	1 726 222	83,38	2 070 212	100,00
Jawa Tengah	50 605	3,15	144 364	8,99	1 410 328	87,85	1 605 297	100,00
DI Yogyakarta	5 888	2,17	21 431	7,88	244 525	89,95	271 844	100,00
Jawa Timur	66 459	3,60	154 707	8,39	1 623 686	88,01	1 844 851	100,00
Banten	11 114	3,19	26 097	7,50	310 917	89,31	348 128	100,00
Bali	3 337	1,56	10 717	5,03	199 216	93,41	213 271	100,00
Nusa Tenggara Barat	11 508	8,12	23 875	16,84	106 398	75,04	141 781	100,00
Nusa Tenggara Timur	4 479	7,12	7 673	12,19	50 788	80,69	62 941	100,00
Kalimantan Barat	333	0,35	4 916	5,18	89 708	94,47	94 957	100,00
Kalimantan Tengah	263	0,70	1 917	5,06	35 667	94,24	37 847	100,00
Kalimantan Selatan	593	0,63	7 189	7,67	86 006	91,70	93 789	100,00
Kalimantan Timur	67	0,06	1 207	1,13	105 887	98,81	107 161	100,00
Sulawesi Utara	1 006	1,09	8 042	8,72	83 186	90,19	92 233	100,00
Sulawesi Tengah	999	2,32	2 184	5,07	39 892	92,61	43 076	100,00
Sulawesi Selatan	4 149	1,84	19 623	8,69	202 070	89,47	225 842	100,00
Sulawesi Tenggara	1 890	5,52	1 094	3,19	31 265	91,29	34 250	100,00
Gorontalo	1 342	5,44	2 908	11,79	20 415	82,77	24 665	100,00
Sulawesi Barat	1 363	7,37	2 222	12,01	14 909	80,62	18 494	100,00
Maluku	1 303	3,37	5 330	13,77	32 064	82,86	38 696	100,00
Maluku Utara	257	1,72	108	0,72	14 589	97,56	14 954	100,00
Papua Barat	0	0,00	708	8,57	7 554	91,43	8 261	100,00
Papua	182	0,60	2 026	6,64	28 314	92,77	30 522	100,00
Indonesia	**277 861**	**3,00**	**788 110**	**8,51**	**8 195 135**	**88,49**	**9 261 107**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.3.2 Perkiraan Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Kelayakan Rumah Tinggal, 2013

Perdesaan

Provinsi	Tidak Layak Huni		Hampir Tidak Layak Huni		Layak Huni		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	17 721	8,26	31 279	14,58	165 565	77,16	214 566	100,00
Sumatera Utara	18 592	4,15	41 545	9,27	388 011	86,58	448 149	100,00
Sumatera Barat	5 548	2,00	27 327	9,87	243 965	88,13	276 839	100,00
Riau	2 328	1,39	9 129	5,43	156 619	93,18	168 076	100,00
Jambi	1 538	1,12	10 980	7,99	124 892	90,89	137 411	100,00
Sumatera Selatan	8 674	2,58	34 444	10,25	293 023	87,17	336 140	100,00
Bengkulu	2 426	2,97	9 882	12,10	69 388	84,93	81 696	100,00
Lampung	16 578	3,65	44 471	9,79	393 175	86,56	454 224	100,00
Kep. Bangka Belitung	715	1,75	1 642	4,02	38 521	94,23	40 878	100,00
Kep. Riau	471	2,40	669	3,40	18 516	94,20	19 656	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	89 764	6,55	331 389	24,19	948 914	69,26	1 370 067	100,00
Jawa Tengah	138 298	6,62	321 966	15,41	1 629 311	77,97	2 089 575	100,00
DI Yogyakarta	8 112	3,95	22 957	11,18	174 334	84,87	205 403	100,00
Jawa Timur	177 705	7,54	346 295	14,69	1 833 674	77,77	2 357 675	100,00
Banten	28 570	13,09	52 383	24,00	137 297	62,91	218 250	100,00
Bali	5 415	2,75	8 053	4,09	183 520	93,16	196 988	100,00
Nusa Tenggara Barat	21 426	10,38	33 488	16,22	151 540	73,40	206 454	100,00
Nusa Tenggara Timur	97 537	31,94	58 336	19,10	149 525	48,96	305 398	100,00
Kalimantan Barat	3 278	1,62	37 193	18,44	161 248	79,94	201 719	100,00
Kalimantan Tengah	2 333	2,92	12 346	15,45	65 246	81,63	79 925	100,00
Kalimantan Selatan	4 702	3,29	17 726	12,40	120 483	84,31	142 911	100,00
Kalimantan Timur	386	0,52	6 398	8,70	66 797	90,78	73 581	100,00
Sulawesi Utara	3 703	2,98	9 636	7,77	110 722	89,25	124 060	100,00
Sulawesi Tengah	10 668	7,03	20 719	13,66	120 308	79,31	151 695	100,00
Sulawesi Selatan	22 517	4,62	79 214	16,24	385 994	79,14	487 725	100,00
Sulawesi Tenggara	5 442	4,86	13 814	12,33	92 795	82,81	112 051	100,00
Gorontalo	5 508	11,53	7 529	15,76	34 730	72,71	47 766	100,00
Sulawesi Barat	6 744	11,43	10 164	17,23	42 092	71,34	59 000	100,00
Maluku	9 379	14,35	10 195	15,60	45 787	70,05	65 362	100,00
Maluku Utara	3 895	9,04	7 699	17,87	31 485	73,09	43 079	100,00
Papua Barat	886	4,73	2 460	13,12	15 397	82,15	18 743	100,00
Papua	10 769	22,69	6 599	13,90	30 100	63,41	47 468	100,00
Indonesia	**731 631**	**6,79**	**1 627 926**	**15,10**	**8 422 972**	**78,12**	**10 782 529**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.3.3 Perkiraan Jumlah dan Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Kategori Kelayakan Rumah Tinggal, 2013

Perdesaan

Provinsi	Tidak Layak Huni		Hampir Tidak Layak Huni		Layak Huni		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	18 376	6,36	34 723	12,01	235 908	81,63	289 007	100,00
Sumatera Utara	23 056	2,67	57 079	6,62	782 232	90,71	862 366	100,00
Sumatera Barat	7 572	1,77	36 367	8,50	383 862	89,73	427 802	100,00
Riau	2 919	1,08	12 283	4,56	254 073	94,35	269 276	100,00
Jambi	1 775	0,90	13 490	6,83	182 139	92,27	197 404	100,00
Sumatera Selatan	10 064	1,94	43 307	8,36	464 875	89,70	518 247	100,00
Bengkulu	2 956	2,65	11 609	10,41	96 924	86,94	111 489	100,00
Lampung	20 527	3,44	52 409	8,79	523 063	87,76	595 999	100,00
Kep. Bangka Belitung	715	0,86	3 752	4,51	78 817	94,64	83 284	100,00
Kep. Riau	541	0,77	1 495	2,12	68 355	97,11	70 391	100,00
DKI Jakarta	6 982	1,18	30 468	5,16	552 955	93,66	590 404	100,00
Jawa Barat	179 598	5,22	585 546	17,02	2 675 135	77,76	3 440 279	100,00
Jawa Tengah	188 903	5,11	466 330	12,62	3 039 639	82,27	3 694 871	100,00
DI Yogyakarta	14 001	2,93	44 388	9,30	418 859	87,77	477 247	100,00
Jawa Timur	244 164	5,81	501 002	11,92	3 457 360	82,27	4 202 526	100,00
Banten	39 684	7,01	78 480	13,86	448 215	79,14	566 378	100,00
Bali	8 752	2,13	18 770	4,58	382 736	93,29	410 258	100,00
Nusa Tenggara Barat	32 934	9,46	57 363	16,47	257 938	74,07	348 235	100,00
Nusa Tenggara Timur	102 016	27,70	66 009	17,92	200 314	54,38	368 339	100,00
Kalimantan Barat	3 611	1,22	42 109	14,19	250 956	84,59	296 676	100,00
Kalimantan Tengah	2 597	2,20	14 263	12,11	100 913	85,68	117 772	100,00
Kalimantan Selatan	5 295	2,24	24 916	10,53	206 489	87,24	236 700	100,00
Kalimantan Timur	452	0,25	7 605	4,21	172 684	95,54	180 742	100,00
Sulawesi Utara	4 708	2,18	17 678	8,17	193 908	89,65	216 294	100,00
Sulawesi Tengah	11 667	5,99	22 903	11,76	160 201	82,25	194 771	100,00
Sulawesi Selatan	26 667	3,74	98 837	13,85	588 063	82,41	713 567	100,00
Sulawesi Tenggara	7 333	5,01	14 908	10,19	124 060	84,80	146 301	100,00
Gorontalo	6 850	9,46	10 436	14,41	55 145	76,13	72 431	100,00
Sulawesi Barat	8 107	10,46	12 386	15,98	57 001	73,56	77 494	100,00
Maluku	10 682	10,27	15 525	14,92	77 851	74,81	104 058	100,00
Maluku Utara	4 152	7,15	7 807	13,45	46 074	79,39	58 033	100,00
Papua Barat	886	3,28	3 167	11,73	22 951	84,99	27 005	100,00
Papua	10 951	14,04	8 625	11,06	58 413	74,90	77 990	100,00
Indonesia	**1 009 492**	**5,04**	**2 416 036**	**12,05**	**16 618 108**	**82,91**	**20 043 635**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.4.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2013

Perkotaan

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				
	Milik Sendiri	Kontrak	Sewa	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	87,28	1,82	1,35	9,56	100,00
Sumatera Utara	80,88	6,32	2,38	10,42	100,00
Sumatera Barat	83,15	3,87	1,60	11,38	100,00
Riau	85,29	1,14	4,32	9,26	100,00
Jambi	82,54	5,61	0,37	11,48	100,00
Sumatera Selatan	85,35	3,58	1,46	9,61	100,00
Bengkulu	92,35	2,01	1,60	4,04	100,00
Lampung	90,41	1,75	0,71	7,12	100,00
Kep. Bangka Belitung	91,19	1,43	0,89	6,50	100,00
Kep. Riau	83,48	2,90	7,17	6,45	100,00
DKI Jakarta	79,86	3,73	5,54	10,87	100,00
Jawa Barat	89,56	1,44	1,04	7,96	100,00
Jawa Tengah	92,27	1,25	0,10	6,38	100,00
DI Yogyakarta	93,96	1,82	0,39	3,83	100,00
Jawa Timur	91,71	1,73	0,64	5,92	100,00
Banten	90,85	0,92	1,90	6,33	100,00
Bali	92,45	0,99	1,30	5,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	93,02	0,15	0,06	6,77	100,00
Nusa Tenggara Timur	91,67	0,53	0,49	7,31	100,00
Kalimantan Barat	92,39	1,92	0,90	4,79	100,00
Kalimantan Tengah	87,81	1,95	2,27	7,97	100,00
Kalimantan Selatan	84,85	1,63	4,41	9,11	100,00
Kalimantan Timur	84,19	3,98	2,43	9,39	100,00
Sulawesi Utara	80,48	0,89	0,59	18,04	100,00
Sulawesi Tengah	88,32	1,01	1,52	9,15	100,00
Sulawesi Selatan	90,75	1,95	0,31	6,98	100,00
Sulawesi Tenggara	91,05	1,45	0,25	7,25	100,00
Gorontalo	86,01	0,77	0,00	13,23	100,00
Sulawesi Barat	91,40	1,95	0,00	6,65	100,00
Maluku	86,12	1,88	1,09	10,91	100,00
Maluku Utara	96,71	0,00	0,00	3,29	100,00
Papua Barat	77,12	0,00	5,03	17,84	100,00
Papua	81,77	1,22	5,28	11,72	100,00
Indonesia	**89,27**	**1,95**	**1,27**	**7,52**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.4.2 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2013

Perdesaan

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				
	Milik Sendiri	Kontrak	Sewa	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	94,75	0,10	0,46	4,68	100,00
Sumatera Utara	90,95	0,70	0,43	7,92	100,00
Sumatera Barat	87,60	0,55	0,17	11,69	100,00
Riau	92,71	0,43	0,80	6,06	100,00
Jambi	94,42	0,75	0,00	4,83	100,00
Sumatera Selatan	93,37	0,00	0,06	6,57	100,00
Bengkulu	91,80	0,25	0,15	7,80	100,00
Lampung	95,84	0,21	0,03	3,92	100,00
Kep. Bangka Belitung	92,73	0,11	0,23	6,93	100,00
Kep. Riau	94,85	0,00	0,00	5,15	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	94,76	0,12	0,11	5,01	100,00
Jawa Tengah	95,37	0,04	0,05	4,54	100,00
DI Yogyakarta	97,74	0,00	0,31	1,95	100,00
Jawa Timur	96,69	0,06	0,02	3,23	100,00
Banten	95,46	0,00	0,00	4,54	100,00
Bali	94,96	0,24	0,00	4,80	100,00
Nusa Tenggara Barat	94,42	0,00	0,01	5,58	100,00
Nusa Tenggara Timur	95,48	0,08	0,00	4,44	100,00
Kalimantan Barat	96,07	0,17	0,23	3,53	100,00
Kalimantan Tengah	92,20	0,00	0,84	6,95	100,00
Kalimantan Selatan	94,83	0,08	0,20	4,89	100,00
Kalimantan Timur	94,39	1,03	0,29	4,29	100,00
Sulawesi Utara	90,69	0,62	0,00	8,69	100,00
Sulawesi Tengah	93,03	0,30	0,00	6,67	100,00
Sulawesi Selatan	95,31	0,03	0,03	4,63	100,00
Sulawesi Tenggara	94,79	0,00	0,00	5,21	100,00
Gorontalo	91,11	0,00	0,00	8,89	100,00
Sulawesi Barat	97,12	0,00	0,00	2,88	100,00
Maluku	93,50	0,00	0,00	6,50	100,00
Maluku Utara	96,40	0,00	0,00	3,60	100,00
Papua Barat	92,64	0,02	0,24	7,10	100,00
Papua	95,73	0,03	0,00	4,24	100,00
Indonesia	**94,94**	**0,14**	**0,10**	**4,82**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.4.1 Persentase Penduduk Lansia menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Status Kepemilikan Tempat Tinggal				
	Milik Sendiri	Kontrak	Sewa	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	92,83	0,55	0,69	5,94	100,00
Sumatera Utara	86,11	3,40	1,36	9,12	100,00
Sumatera Barat	86,03	1,72	0,67	11,58	100,00
Riau	89,92	0,70	2,12	7,26	100,00
Jambi	90,81	2,22	0,11	6,85	100,00
Sumatera Selatan	90,55	1,26	0,55	7,64	100,00
Bengkulu	91,95	0,72	0,54	6,80	100,00
Lampung	94,55	0,58	0,19	4,68	100,00
Kep. Bangka Belitung	91,94	0,78	0,57	6,71	100,00
Kep. Riau	86,66	2,09	5,16	6,09	100,00
DKI Jakarta	79,86	3,73	5,54	10,87	100,00
Jawa Barat	91,63	0,91	0,67	6,78	100,00
Jawa Tengah	94,02	0,57	0,07	5,34	100,00
DI Yogyakarta	95,58	1,03	0,36	3,03	100,00
Jawa Timur	94,50	0,80	0,29	4,41	100,00
Banten	92,62	0,57	1,17	5,64	100,00
Bali	93,66	0,63	0,68	5,04	100,00
Nusa Tenggara Barat	93,85	0,06	0,03	6,06	100,00
Nusa Tenggara Timur	94,83	0,16	0,08	4,93	100,00
Kalimantan Barat	94,89	0,73	0,44	3,94	100,00
Kalimantan Tengah	90,79	0,63	1,30	7,28	100,00
Kalimantan Selatan	90,88	0,69	1,87	6,56	100,00
Kalimantan Timur	88,34	2,78	1,56	7,32	100,00
Sulawesi Utara	86,34	0,74	0,25	12,67	100,00
Sulawesi Tengah	91,99	0,45	0,34	7,22	100,00
Sulawesi Selatan	93,87	0,64	0,12	5,37	100,00
Sulawesi Tenggara	93,91	0,34	0,06	5,69	100,00
Gorontalo	89,37	0,26	0,00	10,37	100,00
Sulawesi Barat	95,76	0,47	0,00	3,78	100,00
Maluku	90,76	0,70	0,40	8,14	100,00
Maluku Utara	96,48	0,00	0,00	3,52	100,00
Papua Barat	87,90	0,01	1,71	10,38	100,00
Papua	90,27	0,50	2,07	7,17	100,00
Indonesia	**92,32**	**0,98**	**0,64**	**6,07**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.5 Proporsi Lansia yang Melakukan Perjalanan Dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	11,23	8,67	9,83
Sumatera Utara	14,62	15,49	15,10
Sumatera Barat	14,33	13,41	13,82
Riau	16,48	10,53	13,52
Jambi	10,66	6,11	8,38
Sumatera Selatan	13,11	12,06	12,56
Bengkulu	21,46	17,17	19,30
Lampung	14,73	14,22	14,48
Kep. Bangka Belitung	17,03	13,72	15,34
Kep. Riau	28,52	28,53	28,52
DKI Jakarta	30,39	29,66	30,01
Jawa Barat	12,62	10,39	11,46
Jawa Tengah	12,85	9,75	11,18
DI Yogyakarta	16,71	16,10	16,37
Jawa Timur	8,77	7,38	8,01
Banten	15,99	14,05	14,99
Bali	24,07	20,52	22,19
Nusa Tenggara Barat	6,34	8,08	7,26
Nusa Tenggara Timur	9,89	9,35	9,61
Kalimantan Barat	11,83	8,54	10,19
Kalimantan Tengah	18,98	13,51	16,32
Kalimantan Selatan	15,39	18,77	17,23
Kalimantan Timur	16,07	12,97	14,63
Sulawesi Utara	17,65	17,13	17,37
Sulawesi Tengah	20,71	16,27	18,48
Sulawesi Selatan	15,10	14,72	14,88
Sulawesi Tenggara	18,19	16,79	17,44
Gorontalo	13,80	8,41	10,89
Sulawesi Barat	16,87	14,96	15,86
Maluku	8,50	7,26	7,86
Maluku Utara	15,95	16,32	16,13
Papua Barat	10,51	4,39	7,79
Papua	7,78	8,32	8,01
Indonesia	**13,37**	**11,50**	**12,37**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.6.1 Persentase Lansia yang Melakukan Perjalanan dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Tujuan Utama Bepergian yang Terakhir, 2013

Laki-laki

Provinsi	Berlibur/ rekreasi	Profesi/ bisnis	Ke-sehatan	Berziarah/ keagamaan	Mengunjungi teman/ keluarga	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,61	2,42	8,65	1,34	80,25	3,73	100,00
Sumatera Utara	6,51	2,84	4,26	2,68	77,93	5,79	100,00
Sumatera Barat	4,24	5,80	4,13	0,79	79,03	6,01	100,00
Riau	7,20	9,39	10,26	0,00	64,83	8,32	100,00
Jambi	3,31	2,48	7,04	1,12	84,13	1,91	100,00
Sumatera Selatan	0,87	5,01	5,27	3,44	83,56	1,85	100,00
Bengkulu	4,25	6,67	3,99	2,75	79,92	2,42	100,00
Lampung	0,15	4,01	4,36	1,27	87,97	2,24	100,00
Kep. Bangka Belitung	9,24	4,37	4,88	1,26	64,64	15,62	100,00
Kepulauan Riau	5,90	10,17	5,07	0,00	78,19	0,67	100,00
DKI Jakarta	11,92	0,60	0,71	0,52	85,28	0,96	100,00
Jawa Barat	4,43	6,06	1,64	2,93	82,10	2,85	100,00
Jawa Tengah	8,03	4,53	1,91	8,60	74,48	2,45	100,00
DI Yogyakarta	6,76	2,10	0,53	1,00	85,60	4,02	100,00
Jawa Timur	7,34	5,62	2,42	7,99	74,13	2,49	100,00
Banten	9,38	2,15	1,02	6,67	79,39	1,39	100,00
Bali	2,03	1,55	2,16	18,26	75,44	0,56	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,39	4,35	0,90	3,97	82,61	2,79	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,01	1,32	9,59	0,00	81,01	7,07	100,00
Kalimantan Barat	4,56	8,50	6,98	0,80	77,57	1,60	100,00
Kalimantan Tengah	5,89	2,93	13,00	3,35	67,43	7,41	100,00
Kalimantan Selatan	4,32	2,18	3,20	3,69	85,95	0,67	100,00
Kalimantan Timur	2,40	3,08	4,85	3,73	82,91	3,03	100,00
Sulawesi Utara	2,60	4,02	6,62	0,92	82,78	3,06	100,00
Sulawesi Tengah	1,30	2,98	7,06	3,28	78,24	7,14	100,00
Sulawesi Selatan	3,37	6,59	5,20	1,47	80,94	2,43	100,00
Sulawesi Tenggara	0,23	15,77	10,97	0,00	70,48	2,56	100,00
Gorontalo	3,87	18,43	9,18	1,07	61,51	5,95	100,00
Sulawesi Barat	0,00	3,05	4,94	0,00	84,98	7,02	100,00
Maluku	1,73	10,02	12,60	0,00	61,94	13,72	100,00
Maluku Utara	0,00	7,97	7,10	0,00	79,91	5,01	100,00
Papua Barat	1,83	1,53	14,77	0,83	77,06	3,98	100,00
Papua	5,49	0,36	4,01	1,31	85,68	3,15	100,00
Indonesia	**5,77**	**4,61**	**3,25**	**4,65**	**78,73**	**2,99**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.6.2 Persentase Lansia yang Melakukan Perjalanan dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Tujuan Utama Bepergian yang Terakhir, 2013

Perempuan

Provinsi	Berlibur/ rekreasi	Profesi/ bisnis	Ke-sehatan	Berziarah/ keagamaan	Mengunjungi teman/ keluarga	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,06	0,16	6,88	1,45	83,86	4,59	100,00
Sumatera Utara	5,05	1,25	3,27	5,99	80,45	3,99	100,00
Sumatera Barat	9,29	0,90	2,66	5,55	77,98	3,62	100,00
Riau	7,32	8,26	7,75	0,00	74,07	2,60	100,00
Jambi	5,54	1,53	10,98	2,82	78,78	0,35	100,00
Sumatera Selatan	0,07	1,59	1,97	0,89	90,64	4,83	100,00
Bengkulu	5,14	1,46	6,86	3,66	81,29	1,59	100,00
Lampung	3,17	0,41	1,63	1,06	90,26	3,46	100,00
Kep. Bangka Belitung	12,97	0,00	2,92	2,37	68,52	13,21	100,00
Kepulauan Riau	1,72	0,00	2,28	0,21	95,79	0,00	100,00
DKI Jakarta	14,83	0,70	0,94	6,33	77,02	0,18	100,00
Jawa Barat	5,83	0,24	1,57	6,04	83,73	2,58	100,00
Jawa Tengah	9,60	0,52	1,54	9,73	76,46	2,14	100,00
DI Yogyakarta	13,69	1,00	1,02	1,92	81,71	0,67	100,00
Jawa Timur	7,83	0,61	2,21	9,01	78,55	1,79	100,00
Banten	14,43	0,00	0,00	2,40	83,17	0,00	100,00
Bali	1,26	1,06	1,71	18,25	76,89	0,83	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,97	3,33	1,15	3,98	85,84	4,73	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,52	1,27	4,57	0,00	89,22	3,43	100,00
Kalimantan Barat	3,37	3,74	3,24	2,55	85,55	1,54	100,00
Kalimantan Tengah	4,19	1,46	6,34	2,54	82,78	2,69	100,00
Kalimantan Selatan	2,77	0,00	0,55	13,82	79,72	3,15	100,00
Kalimantan Timur	0,11	0,00	3,53	3,63	90,68	2,05	100,00
Sulawesi Utara	5,23	0,98	0,64	0,43	90,30	2,41	100,00
Sulawesi Tengah	1,23	0,22	7,72	2,79	87,04	1,00	100,00
Sulawesi Selatan	2,26	2,88	1,71	0,56	91,02	1,57	100,00
Sulawesi Tenggara	0,06	2,76	7,91	3,62	82,67	2,98	100,00
Gorontalo	1,59	8,68	9,28	1,49	78,97	0,00	100,00
Sulawesi Barat	0,00	2,96	3,75	0,00	91,33	1,95	100,00
Maluku	0,95	2,53	6,84	0,00	85,45	4,24	100,00
Maluku Utara	3,40	4,80	6,15	2,64	79,30	3,70	100,00
Papua Barat	0,00	0,00	14,84	8,25	65,73	11,19	100,00
Papua	5,39	2,13	4,32	0,00	88,16	0,00	100,00
Indonesia	**6,90**	**0,96**	**2,22**	**6,14**	**81,57**	**2,21**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 7.6.3 Persentase Lansia yang Melakukan Perjalanan dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Tujuan Utama Bepergian yang Terakhir, 2013

Laki-laki+Perempuan

Provinsi	Berlibur/ rekreasi	Profesi/ bisnis	Ke-sehatan	Berziarah/ keagamaan	Mengunjungi teman/ keluarga	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	3,35	1,33	7,80	1,39	81,99	4,15	100,00
Sumatera Utara	5,68	1,94	3,70	4,56	79,36	4,76	100,00
Sumatera Barat	6,97	3,15	3,33	3,36	78,46	4,71	100,00
Riau	7,25	8,95	9,28	0,00	68,41	6,11	100,00
Jambi	4,13	2,14	8,48	1,74	82,18	1,34	100,00
Sumatera Selatan	0,47	3,30	3,62	2,17	87,10	3,34	100,00
Bengkulu	4,65	4,33	5,28	3,16	80,54	2,05	100,00
Lampung	1,62	2,26	3,03	1,17	89,09	2,84	100,00
Kep. Bangka Belitung	10,94	2,37	3,98	1,77	66,42	14,52	100,00
Kepulauan Riau	3,83	5,13	3,69	0,10	86,91	0,34	100,00
DKI Jakarta	13,41	0,65	0,83	3,50	81,05	0,56	100,00
Jawa Barat	5,09	3,32	1,61	4,39	82,86	2,72	100,00
Jawa Tengah	8,77	2,64	1,74	9,13	75,41	2,31	100,00
DI Yogyakarta	10,54	1,50	0,79	1,50	83,48	2,19	100,00
Jawa Timur	7,59	3,09	2,31	8,50	76,36	2,14	100,00
Banten	11,81	1,11	0,53	4,61	81,21	0,72	100,00
Bali	1,65	1,31	1,94	18,25	76,15	0,69	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,79	3,75	1,04	3,98	84,51	3,93	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,27	1,29	7,02	0,00	85,20	5,21	100,00
Kalimantan Barat	4,06	6,51	5,41	1,53	80,90	1,58	100,00
Kalimantan Tengah	5,21	2,34	10,32	3,02	73,60	5,51	100,00
Kalimantan Selatan	3,40	0,89	1,63	9,68	82,26	2,13	100,00
Kalimantan Timur	1,46	1,81	4,31	3,69	86,10	2,63	100,00
Sulawesi Utara	3,98	2,42	3,48	0,67	86,73	2,72	100,00
Sulawesi Tengah	1,27	1,77	7,35	3,06	82,12	4,43	100,00
Sulawesi Selatan	2,75	4,51	3,25	0,96	86,59	1,95	100,00
Sulawesi Tenggara	0,14	9,11	9,40	1,85	76,72	2,78	100,00
Gorontalo	2,92	14,35	9,22	1,25	68,80	3,47	100,00
Sulawesi Barat	0,00	3,01	4,35	0,00	88,16	4,49	100,00
Maluku	1,36	6,43	9,83	0,00	73,21	9,17	100,00
Maluku Utara	1,70	6,39	6,63	1,31	79,61	4,36	100,00
Papua Barat	1,37	1,15	14,79	2,69	74,22	5,79	100,00
Papua	5,45	1,14	4,15	0,73	86,78	1,76	100,00
Indonesia	**6,33**	**2,81**	**2,74**	**5,39**	**80,13**	**2,60**	**100,00**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.1 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Pernah Menerima/Membeli Beras Miskin (Raskin) dalam Tiga Bulan Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	50,25	82,87	74,45
Sumatera Utara	28,74	56,50	43,22
Sumatera Barat	23,65	40,43	34,52
Riau	24,31	49,71	40,27
Jambi	33,21	50,20	45,05
Sumatera Selatan	42,85	47,19	45,64
Bengkulu	35,55	50,48	46,40
Lampung	52,22	72,93	67,89
Kep. Bangka Belitung	20,79	33,16	26,86
Kep. Riau	20,94	56,57	31,05
DKI Jakarta	20,92	-	20,92
Jawa Barat	55,20	76,72	63,73
Jawa Tengah	63,43	84,68	75,43
DI Yogyakarta	50,65	76,85	61,51
Jawa Timur	57,12	81,43	70,75
Banten	47,57	81,39	60,24
Bali	21,68	40,83	30,73
Nusa Tenggara Barat	83,20	91,86	88,25
Nusa Tenggara Timur	25,78	62,49	56,18
Kalimantan Barat	23,81	57,12	46,83
Kalimantan Tengah	20,26	44,35	36,53
Kalimantan Selatan	25,43	40,63	34,65
Kalimantan Timur	17,65	38,82	26,16
Sulawesi Utara	27,31	58,85	45,42
Sulawesi Tengah	30,20	66,13	58,57
Sulawesi Selatan	22,65	44,70	37,79
Sulawesi Tenggara	27,91	73,49	62,57
Gorontalo	40,53	73,22	62,27
Sulawesi Barat	36,06	59,88	53,94
Maluku	25,07	54,50	43,74
Maluku Utara	21,01	43,36	37,57
Papua Barat	40,77	55,31	51,03
Papua	33,06	52,23	44,69
Indonesia	**48,15**	**71,02**	**60,43**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.2 Rata-rata Raskin yang Dibeli untuk Sebulan dan Rata-rata Harga per kg yang Dibayarkan oleh Rumah Tangga Lansia yang Membeli Raskin selama Tiga bulan Terakhir menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Rata-rata Banyaknya Raskin (kg) yang Dibeli untuk Sebulan selama Tiga Bulan Terakhir			Rata-rata Harga (Rp) per kg Raskin yang Dibayarkan selama Tiga Bulan Terakhir		
	Perkotaan	Perdesaan	K+D	Perkotaan	Perdesaan	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6,01	6,39	6,32	2 006	1 976	1 980
Sumatera Utara	9,36	7,18	7,87	1 924	2 183	2 073
Sumatera Barat	9,20	8,65	8,78	1 955	2 041	2 022
Riau	9,12	7,04	7,50	2 071	2 355	2 218
Jambi	8,97	7,19	7,59	1 995	2 120	2 060
Sumatera Selatan	5,62	6,03	5,89	2 578	2 434	2 512
Bengkulu	7,53	7,30	7,35	2 228	2 325	2 299
Lampung	6,47	5,65	5,80	2 168	2 193	2 188
Kep. Bangka Belitung	11,67	10,96	11,24	1 400	1 306	1 344
Kep. Riau	9,69	10,49	10,10	1 808	2 059	1 920
DKI Jakarta	7,03	-	7,03	2 291	-	2 291
Jawa Barat	4,08	4,40	4,23	2 406	2 417	2 411
Jawa Tengah	4,53	5,12	4,91	2 058	2 001	2 021
DI Yogyakarta	8,24	6,82	7,50	1 908	1 927	1 918
Jawa Timur	4,78	5,04	4,95	1 929	1 936	1 934
Banten	4,01	4,47	4,24	2 423	2 456	2 439
Bali	6,82	7,65	7,34	1 852	1 903	1 884
Nusa Tenggara Barat	4,58	4,54	4,55	2 035	2 107	2 076
Nusa Tenggara Timur	9,90	11,52	11,39	1 683	1 803	1 791
Kalimantan Barat	6,43	6,42	6,42	2 187	2 888	2 764
Kalimantan Tengah	8,45	8,02	8,10	2 341	2 290	2 296
Kalimantan Selatan	7,84	6,73	7,05	2 181	2 563	2 447
Kalimantan Timur	9,89	8,60	9,12	1 849	1 804	1 820
Sulawesi Utara	8,36	6,87	7,25	1 878	1 894	1 889
Sulawesi Tengah	10,40	7,42	7,74	1 862	1 954	1 943
Sulawesi Selatan	10,38	8,89	9,17	1 899	1 894	1 895
Sulawesi Tenggara	6,06	6,53	6,48	1 904	2 047	2 035
Gorontalo	9,45	8,87	9,00	1 774	1 965	1 919
Sulawesi Barat	4,73	4,80	4,79	3 078	2 279	2 522
Maluku	10,75	10,27	10,37	1 894	1 815	1 829
Maluku Utara	12,54	8,90	9,43	1 939	2 378	2 301
Papua Barat	11,52	10,37	10,64	2 605	2 291	2 350
Papua	14,22	11,38	12,20	2 323	2 591	2 507
Indonesia	**5,21**	**5,76**	**5,55**	**2 154**	**2 094**	**2 118**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.3 Persentase Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Sosial menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	8 522	13,55	6 568	3,63	15 090	6,19
Sumatera Utara	39 108	11,81	19 038	5,27	58 146	8,40
Sumatera Barat	16 168	13,37	10 636	4,78	26 803	7,81
Riau	11 256	13,59	4 061	2,90	15 317	6,87
Jambi	7 911	16,22	3 033	2,71	10 944	6,81
Sumatera Selatan	16 411	11,21	5 747	2,18	22 158	5,40
Bengkulu	4 158	17,35	2 107	3,30	6 265	7,14
Lampung	9 677	8,44	8 102	2,27	17 779	3,78
Kep. Bangka Belitung	2 433	7,35	602	1,89	3 035	4,67
Kep. Riau	3 032	7,80	385	2,50	3 417	6,30
DKI Jakarta	61 386	13,07	-	-	61 386	13,07
Jawa Barat	173 859	10,52	53 810	4,95	227 669	8,31
Jawa Tengah	111 990	8,92	56 343	3,46	168 334	5,84
DI Yogyakarta	32 074	15,49	7 932	5,41	40 006	11,31
Jawa Timur	136 014	9,23	44 149	2,35	180 164	5,37
Banten	26 702	8,94	8 199	4,58	34 901	7,30
Bali	16 777	11,02	6 940	5,09	23 717	8,22
Nusa Tenggara Barat	5 519	4,80	4 110	2,55	9 629	3,49
Nusa Tenggara Timur	11 942	23,94	7 362	3,06	19 305	6,65
Kalimantan Barat	5 625	7,56	3 473	2,09	9 099	3,78
Kalimantan Tengah	3 812	12,53	1 983	3,13	5 795	6,19
Kalimantan Selatan	9 483	12,09	5 851	4,84	15 335	7,70
Kalimantan Timur	9 770	11,16	1 621	2,75	11 391	7,78
Sulawesi Utara	5 888	8,48	7 365	7,87	13 253	8,13
Sulawesi Tengah	4 065	12,54	4 247	3,49	8 312	5,40
Sulawesi Selatan	25 405	14,49	16 138	4,20	41 543	7,43
Sulawesi Tenggara	4 370	15,29	3 424	3,77	7 795	6,53
Gorontalo	1 907	9,94	983	2,58	2 890	5,04
Sulawesi Barat	1 471	9,48	881	1,89	2 352	3,78
Maluku	6 089	20,95	1 677	3,32	7 766	9,76
Maluku Utara	1 144	9,51	1 118	3,25	2 263	4,87
Papua Barat	1 742	27,35	709	4,64	2 450	11,32
Papua	4 308	17,50	1 686	4,44	5 995	9,57
Indonesia	**780 021**	**10,60**	**300 281**	**3,52**	**1 080 302**	**6,80**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.4.1 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Sosial, 2013

Perkotaan

Provinsi	Jenis Jaminan Sosial				
	Jaminan Pensiun	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan Veteran	Pesangon PHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	13,24	0,62	0,36	0,09	0,00
Sumatera Utara	10,50	0,81	0,57	0,47	0,33
Sumatera Barat	12,94	0,36	0,11	0,45	0,01
Riau	11,23	2,00	2,48	0,21	0,83
Jambi	15,57	0,00	1,13	0,00	0,65
Sumatera Selatan	9,90	0,52	1,11	0,23	0,50
Bengkulu	16,09	1,42	0,78	1,33	0,00
Lampung	7,28	1,12	0,88	0,16	0,40
Kep. Bangka Belitung	6,10	0,57	0,47	0,25	0,85
Kep. Riau	6,15	1,05	1,77	0,00	0,00
DKI Jakarta	11,48	1,67	1,41	0,08	0,37
Jawa Barat	9,21	0,77	1,11	0,48	0,20
Jawa Tengah	7,98	0,81	0,36	0,27	0,04
DI Yogyakarta	14,22	0,98	0,07	0,32	0,53
Jawa Timur	8,13	0,54	0,63	0,37	0,05
Banten	7,65	0,56	1,69	0,01	1,25
Bali	9,34	0,88	0,92	0,69	0,17
Nusa Tenggara Barat	4,56	0,15	0,04	0,19	0,00
Nusa Tenggara Timur	23,64	0,25	0,12	0,43	0,00
Kalimantan Barat	7,20	0,51	0,77	0,14	0,41
Kalimantan Tengah	11,06	0,53	0,62	0,81	0,00
Kalimantan Selatan	11,01	1,15	0,10	0,03	0,00
Kalimantan Timur	10,70	0,63	0,81	0,01	0,00
Sulawesi Utara	7,78	0,22	0,00	0,61	0,00
Sulawesi Tengah	11,27	1,12	0,47	0,31	0,00
Sulawesi Selatan	13,79	1,09	0,18	0,14	0,29
Sulawesi Tenggara	13,74	2,83	0,07	0,00	0,00
Gorontalo	9,44	0,37	0,11	0,49	0,00
Sulawesi Barat	8,04	0,00	0,00	1,43	0,00
Maluku	20,55	0,67	0,00	0,00	0,00
Maluku Utara	9,24	0,00	0,46	0,28	0,00
Papua Barat	26,53	1,52	1,52	1,22	0,00
Papua	16,43	0,30	0,55	1,54	0,00
Indonesia	**9,46**	**0,79**	**0,77**	**0,33**	**0,21**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.4.2 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Sosial, 2013

Perdesaan

Provinsi	Jenis Jaminan Sosial				
	Jaminan Pensiun	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan Veteran	Pesangon PHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	3,08	0,19	0,02	0,64	0,02
Sumatera Utara	4,76	0,40	0,09	0,45	0,03
Sumatera Barat	3,98	0,34	0,42	0,58	0,04
Riau	2,29	0,42	0,95	0,06	0,11
Jambi	2,40	0,18	0,17	0,14	0,00
Sumatera Selatan	1,90	0,12	0,39	0,00	0,00
Bengkulu	2,67	0,00	0,28	0,36	0,00
Lampung	1,80	0,11	0,27	0,26	0,00
Kep. Bangka Belitung	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Kep. Riau	2,15	0,36	0,00	0,00	0,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3,73	0,28	0,37	0,83	0,12
Jawa Tengah	3,07	0,14	0,09	0,23	0,06
DI Yogyakarta	5,24	0,37	0,00	0,24	0,00
Jawa Timur	2,17	0,17	0,09	0,09	0,00
Banten	3,08	0,57	0,92	0,32	0,53
Bali	3,59	0,43	0,08	1,27	0,00
Nusa Tenggara Barat	2,38	0,00	0,15	0,17	0,00
Nusa Tenggara Timur	2,76	0,37	0,06	0,03	0,02
Kalimantan Barat	1,64	0,34	0,23	0,00	0,00
Kalimantan Tengah	2,63	0,23	0,26	0,07	0,15
Kalimantan Selatan	3,47	0,42	0,47	0,75	0,15
Kalimantan Timur	1,52	0,16	1,06	0,00	0,00
Sulawesi Utara	7,17	0,43	0,29	0,57	0,05
Sulawesi Tengah	2,53	0,25	0,35	0,23	0,34
Sulawesi Selatan	3,14	0,34	0,07	0,87	0,03
Sulawesi Tenggara	3,17	0,59	0,08	0,21	0,13
Gorontalo	2,37	0,72	0,00	0,26	0,12
Sulawesi Barat	1,89	0,19	0,00	0,00	0,00
Maluku	3,32	0,14	0,00	0,00	0,00
Maluku Utara	2,91	0,10	0,24	0,00	0,00
Papua Barat	4,32	0,13	0,00	0,18	0,01
Papua	3,95	0,00	0,00	0,49	0,00
Indonesia	**2,96**	**0,23**	**0,20**	**0,33**	**0,05**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.4.3 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Sosial, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jenis Jaminan Sosial				
	Jaminan Pensiun	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan Veteran	Pesangon PHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5,70	0,30	0,11	0,50	0,02
Sumatera Utara	7,51	0,60	0,32	0,46	0,17
Sumatera Barat	7,14	0,35	0,31	0,53	0,03
Riau	5,61	1,01	1,51	0,12	0,38
Jambi	6,39	0,12	0,46	0,10	0,20
Sumatera Selatan	4,75	0,26	0,65	0,08	0,18
Bengkulu	6,33	0,39	0,41	0,62	0,00
Lampung	3,13	0,35	0,42	0,23	0,10
Kep. Bangka Belitung	4,03	0,29	0,24	0,13	0,43
Kep. Riau	5,01	0,85	1,27	0,00	0,00
DKI Jakarta	11,48	1,67	1,41	0,08	0,37
Jawa Barat	7,04	0,58	0,82	0,62	0,17
Jawa Tengah	5,20	0,43	0,21	0,25	0,05
DI Yogyakarta	10,50	0,73	0,04	0,29	0,31
Jawa Timur	4,78	0,33	0,33	0,21	0,02
Banten	5,94	0,57	1,40	0,12	0,98
Bali	6,63	0,67	0,52	0,96	0,09
Nusa Tenggara Barat	3,29	0,06	0,10	0,18	0,00
Nusa Tenggara Timur	6,35	0,35	0,07	0,10	0,01
Kalimantan Barat	3,36	0,39	0,40	0,04	0,13
Kalimantan Tengah	5,37	0,33	0,38	0,31	0,10
Kalimantan Selatan	6,44	0,71	0,32	0,47	0,09
Kalimantan Timur	7,01	0,44	0,91	0,01	0,00
Sulawesi Utara	7,43	0,34	0,17	0,59	0,03
Sulawesi Tengah	4,37	0,43	0,37	0,25	0,27
Sulawesi Selatan	6,47	0,57	0,10	0,64	0,11
Sulawesi Tenggara	5,70	1,13	0,08	0,16	0,10
Gorontalo	4,74	0,60	0,04	0,34	0,08
Sulawesi Barat	3,42	0,14	0,00	0,36	0,00
Maluku	9,62	0,33	0,00	0,00	0,00
Maluku Utara	4,55	0,07	0,30	0,07	0,00
Papua Barat	10,85	0,54	0,45	0,49	0,01
Papua	8,85	0,12	0,22	0,90	0,00
Indonesia	**5,97**	**0,49**	**0,46**	**0,33**	**0,13**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.5 Perkiraan Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	56 020	89,07	159 517	88,27	215 536	88,48
Sumatera Utara	129 733	39,17	115 034	31,84	244 767	35,35
Sumatera Barat	65 626	54,27	99 387	44,70	165 013	48,07
Riau	38 184	46,10	62 160	44,35	100 345	45,00
Jambi	22 561	46,25	34 632	30,93	57 193	35,58
Sumatera Selatan	84 652	57,80	126 157	47,77	210 810	51,35
Bengkulu	14 617	61,00	25 460	39,88	40 077	45,64
Lampung	62 242	54,28	148 162	41,59	210 403	44,68
Kep. Bangka Belitung	21 622	65,33	19 468	60,98	41 091	63,20
Kep. Riau	20 482	52,73	9 940	64,64	30 423	56,10
DKI Jakarta	181 825	38,71	-	-	181 825	38,71
Jawa Barat	866 906	52,44	520 604	47,94	1 387 510	50,66
Jawa Tengah	699 484	55,73	877 034	53,82	1 576 518	54,65
DI Yogyakarta	155 619	75,13	112 550	76,79	268 169	75,82
Jawa Timur	663 480	45,01	843 104	44,80	1 506 584	44,89
Banten	173 254	57,98	97 638	54,52	270 892	56,69
Bali	129 825	85,27	130 592	95,86	260 417	90,27
Nusa Tenggara Barat	67 001	58,27	76 823	47,70	143 824	52,10
Nusa Tenggara Timur	35 188	70,55	177 651	73,83	212 838	73,26
Kalimantan Barat	24 571	33,02	65 875	39,55	90 446	37,53
Kalimantan Tengah	13 691	45,01	25 810	40,80	39 501	42,16
Kalimantan Selatan	38 759	49,41	56 179	46,49	94 938	47,64
Kalimantan Timur	66 836	76,34	37 925	64,37	104 761	71,53
Sulawesi Utara	38 994	56,16	44 472	47,50	83 467	51,19
Sulawesi Tengah	17 715	54,64	63 977	52,61	81 693	53,04
Sulawesi Selatan	114 278	65,17	245 679	63,98	359 957	64,35
Sulawesi Tenggara	15 611	54,60	52 570	57,88	68 181	57,10
Gorontalo	13 787	71,83	26 795	70,27	40 583	70,79
Sulawesi Barat	9 885	63,67	28 938	62,00	38 822	62,42
Maluku	17 256	59,38	28 393	56,25	45 649	57,40
Maluku Utara	5 605	46,60	21 264	61,82	26 870	57,87
Papua Barat	4 690	73,63	10 885	71,29	15 575	71,98
Papua	16 329	66,34	22 455	59,10	38 784	61,94
Indonesia	**3 886 330**	**52,79**	**4 367 130**	**51,19**	**8 253 460**	**51,93**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.6.1 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/ Asuransi Kesehatan dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan, 2013

Perkotaan

Provinsi	Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan				
	Jamkesmas	Jamkesda	JPK PNS/Veteran/ Pensiun	JPK Jamsostek	Jaminan kesehatan lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	41,09	43,13	0,52	24,82	2,36
Sumatera Utara	17,09	1,88	0,04	15,47	6,35
Sumatera Barat	20,22	6,76	0,61	22,99	3,84
Riau	14,32	7,95	0,59	16,78	9,46
Jambi	18,22	1,33	0,00	21,43	5,84
Sumatera Selatan	18,95	11,57	0,00	20,22	10,45
Bengkulu	26,48	0,90	2,91	31,01	2,83
Lampung	24,50	13,23	0,74	15,62	4,97
Kep. Bangka Belitung	13,36	33,30	0,00	11,61	6,37
Kep. Riau	13,67	7,99	1,09	11,61	21,26
DKI Jakarta	1,77	1,35	0,36	16,38	16,52
Jawa Barat	30,44	3,36	0,71	12,04	9,04
Jawa Tengah	34,55	3,13	0,54	13,79	5,91
DI Yogyakarta	46,47	3,82	1,48	23,26	5,22
Jawa Timur	26,60	1,69	1,10	12,34	5,14
Banten	23,83	8,82	0,85	9,41	18,58
Bali	10,25	61,39	4,34	17,33	12,08
Nusa Tenggara Barat	47,39	1,34	1,17	7,77	0,70
Nusa Tenggara Timur	31,46	6,28	0,07	36,37	2,60
Kalimantan Barat	13,16	2,55	0,09	13,70	6,09
Kalimantan Tengah	17,88	3,59	0,38	19,29	4,34
Kalimantan Selatan	20,99	5,17	0,64	20,65	4,90
Kalimantan Timur	9,57	39,07	0,28	20,22	22,65
Sulawesi Utara	18,23	7,47	0,54	25,49	6,91
Sulawesi Tengah	23,44	2,47	0,31	28,41	2,76
Sulawesi Selatan	18,78	12,35	0,44	27,84	6,70
Sulawesi Tenggara	20,35	1,55	0,00	30,57	3,14
Gorontalo	36,05	6,25	1,24	26,08	3,10
Sulawesi Barat	22,53	0,46	0,74	25,83	0,86
Maluku	31,01	1,38	0,16	29,04	4,68
Maluku Utara	11,58	6,51	0,00	29,66	2,59
Papua Barat	46,84	0,00	0,11	38,32	5,27
Papua	34,06	9,15	0,49	29,21	2,43
Indonesia	**26,10**	**5,81**	**0,77**	**15,05**	**7,94**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.6.2 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/ Asuransi Kesehatan dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan, 2013

Perdesaan

Provinsi	Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan				
	Jamkesmas	Jamkesda	JPK PNS/Veteran/ Pensiun	JPK Jamsostek	Jaminan kesehatan lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	64,22	31,04	6,76	0,28	2,57
Sumatera Utara	22,13	2,61	5,20	2,01	0,17
Sumatera Barat	28,07	9,41	7,64	1,00	0,87
Riau	27,12	14,65	3,68	2,47	0,44
Jambi	24,51	2,76	3,98	1,55	0,85
Sumatera Selatan	20,53	21,14	2,30	1,03	6,17
Bengkulu	34,14	0,76	5,16	0,70	0,14
Lampung	34,32	3,38	3,05	0,95	1,39
Kep. Bangka Belitung	16,54	38,90	4,33	3,20	14,20
Kep. Riau	32,13	20,19	4,09	3,43	5,27
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	39,74	3,39	4,66	1,45	2,52
Jawa Tengah	45,15	2,56	4,48	1,34	2,78
DI Yogyakarta	63,09	2,13	8,41	0,61	7,00
Jawa Timur	38,80	1,62	2,90	1,49	0,65
Banten	47,32	1,32	3,38	5,97	0,54
Bali	18,13	74,86	8,66	1,74	9,91
Nusa Tenggara Barat	41,45	1,09	3,03	0,23	3,70
Nusa Tenggara Timur	65,39	2,67	5,40	0,25	2,00
Kalimantan Barat	32,07	4,57	2,09	1,29	1,26
Kalimantan Tengah	28,71	4,76	4,56	4,48	2,56
Kalimantan Selatan	24,71	12,80	6,01	3,45	2,85
Kalimantan Timur	33,30	25,82	4,43	6,25	3,07
Sulawesi Utara	30,57	5,49	11,45	1,73	1,75
Sulawesi Tengah	40,20	7,55	6,10	0,76	2,19
Sulawesi Selatan	33,66	20,03	6,64	0,66	11,60
Sulawesi Tenggara	48,45	3,57	6,82	0,62	0,27
Gorontalo	60,09	5,51	6,24	0,42	1,54
Sulawesi Barat	36,42	3,54	6,60	0,27	21,19
Maluku	49,51	1,56	5,84	0,90	0,48
Maluku Utara	28,14	30,69	7,72	0,96	0,16
Papua Barat	68,13	0,00	4,21	2,18	1,39
Papua	48,92	10,23	4,55	0,12	2,66
Indonesia	**39,08**	**6,83**	**4,53**	**1,45**	**2,68**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.6.3 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Mempunyai Jaminan Pembiayaan/ Asuransi Kesehatan dalam Setahun Terakhir menurut Tipe Daerah dan Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan, 2013

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Jenis Jaminan Pembiayaan/Asuransi Kesehatan				
	Jamkesmas	Jamkesda	JPK PNS/Veteran/ Pensiun	JPK Jamsostek	Jaminan kesehatan lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	58,34	34,19	11,31	0,80	2,62
Sumatera Utara	19,99	2,25	10,06	4,08	1,12
Sumatera Barat	25,46	8,40	13,08	2,00	2,16
Riau	22,46	12,09	8,47	4,97	1,79
Jambi	22,76	2,27	9,18	2,76	0,96
Sumatera Selatan	20,11	17,67	8,48	4,39	6,21
Bengkulu	32,40	0,81	11,78	1,19	0,43
Lampung	32,19	5,80	6,07	1,95	1,35
Kep. Bangka Belitung	14,90	35,91	8,16	5,01	13,55
Kep. Riau	19,64	11,90	9,00	16,86	5,34
DKI Jakarta	1,57	1,50	15,80	16,91	10,71
Jawa Barat	34,53	3,35	8,97	6,05	2,76
Jawa Tengah	40,77	2,81	8,46	3,40	2,88
DI Yogyakarta	53,49	3,11	16,95	3,26	5,81
Jawa Timur	33,52	1,66	6,98	3,14	1,04
Banten	33,01	6,34	7,09	14,10	4,77
Bali	14,20	67,87	13,16	7,33	9,40
Nusa Tenggara Barat	44,25	1,18	4,87	0,43	3,40
Nusa Tenggara Timur	59,58	3,28	10,75	0,65	2,04
Kalimantan Barat	26,28	3,92	5,57	2,73	1,21
Kalimantan Tengah	25,48	4,45	9,29	4,40	2,97
Kalimantan Selatan	23,30	9,82	11,55	4,06	2,49
Kalimantan Timur	19,15	34,08	13,67	16,57	4,53
Sulawesi Utara	25,28	6,39	17,51	3,98	3,57
Sulawesi Tengah	36,89	6,43	10,66	1,31	2,20
Sulawesi Selatan	29,03	17,68	13,31	2,60	11,90
Sulawesi Tenggara	41,81	3,11	12,54	1,19	0,88
Gorontalo	52,25	5,70	12,54	1,29	2,69
Sulawesi Barat	33,42	2,77	11,09	0,35	20,30
Maluku	43,00	1,46	14,41	2,27	0,59
Maluku Utara	23,83	24,38	13,46	1,38	0,12
Papua Barat	62,10	0,00	14,14	2,93	1,43
Papua	43,16	9,94	14,32	1,08	3,22
Indonesia	**33,29**	**6,42**	**9,31**	**4,49**	**3,24**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.7 Perkiraan Jumlah dan Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Menerima PNPM dan Program Pemerintah Lainnya menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1 086	1,75	7 755	4,38	8 841	3,70
Sumatera Utara	1 921	0,63	5 772	1,73	7 694	1,20
Sumatera Barat	1 942	1,67	11 313	5,31	13 255	4,03
Riau	40	0,05	5 210	3,96	5 250	2,51
Jambi	281	0,62	2 827	2,70	3 108	2,07
Sumatera Selatan	90	0,06	1 890	0,75	1 980	0,51
Bengkulu	211	0,93	1 683	2,78	1 894	2,28
Lampung	826	0,76	4 152	1,23	4 978	1,11
Kep. Bangka Belitung	199	0,63	160	0,53	359	0,58
Kep. Riau	503	1,35	1 295	8,39	1 799	3,42
DKI Jakarta	248	0,06	-	-	248	0,06
Jawa Barat	26 955	1,75	25 047	2,46	52 003	2,03
Jawa Tengah	24 069	2,10	46 199	3,09	70 269	2,66
DI Yogyakarta	2 183	1,08	4 779	3,32	6 962	2,01
Jawa Timur	20 096	1,44	33 968	1,90	54 064	1,70
Banten	2 037	0,72	2 653	1,59	4 691	1,05
Bali	1 499	0,99	647	0,47	2 146	0,75
Nusa Tenggara Barat	1 276	1,15	3 179	2,05	4 455	1,68
Nusa Tenggara Timur	1 318	2,62	11 558	4,78	12 876	4,41
Kalimantan Barat	0	0,00	3 229	2,15	3 229	1,48
Kalimantan Tengah	337	1,18	1 728	2,95	2 066	2,37
Kalimantan Selatan	544	0,73	3 442	3,00	3 986	2,10
Kalimantan Timur	273	0,35	1 457	2,73	1 730	1,31
Sulawesi Utara	975	1,50	5 063	5,80	6 037	3,97
Sulawesi Tengah	204	0,73	6 063	5,92	6 267	4,80
Sulawesi Selatan	2 887	1,70	8 728	2,35	11 615	2,14
Sulawesi Tenggara	473	1,72	4 141	4,77	4 615	4,04
Gorontalo	762	4,26	2 679	7,60	3 441	6,48
Sulawesi Barat	643	4,07	959	2,03	1 602	2,54
Maluku	1	0,00	1 027	2,05	1 028	1,30
Maluku Utara	0	0,00	502	1,57	502	1,16
Papua Barat	25	0,43	146	1,09	171	0,89
Papua	233	1,13	1 180	3,62	1 413	2,65
Indonesia	**94 140**	**1,37**	**210 432**	**2,62**	**304 572**	**2,04**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

Tabel 8.8 Proporsi Rumah Tangga Lansia yang Menerima Bantuan dari Kebijakan Pasar Kerja dalam Setahun Terakhir menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Program, 2013

Provinsi	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri			Program Pemerintah Lainnya		
	Perkotaan	Perdesaan	K+D	Perkotaan	Perdesaan	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,67	3,92	3,34	0,08	0,52	0,41
Sumatera Utara	0,11	1,69	0,93	0,52	0,17	0,34
Sumatera Barat	1,52	4,57	3,49	0,16	0,80	0,58
Riau	0,05	1,99	1,27	0,00	1,97	1,24
Jambi	0,25	2,70	1,95	0,37	0,00	0,11
Sumatera Selatan	0,01	0,58	0,37	0,05	0,18	0,13
Bengkulu	0,93	2,78	2,28	0,00	0,00	0,00
Lampung	0,48	1,22	1,04	0,28	0,10	0,14
Kep. Bangka Belitung	0,25	0,35	0,30	0,38	0,18	0,28
Kep. Riau	1,24	7,47	3,07	0,12	0,92	0,35
DKI Jakarta	0,00	-	0,00	0,06	-	0,06
Jawa Barat	1,55	2,16	1,79	0,27	0,36	0,30
Jawa Tengah	1,77	2,65	2,27	0,32	0,53	0,44
DI Yogyakarta	0,96	3,17	1,88	0,11	0,14	0,13
Jawa Timur	0,92	1,56	1,28	0,52	0,40	0,45
Banten	0,51	1,48	0,87	0,21	0,32	0,25
Bali	0,87	0,39	0,64	0,12	0,08	0,10
Nusa Tenggara Barat	0,80	2,05	1,53	0,35	0,03	0,16
Nusa Tenggara Timur	1,20	3,58	3,17	1,42	1,60	1,57
Kalimantan Barat	0,00	1,90	1,31	0,00	0,25	0,17
Kalimantan Tengah	1,18	2,45	2,03	0,56	0,52	0,53
Kalimantan Selatan	0,51	2,05	1,44	0,22	0,95	0,66
Kalimantan Timur	0,35	2,48	1,21	0,00	0,25	0,10
Sulawesi Utara	1,44	5,44	3,73	0,11	0,36	0,25
Sulawesi Tengah	0,73	4,91	4,01	0,00	1,15	0,90
Sulawesi Selatan	1,10	1,95	1,69	0,59	0,39	0,46
Sulawesi Tenggara	1,39	4,29	3,59	0,34	0,56	0,50
Gorontalo	4,26	7,39	6,34	0,00	0,57	0,38
Sulawesi Barat	4,07	1,79	2,36	0,00	0,23	0,17
Maluku	0,00	1,73	1,09	0,00	0,33	0,21
Maluku Utara	0,00	1,57	1,16	0,00	0,38	0,28
Papua Barat	0,43	1,09	0,89	0,00	0,00	0,00
Papua	1,13	3,62	2,65	0,00	0,00	0,00
INDONESIA	**1,07**	**2,24**	**1,70**	**0,31**	**0,45**	**0,39**

Sumber: BPS, Susenas Kor 2013

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

PENGHITUNGAN TINGKAT KESALAHAN PENARIKAN SAMPEL

http://www.bpp-9.id

http://www.bps.go.id

PENGHITUNGAN TINGKAT KESALAHAN PENARIKAN SAMPEL

(SAMPLING ERROR ESTIMATES)

Nilai-nilai indikator yang diestimasi dari hasil Susenas 2013 dipengaruhi oleh dua jenis kesalahan (*error*), yaitu *non sampling error* dan *sampling error*. *Non sampling error* adalah kesalahan yang terjadi ketika proses pengumpulan maupun pengolahan data. Misalnya kesalahan dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner, maupun kesalahan dalam melakukan *input* data ke komputer.

Sampling error adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik sampling tertentu dalam suatu survei. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2013 ditunjukkan oleh nilai *standard error* (galat baku) dari suatu nilai indikator (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur presisi suatu indikator digunakan nilai *relative standard error* (RSE), yaitu perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya, yang dinyatakan dalam persen. *Standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

Penghitungan tingkat *sampling error* untuk indikator-indikator yang disajikan dalam publikasi Statistik Penduduk Lansia Indonesia 2013 menggunakan software STATA 12.0 for Windows. Indikator kepemudaan yang dihitung *sampling error*nya meliputi indikator pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sampling error disajikan dalam 12 tabel lampiran menurut provinsi dan tipe daerah (perkotaan dan perdesaan). Tingkat *sampling error* yang disajikan meliputi nilai-nilai estimasi dari *standard error*, RSE, selang kepercayaan 95 persen, dan *design effect* (deff).

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

Tabel 9.1 *Sampling Error* Persentase Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	5,47	0,31	5,59	4,87	6,06	1,08	12 747	6,20	0,19	3,00	5,83	6,56	0,90	30 472	5,99	0,16	2,65	5,68	6,30	0,95	43 219
Sumatera Utara	6,17	0,23	3,73	5,72	6,62	2,69	32 473	6,49	0,19	3,00	6,11	6,87	1,90	41 046	6,34	0,15	2,38	6,04	6,63	2,29	73 519
Sumatera Barat	7,61	0,31	4,11	7,00	8,23	1,21	15 960	8,92	0,27	3,07	8,38	9,46	1,26	22 792	8,41	0,21	2,48	8,00	8,82	1,26	38 752
Riau	4,27	0,28	6,46	3,73	4,81	1,94	10 877	4,57	0,21	4,65	4,16	4,99	1,67	17 788	4,46	0,17	3,79	4,13	4,79	1,77	28 665
Jambi	5,96	0,39	6,50	5,20	6,72	1,18	6 244	6,01	0,21	3,58	5,59	6,43	0,82	16 447	6,00	0,19	3,18	5,62	6,37	0,93	22 691
Sumatera Selatan	6,45	0,33	5,19	5,80	7,11	2,30	11 836	6,69	0,21	3,16	6,28	7,11	1,58	23 960	6,60	0,18	2,75	6,25	6,96	1,84	35 796
Bengkulu	5,23	0,38	7,33	4,48	5,98	0,74	5 912	6,54	0,26	4,01	6,03	7,05	0,62	13 088	6,13	0,22	3,57	5,70	6,56	0,66	19 000
Lampung	6,85	0,40	5,83	6,07	7,63	2,27	8 846	7,73	0,22	2,81	7,31	8,16	1,71	24 893	7,50	0,19	2,56	7,13	7,88	1,86	33 739
Kep. Bangka Belitung	6,54	0,39	5,94	5,78	7,31	0,70	6 529	6,11	0,46	7,56	5,20	7,01	1,09	6 598	6,32	0,30	4,78	5,73	6,91	0,89	13 127
Kepulauan Riau	3,25	0,37	11,26	2,54	3,97	2,92	9 316	6,33	0,60	9,51	5,15	7,51	0,83	3 372	3,76	0,33	8,78	3,12	4,41	2,48	12 688
DKI Jakarta	5,91	0,23	3,93	5,46	6,37	4,25	17 453	-	-	-	-	-	-	-	5,91	0,23	3,93	5,46	6,37	4,25	17 453
Jawa Barat	6,89	0,16	2,25	6,58	7,19	4,96	52 486	8,94	0,22	2,50	8,50	9,37	4,12	27 011	7,58	0,13	1,68	7,33	7,83	4,61	79 497
Jawa Tengah	10,53	0,20	1,86	10,15	10,91	2,72	50 640	11,60	0,19	1,68	11,22	11,98	2,93	43 732	11,11	0,14	1,25	10,84	11,38	2,84	94 372
DI Yogyakarta	11,37	0,48	4,24	10,42	12,31	2,42	7 960	16,77	0,90	5,38	15,00	18,54	3,14	3 865	13,20	0,43	3,22	12,36	14,03	2,51	11 825
Jawa Timur	10,08	0,20	1,94	9,70	10,46	3,40	54 047	11,76	0,19	1,60	11,39	12,13	3,01	46 403	10,96	0,14	1,24	10,69	11,22	3,20	100 450
Banten	4,47	0,22	4,93	4,04	4,91	3,89	17 656	5,96	0,33	5,56	5,31	6,61	3,15	8 772	4,95	0,18	3,69	4,59	5,31	3,57	26 428
Bali	8,65	0,40	4,67	7,85	9,44	2,24	12 926	12,27	0,51	4,16	11,27	13,27	1,70	8 145	10,07	0,32	3,15	9,45	10,70	1,99	21 071
Nusa Tenggara Barat	7,17	0,36	4,96	6,47	7,86	1,65	9 572	7,54	0,37	4,89	6,82	8,26	2,34	12 314	7,38	0,26	3,54	6,87	7,90	2,07	21 886
Nusa Tenggara Timur	6,40	0,40	6,19	5,63	7,18	1,13	8 276	7,65	0,18	2,33	7,30	8,00	0,79	39 896	7,40	0,16	2,19	7,08	7,72	0,84	48 172
Kalimantan Barat	6,70	0,39	5,87	5,93	7,47	1,54	8 599	6,23	0,22	3,51	5,80	6,66	1,16	21 360	6,37	0,19	3,04	5,99	6,75	1,28	29 959
Kalimantan Tengah	4,69	0,32	6,83	4,06	5,32	0,81	8 167	5,04	0,24	4,81	4,57	5,52	0,86	16 472	4,92	0,19	3,94	4,54	5,30	0,84	24 639
Kalimantan Selatan	5,76	0,33	5,78	5,11	6,41	1,46	10 073	6,40	0,27	4,14	5,88	6,92	1,15	15 439	6,13	0,21	3,40	5,72	6,54	1,28	25 512
Kalimantan Timur	4,47	0,26	5,77	3,96	4,97	1,64	15 384	4,97	0,29	5,82	4,40	5,53	1,15	11 031	4,66	0,19	4,16	4,28	5,04	1,44	26 415
Sulawesi Utara	8,64	0,49	5,67	7,68	9,60	1,43	10 236	9,55	0,36	3,74	8,86	10,25	0,84	15 589	9,14	0,30	3,24	8,56	9,72	1,10	25 825
Sulawesi Tengah	6,27	0,58	9,27	5,13	7,40	1,73	5 543	7,19	0,24	3,33	6,72	7,66	0,80	18 472	6,96	0,23	3,29	6,51	7,41	1,00	24 015
Sulawesi Selatan	7,32	0,34	4,59	6,66	7,98	2,26	18 602	9,26	0,20	2,20	8,86	9,66	1,14	35 414	8,54	0,18	2,14	8,19	8,90	1,57	54 016
Sulawesi Tenggara	5,08	0,39	7,70	4,31	5,85	0,94	6 242	6,45	0,27	4,18	5,92	6,98	0,92	17 776	6,07	0,22	3,70	5,63	6,51	0,94	24 018
Gorontalo	6,55	0,55	8,36	5,47	7,62	0,81	4 147	6,59	0,38	5,71	5,86	7,33	0,73	7 740	6,58	0,31	4,72	5,97	7,19	0,76	11 887
Sulawesi Barat	6,57	0,55	8,44	5,48	7,65	0,62	2 685	6,17	0,37	6,04	5,44	6,90	1,01	8 386	6,26	0,31	5,03	5,64	6,87	0,92	11 071
Maluku	6,15	0,42	6,86	5,32	6,98	0,85	7 291	6,50	0,33	5,02	5,86	7,14	0,77	14 503	6,37	0,26	4,05	5,86	6,87	0,80	21 794
Maluku Utara	4,87	0,44	9,09	4,00	5,73	0,57	4 263	5,31	0,25	4,62	4,83	5,79	0,43	12 287	5,19	0,22	4,15	4,77	5,61	0,46	16 550
Papua Barat	3,47	0,33	9,61	2,82	4,12	0,35	5 687	3,71	0,33	8,78	3,07	4,35	0,66	10 260	3,63	0,25	6,77	3,15	4,12	0,56	15 947
Papua	3,89	0,44	11,34	3,02	4,75	1,79	8 200	2,10	0,15	7,27	1,80	2,39	1,13	31 977	2,56	0,16	6,40	2,24	2,88	1,44	40 177
Indonesia	**7,43**	**0,06**	**0,87**	**7,30**	**7,55**	**3,32**	**466 875**	**8,67**	**0,06**	**0,67**	**8,55**	**8,78**	**2,34**	**627 300**	**8,05**	**0,04**	**0,54**	**7,96**	**8,13**	**2,82**	**1094 175**

http://www.bps.go.id

Tabel 9.2 *Sampling Error* Angka Buta Huruf (ABH) Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	13,01	2,15	16,53	8,80	17,23	1,52	824	23,11	1,44	6,23	20,28	25,93	0,97	2 327	20,51	1,21	5,88	18,14	22,87	1,23	3 151
Sumatera Utara	5,41	0,67	12,38	4,10	6,73	1,81	2 562	13,94	0,96	6,89	12,05	15,82	1,33	3 081	9,84	0,61	6,17	8,65	11,03	1,71	5 643
Sumatera Barat	7,58	1,14	14,98	5,36	9,81	1,39	1 490	13,25	0,99	7,50	11,30	15,20	0,92	2 396	11,25	0,75	6,70	9,77	12,73	1,16	3 886
Riau	7,63	2,38	31,23	2,96	12,30	4,07	537	16,72	1,64	9,80	13,51	19,93	1,25	1 046	13,30	1,35	10,17	10,65	15,96	2,03	1 583
Jambi	12,14	2,34	19,25	7,56	16,72	1,53	458	20,89	1,52	7,26	17,92	23,86	0,74	1 222	18,23	1,26	6,93	15,75	20,70	1,01	1 680
Sumatera Selatan	9,53	1,55	16,23	6,50	12,57	2,52	924	16,27	1,07	6,56	14,18	18,37	1,09	1 852	13,91	0,88	6,34	12,18	15,63	1,60	2 776
Bengkulu	10,37	2,08	20,04	6,30	14,45	0,69	395	25,66	1,72	6,70	22,29	29,03	0,49	1 021	21,57	1,40	6,50	18,82	24,32	0,62	1 416
Lampung	16,33	2,09	12,80	12,23	20,42	2,26	774	25,58	1,28	5,01	23,07	28,09	1,51	2 328	23,38	1,10	4,70	21,23	25,53	1,92	3 102
Kep. Bangka Belitung	11,74	1,88	16,04	8,05	15,43	0,72	549	19,31	2,63	13,64	14,15	24,48	0,70	395	15,46	1,64	10,62	12,24	18,67	0,82	944
Kepulauan Riau	12,93	2,52	19,52	7,99	17,88	1,43	585	27,22	4,27	15,70	18,84	35,59	0,70	247	16,92	2,22	13,13	12,57	21,28	1,18	832
DKI Jakarta	5,49	0,79	14,37	3,94	7,03	3,53	1 435	-	-	-	-	-	-	-	5,49	0,79	14,37	3,94	7,03	3,37	1 435
Jawa Barat	13,84	0,82	5,89	12,24	15,44	5,76	4 422	21,27	1,14	5,37	19,03	23,50	4,11	3 056	16,80	0,67	3,99	15,48	18,11	5,27	7 478
Jawa Tengah	29,21	0,92	3,15	27,41	31,02	3,28	5 635	41,24	0,86	2,09	39,55	42,92	2,47	5 945	36,01	0,63	1,76	34,77	37,26	3,07	11 580
DI Yogyakarta	26,37	1,87	7,10	22,70	30,04	2,45	1 062	46,20	3,34	7,22	39,66	52,74	3,55	798	34,91	1,92	5,50	31,14	38,67	3,69	1 860
Jawa Timur	25,38	0,90	3,53	23,63	27,14	3,90	6 258	47,61	0,90	1,89	45,85	49,37	2,95	6 681	37,85	0,66	1,74	36,56	39,14	3,68	12 939
Banten	19,10	2,22	11,64	14,74	23,46	5,56	963	28,08	2,30	8,20	23,57	32,59	2,21	689	22,56	1,62	7,19	19,38	25,74	4,07	1 652
Bali	30,43	1,81	5,93	26,89	33,97	1,64	1 397	47,67	2,60	5,45	42,58	52,77	2,06	1 201	38,71	1,66	4,28	35,46	41,95	2,26	2 598
Nusa Tenggara Barat	49,76	3,12	6,26	43,66	55,87	2,75	785	55,85	2,72	4,88	50,51	61,19	2,40	1 136	53,37	2,05	3,85	49,35	57,40	2,81	1 921
Nusa Tenggara Timur	17,39	2,46	14,12	12,58	22,21	1,32	554	37,66	1,24	3,31	35,22	40,10	0,78	3 863	34,20	1,13	3,31	31,98	36,42	1,00	4 417
Kalimantan Barat	24,24	2,55	10,54	19,23	29,24	1,68	706	44,74	1,78	3,98	41,25	48,24	1,00	1 485	38,18	1,54	4,04	35,16	41,20	1,42	2 191
Kalimantan Tengah	9,20	1,40	15,26	6,45	11,96	0,45	497	11,96	1,52	12,74	8,98	14,95	0,68	1 049	11,08	1,13	10,19	8,86	13,29	0,73	1 546
Kalimantan Selatan	9,85	1,59	16,11	6,74	12,96	1,33	688	22,09	1,62	7,33	18,92	25,27	0,84	1 151	17,24	1,19	6,88	14,92	19,57	1,11	1 839
Kalimantan Timur	9,41	1,46	15,50	6,55	12,26	1,33	771	27,25	2,63	9,65	22,10	32,41	0,99	732	16,67	1,42	8,54	13,88	19,46	1,26	1 503
Sulawesi Utara	1,73	0,49	28,05	0,78	2,68	0,64	1 057	4,26	0,74	17,33	2,82	5,71	0,64	1 664	3,18	0,47	14,80	2,26	4,11	0,74	2 721
Sulawesi Tengah	4,27	1,26	29,54	1,80	6,75	0,84	335	19,68	1,54	7,83	16,66	22,70	0,88	1 356	16,27	1,29	7,92	13,75	18,80	1,13	1 691
Sulawesi Selatan	21,18	1,55	7,30	18,15	24,21	1,61	1 573	44,20	1,23	2,78	41,79	46,61	1,15	3 929	36,91	1,04	2,81	34,88	38,95	1,57	5 502
Sulawesi Tenggara	20,73	2,74	13,20	15,36	26,09	0,78	401	40,83	1,84	4,50	37,23	44,43	0,60	1 303	36,13	1,58	4,37	33,03	39,22	0,75	1 704
Gorontalo	7,52	1,95	25,88	3,71	11,34	0,67	274	13,70	2,01	14,65	9,77	17,63	0,63	582	11,59	1,50	12,96	8,65	14,54	0,76	856
Sulawesi Barat	25,68	4,24	16,53	17,36	34,00	0,87	192	41,10	2,99	7,28	35,24	46,97	0,84	600	37,42	2,53	6,75	32,47	42,37	1,01	792
Maluku	3,66	1,42	38,81	0,87	6,44	1,10	470	9,80	1,24	12,69	7,36	12,24	0,44	1 130	7,52	0,95	12,58	5,66	9,37	0,64	1 600
Maluku Utara	7,06	2,21	31,27	2,73	11,38	0,55	209	15,76	1,98	12,56	11,88	19,64	0,49	714	13,52	1,60	11,81	10,39	16,65	0,60	923
Papua Barat	5,48	2,26	41,25	1,05	9,90	0,41	271	20,33	3,14	15,45	14,18	26,49	0,44	424	15,79	2,27	14,37	11,34	20,24	0,50	695
Papua	14,66	7,86	53,62	0,00	30,06	7,52	276	41,23	3,61	8,76	34,16	48,31	0,99	732	30,83	3,44	11,16	24,09	37,58	2,06	1 008
Indonesia	**19,14**	**0,35**	**1,83**	**18,45**	**19,83**	**3,51**	**39 329**	**34,15**	**0,35**	**1,03**	**33,45**	**34,84**	**2,85**	**56 135**	**27,21**	**0,25**	**0,93**	**26,71**	**27,71**	**3,11**	**95 464**

http://www.bps.go.id

Tabel 9.3 *Sampling Error* Rata-rata Lama Sekolah Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	6,46	0,26	4,05	5,95	6,98	1,33	824	3,95	0,12	2,92	3,72	4,17	0,93	2 327	4,59	0,11	2,45	4,37	4,81	1,17	3 151
Sumatera Utara	7,03	0,16	2,34	6,71	7,35	3,35	2 562	4,69	0,11	2,30	4,48	4,91	1,53	3 081	5,82	0,11	1,82	5,61	6,02	2,85	5 643
Sumatera Barat	6,80	0,25	3,74	6,30	7,30	2,37	1 490	4,58	0,12	2,63	4,34	4,82	1,19	2 396	5,36	0,12	2,21	5,13	5,59	1,69	3 886
Riau	6,64	0,32	4,86	6,00	7,27	2,66	537	3,52	0,14	3,96	3,25	3,79	1,26	1 046	4,69	0,16	3,38	4,38	5,00	2,03	1 583
Jambi	5,97	0,31	5,16	5,36	6,57	1,50	458	3,48	0,12	3,56	3,24	3,72	0,72	1 222	4,24	0,13	3,11	3,98	4,49	1,09	1 680
Sumatera Selatan	6,20	0,25	4,01	5,71	6,68	2,86	924	3,80	0,10	2,60	3,61	4,00	1,31	1 852	4,64	0,12	2,50	4,42	4,87	2,29	2 776
Bengkulu	6,52	0,39	5,98	5,75	7,28	0,98	395	3,31	0,17	5,02	2,99	3,64	0,77	1 021	4,17	0,17	3,99	3,84	4,50	0,89	1 416
Lampung	5,38	0,30	5,49	4,80	5,96	3,28	774	3,15	0,09	2,94	2,97	3,33	1,61	2 328	3,68	0,10	2,85	3,47	3,89	2,50	3 102
Kep. Bangka Belitung	5,17	0,25	4,76	4,69	5,65	0,73	549	3,39	0,24	7,16	2,92	3,87	0,83	395	4,30	0,17	4,05	3,96	4,64	0,79	944
Kepulauan Riau	5,99	0,50	8,30	5,02	6,97	2,67	585	2,75	0,37	13,53	2,02	3,47	1,11	247	5,09	0,40	7,90	4,30	5,87	2,50	832
DKI Jakarta	8,35	0,22	2,68	7,91	8,78	6,46	1 435								8,35	0,22	2,68	7,91	8,78	6,17	1 435
Jawa Barat	5,25	0,11	2,13	5,04	5,47	7,15	4 422	3,38	0,08	2,51	3,22	3,55	4,13	3 056	4,51	0,08	1,68	4,36	4,66	6,13	7 478
Jawa Tengah	4,42	0,10	2,25	4,23	4,62	4,17	5 635	2,69	0,06	2,16	2,57	2,80	2,75	5 945	3,44	0,06	1,60	3,33	3,55	3,65	11 580
DI Yogyakarta	5,71	0,28	4,88	5,16	6,25	4,08	1 062	3,12	0,24	7,59	2,66	3,59	3,05	798	4,60	0,20	4,36	4,20	4,99	4,03	1 860
Jawa Timur	4,79	0,11	2,22	4,58	5,00	5,41	6 258	2,36	0,06	2,40	2,25	2,47	3,23	6 681	3,42	0,06	1,71	3,31	3,54	4,61	12 939
Banten	4,93	0,30	6,02	4,35	5,51	6,42	963	2,48	0,17	7,02	2,14	2,82	2,72	689	3,99	0,20	4,95	3,60	4,37	5,34	1 652
Bali	4,30	0,20	4,69	3,91	4,70	2,13	1 397	2,46	0,16	6,38	2,15	2,77	1,79	1 201	3,42	0,13	3,91	3,15	3,68	2,12	2 598
Nusa Tenggara Barat	3,03	0,24	7,98	2,56	3,51	2,36	785	1,92	0,14	7,53	1,63	2,20	1,96	1 136	2,37	0,13	5,46	2,12	2,63	2,23	1 921
Nusa Tenggara Timur	6,31	0,32	5,06	5,68	6,93	1,35	554	2,82	0,08	2,75	2,67	2,97	0,74	3 863	3,42	0,09	2,63	3,24	3,59	1,04	4 417
Kalimantan Barat	4,74	0,30	6,37	4,15	5,33	2,10	706	1,94	0,09	4,72	1,76	2,12	0,92	1 485	2,84	0,13	4,56	2,59	3,09	1,81	2 191
Kalimantan Tengah	6,29	0,29	4,67	5,71	6,86	0,88	497	4,12	0,16	3,86	3,81	4,43	0,88	1 049	4,82	0,14	3,00	4,53	5,10	0,90	1 546
Kalimantan Selatan	5,87	0,26	4,49	5,35	6,38	1,68	688	3,16	0,13	3,99	2,91	3,41	0,89	1 151	4,23	0,14	3,24	3,96	4,50	1,38	1 839
Kalimantan Timur	6,13	0,26	4,23	5,62	6,64	2,05	771	3,48	0,21	5,90	3,08	3,88	0,97	732	5,05	0,18	3,63	4,69	5,41	1,69	1 503
Sulawesi Utara	7,78	0,26	3,31	7,28	8,29	1,76	1 057	5,80	0,15	2,64	5,50	6,10	0,90	1 664	6,64	0,15	2,19	6,36	6,93	1,41	2 721
Sulawesi Tengah	7,44	0,31	4,14	6,84	8,05	1,17	335	4,09	0,13	3,25	3,83	4,35	0,92	1 356	4,83	0,14	3,00	4,54	5,11	1,34	1 691
Sulawesi Selatan	6,54	0,27	4,08	6,02	7,06	2,99	1 573	2,70	0,09	3,43	2,52	2,88	1,30	3 929	3,91	0,13	3,23	3,67	4,16	2,70	5 502
Sulawesi Tenggara	5,83	0,31	5,37	5,21	6,44	0,70	401	2,78	0,13	4,56	2,53	3,03	0,64	1 303	3,49	0,13	3,79	3,23	3,75	0,78	1 704
Gorontalo	6,86	0,38	5,51	6,12	7,60	0,99	274	3,96	0,17	4,25	3,63	4,28	0,57	582	4,94	0,19	3,94	4,56	5,33	0,94	856
Sulawesi Barat	5,17	0,46	8,87	4,27	6,07	0,79	192	3,01	0,21	7,03	2,59	3,42	0,78	600	3,52	0,20	5,68	3,13	3,92	0,89	792
Maluku	7,42	0,34	4,63	6,75	8,10	1,33	470	5,05	0,19	3,67	4,69	5,41	0,77	1 130	5,93	0,19	3,15	5,57	6,30	1,17	1 600
Maluku Utara	7,35	0,37	5,00	6,63	8,07	0,58	209	4,39	0,19	4,43	4,01	4,77	0,47	714	5,15	0,19	3,65	4,78	5,52	0,61	923
Papua Barat	8,22	0,46	5,60	7,32	9,13	0,51	271	4,83	0,26	5,48	4,32	5,35	0,40	424	5,87	0,25	4,24	5,38	6,36	0,48	695
Papua	7,24	0,70	9,69	5,87	8,62	3,84	276	3,61	0,33	9,25	2,96	4,27	1,20	732	5,03	0,30	5,96	4,45	5,62	1,58	1 008
Indonesia	**5,44**	**0,05**	**0,87**	**5,35**	**5,53**	**4,73**	**39 329**	**3,04**	**0,02**	**0,80**	**2,99**	**3,08**	**2,80**	**56 135**	**4,15**	**0,03**	**0,64**	**4,09**	**4,20**	**3,94**	**95 464**

http://www.bps.go.id

Tabel 9.4 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	56,60	2,64	4,66	51,43	61,78	1,05	824	66,63	1,61	2,42	63,47	69,80	0,97	2 327	64,05	1,39	2,17	61,33	66,77	1,15	3 151
Sumatera Utara	42,85	1,92	4,48	39,08	46,61	3,11	2 562	48,45	1,44	2,98	45,62	51,28	1,45	3 081	45,76	1,19	2,61	43,42	48,10	2,36	5 643
Sumatera Barat	53,84	2,39	4,45	49,15	58,53	1,74	1 490	56,02	1,58	2,81	52,94	59,11	1,08	2 396	55,25	1,32	2,39	52,66	57,85	1,44	3 886
Riau	46,77	3,11	6,65	40,67	52,87	1,96	537	53,37	2,18	4,09	49,09	57,64	1,24	1 046	50,89	1,81	3,56	47,34	54,44	1,68	1 583
Jambi	35,13	3,15	8,95	28,97	41,30	1,30	458	45,46	2,02	4,44	41,50	49,42	0,87	1 222	42,32	1,72	4,07	38,95	45,70	1,14	1 680
Sumatera Selatan	60,05	2,45	4,07	55,26	64,85	2,26	924	46,70	1,61	3,45	43,54	49,86	1,36	1 852	51,39	1,39	2,71	48,66	54,12	1,92	2 776
Bengkulu	54,46	3,82	7,01	46,97	61,94	0,87	395	52,05	2,21	4,24	47,72	56,38	0,62	1 021	52,69	1,91	3,63	48,94	56,45	0,78	1 416
Lampung	42,54	2,96	6,95	36,74	48,34	2,53	774	52,21	1,56	3,00	49,14	55,27	1,72	2 328	49,91	1,40	2,80	47,17	52,64	2,22	3 102
Kep. Bangka Belitung	52,86	2,59	4,89	47,79	57,94	0,57	549	51,64	3,64	7,06	44,50	58,78	0,84	395	52,26	2,22	4,25	47,91	56,62	0,79	944
Kepulauan Riau	36,50	3,96	10,84	28,75	44,26	1,71	585	46,65	5,29	11,35	36,27	57,02	0,85	247	39,34	3,26	8,30	32,94	45,73	1,50	832
DKI Jakarta	54,13	1,94	3,58	50,33	57,93	4,46	1 435	-	-	-	-	-	-	-	54,13	1,94	3,58	50,33	57,93	4,26	1 435
Jawa Barat	52,76	1,15	2,19	50,49	55,02	5,53	4 422	57,24	1,27	2,22	54,75	59,73	3,50	3 056	54,54	0,86	1,58	52,86	56,23	4,89	7 478
Jawa Tengah	50,65	0,94	1,85	48,82	52,49	2,81	5 635	48,10	0,96	1,99	46,23	49,97	2,95	5 945	49,21	0,68	1,37	47,89	50,54	3,21	11 580
DI Yogyakarta	56,16	2,37	4,22	51,51	60,81	3,09	1 062	49,40	2,95	5,97	43,62	55,18	2,76	798	53,25	1,86	3,50	49,60	56,91	3,17	1 860
Jawa Timur	47,61	1,00	2,10	45,65	49,57	3,68	6 258	46,23	0,86	1,86	44,54	47,92	2,72	6 681	46,83	0,65	1,39	45,55	48,11	3,43	12 939
Banten	54,01	2,24	4,14	49,63	58,39	3,50	963	63,98	2,44	3,82	59,20	68,77	2,18	689	57,85	1,65	2,86	54,61	61,10	3,03	1 652
Bali	51,24	2,23	4,36	46,86	55,62	2,12	1 397	61,82	2,13	3,45	57,64	66,00	1,46	1 201	56,32	1,55	2,75	53,28	59,36	1,90	2 598
Nusa Tenggara Barat	66,11	2,57	3,89	61,07	71,15	2,09	785	60,86	2,54	4,17	55,88	65,84	2,16	1 136	63,00	1,84	2,92	59,39	66,61	2,42	1 921
Nusa Tenggara Timur	57,66	2,89	5,02	51,99	63,33	1,08	554	58,41	1,26	2,16	55,93	60,88	0,77	3 863	58,28	1,16	1,99	56,01	60,55	0,97	4 417
Kalimantan Barat	51,74	2,72	5,26	46,40	57,07	1,41	706	54,84	1,94	3,54	51,03	58,64	1,18	1 485	53,84	1,58	2,94	50,74	56,95	1,43	2 191
Kalimantan Tengah	38,24	3,02	7,89	32,33	44,16	0,73	497	54,04	2,66	4,91	48,84	59,25	0,88	1 049	48,97	2,05	4,18	44,96	52,98	0,94	1 546
Kalimantan Selatan	54,49	3,12	5,72	48,38	60,59	1,83	688	61,15	1,92	3,14	57,39	64,91	0,86	1 151	58,51	1,70	2,90	55,19	61,84	1,34	1 839
Kalimantan Timur	37,58	2,66	7,09	32,36	42,80	1,62	771	50,81	3,36	6,61	44,23	57,39	1,28	732	42,96	2,11	4,92	38,82	47,10	1,57	1 503
Sulawesi Utara	36,34	2,34	6,44	31,75	40,92	1,09	1 057	47,74	2,01	4,22	43,80	51,69	0,78	1 664	42,88	1,55	3,61	39,84	45,91	1,01	2 721
Sulawesi Tengah	60,91	3,57	5,87	53,90	67,92	1,15	335	52,24	1,70	3,26	48,90	55,58	0,68	1 356	54,16	1,58	2,91	51,07	57,25	0,93	1 691
Sulawesi Selatan	44,47	2,13	4,79	40,29	48,65	2,07	1 573	47,98	1,21	2,53	45,60	50,36	1,11	3 929	46,87	1,07	2,29	44,77	48,97	1,57	5 502
Sulawesi Tenggara	58,61	4,25	7,25	50,28	66,95	1,27	401	55,97	2,04	3,64	51,97	59,96	0,73	1 303	56,59	1,86	3,28	52,94	60,23	0,98	1 704
Gorontalo	56,22	4,34	7,72	47,70	64,73	0,94	274	61,96	2,74	4,43	56,58	67,34	0,59	582	60,00	2,36	3,94	55,37	64,64	0,80	856
Sulawesi Barat	62,76	4,73	7,53	53,49	72,03	0,88	192	51,72	3,21	6,21	45,43	58,02	0,94	600	54,36	2,71	4,98	49,05	59,66	1,09	792
Maluku	36,03	4,26	11,82	27,69	44,38	1,52	470	48,71	2,86	5,87	43,11	54,31	0,83	1 130	43,99	2,45	5,57	39,19	48,80	1,21	1 600
Maluku Utara	37,95	4,35	11,46	29,43	46,48	0,60	209	41,21	2,31	5,60	36,68	45,73	0,37	714	40,37	2,05	5,07	36,36	44,38	0,48	923
Papua Barat	44,69	4,08	9,14	36,68	52,70	0,28	271	37,07	4,09	11,03	29,05	45,08	0,52	424	39,40	3,16	8,02	33,20	45,60	0,54	695
Papua	52,08	4,96	9,52	42,37	61,80	1,50	276	37,38	2,61	6,99	32,26	42,50	0,53	732	43,13	2,65	6,15	37,94	48,33	1,06	1 008
Indonesia	**50,53**	**0,44**	**0,86**	**49,67**	**51,38**	**3,37**	**39 329**	**51,27**	**0,36**	**0,71**	**50,56**	**51,99**	**2,73**	**56 135**	**50,93**	**0,28**	**0,55**	**50,38**	**51,48**	**3,02**	**95 464**

http://www.bps.go.id

Tabel 9.5 *Sampling Error* Angka Kesakitan Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	29,91	2,56	8,55	24,90	34,93	1,16	824	38,19	1,63	4,27	35,00	41,39	0,93	2 327	36,06	1,38	3,83	33,35	38,77	1,14	3 151
Sumatera Utara	19,79	1,37	6,92	17,10	22,47	2,44	2 562	30,58	1,34	4,40	27,95	33,22	1,47	3 081	25,40	0,98	3,86	23,47	27,32	2,09	5 643
Sumatera Barat	26,81	2,21	8,25	22,47	31,14	1,88	1 490	28,27	1,31	4,65	25,69	30,84	0,91	2 396	27,75	1,15	4,16	25,49	30,01	1,35	3 886
Riau	20,85	2,46	11,78	16,03	25,66	1,85	537	25,18	1,93	7,67	21,40	28,97	1,29	1 046	23,55	1,53	6,50	20,55	26,55	1,67	1 583
Jambi	18,58	2,38	12,79	13,92	23,23	1,12	458	25,91	1,65	6,35	22,68	29,14	0,75	1 222	23,68	1,36	5,76	21,01	26,35	0,97	1 680
Sumatera Selatan	21,96	2,20	10,01	17,65	26,27	2,56	924	22,64	1,32	5,82	20,05	25,22	1,29	1 852	22,40	1,15	5,14	20,14	24,66	1,88	2 776
Bengkulu	29,79	3,46	11,62	23,01	36,57	0,85	395	29,46	1,76	5,98	26,01	32,91	0,47	1 021	29,55	1,59	5,38	26,44	32,66	0,64	1 416
Lampung	17,99	2,01	11,20	14,04	21,94	1,94	774	24,21	1,26	5,19	21,75	26,67	1,51	2 328	22,73	1,08	4,74	20,62	24,84	1,88	3 102
Kep. Bangka Belitung	21,38	2,34	10,92	16,80	25,96	0,69	549	19,55	2,75	14,06	14,16	24,93	0,76	395	20,48	1,80	8,77	16,96	24,00	0,79	944
Kepulauan Riau	18,47	2,87	15,55	12,84	24,10	1,39	585	25,92	4,15	16,00	17,79	34,05	0,68	247	20,55	2,39	11,62	15,87	25,23	1,17	832
DKI Jakarta	21,92	1,59	7,26	18,80	25,04	4,36	1 435	-	-	-	-	-	-	-	21,92	1,59	7,26	18,80	25,04	4,16	1 435
Jawa Barat	25,13	0,96	3,81	23,25	27,01	5,04	4 422	27,14	1,07	3,95	25,04	29,24	3,08	3 056	25,93	0,72	2,77	24,52	27,34	4,39	7 478
Jawa Tengah	22,42	0,74	3,29	20,98	23,87	2,51	5 635	22,71	0,76	3,34	21,22	24,20	2,65	5 945	22,59	0,54	2,37	21,54	23,64	2,89	11 580
DI Yogyakarta	18,32	1,61	8,77	15,17	21,47	2,34	1 062	23,60	2,81	11,90	18,09	29,10	3,47	798	20,59	1,54	7,48	17,57	23,61	3,29	1 860
Jawa Timur	22,21	0,78	3,51	20,68	23,74	3,24	6 258	23,56	0,70	2,95	22,20	24,93	2,45	6 681	22,97	0,52	2,26	21,95	23,99	3,05	12 939
Banten	23,97	1,93	8,06	20,18	27,76	3,56	963	28,73	2,29	7,98	24,24	33,22	2,16	689	25,80	1,47	5,69	22,93	28,68	3,04	1 652
Bali	27,19	1,85	6,79	23,57	30,81	1,83	1 397	37,20	2,60	7,00	32,10	42,30	2,20	1 201	32,00	1,54	4,83	28,97	35,02	2,14	2 598
Nusa Tenggara Barat	38,47	2,96	7,69	32,67	44,27	2,62	785	32,62	2,47	7,57	27,78	37,47	2,21	1 136	35,01	1,92	5,49	31,24	38,77	2,69	1 921
Nusa Tenggara Timur	29,27	3,07	10,50	23,24	35,30	1,43	554	32,35	1,12	3,47	30,14	34,55	0,68	3 863	31,82	1,07	3,36	29,73	33,92	0,92	4 417
Kalimantan Barat	24,55	2,24	9,11	20,17	28,94	1,28	706	29,91	1,79	5,98	26,41	33,42	1,19	1 485	28,20	1,42	5,03	25,42	30,98	1,40	2 191
Kalimantan Tengah	18,38	2,28	12,39	13,91	22,84	0,65	497	33,45	2,43	7,25	28,69	38,20	0,82	1 049	28,60	1,82	6,36	25,04	32,17	0,91	1 546
Kalimantan Selatan	19,04	2,09	10,98	14,94	23,14	1,33	688	27,74	1,81	6,51	24,20	31,28	0,90	1 151	24,29	1,39	5,71	21,57	27,01	1,18	1 839
Kalimantan Timur	17,59	1,92	10,89	13,84	21,35	1,35	771	27,49	2,71	9,87	22,17	32,81	1,05	732	21,62	1,60	7,40	18,49	24,76	1,30	1 503
Sulawesi Utara	18,27	2,01	11,02	14,32	22,21	1,25	1 057	30,00	1,83	6,11	26,41	33,60	0,77	1 664	25,00	1,36	5,44	22,33	27,67	1,02	2 721
Sulawesi Tengah	34,08	3,28	9,62	27,65	40,51	1,03	335	32,61	1,59	4,89	29,49	35,74	0,68	1 356	32,94	1,44	4,38	30,11	35,76	0,87	1 691
Sulawesi Selatan	19,52	1,44	7,40	16,69	22,35	1,50	1 573	24,79	0,99	4,01	22,84	26,74	1,00	3 929	23,13	0,82	3,56	21,51	24,74	1,29	5 502
Sulawesi Tenggara	32,64	3,14	9,61	26,50	38,79	0,76	401	40,20	1,89	4,71	36,49	43,91	0,64	1 303	38,43	1,62	4,21	35,26	41,60	0,77	1 704
Gorontalo	25,14	3,26	12,97	18,75	31,53	0,69	274	31,71	2,60	8,19	26,62	36,80	0,57	582	29,47	2,05	6,97	25,45	33,50	0,70	856
Sulawesi Barat	34,30	4,69	13,68	25,10	43,49	0,90	192	29,20	2,98	10,20	23,36	35,04	0,98	600	30,42	2,53	8,32	25,46	35,37	1,12	792
Maluku	18,16	2,81	15,46	12,66	23,67	1,02	470	28,88	2,30	7,95	24,38	33,39	0,65	1 130	24,90	1,81	7,26	21,35	28,44	0,87	1 600
Maluku Utara	19,84	3,72	18,73	12,56	27,13	0,65	209	29,79	2,06	6,91	25,75	33,82	0,34	714	27,22	1,81	6,65	23,68	30,77	0,46	923
Papua Barat	28,37	3,32	11,70	21,86	34,87	0,22	271	21,54	3,17	14,73	15,32	27,75	0,43	424	23,63	2,48	10,51	18,76	28,49	0,44	695
Papua	29,84	4,66	15,63	20,70	38,98	1,58	276	21,87	2,19	10,03	17,57	26,16	0,52	732	24,99	2,36	9,45	20,36	29,62	1,11	1 008
Indonesia	**23,12**	**0,35**	**1,52**	**22,43**	**23,81**	**3,08**	**39 329**	**26,24**	**0,30**	**1,16**	**25,64**	**26,83**	**2,44**	**56 135**	**24,80**	**0,23**	**0,93**	**24,34**	**25,25**	**2,72**	**95 464**

http://www.bps.go.id

Tabel 9.6 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Menjadi Korban Kejahatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	0,70	0,33	47,54	0,05	1,35	0,59	824	0,80	0,30	37,50	0,21	1,38	0,94	2 327	0,77	0,24	30,83	0,31	1,24	1,02	3 151
Sumatera Utara	1,30	0,43	32,84	0,46	2,14	2,93	2 562	0,79	0,33	41,58	0,15	1,43	2,38	3 081	1,03	0,27	25,82	0,51	1,56	2,86	5 643
Sumatera Barat	2,06	0,64	31,25	0,80	3,33	1,55	1 490	0,91	0,23	25,35	0,46	1,36	0,63	2 396	1,32	0,27	20,69	0,78	1,85	1,16	3 886
Riau	1,02	0,51	50,25	0,02	2,02	1,31	537	1,33	0,41	31,12	0,52	2,14	0,85	1 046	1,21	0,32	26,53	0,58	1,84	1,11	1 583
Jambi	0,39	0,32	83,18	0,00	1,01	0,80	458	0,56	0,23	41,91	0,10	1,02	0,52	1 222	0,51	0,19	37,54	0,13	0,88	0,67	1 680
Sumatera Selatan	1,89	0,80	42,53	0,31	3,46	3,16	924	1,33	0,29	21,80	0,76	1,90	0,83	1 852	1,53	0,34	22,26	0,86	2,19	1,90	2 776
Bengkulu	3,91	1,69	43,17	0,60	7,22	1,13	395	1,58	0,45	28,19	0,71	2,45	0,40	1 021	2,20	0,57	25,66	1,10	3,31	0,79	1 416
Lampung	1,55	0,58	37,38	0,41	2,68	1,55	774	0,79	0,23	29,48	0,33	1,24	1,21	2 328	0,97	0,22	23,18	0,53	1,41	1,49	3 102
Kep. Bangka Belitung	1,26	0,62	49,08	0,05	2,47	0,65	549	0,26	0,18	71,03	0,00	0,61	0,20	395	0,77	0,33	43,00	0,12	1,41	0,57	944
Kepulauan Riau	1,18	0,96	81,21	0,00	3,06	1,99	585	0,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,85	0,70	81,85	0,00	2,22	1,93	832
DKI Jakarta	1,42	0,45	31,35	0,55	2,29	4,17	1 435	-	-	-	-	-	-	-	1,42	0,45	31,35	0,55	2,29	3,98	1 435
Jawa Barat	1,45	0,23	16,17	0,99	1,91	3,97	4 422	1,10	0,22	19,86	0,67	1,53	2,33	3 056	1,31	0,17	12,64	0,99	1,63	3,47	7 478
Jawa Tengah	1,27	0,17	13,44	0,93	1,60	1,86	5 635	0,82	0,14	17,44	0,54	1,10	2,03	5 945	1,01	0,11	10,81	0,80	1,23	2,11	11 580
DI Yogyakarta	0,72	0,27	36,91	0,20	1,24	1,34	1 062	0,83	0,33	39,88	0,18	1,48	1,05	798	0,77	0,21	27,07	0,36	1,18	1,29	1 860
Jawa Timur	1,03	0,15	14,26	0,74	1,32	1,95	6 258	0,72	0,12	16,91	0,48	0,96	1,88	6 681	0,86	0,09	10,97	0,67	1,04	2,08	12 939
Banten	1,77	0,62	34,94	0,56	2,98	3,82	963	0,76	0,31	41,08	0,15	1,37	1,09	689	1,38	0,40	29,01	0,60	2,17	3,18	1 652
Bali	1,18	0,42	36,08	0,34	2,01	1,65	1 397	1,14	0,35	30,68	0,46	1,83	0,83	1 201	1,16	0,28	23,92	0,62	1,71	1,31	2 598
Nusa Tenggara Barat	2,10	0,60	28,40	0,93	3,26	1,22	785	1,84	0,61	33,25	0,64	3,03	1,65	1 136	1,94	0,44	22,42	1,09	2,80	1,65	1 921
Nusa Tenggara Timur	2,65	0,84	31,59	1,01	4,28	0,85	554	2,53	0,35	13,78	1,85	3,21	0,58	3 863	2,55	0,32	12,64	1,92	3,18	0,73	4 417
Kalimantan Barat	1,94	0,71	36,80	0,54	3,34	1,27	706	0,26	0,14	55,63	0,00	0,54	0,62	1 485	0,80	0,25	31,46	0,31	1,29	1,12	2 191
Kalimantan Tengah	2,12	0,99	46,77	0,18	4,06	0,89	497	0,62	0,26	42,03	0,11	1,13	0,34	1 049	1,10	0,37	33,28	0,38	1,82	0,69	1 546
Kalimantan Selatan	1,43	0,69	47,95	0,09	2,77	1,56	688	1,06	0,41	38,84	0,25	1,87	0,89	1 151	1,21	0,37	30,52	0,49	1,93	1,28	1 839
Kalimantan Timur	0,13	0,11	80,65	0,00	0,35	0,47	771	0,37	0,23	61,63	0,00	0,81	0,40	732	0,23	0,11	48,94	0,01	0,45	0,47	1 503
Sulawesi Utara	1,49	0,51	33,99	0,50	2,48	0,80	1 057	0,45	0,17	36,59	0,13	0,78	0,29	1 664	0,89	0,23	26,29	0,43	1,35	0,64	2 721
Sulawesi Tengah	3,02	1,14	37,56	0,80	5,25	0,94	335	2,25	0,54	24,05	1,19	3,31	0,78	1 356	2,42	0,49	20,22	1,46	3,38	0,94	1 691
Sulawesi Selatan	1,05	0,29	27,27	0,49	1,60	0,88	1 573	0,87	0,18	21,22	0,51	1,23	0,74	3 929	0,92	0,15	16,76	0,62	1,23	0,89	5 502
Sulawesi Tenggara	1,55	0,67	43,24	0,24	2,87	0,50	401	0,79	0,33	41,66	0,15	1,44	0,60	1 303	0,97	0,30	30,54	0,39	1,55	0,64	1 704
Gorontalo	2,96	1,14	38,37	0,73	5,19	0,55	274	3,41	1,17	34,49	1,10	5,71	0,77	582	3,25	0,87	26,62	1,56	4,95	0,82	856
Sulawesi Barat	1,60	0,95	59,50	-0,27	3,47	0,53	192	1,40	0,61	43,29	0,21	2,59	0,61	600	1,45	0,52	35,54	0,44	2,46	0,69	792
Maluku	2,75	1,34	48,89	0,11	5,38	1,30	470	1,42	0,92	64,77	0,00	3,21	1,52	1 130	1,91	0,76	39,93	0,42	3,41	1,54	1 600
Maluku Utara	0,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,64	0,37	57,95	0,00	1,38	0,36	714	0,48	0,28	58,13	0,00	1,02	0,45	923
Papua Barat	3,59	1,76	48,89	0,15	7,04	0,37	271	1,27	1,03	81,51	0,00	3,30	0,62	424	1,98	0,90	45,52	0,21	3,75	0,54	695
Papua	4,17	1,46	34,97	1,31	7,02	0,81	276	0,64	0,32	49,70	0,02	1,26	0,29	732	2,02	0,58	28,82	0,88	3,16	0,64	1 008
Indonesia	**1,35**	**0,09**	**6,36**	**1,18**	**1,51**	**2,43**	**39 329**	**0,95**	**0,06**	**6,10**	**0,84**	**1,07**	**1,83**	**56 135**	**1,13**	**0,05**	**4,44**	**1,03**	**1,23**	**2,16**	**95 464**

http://www.bps.go.id

Tabel 9.7 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	0,88	0,35	40,35	0,18	1,57	0,54	824	9,68	1,00	10,29	7,73	11,63	0,94	2 327	7,41	0,76	10,23	5,93	8,90	1,15	3 151
Sumatera Utara	1,08	0,31	28,34	0,48	1,68	1,81	2 562	5,53	0,61	10,94	4,35	6,72	1,21	3 081	3,39	0,35	10,31	2,71	4,08	1,53	5 643
Sumatera Barat	1,34	0,50	37,39	0,36	2,32	1,43	1 490	3,14	0,50	15,85	2,16	4,12	0,87	2 396	2,51	0,37	14,69	1,78	3,23	1,13	3 886
Riau	0,58	0,38	64,90	0,00	1,33	1,25	537	2,51	0,65	25,83	1,24	3,78	1,11	1 046	1,79	0,43	24,11	0,94	2,63	1,36	1 583
Jambi	0,39	0,40	100,30	0,00	1,17	1,19	458	1,95	0,49	25,06	0,99	2,90	0,66	1 222	1,47	0,36	24,52	0,77	2,18	0,85	1 680
Sumatera Selatan	0,76	0,44	57,39	0,00	1,62	2,30	924	4,91	0,64	13,13	3,64	6,17	1,15	1 852	3,45	0,45	13,01	2,57	4,33	1,49	2 776
Bengkulu	1,78	1,00	56,06	0,00	3,73	0,85	395	4,64	0,81	17,38	3,06	6,22	0,46	1 021	3,88	0,65	16,70	2,61	5,14	0,60	1 416
Lampung	2,79	1,04	37,41	0,74	4,83	2,84	774	4,08	0,58	14,28	2,94	5,23	1,52	2 328	3,77	0,51	13,46	2,78	4,77	2,02	3 102
Kep. Bangka Belitung	0,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,02	0,75	37,15	0,55	3,49	0,45	395	0,99	0,36	36,59	0,28	1,70	0,53	944
Kepulauan Riau	0,14	0,14	100,95	0,00	0,41	0,36	585	2,40	1,32	54,98	0,00	4,98	0,56	247	0,77	0,38	49,93	0,02	1,52	0,65	832
DKI Jakarta	1,18	0,42	35,90	0,35	2,01	4,54	1 435	-	-	-	-	-	-	-	1,18	0,42	35,90	0,35	2,01	4,34	1 435
Jawa Barat	4,40	0,53	11,97	3,37	5,43	6,80	4 422	8,56	0,71	8,35	7,16	9,96	3,45	3 056	6,05	0,43	7,03	5,22	6,89	5,21	7 478
Jawa Tengah	3,15	0,35	11,09	2,47	3,84	3,21	5 635	6,91	0,46	6,60	6,02	7,80	2,60	5 945	5,28	0,30	5,68	4,69	5,86	3,17	11 580
DI Yogyakarta	2,17	0,50	23,05	1,19	3,14	1,59	1 062	3,95	0,77	19,49	2,44	5,46	1,24	798	2,93	0,43	14,80	2,08	3,78	1,50	1 860
Jawa Timur	3,63	0,38	10,39	2,89	4,37	3,75	6 258	7,90	0,49	6,22	6,94	8,86	3,02	6 681	6,03	0,32	5,35	5,39	6,66	3,67	12 939
Banten	3,33	0,84	25,31	1,68	4,99	3,84	963	15,07	1,89	12,55	11,36	18,78	2,36	689	7,86	0,89	11,27	6,12	9,59	2,92	1 652
Bali	1,56	0,44	28,12	0,70	2,43	1,34	1 397	3,30	0,72	21,74	1,89	4,70	1,23	1 201	2,40	0,41	17,16	1,59	3,20	1,41	2 598
Nusa Tenggara Barat	8,12	1,55	19,16	5,07	11,16	2,29	785	12,79	1,67	13,07	9,51	16,07	2,00	1 136	10,89	1,16	10,69	8,61	13,17	2,31	1 921
Nusa Tenggara Timur	7,12	1,89	26,54	3,42	10,82	1,69	554	36,56	1,35	3,69	33,91	39,20	0,93	3 863	31,53	1,19	3,78	29,19	33,86	1,15	4 417
Kalimantan Barat	0,35	0,22	62,79	0,00	0,78	0,66	706	5,18	0,82	15,83	3,57	6,79	1,07	1 485	3,63	0,56	15,48	2,53	4,74	1,28	2 191
Kalimantan Tengah	0,70	0,37	52,66	0,00	1,41	0,37	497	5,35	1,27	23,75	2,86	7,85	0,98	1 049	3,86	0,87	22,65	2,14	5,57	1,15	1 546
Kalimantan Selatan	1,00	0,53	52,82	0,00	2,03	1,32	688	5,52	1,04	18,87	3,48	7,57	1,15	1 151	3,73	0,67	17,89	2,42	5,04	1,40	1 839
Kalimantan Timur	0,06	0,06	100,37	0,00	0,18	0,33	771	1,17	0,48	40,96	0,23	2,11	0,56	732	0,51	0,20	39,18	0,12	0,91	0,68	1 503
Sulawesi Utara	1,09	0,42	38,75	0,26	1,92	0,76	1 057	4,77	0,81	16,98	3,18	6,36	0,69	1 664	3,20	0,50	15,77	2,21	4,19	0,85	2 721
Sulawesi Tengah	2,32	1,38	59,34	0,00	5,02	1,80	335	9,20	1,07	11,62	7,11	11,30	0,80	1 356	7,68	0,90	11,67	5,92	9,44	1,05	1 691
Sulawesi Selatan	1,84	0,44	24,09	0,97	2,70	1,22	1 573	6,52	0,66	10,06	5,23	7,81	1,33	3 929	5,04	0,47	9,43	4,11	5,97	1,60	5 502
Sulawesi Tenggara	5,52	1,68	30,44	2,23	8,81	0,92	401	6,66	1,13	16,91	4,45	8,87	0,88	1 303	6,39	0,95	14,86	4,53	8,25	1,05	1 704
Gorontalo	5,44	2,23	40,91	1,08	9,81	1,18	274	14,55	2,52	17,33	9,61	19,49	0,94	582	11,45	1,84	16,05	7,85	15,05	1,15	856
Sulawesi Barat	7,37	2,20	29,87	3,05	11,68	0,65	192	14,96	2,34	15,63	10,37	19,54	0,98	600	13,15	1,86	14,18	9,49	16,80	1,12	792
Maluku	3,37	1,36	40,41	0,70	6,03	1,10	470	18,02	1,91	10,57	14,29	21,76	0,62	1 130	12,57	1,33	10,57	9,97	15,18	0,80	1 600
Maluku Utara	1,72	1,22	71,07	0,00	4,11	0,66	209	10,86	1,61	14,85	7,70	14,02	0,45	714	8,50	1,25	14,65	6,06	10,94	0,55	923
Papua Barat	0,00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,55	1,52	23,18	3,57	9,53	0,27	424	4,55	1,02	22,35	2,56	6,54	0,31	695
Papua	0,60	0,59	99,51	0,00	1,76	0,90	276	27,15	3,37	12,40	20,55	33,75	1,05	732	16,76	2,19	13,05	12,47	21,04	1,27	1 008
Indonesia	**3,03**	**0,17**	**5,45**	**2,70**	**3,35**	**4,10**	**39 329**	**8,01**	**0,19**	**2,41**	**7,63**	**8,39**	**2,61**	**56 135**	**5,71**	**0,13**	**2,26**	**5,45**	**5,96**	**2,96**	**95 464**

http://www.bps.go.id

Tabel 9.8 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Membeli Beras Miskin (Raskin) menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	50,25	3,08	6,13	44,21	56,29	1,16	695	82,87	1,36	1,64	80,21	85,52	0,94	1 941	74,45	1,35	1,81	71,80	77,09	1,10	2 636
Sumatera Utara	28,74	1,92	6,68	24,98	32,51	2,88	2 011	56,50	1,68	2,98	53,21	59,80	1,68	2 450	43,22	1,39	3,21	40,51	45,94	2,55	4 461
Sumatera Barat	23,65	2,33	9,84	19,09	28,21	1,75	1 159	40,43	1,68	4,15	37,15	43,72	1,05	1 894	34,52	1,37	3,98	31,83	37,22	1,35	3 053
Riau	24,31	2,95	12,15	18,52	30,09	1,90	439	49,71	2,76	5,55	44,30	55,12	1,73	841	40,27	2,17	5,38	36,02	44,52	2,05	1 280
Jambi	33,21	3,39	10,20	26,57	39,86	1,22	368	50,20	2,28	4,55	45,73	54,68	0,94	983	45,05	1,92	4,27	41,28	48,82	1,13	1 351
Sumatera Selatan	42,85	3,22	7,51	36,55	49,16	2,99	724	47,19	1,96	4,16	43,34	51,03	1,65	1 449	45,64	1,70	3,74	42,30	48,98	2,26	2 173
Bengkulu	35,55	3,84	10,81	28,02	43,09	0,75	315	50,48	2,76	5,47	45,07	55,89	0,79	789	46,40	2,29	4,93	41,92	50,88	0,87	1 104
Lampung	52,22	3,48	6,65	45,41	59,04	2,68	610	72,93	1,63	2,23	69,74	76,12	1,93	1 782	67,89	1,52	2,24	64,91	70,87	2,34	2 392
Kep. Bangka Belitung	20,79	2,43	11,68	16,03	25,54	0,57	410	33,16	3,84	11,58	25,64	40,69	0,86	312	26,86	2,21	8,22	22,54	31,19	0,76	722
Kepulauan Riau	20,94	3,47	16,59	14,13	27,75	1,37	444	56,57	6,87	12,14	43,12	70,03	1,19	194	31,05	3,39	10,90	24,41	37,68	1,36	638
DKI Jakarta	20,92	1,61	7,71	17,76	24,08	3,57	1 107	-	-	-	-	-	-	-	20,92	1,61	7,71	17,76	24,08	3,47	1 107
Jawa Barat	55,20	1,34	2,43	52,56	57,83	5,83	3 497	76,72	1,18	1,54	74,40	79,03	3,42	2 382	63,73	0,95	1,49	61,87	65,59	5,02	5 879
Jawa Tengah	63,43	1,17	1,85	61,13	65,73	3,60	4 410	84,68	0,79	0,94	83,12	86,23	3,19	4 554	75,43	0,69	0,91	74,08	76,78	3,46	8 964
DI Yogyakarta	50,65	2,81	5,54	45,15	56,15	3,15	801	76,85	3,90	5,08	69,19	84,50	5,07	553	61,51	2,29	3,73	57,01	66,00	3,69	1 354
Jawa Timur	57,12	1,26	2,21	54,65	59,60	4,63	4 989	81,43	0,89	1,09	79,69	83,17	3,95	5 208	70,75	0,76	1,07	69,27	72,24	4,36	10 197
Banten	47,57	2,83	5,94	42,03	53,11	4,62	808	81,39	2,67	3,28	76,17	86,62	3,39	562	60,24	2,02	3,35	56,28	64,20	3,83	1 370
Bali	21,68	2,33	10,73	17,12	26,25	2,35	963	40,83	2,91	7,12	35,13	46,53	1,93	819	30,73	1,84	5,99	27,12	34,33	2,16	1 782
Nusa Tenggara Barat	83,20	2,11	2,54	79,05	87,34	1,78	629	91,86	1,30	1,41	89,32	94,40	1,46	875	88,25	1,16	1,31	85,98	90,53	1,68	1 504
Nusa Tenggara Timur	25,78	3,49	13,55	18,94	32,63	1,54	433	62,49	1,73	2,77	59,09	65,88	1,24	2 954	56,18	1,59	2,84	53,06	59,31	1,41	3 387
Kalimantan Barat	23,81	2,76	11,60	18,39	29,22	1,51	550	57,12	2,52	4,42	52,17	62,07	1,75	1 195	46,83	2,01	4,30	42,89	50,78	1,84	1 745
Kalimantan Tengah	20,26	2,84	14,03	14,69	25,83	0,74	401	44,35	2,95	6,65	38,57	50,13	0,90	835	36,53	2,24	6,13	32,14	40,91	0,95	1 236
Kalimantan Selatan	25,43	2,63	10,34	20,27	30,59	1,38	568	40,63	2,29	5,65	36,13	45,12	1,06	973	34,65	1,76	5,09	31,19	38,10	1,28	1 541
Kalimantan Timur	17,65	2,37	13,45	12,99	22,30	1,64	634	38,82	3,65	9,39	31,67	45,96	1,33	574	26,16	2,10	8,04	22,04	30,28	1,57	1 208
Sulawesi Utara	27,31	2,56	9,37	22,29	32,32	1,11	790	58,85	2,37	4,03	54,20	63,49	0,88	1 238	45,42	1,86	4,09	41,77	49,06	1,07	2 028
Sulawesi Tengah	30,20	4,21	13,93	21,95	38,45	1,32	256	66,13	2,09	3,17	62,02	70,23	0,96	1 073	58,57	2,00	3,42	54,64	62,49	1,19	1 329
Sulawesi Selatan	22,65	1,78	7,87	19,16	26,15	1,54	1 217	44,70	1,41	3,15	41,94	47,46	1,24	3 046	37,79	1,16	3,07	35,51	40,06	1,50	4 263
Sulawesi Tenggara	27,91	3,25	11,65	21,53	34,28	0,73	326	73,49	2,69	3,66	68,21	78,77	1,36	1 041	62,57	2,34	3,74	57,98	67,16	1,31	1 367
Gorontalo	40,53	4,21	10,38	32,29	48,78	0,68	221	73,22	2,99	4,08	67,36	79,07	0,70	451	62,27	2,59	4,16	57,20	67,35	0,77	672
Sulawesi Barat	36,06	5,05	14,00	26,17	45,96	0,83	156	59,88	4,01	6,69	52,03	67,74	1,26	470	53,94	3,30	6,11	47,48	60,40	1,28	626
Maluku	25,07	3,90	15,55	17,42	32,71	1,14	357	54,50	3,47	6,36	47,70	61,30	0,99	851	43,74	2,76	6,32	38,33	49,16	1,16	1 208
Maluku Utara	21,01	4,01	19,10	13,15	28,88	0,56	167	43,36	3,70	8,54	36,11	50,62	0,77	561	37,57	3,00	7,98	31,70	43,45	0,84	728
Papua Barat	40,77	5,26	12,89	30,46	51,07	0,35	207	55,31	5,46	9,87	44,61	66,01	0,74	345	51,03	4,08	8,00	43,03	59,02	0,68	552
Papua	33,06	5,15	15,59	22,96	43,16	1,43	226	52,23	3,78	7,24	44,82	59,64	0,88	591	44,69	3,06	6,86	38,69	50,70	1,12	817
Indonesia	**48,15**	**0,52**	**1,09**	**47,12**	**49,18**	**3,81**	**30 888**	**71,02**	**0,37**	**0,52**	**70,30**	**71,74**	**2,65**	**43 786**	**60,43**	**0,32**	**0,53**	**59,80**	**61,05**	**3,17**	**74 674**

http://www.bps.go.id

Tabel 9.9 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	89,07	2,02	2,27	85,11	93,03	1,28	695	88,27	1,09	1,23	86,14	90,41	0,84	1 941	88,48	0,96	1,09	86,59	90,36	1,04	2 636
Sumatera Utara	39,17	1,95	4,98	35,34	43,00	2,56	2 011	31,84	1,56	4,90	28,79	34,90	1,63	2 450	35,35	1,25	3,52	32,91	37,79	2,21	4 461
Sumatera Barat	54,27	2,49	4,58	49,39	59,15	1,46	1 159	44,70	1,58	3,54	41,60	47,81	0,91	1 894	48,07	1,34	2,80	45,44	50,71	1,17	3 053
Riau	46,10	3,13	6,79	39,96	52,23	1,58	439	44,35	2,67	6,02	39,12	49,58	1,63	841	45,00	2,04	4,54	41,00	49,00	1,76	1 280
Jambi	46,25	3,41	7,37	39,57	52,93	1,10	368	30,93	1,96	6,32	27,10	34,76	0,81	983	35,58	1,73	4,86	32,19	38,97	0,98	1 351
Sumatera Selatan	57,80	3,06	5,29	51,81	63,80	2,72	724	47,77	2,15	4,51	43,56	51,99	1,98	1 449	51,35	1,77	3,45	47,88	54,83	2,43	2 173
Bengkulu	61,00	3,55	5,81	54,05	67,95	0,61	315	39,88	2,28	5,71	35,41	44,35	0,56	789	45,64	1,95	4,27	41,82	49,46	0,63	1 104
Lampung	54,28	3,42	6,29	47,59	60,98	2,60	610	41,59	1,78	4,28	38,10	45,08	1,88	1 782	44,68	1,58	3,55	41,57	47,79	2,25	2 392
Kep. Bangka Belitung	65,33	3,04	4,65	59,37	71,29	0,65	410	60,98	4,15	6,81	52,84	69,12	0,93	312	63,20	2,58	4,09	58,13	68,26	0,88	722
Kepulauan Riau	52,73	4,64	8,79	43,64	61,81	1,62	444	64,64	6,51	10,08	51,87	77,40	1,15	194	56,10	3,77	6,72	48,72	63,49	1,47	638
DKI Jakarta	38,71	2,11	5,44	34,58	42,83	4,24	1 107	-	-	-	-	-	-	-	38,71	2,11	5,44	34,58	42,83	4,12	1 107
Jawa Barat	52,44	1,14	2,17	50,21	54,67	4,14	3 497	47,94	1,39	2,90	45,22	50,66	3,39	2 382	50,66	0,88	1,74	48,93	52,38	4,00	5 879
Jawa Tengah	55,73	0,98	1,75	53,82	57,65	2,34	4 410	53,82	1,01	1,87	51,85	55,80	2,68	4 554	54,65	0,71	1,30	53,26	56,04	2,75	8 964
DI Yogyakarta	75,13	2,08	2,77	71,05	79,21	2,32	801	76,79	3,78	4,93	69,38	84,21	4,75	553	75,82	1,98	2,61	71,95	79,69	3,54	1 354
Jawa Timur	45,01	1,05	2,33	42,95	47,06	3,16	4 989	44,80	0,97	2,17	42,89	46,70	2,91	5 208	44,89	0,71	1,59	43,49	46,29	3,25	10 197
Banten	57,98	2,50	4,32	53,08	62,89	3,71	808	54,52	2,72	4,99	49,19	59,85	2,16	562	56,69	1,87	3,29	53,03	60,35	3,19	1 370
Bali	85,27	1,98	2,32	81,40	89,14	2,29	963	95,86	0,98	1,02	93,94	97,78	1,33	819	90,27	1,16	1,28	88,00	92,54	2,07	1 782
Nusa Tenggara Barat	58,27	2,75	4,72	52,88	63,66	1,73	629	47,70	2,67	5,60	42,46	52,94	1,86	875	52,10	1,95	3,74	48,28	55,92	1,97	1 504
Nusa Tenggara Timur	70,55	2,91	4,12	64,85	76,25	0,98	433	73,83	1,13	1,53	71,61	76,04	0,64	2 954	73,26	1,06	1,45	71,18	75,35	0,79	3 387
Kalimantan Barat	33,02	2,84	8,59	27,46	38,58	1,31	550	39,55	2,12	5,36	35,39	43,70	1,26	1 195	37,53	1,71	4,55	34,19	40,88	1,41	1 745
Kalimantan Tengah	45,01	3,36	7,47	38,42	51,60	0,67	401	40,80	2,54	6,22	35,82	45,77	0,68	835	42,16	2,03	4,82	38,18	46,15	0,74	1 236
Kalimantan Selatan	49,41	2,94	5,95	43,65	55,18	1,31	568	46,49	2,18	4,69	42,22	50,76	0,93	973	47,64	1,75	3,68	44,20	51,08	1,16	1 541
Kalimantan Timur	76,34	2,63	3,44	71,19	81,49	1,61	634	64,37	3,61	5,61	57,30	71,45	1,35	574	71,53	2,16	3,02	67,29	75,76	1,58	1 208
Sulawesi Utara	56,16	2,82	5,02	50,63	61,68	1,08	790	47,50	2,23	4,69	43,14	51,87	0,75	1 238	51,19	1,77	3,45	47,73	54,65	0,96	2 028
Sulawesi Tengah	54,64	3,71	6,79	47,37	61,91	0,87	256	52,61	2,02	3,85	48,65	56,58	0,81	1 073	53,04	1,78	3,36	49,55	56,53	0,92	1 329
Sulawesi Selatan	65,17	2,32	3,56	60,63	69,72	2,01	1 217	63,98	1,54	2,41	60,96	67,00	1,59	3 046	64,35	1,28	1,99	61,84	66,87	1,88	4 263
Sulawesi Tenggara	54,60	4,09	7,49	46,59	62,61	0,93	326	57,88	2,23	3,85	53,51	62,25	0,75	1 041	57,10	1,96	3,44	53,25	60,94	0,88	1 367
Gorontalo	71,83	3,43	4,77	65,11	78,56	0,54	221	70,27	2,92	4,16	64,54	76,00	0,63	451	70,79	2,26	3,19	66,37	75,22	0,66	672
Sulawesi Barat	63,67	4,80	7,54	54,25	73,08	0,75	156	62,00	3,29	5,30	55,56	68,45	0,86	470	62,42	2,74	4,40	57,04	67,80	0,94	626
Maluku	59,38	3,98	6,71	51,57	67,19	0,92	357	56,25	2,68	4,76	51,01	61,50	0,59	851	57,40	2,24	3,91	53,00	61,79	0,77	1 208
Maluku Utara	46,60	4,72	10,14	37,34	55,85	0,52	167	61,82	3,27	5,30	55,40	68,23	0,63	561	57,87	2,75	4,75	52,48	63,27	0,68	728
Papua Barat	73,63	4,06	5,51	65,69	81,58	0,26	207	71,29	4,15	5,82	63,16	79,41	0,52	345	71,98	3,16	4,39	65,78	78,18	0,50	552
Papua	66,34	4,58	6,91	57,36	75,32	1,12	226	59,10	3,80	6,42	51,66	66,54	0,92	591	61,94	2,94	4,75	56,18	67,71	1,08	817
Indonesia	**52,79**	**0,45**	**0,86**	**51,90**	**53,68**	**2,87**	**30 888**	**51,19**	**0,40**	**0,78**	**50,40**	**51,98**	**2,58**	**43 786**	**51,93**	**0,30**	**0,58**	**51,34**	**52,52**	**2,71**	**74 674**

http://www.bps.go.id

Tabel 9.10 *Sampling Error* Persentase Rumah Tangga Lansia yang Memiliki Jaminan Sosial Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	13,55	2,27	16,74	9,10	18,00	1,34	695	3,63	0,56	15,40	2,54	4,73	0,65	1 941	6,19	0,74	11,90	4,75	7,64	1,07	2 636
Sumatera Utara	11,81	1,22	10,37	9,41	14,21	2,30	2 011	5,27	0,68	12,84	3,94	6,60	1,34	2 450	8,40	0,69	8,21	7,05	9,75	2,01	4 461
Sumatera Barat	13,37	1,45	10,85	10,53	16,21	1,06	1 159	4,78	0,58	12,09	3,65	5,92	0,66	1 894	7,81	0,63	8,13	6,56	9,05	0,90	3 053
Riau	13,59	2,53	18,61	8,63	18,54	2,18	439	2,90	0,69	23,73	1,55	4,25	0,95	841	6,87	1,06	15,42	4,79	8,95	1,84	1 280
Jambi	16,22	2,96	18,26	10,41	22,02	1,52	368	2,71	0,53	19,68	1,66	3,75	0,49	983	6,81	1,01	14,83	4,83	8,79	1,21	1 351
Sumatera Selatan	11,21	1,90	16,91	7,49	14,92	2,55	724	2,18	0,44	20,32	1,31	3,04	0,98	1 449	5,40	0,75	13,97	3,92	6,88	2,15	2 173
Bengkulu	17,35	3,06	17,65	11,35	23,36	0,76	315	3,30	0,89	27,01	1,55	5,05	0,64	789	7,14	1,07	14,98	5,04	9,23	0,71	1 104
Lampung	8,44	1,61	19,10	5,28	11,60	1,86	610	2,27	0,45	19,77	1,39	3,16	1,31	1 782	3,78	0,52	13,74	2,76	4,79	1,64	2 392
Kep. Bangka Belitung	7,35	1,43	19,46	4,55	10,15	0,48	410	1,89	0,82	43,32	0,28	3,49	0,46	312	4,67	0,84	17,94	3,03	6,31	0,48	722
Kepulauan Riau	7,80	2,13	27,33	3,62	11,99	1,19	444	2,50	2,10	83,93	0,00	6,62	1,12	194	6,30	1,63	25,81	3,11	9,49	1,14	638
DKI Jakarta	13,07	1,42	10,87	10,28	15,85	4,03	1 107	-	-	-	-	-	-	-	13,07	1,42	10,87	10,28	15,85	3,92	1 107
Jawa Barat	10,52	0,72	6,81	9,11	11,92	4,36	3 497	4,95	0,50	10,17	3,97	5,94	2,36	2 382	8,31	0,48	5,72	7,38	9,24	3,81	5 879
Jawa Tengah	8,92	0,59	6,56	7,78	10,07	2,56	4 410	3,46	0,31	9,09	2,84	4,07	1,95	4 554	5,84	0,31	5,34	5,23	6,45	2,39	8 964
DI Yogyakarta	15,49	1,91	12,35	11,74	19,23	2,80	801	5,41	1,40	25,80	2,68	8,15	2,25	553	11,31	1,29	11,40	8,78	13,84	2,75	1 354
Jawa Timur	9,23	0,58	6,32	8,08	10,37	2,89	4 989	2,35	0,25	10,78	1,85	2,84	2,12	5 208	5,37	0,29	5,44	4,80	5,94	2,65	10 197
Banten	8,94	1,58	17,69	5,84	12,04	4,44	808	4,58	0,96	21,05	2,69	6,47	1,54	562	7,30	1,05	14,41	5,24	9,37	3,68	1 370
Bali	11,02	1,55	14,06	7,98	14,06	1,80	963	5,09	1,07	20,95	3,00	7,19	1,30	819	8,22	0,96	11,67	6,34	10,10	1,65	1 782
Nusa Tenggara Barat	4,80	1,06	22,06	2,72	6,87	1,36	629	2,55	0,71	27,69	1,17	3,94	1,31	875	3,49	0,60	17,21	2,31	4,66	1,39	1 504
Nusa Tenggara Timur	23,94	3,51	14,66	17,06	30,82	1,63	433	3,06	0,40	13,17	2,27	3,85	0,53	2 954	6,65	0,75	11,31	5,17	8,12	1,24	3 387
Kalimantan Barat	7,56	1,74	23,08	4,14	10,98	1,57	550	2,09	0,48	22,91	1,15	3,02	0,75	1 195	3,78	0,64	16,98	2,52	5,03	1,28	1 745
Kalimantan Tengah	12,53	2,21	17,62	8,20	16,86	0,65	401	3,13	0,79	25,34	1,58	4,69	0,53	835	6,19	0,90	14,56	4,42	7,95	0,62	1 236
Kalimantan Selatan	12,09	2,03	16,79	8,11	16,07	1,47	568	4,84	0,80	16,49	3,28	6,41	0,68	973	7,70	0,93	12,13	5,86	9,53	1,15	1 541
Kalimantan Timur	11,16	1,78	15,99	7,66	14,66	1,36	634	2,75	0,87	31,51	1,05	4,45	0,67	574	7,78	1,13	14,59	5,55	10,00	1,24	1 208
Sulawesi Utara	8,48	1,75	20,63	5,05	11,91	1,32	790	7,87	1,29	16,40	5,34	10,40	0,87	1 238	8,13	1,05	12,92	6,07	10,19	1,13	2 028
Sulawesi Tengah	12,54	2,81	22,38	7,04	18,04	1,12	256	3,49	0,64	18,43	2,23	4,75	0,60	1 073	5,40	0,83	15,36	3,77	7,02	0,97	1 329
Sulawesi Selatan	14,49	1,98	13,68	10,60	18,37	2,69	1 217	4,20	0,45	10,76	3,32	5,09	0,79	3 046	7,43	0,72	9,73	6,01	8,84	2,00	4 263
Sulawesi Tenggara	15,29	3,05	19,93	9,31	21,26	0,99	326	3,77	0,81	21,51	2,18	5,36	0,67	1 041	6,53	0,96	14,73	4,64	8,41	0,85	1 367
Gorontalo	9,94	2,46	24,75	5,12	14,76	0,63	221	2,58	0,93	36,04	0,76	4,40	0,53	451	5,04	1,04	20,56	3,01	7,07	0,60	672
Sulawesi Barat	9,48	2,97	31,36	3,65	15,30	0,77	156	1,89	0,73	38,86	0,45	3,32	0,55	470	3,78	0,94	24,83	1,94	5,62	0,71	626
Maluku	20,95	3,67	17,51	13,76	28,14	1,14	357	3,32	1,00	30,11	1,36	5,28	0,64	851	9,76	1,66	17,04	6,50	13,03	1,17	1 208
Maluku Utara	9,51	3,51	36,86	2,64	16,39	0,83	167	3,25	0,88	27,06	1,53	4,98	0,34	561	4,87	1,14	23,40	2,64	7,11	0,61	728
Papua Barat	27,35	4,19	15,33	19,13	35,56	0,27	207	4,64	1,69	36,40	1,33	7,95	0,40	345	11,32	1,74	15,35	7,92	14,73	0,31	552
Papua	17,50	3,39	19,35	10,87	24,14	0,94	226	4,44	1,04	23,43	2,40	6,48	0,39	591	9,57	1,40	14,60	6,83	12,31	0,66	817
Indonesia	**10,60**	**0,28**	**2,66**	**10,04**	**11,15**	**2,90**	**30 888**	**3,52**	**0,13**	**3,55**	**3,27**	**3,76**	**1,84**	**43 786**	**6,80**	**0,15**	**2,17**	**6,51**	**7,09**	**2,56**	**74 674**

http://www.bps.go.id

Tabel 9.11 *Sampling Error* Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lansia menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	36,57	2,31	6,32	32,04	41,09	0,47	689	47,05	1,73	3,68	43,66	50,45	0,75	1 326	44,47	1,43	3,22	41,66	47,27	0,69	2 015
Sumatera Utara	35,96	1,95	5,43	32,13	39,79	1,97	1 532	54,63	1,60	2,92	51,50	57,77	1,34	1 956	45,72	1,31	2,86	43,16	48,29	1,72	3 488
Sumatera Barat	33,75	2,12	6,27	29,61	37,90	0,85	1 051	49,98	1,56	3,12	46,93	53,04	0,76	1 344	44,26	1,29	2,91	41,73	46,79	0,82	2 395
Riau	42,02	3,20	7,62	35,74	48,29	1,19	435	55,19	2,71	4,91	49,87	60,50	1,43	551	50,30	2,12	4,21	46,15	54,46	1,37	986
Jambi	33,44	3,15	9,44	27,25	39,62	0,75	375	51,77	2,14	4,13	47,58	55,97	0,76	665	46,50	1,87	4,02	42,84	50,17	0,82	1 040
Sumatera Selatan	32,57	2,31	7,11	28,03	37,11	1,29	701	53,79	2,10	3,91	49,66	57,92	1,73	1 079	46,30	1,67	3,60	43,03	49,57	1,67	1 780
Bengkulu	37,20	3,68	9,89	29,99	44,41	0,49	285	51,80	2,29	4,43	47,30	56,29	0,51	649	48,03	1,97	4,10	44,17	51,90	0,51	934
Lampung	33,51	2,28	6,81	29,04	37,99	0,91	635	53,77	1,73	3,22	50,37	57,17	1,62	1 264	49,22	1,48	3,01	46,32	52,13	1,52	1 899
Kep. Bangka Belitung	36,19	2,76	7,62	30,78	41,59	0,39	386	49,21	3,80	7,72	41,76	56,66	0,71	257	42,78	2,32	5,41	38,24	47,32	0,53	643
Kepulauan Riau	31,74	3,84	12,09	24,22	39,26	0,99	255	47,34	4,37	9,23	38,78	55,90	0,38	206	35,72	3,11	8,69	29,63	41,81	0,82	461
DKI Jakarta	31,15	1,88	6,03	27,47	34,83	2,85	847	-	-	-	-	-	-	-	31,15	1,88	6,03	27,47	34,83	2,85	847
Jawa Barat	39,58	1,26	3,18	37,12	42,05	3,90	2 808	50,44	1,33	2,63	47,84	53,05	2,77	1 976	43,92	0,93	2,12	42,09	45,74	3,45	4 784
Jawa Tengah	40,61	0,94	2,30	38,78	42,44	1,66	3 823	53,58	1,00	1,87	51,62	55,54	2,41	3 690	47,95	0,71	1,48	46,56	49,35	2,14	7 513
DI Yogyakarta	43,42	2,52	5,79	38,49	48,35	2,00	646	70,97	2,35	3,31	66,37	75,57	1,47	562	54,82	1,89	3,45	51,11	58,53	1,91	1 208
Jawa Timur	42,15	1,06	2,52	40,07	44,23	2,44	4 066	55,26	0,96	1,74	53,37	57,14	2,49	3 978	49,46	0,72	1,47	48,03	50,88	2,51	8 044
Banten	32,39	2,21	6,81	28,07	36,72	2,22	635	46,80	3,11	6,65	40,70	52,90	2,44	433	37,96	1,85	4,88	34,33	41,60	2,37	1 068
Bali	46,59	2,31	4,96	42,06	51,12	1,32	851	63,20	2,08	3,29	59,13	67,27	1,05	887	54,54	1,59	2,91	51,44	57,65	1,19	1 738
Nusa Tenggara Barat	41,29	3,16	7,66	35,09	47,49	1,69	523	54,33	2,56	4,71	49,31	59,35	1,61	695	49,08	1,98	4,04	45,20	52,96	1,60	1 218
Nusa Tenggara Timur	33,37	2,70	8,10	28,07	38,67	0,55	461	59,09	1,28	2,16	56,59	61,60	0,60	2 198	55,03	1,18	2,15	52,71	57,35	0,60	2 659
Kalimantan Barat	31,06	2,57	8,27	26,03	36,10	0,82	580	54,09	2,18	4,03	49,82	58,36	1,11	936	46,85	1,77	3,77	43,39	50,31	1,07	1 516
Kalimantan Tengah	41,24	3,55	8,61	34,28	48,20	0,57	366	59,50	2,18	3,66	55,23	63,77	0,46	665	53,69	1,90	3,54	49,96	57,42	0,50	1 031
Kalimantan Selatan	34,54	3,08	8,92	28,50	40,58	1,13	462	53,41	2,16	4,04	49,17	57,64	0,75	647	45,83	1,85	4,04	42,19	49,46	0,93	1 109
Kalimantan Timur	39,99	2,66	6,65	34,78	45,21	0,99	463	52,80	3,80	7,20	45,35	60,25	1,24	416	44,97	2,27	5,05	40,51	49,42	1,15	879
Sulawesi Utara	35,20	2,17	6,16	30,95	39,45	0,54	730	43,20	1,75	4,04	39,77	46,62	0,43	1 124	39,74	1,38	3,48	37,03	42,45	0,49	1 854
Sulawesi Tengah	38,87	4,80	12,36	29,45	48,28	1,08	273	51,76	2,24	4,33	47,36	56,15	0,87	767	49,12	2,04	4,15	45,13	53,11	0,90	1 040
Sulawesi Selatan	29,97	2,21	7,37	25,64	34,30	1,50	1 123	44,67	1,31	2,93	42,10	47,24	0,96	2 347	40,01	1,20	2,99	37,66	42,35	1,21	3 470
Sulawesi Tenggara	32,52	2,69	8,28	27,24	37,79	0,33	349	55,99	2,29	4,09	51,50	60,47	0,69	794	50,47	1,95	3,86	46,64	54,29	0,65	1 143
Gorontalo	41,96	4,77	11,36	32,62	51,30	0,64	153	47,82	3,17	6,62	41,61	54,03	0,55	347	45,86	2,63	5,74	40,70	51,02	0,57	500
Sulawesi Barat	36,87	5,05	13,68	26,98	46,76	0,58	132	52,53	3,35	6,38	45,97	59,10	0,76	308	48,77	2,82	5,78	43,25	54,29	0,71	440
Maluku	36,37	5,16	14,19	26,25	46,48	1,12	333	49,78	2,63	5,28	44,63	54,93	0,53	706	45,25	2,61	5,77	40,14	50,37	0,79	1 039
Maluku Utara	31,98	4,10	12,83	23,94	40,02	0,38	280	52,25	2,87	5,50	46,62	57,88	0,40	427	46,39	2,48	5,35	41,52	51,26	0,42	707
Papua Barat	33,89	5,04	14,89	24,00	43,78	0,28	96	66,27	3,51	5,30	59,39	73,15	0,28	294	55,51	3,20	5,76	49,25	61,78	0,31	390
Papua	38,35	4,26	11,10	30,00	46,69	0,64	177	63,34	2,91	4,60	57,64	69,05	0,50	557	53,83	2,57	4,77	48,80	58,87	0,58	734
Indonesia	**38,66**	**0,46**	**1,18**	**37,77**	**39,55**	**2,32**	**26 521**	**53,39**	**0,39**	**0,73**	**52,63**	**54,16**	**1,89**	**34 051**	**46,59**	**0,30**	**0,65**	**45,99**	**47,18**	**2,13**	**60 572**

http://www.bps.go.id

Tabel 9.12 *Sampling Error* Persentase Lansia yang Bekerja menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2013

Provinsi	Perkotaan							Perdesaan							Perkotaan + Perdesaan						
	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel	Esti-masi	*Stan-dard Error*	*RSE*	Selang Kepercayaan		Efek Ran-cangan	Jumlah Sampel
				Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas						Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	36,27	2,31	6,38	31,73	40,80	0,47	689	46,81	1,74	3,71	43,40	50,22	0,76	1 326	44,21	1,44	3,25	41,39	47,03	0,70	2 015
Sumatera Utara	35,73	1,95	5,47	31,90	39,56	1,97	1 532	54,57	1,60	2,93	51,44	57,70	1,34	1 956	45,58	1,31	2,87	43,01	48,14	1,72	3 488
Sumatera Barat	33,63	2,12	6,29	29,48	37,78	0,86	1 051	49,89	1,55	3,11	46,85	52,94	0,76	1 344	44,16	1,29	2,92	41,64	46,69	0,81	2 395
Riau	41,79	3,21	7,69	35,49	48,09	1,20	435	55,19	2,71	4,91	49,87	60,50	1,43	551	50,22	2,12	4,23	46,06	54,38	1,38	986
Jambi	32,96	3,16	9,57	26,78	39,15	0,76	375	51,54	2,13	4,14	47,36	55,72	0,76	665	46,20	1,87	4,05	42,54	49,87	0,82	1 040
Sumatera Selatan	32,20	2,31	7,18	27,67	36,73	1,29	701	53,79	2,10	3,91	49,66	57,92	1,73	1 079	46,17	1,67	3,62	42,90	49,45	1,68	1 780
Bengkulu	37,20	3,68	9,89	29,99	44,41	0,49	285	51,80	2,29	4,43	47,30	56,29	0,51	649	48,03	1,97	4,10	44,17	51,90	0,51	934
Lampung	33,16	2,29	6,91	28,67	37,65	0,92	635	53,68	1,74	3,24	50,27	57,08	1,63	1 264	49,07	1,49	3,03	46,16	51,98	1,53	1 899
Kep. Bangka Belitung	36,03	2,76	7,65	30,63	41,44	0,40	386	48,41	3,73	7,70	41,10	55,71	0,68	257	42,30	2,29	5,41	37,81	46,78	0,52	643
Kepulauan Riau	31,51	3,84	12,17	24,00	39,03	0,99	255	47,08	4,37	9,29	38,51	55,64	0,38	206	35,49	3,10	8,74	29,40	41,57	0,82	461
DKI Jakarta	30,92	1,88	6,07	27,24	34,60	2,85	847	-	-	-	-	-	-	-	30,92	1,88	6,07	27,24	34,60	2,85	847
Jawa Barat	38,97	1,25	3,20	36,52	41,42	3,87	2 808	50,02	1,33	2,65	47,42	52,63	2,77	1 976	43,38	0,93	2,13	41,57	45,20	3,43	4 784
Jawa Tengah	40,28	0,94	2,33	38,44	42,11	1,67	3 823	53,38	1,01	1,88	51,41	55,36	2,43	3 690	47,70	0,71	1,50	46,30	49,10	2,15	7 513
DI Yogyakarta	43,30	2,52	5,82	38,36	48,24	2,01	646	70,97	2,35	3,31	66,37	75,57	1,47	562	54,75	1,89	3,46	51,04	58,47	1,92	1 208
Jawa Timur	41,97	1,06	2,53	39,89	44,06	2,45	4 066	55,08	0,96	1,75	53,19	56,96	2,50	3 978	49,28	0,73	1,47	47,85	50,70	2,52	8 044
Banten	31,83	2,20	6,92	27,52	36,15	2,23	635	46,54	3,11	6,67	40,46	52,63	2,43	433	37,52	1,85	4,93	33,89	41,14	2,37	1 068
Bali	46,59	2,31	4,96	42,06	51,12	1,32	851	63,11	2,08	3,30	59,04	67,19	1,05	887	54,50	1,59	2,91	51,39	57,61	1,19	1 738
Nusa Tenggara Barat	41,04	3,20	7,79	34,78	47,31	1,73	523	54,33	2,56	4,71	49,31	59,35	1,61	695	48,98	1,99	4,06	45,08	52,89	1,61	1 218
Nusa Tenggara Timur	33,37	2,70	8,10	28,07	38,67	0,55	461	59,05	1,28	2,16	56,55	61,56	0,60	2 198	54,99	1,18	2,15	52,67	57,32	0,60	2 659
Kalimantan Barat	30,76	2,57	8,36	25,72	35,80	0,83	580	53,71	2,19	4,08	49,41	58,00	1,13	936	46,49	1,77	3,82	43,01	49,97	1,08	1 516
Kalimantan Tengah	41,17	3,55	8,62	34,21	48,13	0,57	366	59,22	2,17	3,66	54,97	63,47	0,46	665	53,47	1,89	3,54	49,76	57,19	0,50	1 031
Kalimantan Selatan	33,95	3,06	9,02	27,95	39,95	1,13	462	53,41	2,16	4,04	49,17	57,64	0,75	647	45,59	1,85	4,05	41,97	49,21	0,93	1 109
Kalimantan Timur	39,28	2,62	6,67	34,15	44,42	0,97	463	52,80	3,80	7,20	45,35	60,25	1,24	416	44,53	2,26	5,07	40,10	48,96	1,14	879
Sulawesi Utara	34,56	2,13	6,16	30,39	38,73	0,53	730	43,15	1,75	4,05	39,72	46,58	0,43	1 124	39,43	1,38	3,49	36,74	42,13	0,48	1 854
Sulawesi Tengah	38,63	4,78	12,38	29,26	48,00	1,07	273	51,54	2,24	4,34	47,15	55,93	0,87	767	48,90	2,03	4,16	44,92	52,89	0,90	1 040
Sulawesi Selatan	29,89	2,21	7,39	25,56	34,22	1,50	1 123	44,61	1,31	2,93	42,04	47,17	0,96	2 347	39,94	1,19	2,99	37,60	42,28	1,21	3 470
Sulawesi Tenggara	32,52	2,69	8,28	27,24	37,79	0,33	349	55,58	2,26	4,07	51,15	60,01	0,67	794	50,16	1,93	3,84	46,38	53,93	0,63	1 143
Gorontalo	41,96	4,77	11,36	32,62	51,30	0,64	153	47,82	3,17	6,62	41,61	54,03	0,55	347	45,86	2,63	5,74	40,70	51,02	0,57	500
Sulawesi Barat	36,87	5,05	13,68	26,98	46,76	0,58	132	52,53	3,35	6,38	45,97	59,10	0,76	308	48,77	2,82	5,78	43,25	54,29	0,71	440
Maluku	36,37	5,16	14,19	26,25	46,48	1,12	333	49,69	2,63	5,29	44,54	54,84	0,53	706	45,19	2,61	5,77	40,08	50,31	0,79	1 039
Maluku Utara	31,66	4,04	12,77	23,73	39,58	0,37	280	52,25	2,87	5,50	46,62	57,88	0,40	427	46,30	2,48	5,35	41,44	51,16	0,42	707
Papua Barat	33,89	5,04	14,89	24,00	43,78	0,28	96	65,75	3,50	5,32	58,89	72,60	0,27	294	55,17	3,18	5,77	48,93	61,41	0,31	390
Papua	38,35	4,26	11,10	30,00	46,69	0,64	177	63,08	2,94	4,66	57,31	68,85	0,51	557	53,67	2,58	4,80	48,62	58,72	0,59	734
Indonesia	**38,32**	**0,45**	**1,19**	**37,43**	**39,21**	**2,32**	**26 521**	**53,21**	**0,39**	**0,73**	**52,44**	**53,98**	**1,89**	**34 051**	**46,33**	**0,30**	**0,66**	**45,74**	**46,93**	**2,13**	**60 572**

http://www.bps.go.id

http://www.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

http://www.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : http://www.bps.go.id E-mail : bpshq@bps.go.id

ISSN 2086-1036
9 772086 103005